

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 21 MARET 2019

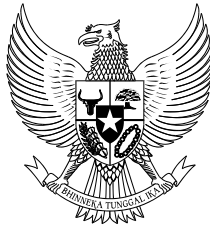
NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2018-2023

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2019



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG:

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 – 2023;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
17. Peraturan.....

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sukabumi tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 - 2023.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana.....

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. penyusunan Rentsra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
 - a. menetapkan visi, misi, dan program pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran;
 - c. mewujudkan.....

- c. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD; dan
- b. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD, meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

b. BAB II.....

- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi Daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi secara indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub bab.
- d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
Memuat permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.
- f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
- g. BAB VII.....

- g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diwakili oleh indikator kinerja dan indikator kinerja kunci yang disajikan beserta target setiap tahun sampai dengan Tahun 2023.
- i. BAB IX : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan RPJMD serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan

BAB IV

ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Ketentuan mengenai uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB V.....

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil.....

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran sepanjang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, dilakukan perubahan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 21 Maret 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 21 Maret 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

SALEH MAKBULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT : 3/47/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2018-2023.

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (4), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, visi dan misi Wali Kota terpilih harus diterjemahkan kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan

dalam

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD yang saat ini memasuki tahun fase keempat. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas Wali Kota terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD dan harus dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, *top down*, dan *bottom up*. Perencanaan pembangunan yang dilakukan dalam pendekatan politik artinya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Wali Kota terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Pendekatan teknokratis dilakukan dengan cara atau metode dan kerangka berpikir ilmiah, pendekatan ini akan melibatkan beberapa pemangku kepentingan terkait seperti kalangan akademisi.

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terhadap pembangunan. Partisipasi dari pemangku kepentingan pembangunan seperti masyarakat, organisasi sosial masyarakat, dan filantropi bisnis diharapkan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Pendekatan atas bawah (*top down*) dan pendekatan bawah atas (*bottom up*) artinya perencanaan pembangunan disesuaikan dengan kewenangan pada setiap jenjang pemerintahan, yang disesuaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada setiap tingkat pemerintahan.

RPJMD juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, yaitu:

1. Pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif, dan spasial.
 - a. pendekatan holistik-tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 - b. pendekatan integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
 - c. pendekatan spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
2. menerapkan kebijakan anggaran belanja yang diprioritaskan untuk program dan kegiatan strategis atau *money follow programme*.
3. menerapkan cara baru RPJMD, yaitu:
 - a. kolaborasi pemangku kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan *Pentahelix – ABCGM (Academic, Business, Community, Government, and Media)*;
 - b. kolaborasi pendanaan pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Dana Masyarakat atau Umat, dan CSR;
 - c. inovasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. pendekatan spasial;
 - e. sinkronisasi aplikasi dan interkoneksi data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Alur penyusunan RPJMD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari rancangan teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya, rancangan awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan, dan kesepakatan dengan DPRD serta hasil konsultasi ke Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Rancangan awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah menjadi masukan untuk perumusan rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Hasil musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Perda tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Raperda tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat. Hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat menjadi dasar penyempurnaan Ranperda tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Perda tentang RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.

RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam RKPD yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

RPJMD menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan:

1. media untuk mengimplementasikan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. penjabaran pelaksanaan RPJPD periode atau tahap keempat;
3. perwujudan dari rencana tata ruang wilayah Daerah tahun 2011-2031;
4. pedoman akhir dalam penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah;
5. pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
6. instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Wali Kota dan kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun; dan
7. instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.

Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di RPJMD dengan perencanaan strategis dan perencanaan operasional di Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sukabumi tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan pada rancangan teknokratik RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029, serta RTRW Daerah tahun 2011-2031.

1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor

23 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan dalam RPJMD dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat yang memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

RPJPD memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan dan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan rancangan RPJMD berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJPD tahap ketiga, serta berpedoman pada arah kebijakan pembangunan pada RPJPD tahap keempat yang ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif serta terpadunya antara sektor jasa dan pertanian. Lembaga dan pranata telah tersusun dan tertata serta berfungsi dengan baik. Kondisi ini didukung dengan kemampuan iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian lebih efisien dan produktivitas tinggi.

1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RTRW

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi Tahun 2011-2031. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan kebijakan pembangunan yang harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah kota, program pengembangan wilayah kota, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Sedangkan penentuan lokasi

program atau kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang dalam RPJMD didasarkan pada Dokumen Materi Teknis Revisi RTRW Kota Sukabumi Tahun 2019-2039 yang sedang dalam tahap penyusunan Naskah Akademis RTRW 2019-2039.

1.3.4. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

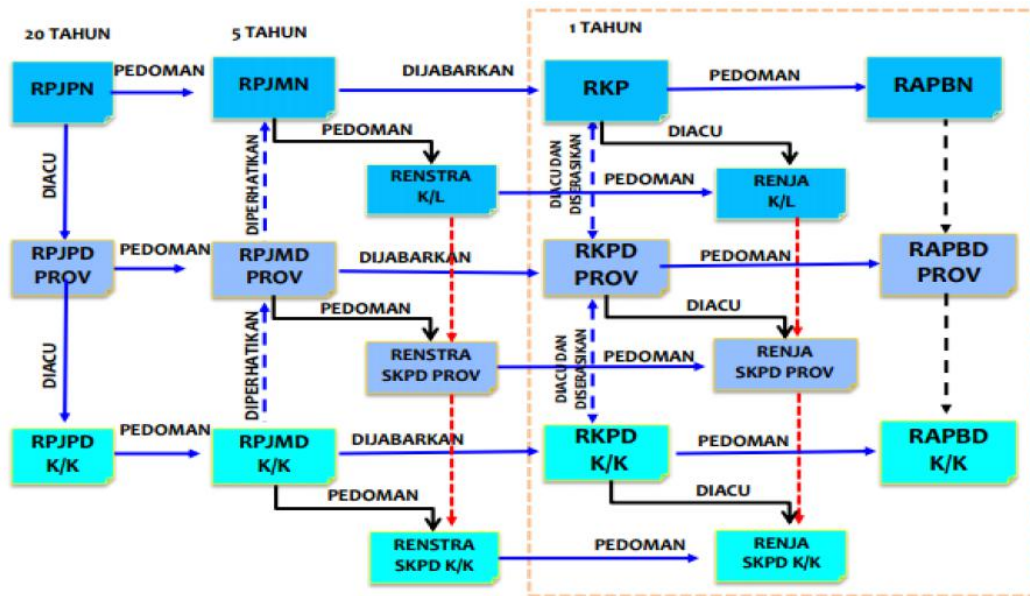
1.3.5. Hubungan RPJMD dengan RKPD

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam RKPD sebagai perencanaan tahunan Daerah. Prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD harus berpedoman pada RPJMD yang artinya harus selaras dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu rencana program dan kegiatan prioritas tahunan Daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

1.3.6. Hubungan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Penyusunan RPJMD mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan telah memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Secara keseluruhan, hubungan keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Hubungan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
(Sumber : Permendagri Nomor 86 tahun 2017)

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD pada dasarnya dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif, dan berbasis spasial dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang atau *sustainability development* dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat.

Tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan serta program pembangunan daerah jangka menengah Daerah;
2. menetapkan pedoman untuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKP, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

3. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten yang berbatasan.

1.5. SISTEMATIKA

Sistematika RPJMD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu terdiri atas 9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN	memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	memuat secara logis dasar-dasar analisis dan gambaran umum kondisi daerah, yang meliputi aspek geografi dan demografi secara indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah.
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub bab.
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	memuat permasalahan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

**BAB V VISI, MISI,
TUJUAN, DAN SASARAN**

menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan, dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.

**BAB VI STRATEGI,
ARAH KEBIJAKAN, DAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH**

memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

**BAB VII KERANGKA
PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT
DAERAH**

memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

**BAB VIII KINERJA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAERAH**

memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diwakili oleh indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang disajikan beserta target setiap tahun sampai dengan tahun 2023.

BAB IX PENUTUP

memuat kaidah pelaksanaan RPJMD serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOLOGIS DAN DEMOGRAFIS

Wilayah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 terbagi dalam 5 (lima) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 27 September 2000, wilayah administrasi Daerah mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) kecamatan dengan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Kecamatan Baros dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Lembursitu, Kecamatan Baros, dan Kecamatan Cibeureum.

Daerah merupakan dataran rendah yang terletak pada posisi $106^{\circ}45'50''$ Bujur Timur dan $106^{\circ}45'10''$ Bujur Timur, $6^{\circ}50'44''$ Lintang Selatan, di kaki Gunung Gede dan Gunung Pangrango yang ketinggiannya mencapai 584 (lima ratus delapan puluh empat) meter di atas permukaan laut, dan berjarak 120 (seratus dua puluh) km dari Ibukota Negara yaitu DKI Jakarta atau 96 (sembilan puluh enam) km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung. Berdasarkan posisi geografisnya, Daerah berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, yaitu sebagai berikut:

1. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
2. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
3. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
4. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Wilayah administrasi Daerah terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu, dan Kecamatan Cibeureum. Jarak terjauh dari Balai kota

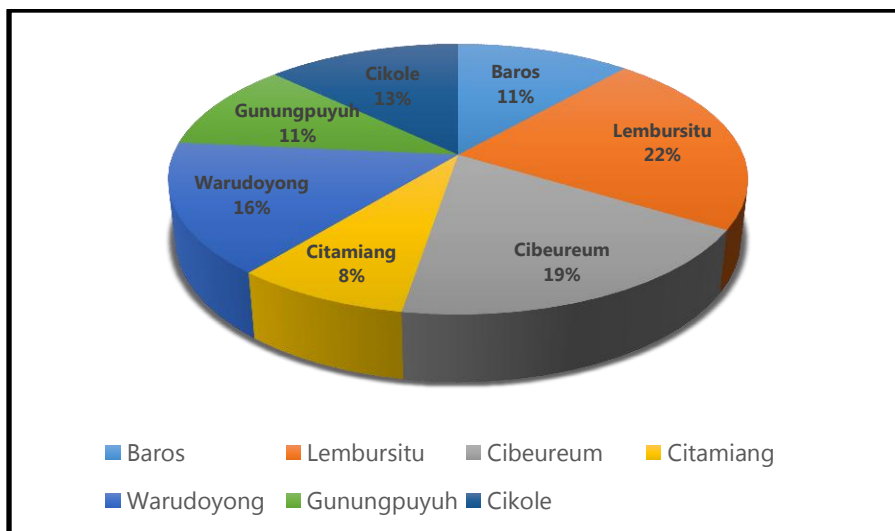
Sukabumi

Sukabumi adalah Kecamatan Lembursitu, yakni sejauh 7 (tujuh) km. Luas dataran masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 2.1 sedangkan persentase luas wilayah Daerah per kecamatan disajikan pada Gambar 2.1 dan peta administrasi wilayah Daerah disajikan pada Gambar 2.2.

Tabel 2.1.
Luas Dataran Masing-masing Kecamatan di Daerah

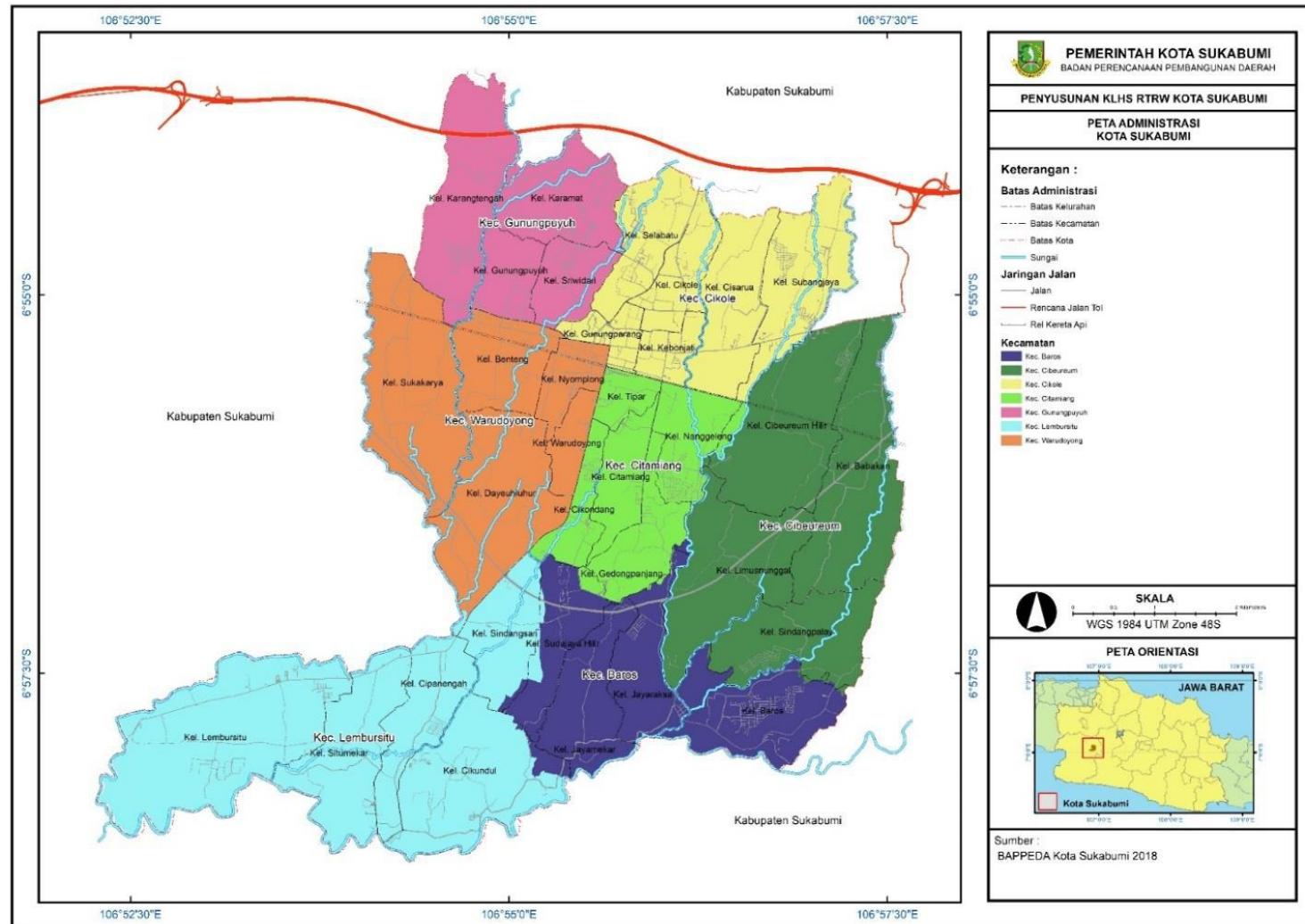
NO	KECAMATAN	LUAS (KM ²)
1	Baros	6,11389
2	Lembursitu	8,89763
3	Cibeureum	8,77390
4	Citamiang	4,0400
5	Warudoyong	7,5983
6	Gunungpuyuh	5,49579
7	Cikole	7,08280
LUAS TOTAL		48,00231

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2018 (BPS)



Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Daerah Menurut Kecamatan
(Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2017, BPS)

Gambar 2.2
Peta Administrasi Daerah



Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2018

Wilayah

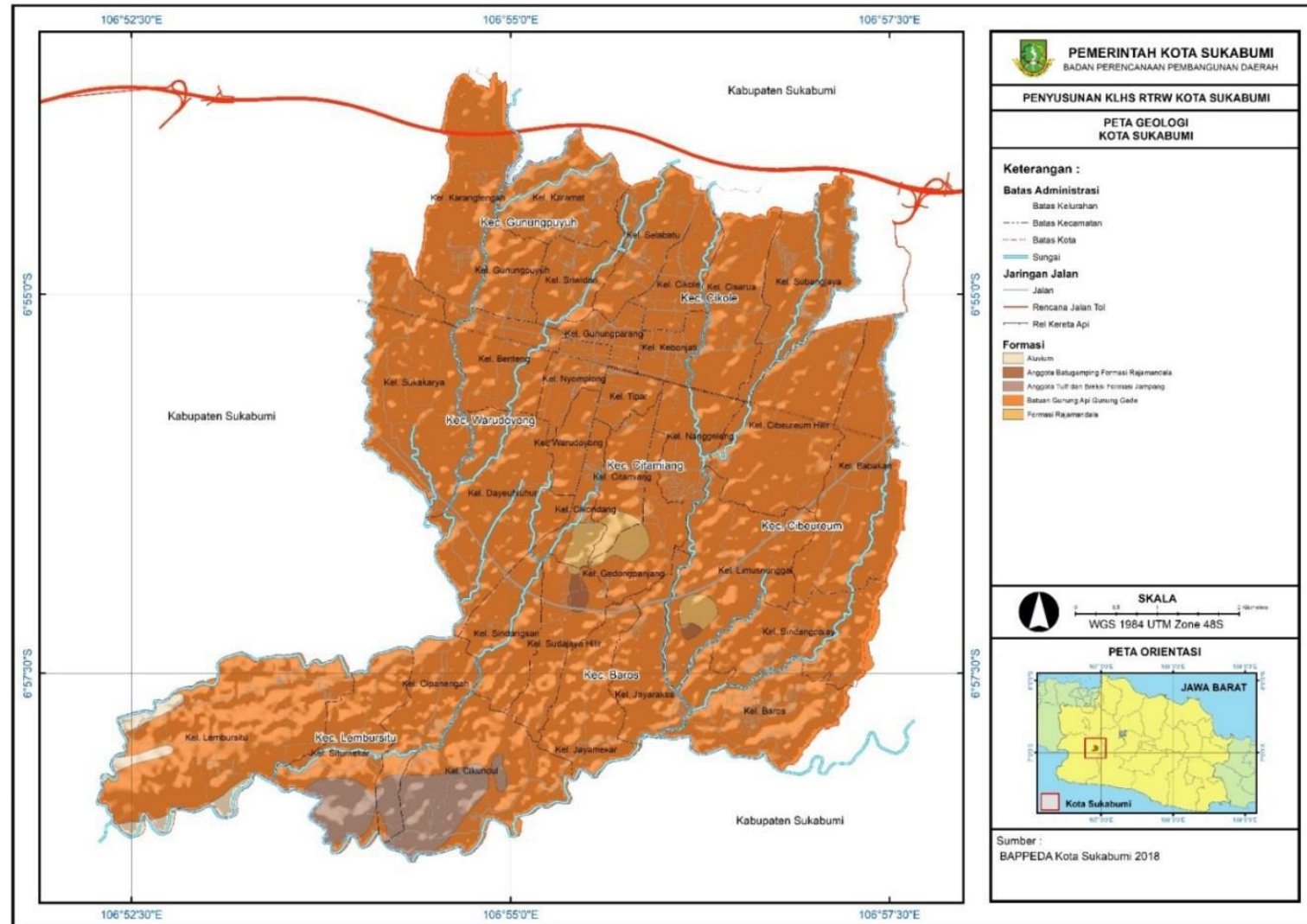
Wilayah Daerah disusun dari beberapa kelompok litologi batuan atau batuan dasar, yaitu batuan vulkanik yang berasal dari endapan Gunung Gede dan Pangrango, batuan terobosan yang berupa andesit horenblerida, dan batuan sedimen yang terdiri dari batuan gamping terumbu, batu pasir kwarsa, serta batuan lempung napalan. Indikasi bencana beraspek geologi di Daerah berupa gempa bumi yang akan menyebabkan *liquifaksi* atau pergeseran tanah, bahaya longsor atau gerakan tanah, dan bahaya gunung berapi. Adapun batuan dasar yang menyusun wilayah Daerah berdasarkan kecamatannya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.3.

Tabel 2.2
Luas dan Jenis Batuan di DAS Cilandir

NO	KECAMATAN	SIMBOL	FORMASI	LUAS (Ha)
1	Baros	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	550,52
		Tmol	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala	8,66
		Tmor	Formasi Rajamandala	1,31
2	Cibeureum	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	913,46
		Tmol	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala	3,65
		Tmor	Formasi Rajamandala	15,09
3	Cikole	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	644,37
4	Citamiang	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	333,51
		Tmor	Formasi Rajamandala	49,45
5	Gunungpuyuh	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	514,23
6	Lembursitu	Qa	Aluvium	43,42
		Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	894,87
		Tmjt	Anggota Tuff dan Breksi Formasi Jampang	157,06
7	Warudoyong	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	759,64

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi, 2017

Gambar 2.3
Peta Geologi Daerah



Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2018

Wilayah

Wilayah Daerah merupakan lereng selatan dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango dengan bentuk bentang alam yang relatif datar sampai bergelombang dengan kemiringan lahan (lereng) diperkirakan relatif beragam. Secara morfologi, Daerah dapat dibagi menjadi 5 (lima) satuan morfologi, yaitu morfologi daratan dengan elevasi 385–600 m dpl, morfologi medan bergelombang dengan elevasi 350–975 m dpl, morfologi pegunungan berelief sedang dengan elevasi 375–975 m dpl, dan pegunungan berelief kasar dengan elevasi 375–900 m dpl. Dari kelima satuan tersebut, sebagian besar morfologi daerah Daerah berupa medan bergelombang. Kondisi morfologis di Daerah berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Kondisi Morfologis Daerah

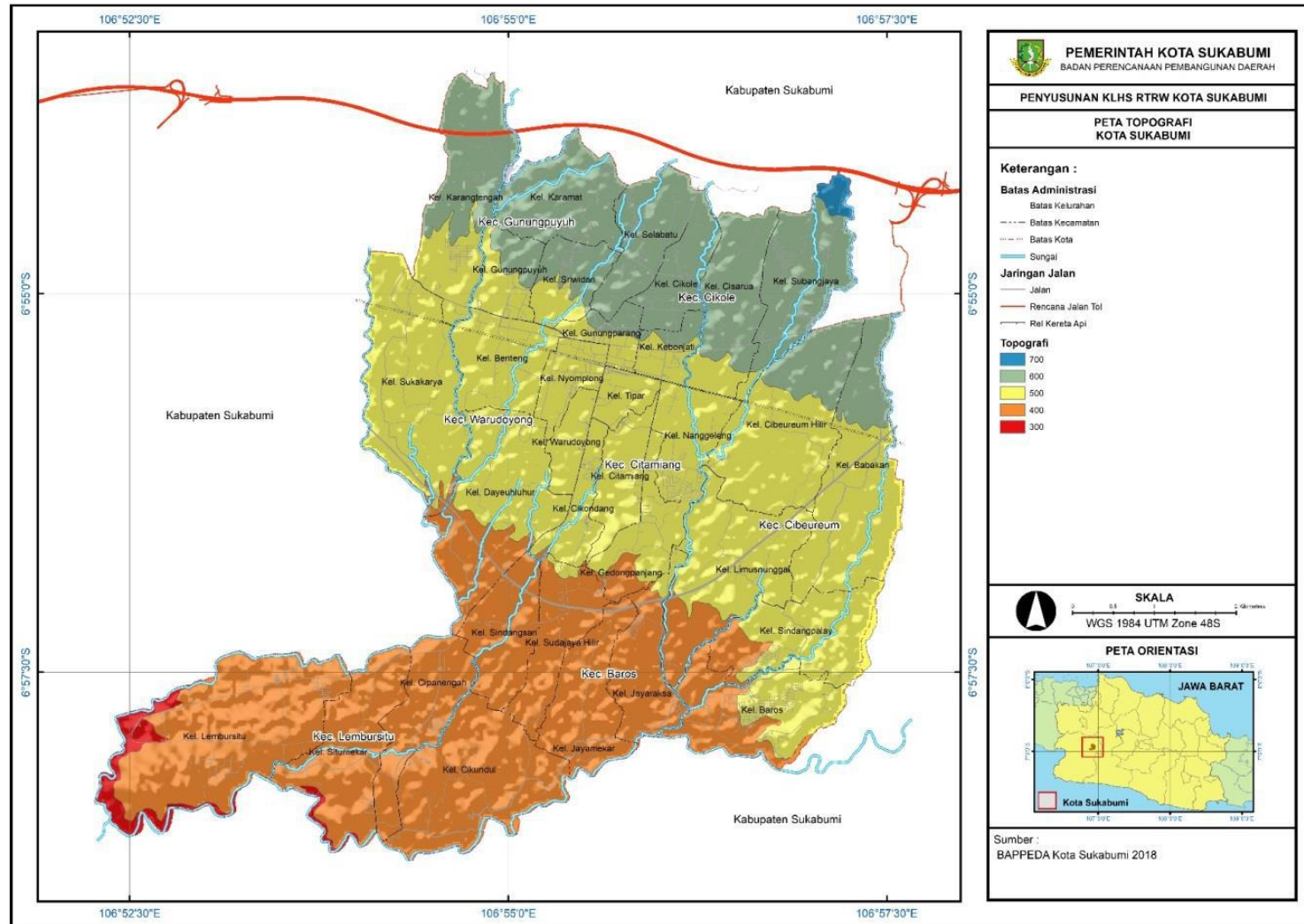
NO.	KECAMATAN	KEMIRINGAN	MORFOLOGI	LUAS (Ha)
1	Baros	> 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/ Perbukitan	0,17
		0 - 2 %	Datar	415,61
		15 - 25 %	Bukit/Perbukitan	3,56
		2 - 15 %	Datar	140,22
		25 - 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/ Perbukitan	0,91
2	Cibeureum	> 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	0,01
		0 - 2 %	Datar	339,78
		15 - 25 %	Bukit/Perbukitan	3,34
		2 - 15 %	Datar	588,69
		25 - 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/ Perbukitan	0,38
3	Cikole	> 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	0,45
		0 - 2 %	Datar	195,10
		15 - 25 %	Bukit/Perbukitan	17,50
		2 - 15 %	Datar	428,02
		25 - 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	3,30
4	Citamiang	0 - 2 %	Datar	136,63
		15 - 25 %	Bukit/Perbukitan	4,97
		2 - 15 %	Datar	241,19
		25 - 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	0,17

NO.	KECAMATAN	KEMIRINGAN	MORFOLOGI	LUAS (Ha)
5	Gunungpuyuh	> 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	0,05
		0 - 2 %	Datar	175,72
		15 - 25 %	Bukit/Perbukitan	6,87
		2 - 15 %	Datar	329,67
		25 - 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	1,92
6	Lembursitu	> 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	0,99
		0 - 2 %	Datar	659,90
		15 - 25 %	Bukit/Perbukitan	46,86
		2 - 15 %	Datar	372,97
		25 - 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	14,62
7	Warudoyong	> 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	0,04
		0 - 2 %	Datar	306,12
		15 - 25 %	Bukit/Perbukitan	0,86
		2 - 15 %	Datar	452,43
		25 - 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	0,19

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi, 2017

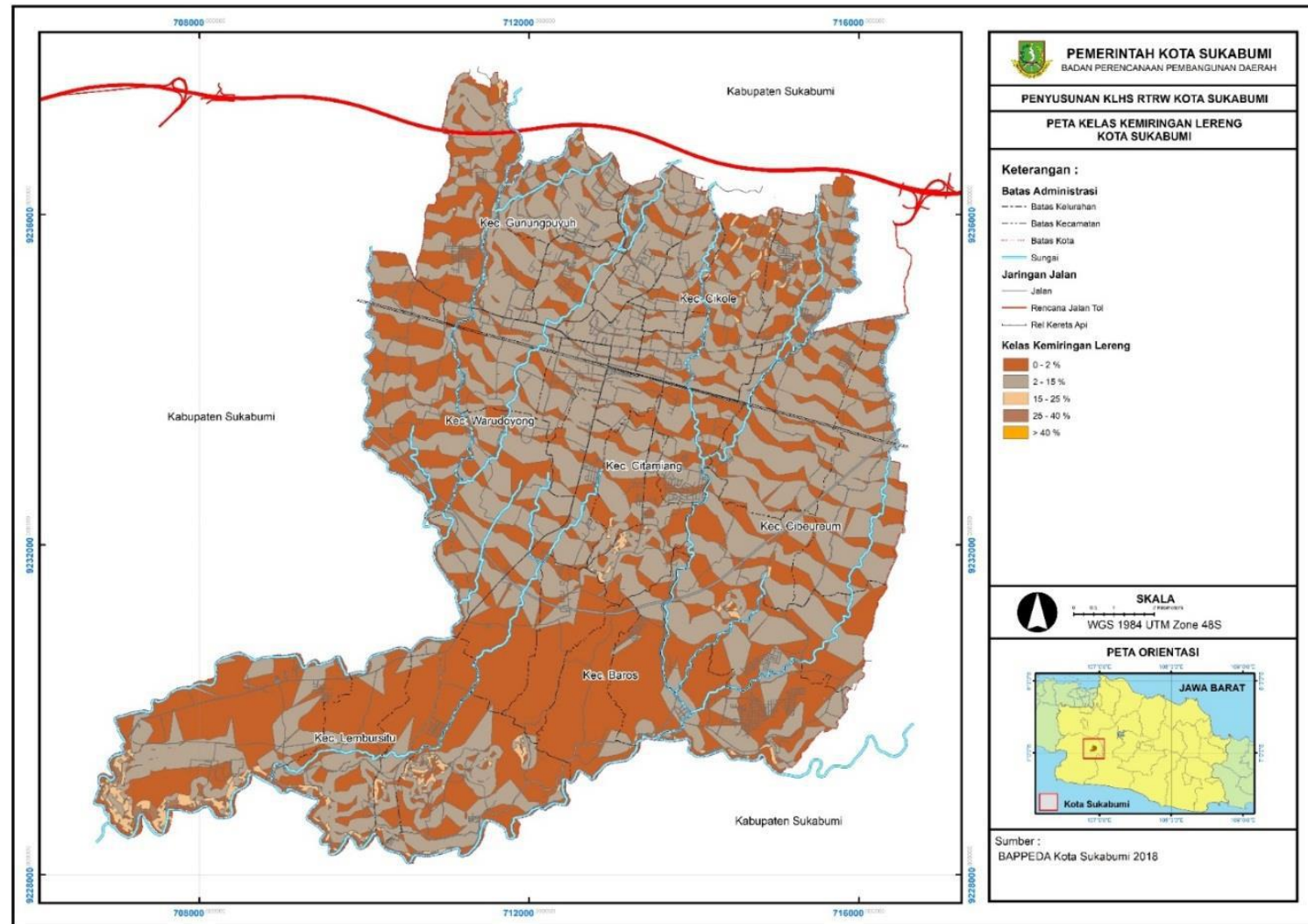
Adapun kondisi topografi dan kemiringan lereng di wilayah Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.4 dan 2.5 berikut.

Gambar 2.4
Peta Topografi Daerah



Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2018

Gambar 2.5
Peta Kemiringan Lereng Daerah



Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2018

Berdasarkan

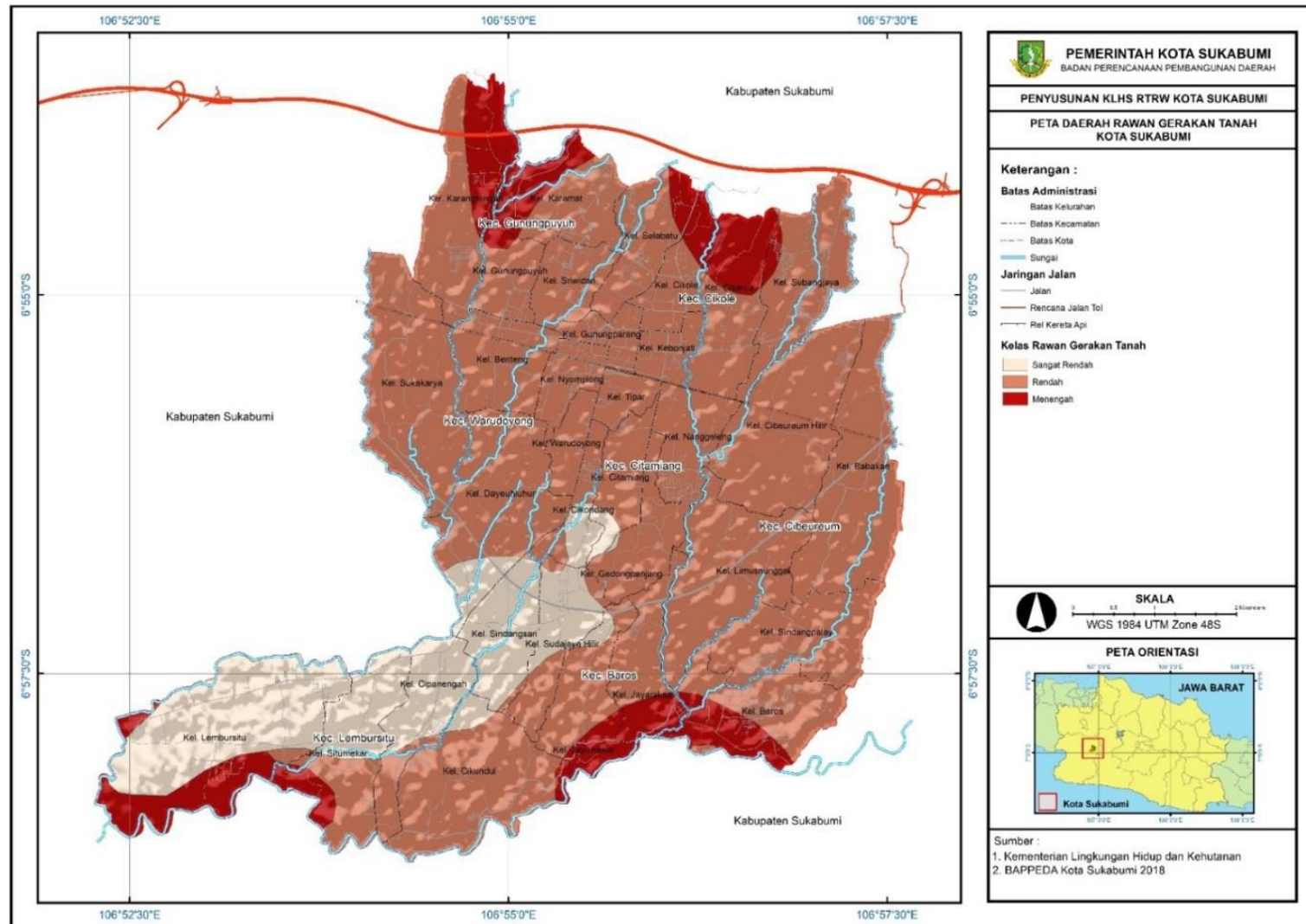
Berdasarkan peta kerentanan gerakan tanah, Daerah termasuk kedalam kisaran zona kerentanan gerakan tanah menengah, rendah sampai sangat rendah. Kerentanan gerakan tanah pada tiga kelas ini memungkinkan terjadinya adanya longsor terutama pada lereng-lereng terjal dan pada saat curah hujan tinggi. Zona gerakan tanah sedang merupakan daerah yang secara umum mempunyai kerentanan gerakan tanah menengah untuk terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah besar maupun kecil dapat terjadi terutama di daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan pada lereng yang mengalami gangguan. Gerakan tanah yang sudah lama terjadi masih mungkin dapat aktif kembali terutama oleh curah hujan yang tinggi dan aktivitas manusia. Adapun luas gerakan tanah di Daerah berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan secara spasial disajikan pada Gambar 2.6 berikut.

Tabel 2.4
Luas Potensi Gerakan Tanah di Daerah

NO	KECAMATAN	POTENSI RAWAN GERAKAN TANAH	LUAS (Ha)
1	Baros	Menengah	137,97
		Rendah	345,31
		Sangat Rendah	77,20
2	Cibeureum	Rendah	932,21
3	Cikole	Menengah	140,05
		Rendah	504,32
4	Citamiang	Rendah	343,29
		Sangat Rendah	39,67
5	Gunungpuyuh	Menengah	145,73
		Rendah	368,50
6	Lembursitu	Menengah	135,26
		Rendah	351,54
		Sangat Rendah	608,55
7	Warudoyong	Rendah	722,65
		Sangat Rendah	36,99

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi, 2017

Gambar 2.6
Peta Rawan Gerakan Tanah di Daerah



Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2018

Seperti

Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, wilayah Daerah sangat dipengaruhi oleh iklim tropika khatulistiwa. Suhu udara rata-rata di wilayah Daerah berkisar antara 26°C–28°C. Intensitas hujan harian rata-rata merupakan jumlah hujan selama setahun dibagi dengan jumlah hari hujan dalam tahun tersebut. Perhitungan intensitas curah hujan di Daerah menggunakan stasiun terdekat yaitu Stasiun Cimandiri yang berada di dalam dan sekitar DAS Cimandiri. Nilai intensitas curah hujan harian maksimal sebesar 76 (tujuh puluh enam) mm dan curah hujan tahunan sebesar 3.794 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat) mm. Jumlah bulan kering berkisar 1-2 bulan per tahun, namun mendapat pengaruh hujan orografis di sepanjang sungai merupakan perbukitan dan dataran bergelombang. Menurut Schimdt Ferguson, ciri-ciri iklim tersebut digolongkan sebagai iklim basah Tipe Af. Curah hujan minimum umumnya terjadi pada musim bulan Agustus. Curah hujan harian pada Stasiun Cimandiri dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Curah Hujan Daerah

Tgl	Bulan												Tahunan
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	0	8	4	2	0	3	28	0	0	5	0	16	
2	0	11	9	8	0	0	0	0	0	2	0	44	
3	2	24	1	6	0	0	0	0	0	3	0	3	
4	50	24	14	4	0	0	20	0	0	0	0	0	
5	0	14	39	2	0	0	0	0	0	16	9	0	
6	4	32	0	0	1	14	0	0	0	0	3	0	
7	7	16	0	4	5	0	0	0	5	6	34	0	
8	0	4	48	0	2	0	0	2	0	2	12	9	
9	0	28	0	0	17	0	0	0	0	2	7	3	
10	0	20	0	0	32	1	0	1	0	22	13	0	
11	4	14	0	8	5	17	0	1	0	2	6	3	
12	5	6	0	12	0	32	0	0	0	7	14	2	
13	12	8	0	33	15	0	0	0	0	22	2	4	
14	38	13	0	4	0	0	0	0	0	0	1	2	
15	33	5	6	5	0	0	0	0	2	0	17	16	
16	17	12	16	0	0	22	0	0	4	0	0	3	
17	10	9	0	0	0	0	0	0	0	2	14	1	
18	14	6	4	0	0	19	0	0	0	0	6	4	
19	4	0	8	38	0	0	0	0	0	1	1	4	
20	6	0	1	9	0	0	0	0	0	68	0	0	
21	0	23	10	16	0	0	0	0	0	2	0	35	
22	12	6	3	7	0	6	3	0	16	51	5	6	
23	5	31	4	4	0	4	0	0	2	0	6	6	
24	0	4	0	2	0	0	15	0	8	0	0	0	
25	19	5	0	0	5	47	0	0	19	0	5	0	

26	11	2	0	2	0	0	0	0	21	32	13	0	
27	2	58	0	14	0	0	0	0	2	6	58	7	
28	44	22	3	8	0	0	7	0	4	11	96	0	
29	65		29	2	46	3	22	0	6	14	6	0	
30	24		7	0	0	17	2	30	13	0	4	1	
31	18		3		0		0	0		0		0	
Hujan Maks	65	58	48	38	46	47	28	30	21	68	96	44	96
Jml Curah hujan	406	405	209	190	128	128	97	34	102	276	332	169	2533
Jml Hari hujan	23	26	18	21	9	9	7	4	12	20	22	19	193
Jml hujan (1-15)	155	227	121	88	77	67	48	4	7	89	118	102	
Jml data kosong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jml Hujan (16-31)	251	178	88	102	51	118	49	30	95	187	214	67	
Jml data kosong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka 2018 (BPS)

Kondisi air permukaan maupun air tanah atau *groundwater* baik dari sisi pergerakan, distribusi, maupun kualitasnya di Daerah sangat erat kaitannya dengan sungai-sungai yang mengalir di wilayah Daerah. Daerah Aliran Sungai atau DAS dan sungai-sungai yang melewati Daerah dijelaskan pada Tabel 2.6 dan Gambar 2.7 berikut ini.

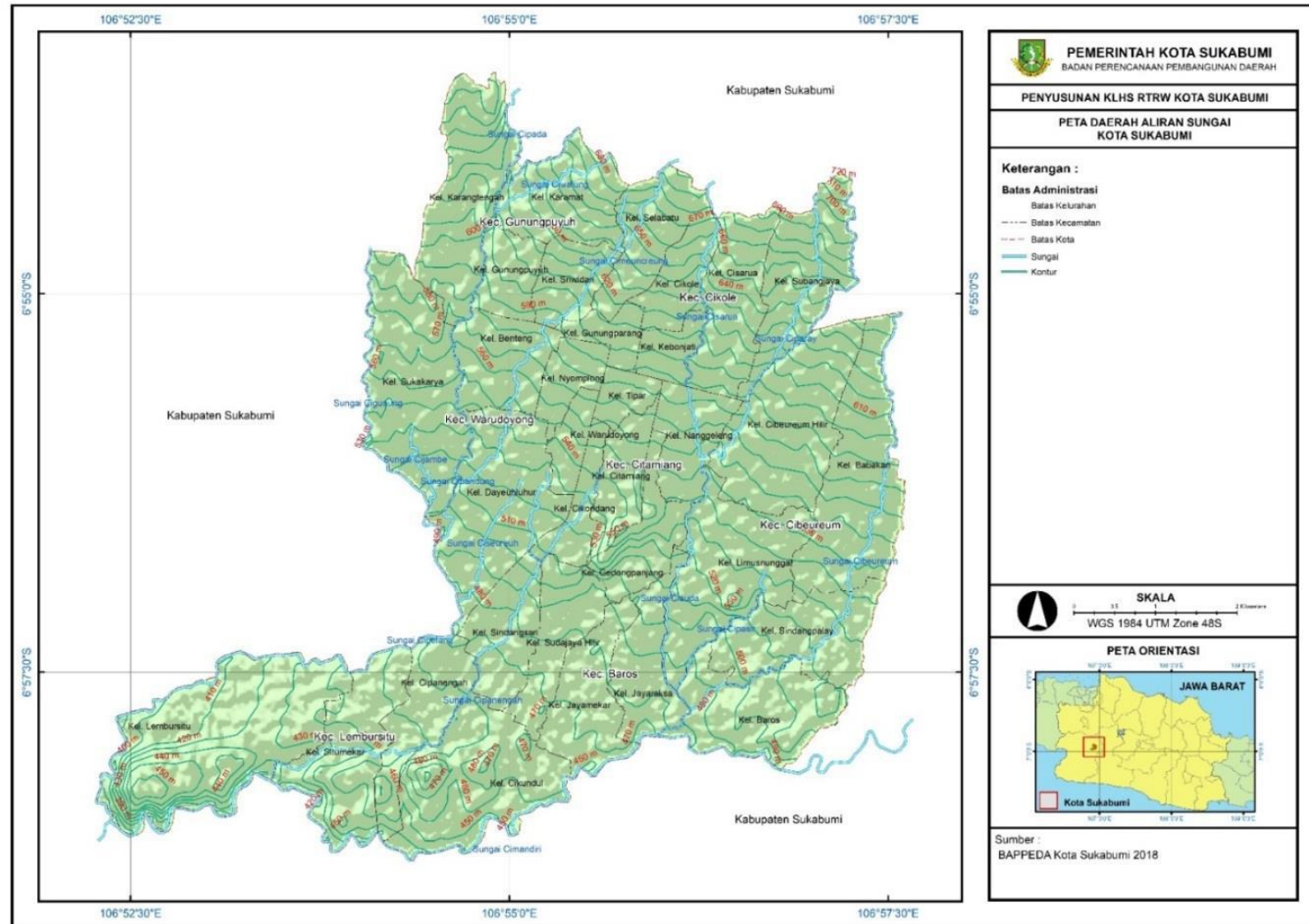
Tabel 2.6
Daerah Aliran Sungai di Wilayah Daerah

No	Nama Sungai	Luas DAS (Ha)	Panjang (km)	Debit (m ³ /dtk)
1	Ceger	0,004129	4,129	-
2	Cibeureum	0,0076	7,600	-
3	Salakaso	0,003244	3,244	-
4	Cibitung	0,006125	6,125	-
5	Cisuda	0,009659	9,659	0,40
6	Tonjong	0,004625	4,625	-
7	Cimandiri	0,012705	12,705	4,60

No	Nama Sungai	Luas DAS (Ha)	Panjang (km)	Debit (m³/dtk)
8	Cikapek	0,001851	1,851	0,01
9	Cipelang Leutik	0,003727	3,727	0,08
10	Cipelang	0,01508	15,080	1,26
11	Ciseureuh	0,004827	4,827	0,07
12	Cijambe	0,002252	2,252	0,20
13	Cigunung	0,004252	4,252	0,27
14	Bantarpanjang	0,001908	1,908	-
15	Gunungpuyuh	0,001068	1,068	-
16	Cikujang	0,001359	1,359	-
17	Cipanengah	0,005592	5,592	0,54
18	Ciseupan	0,003583	3,583	-
19	Ciparigi	0,001629	1,629	-
20	Cipada	0,001164	1,164	2,13
21	Ciwalung	0,001773	1,773	0,02
22	Cibandung	0,002847	2,847	0,06
23	Ciharempoy	0,004776	4,776	-
24	Cisarua	0,004127	4,127	0,36
25	Ciaul	0,003420	3,420	-
26	Cipicung	0,001503	1,503	-
27	Cisaray	0,002429	2,429	0,2
28	Tipar	0,003926	3,926	-
29	Cipasir	0,001948	1,948	-

Sumber : Masterplan Drainase Kota Sukabumi, 2014

Gambar 2.7
Peta Daerah Aliran Sungai Daerah



Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2018

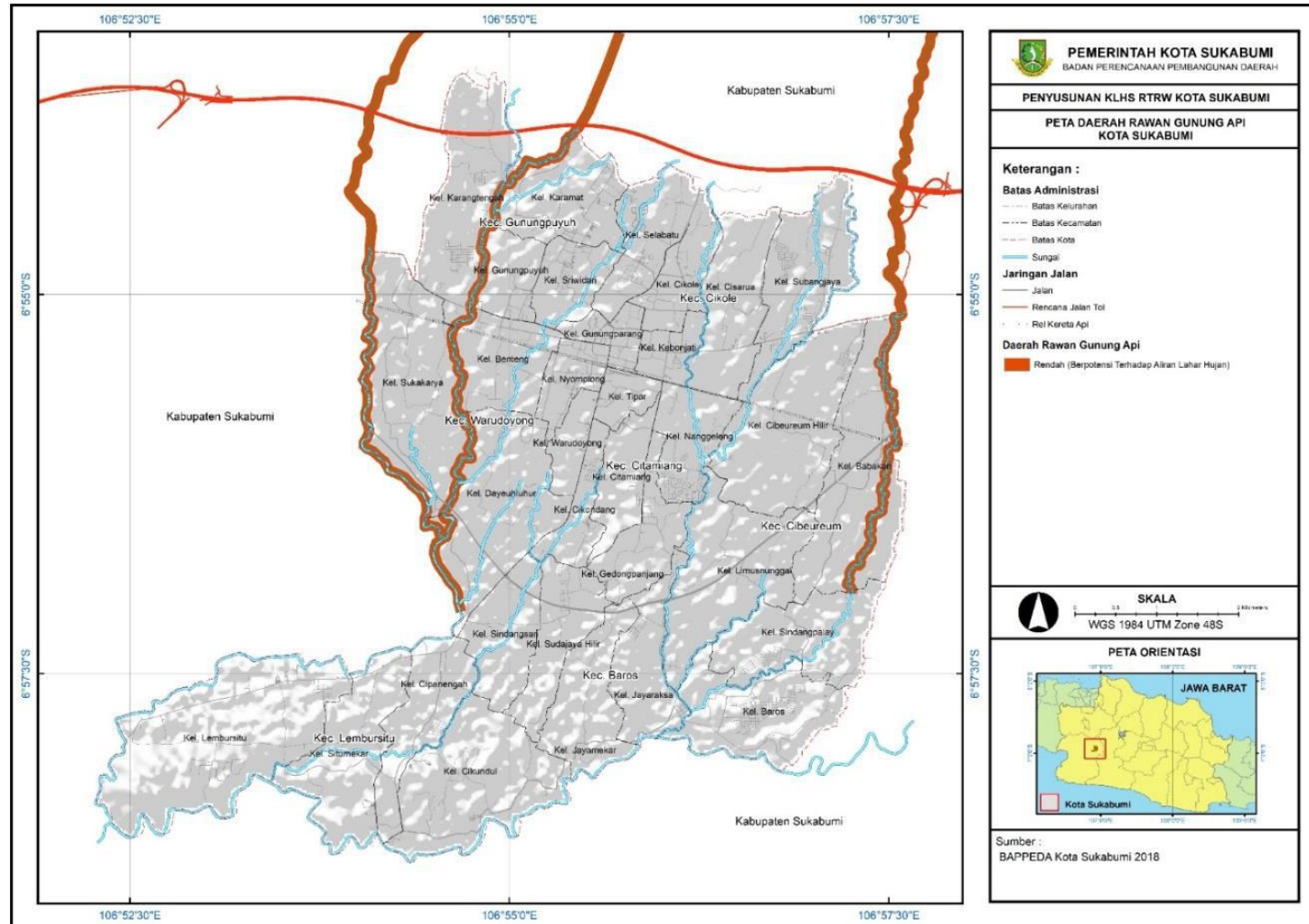
Wilayah Daerah merupakan salah satu di antara daerah yang cukup rawan letusan gunung berapi karena letaknya relatif dekat dengan Gunung Gede Pangrango. Selain itu wilayah Daerah juga rawan gempa bumi karena terletak di sesar atau patahan Cimandiri. Daerah potensi gempa di Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.7 sedangkan peta rawan letusan gunung berapi serta peta rawan gempa disajikan berturut-turut pada Gambar 2.8 dan Gambar 2.9.

Tabel 2.7
Potensi Gempa di Daerah

NO	KECAMATAN	POTENSI GEMPA	LUAS (Ha)
1	Baros	Daerah Aman	97,69
		Daerah Rawan Gempa	462,78
2	Cibeureum	Daerah Aman	835,26
		Daerah Rawan Gempa	96,94
3	Cikole	Daerah Aman	644,37
4	Citamiang	Daerah Aman	382,96
5	Gunungpuyuh	Daerah Aman	514,23
6	Lembursitu	Daerah Aman	49,10
		Daerah Rawan Gempa	1.046,25
7	Warudoyong	Daerah Aman	758,23
		Daerah Rawan Gempa	1,41

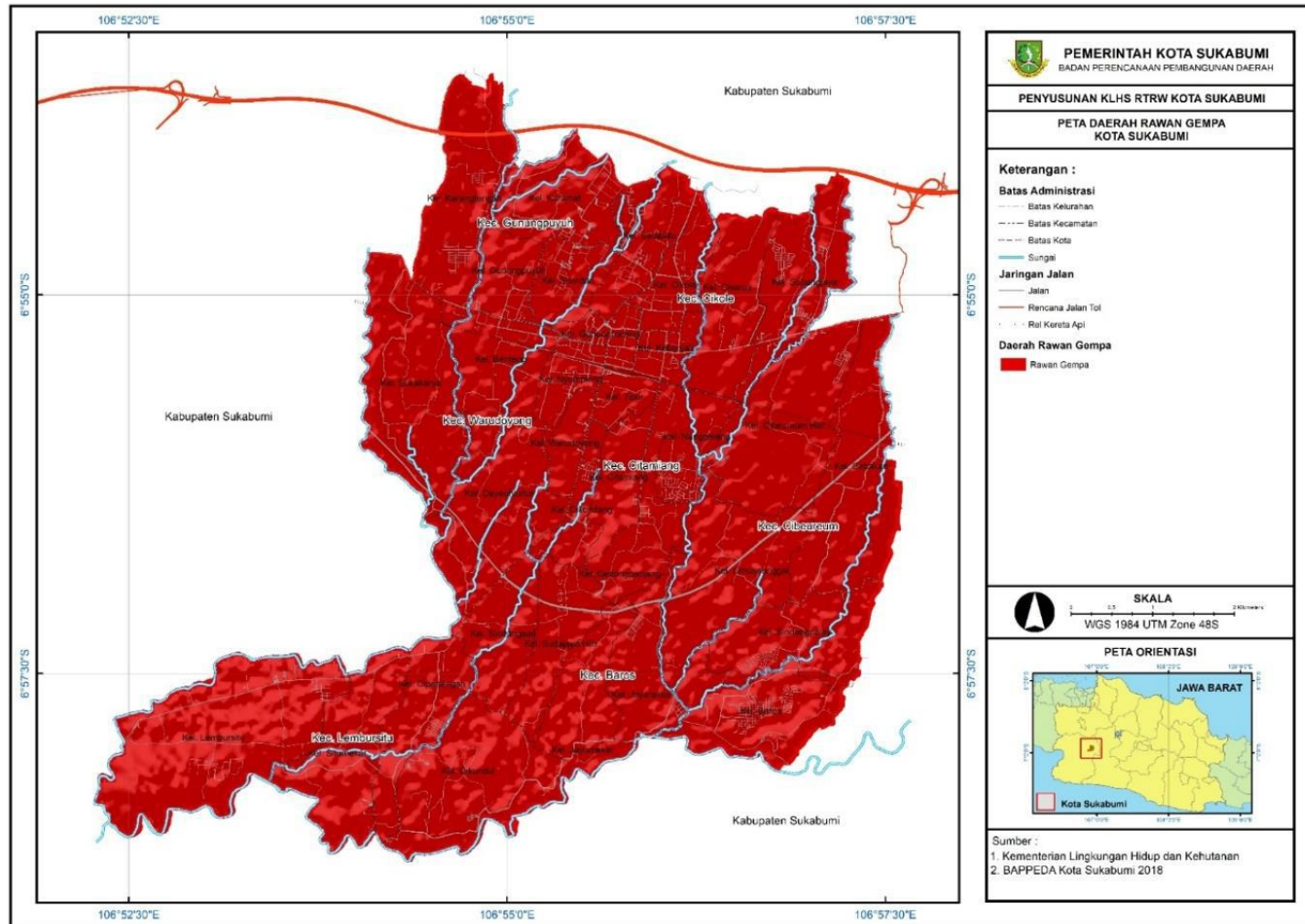
Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2017

Gambar 2.8
Peta Rawan Gunung Api Daerah



Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2018

Gambar 2.9
Peta Rawan Gempa Daerah



Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2018

Letak

Letak Daerah sangat strategis karena berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi Jawa Barat dengan Ibukota Negara, serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, sehingga menjadikan Daerah sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja.

Jumlah penduduk Daerah tahun 2018 adalah 344.797 (tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) jiwa yang terdiri atas 173.376 (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam) jiwa penduduk laki-laki atau sebesar 50,28% (lima puluh koma dua puluh delapan persen) dan 171.421 (seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu) jiwa penduduk perempuan atau sebesar 49,71% (empat puluh sembilan koma tujuh puluh satu persen) dengan rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,14 (seratus satu koma empat belas). Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut kecamatan di Daerah tahun 2018 disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Daerah Tahun 2018

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Ribuan)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Baros	18.728	18.343	37.071	102,09
2	Lembursitu	20.251	20.490	40.741	98,83
3	Cibeureum	21.397	20.869	42.266	102,53
4	Citamiang	26.923	26.743	53.666	100,67
5	Warudoyong	29.737	28.779	58.516	102,33
6	Gunungpuyuh	24.629	24.091	48.720	102,23
7	Cikole	31.711	32.106	63.817	98,77
	Tahun 2018	173.376	171.421	344.797	101,14
	Tahun 2017	169.392	166.474	335.866	101,75
	Tahun 2016	166.971	164.003	330.974	101,81
	Tahun 2015	162.311	159.017	321.328	102,07
	Tahun 2014	162.480	158.092	320.572	102,77

Sumber : Data Agregat Penduduk Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB)
Disdukcapil Kota Sukabumi

Dari

Dari Tabel 2.8 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Daerah mengalami penambahan tiap tahun. Laju pertumbuhan penduduk Daerah Tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.9 sedangkan perkembangan laju pertumbuhan penduduk Daerah Tahun 2013-2018 disajikan pada Gambar 2. 10.

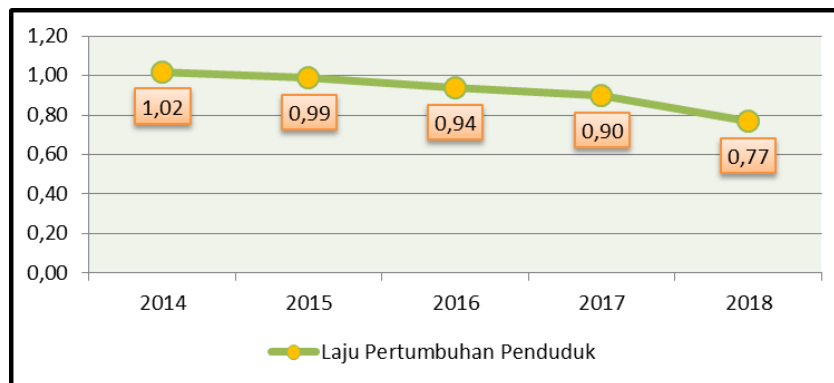
Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Penduduk Daerah Tahun 2013 - 2018

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk pertahun (%)
1	2014	320.572	1,02
2	2015	321.328	0,99
3	2016	330.974	0,94
4	2017	335.866	0,90
5	2018	344.797	0,77*

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka 2018

* Bappeda Kota Sukabumi diolah 2019

Laju pertumbuhan penduduk Daerah cenderung menurun dalam kurun waktu tahun 2014-2018. Laju pertumbuhan penduduk Daerah tertinggi terjadi pada Tahun 2014 sedangkan laju pertumbuhan penduduk Daerah terendah terjadi pada Tahun 2018 dengan nilai masing-masing sebesar 1,02 (satu koma nol dua) dan 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh). Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Daerah dalam kurun waktu 2014 – 2018 disajikan pada Gambar 2.10.



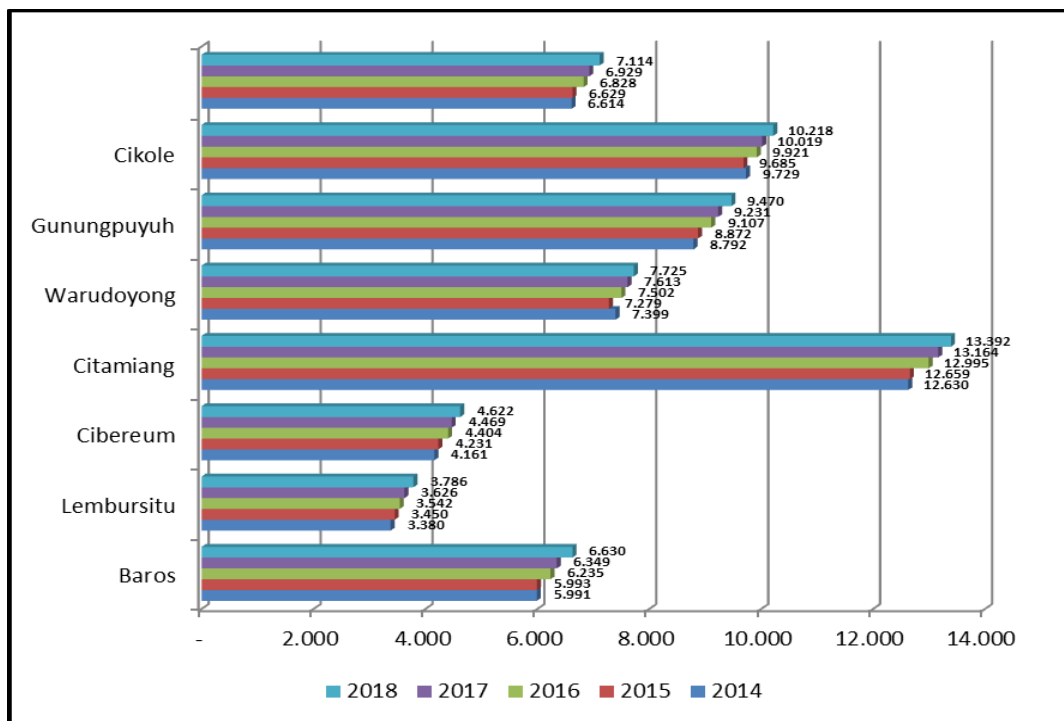
Gambar 2.10
Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Daerah
(Sumber: Kota Sukabumi dalam Angka 2018)

Kepadatan penduduk di Daerah terus meningkat dalam kurun waktu tahun 2014-2018 dengan persentase peningkatan kepadatan penduduk sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) yaitu dari 6.614 (enam ribu enam ratus empat belas) jiwa/km² pada tahun 2014 menjadi 7.114 (tujuh ribu seratus empat belas) jiwa/km² pada tahun 2018. Kepadatan penduduk Daerah Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.10. Adapun grafik kepadatan penduduk per Kecamatan disajikan pada Gambar 2.11.

Tabel 2.10
Kepadatan Penduduk Daerah Tahun 2014-2018

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Baros	5,59158	5.991	5.993	6.235	6.349	6.630
2	Lembursitu	10,76196	3.380	3.450	3.542	3.626	3.786
3	Cibereum	9,14407	4.161	4.231	4.404	4.469	4.622
4	Citamiang	4,00739	12.630	12.659	12.995	13.164	13.392
5	Warudoyong	7,57486	7.399	7.279	7.502	7.613	7.725
6	Gunungpuyuh	5,14479	8.792	8.872	9.107	9.231	9.470
7	Cikole	6,24528	9.729	9.685	9.921	10.019	10.218
Rata-Rata Kepadatan Penduduk			6.614	6.629	6.828	6.929	7.114

Sumber : Data Agregat Penduduk Berdasarkan DKB 2014-2018, Disdukcapil diolah, 2019



Gambar 2.11
Kepadatan Penduduk Daerah Tahun 2014-2018

(Sumber : Disdukcapil diolah, 2019)

Rata-rata jumlah penduduk per kepala keluarga di Daerah tiap tahun dalam kurun waktu tahun 2014-2018 tidak mengalami perubahan yaitu 3 (tiga) jiwa per kepala keluarga. Jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, dan jumlah jiwa per kepala keluarga disajikan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Rata-rata Jumlah Penduduk per Kepala Keluarga di Daerah
Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk per Kepala Keluarga (jiwa)
1	2014	320.572	92.069	3
2	2015	321.328	93.140	3
3	2016	330.974	98.636	3
4	2017	335.866	102.563	3
5	2018	344.797	105.927	3

Sumber : Data Agregat Penduduk Berdasarkan DKB 2014-2018, Disdukcapil diolah, 2019

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olah raga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diukur melalui 13 (tiga belas) indikator yaitu:

1. jumlah penduduk;
2. laju pertumbuhan penduduk (LPP; %);
3. laju pertumbuhan ekonomi (LPE; %);
4. laju inflasi (%);
5. tingkat kemiskinan (%)
6. ketimpangan kemakmuran (gini ratio);
7. PDRB perkapita (ADHB);
8. angka melek huruf (AMH);

9. angka rata-rata lama sekolah (RLS);
10. angka harapan lama sekolah (HLS);
11. angka harapan hidup (AHH);
12. persentase keluarga prasejahtera dan sejahtera I; dan
13. tingkat pengangguran terbuka (TPT).

2.2.1.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Daerah tahun 2018 adalah 344.797 (tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) jiwa, meningkat sebesar 24.225 (dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima) jiwa dari jumlah penduduk tahun 2014 yaitu sebesar 320.572 (tiga ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua) jiwa atau persentase peningkatan jumlah penduduk tahun 2014-2018 sebesar 7,55% (tujuh koma lima puluh lima). Adapun rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan terus menurun dari 102,77% (seratus dua koma tujuh puluh tujuh persen) pada tahun 2014 menjadi 101,14% (seratus satu koma empat belas persen) pada tahun 2018.

Kepadatan penduduk di Daerah pada tahun 2018 mencapai 7.114 (tujuh ribu seratus empat belas) jiwa/km², meningkat 7,5% (tujuh koma lima persen) dari kepadatan penduduk tahun 2014 sebesar 6.614 (enam ribu enam ratus empat belas) jiwa/km² menjadi 7.114 (tujuh ribu seratus empat belas) jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per kepala keluarga tetap yaitu 3 (tiga) jiwa per kepala keluarga.

2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk Daerah pada kurun waktu tahun 2014-2018 menurun dengan persentase penurunan sebesar 24% (dua puluh empat persen) yaitu dari 1,02 (satu koma nol dua) pada tahun 2014 menjadi 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) pada tahun 2018. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2015-2017 cenderung menurun dengan

laju

laju yang tidak terlalu signifikan yaitu 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) pada tahun 2015, 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) pada tahun 2016, dan 0,90 (nol koma sembilan puluh) pada tahun 2017.

2.2.1.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi Daerah senantiasa bergerak positif. Laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tahun 2013-2018 menunjukkan tren yang fluktuatif, mengalami perlambatan pada tahun 2015 dan 2017. Perlambatan ekonomi dari tahun 2015 salah satunya adalah sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak sebagai akibat dicabutnya subsidi pemerintah pada tahun 2013. Langkah ini berakibat kepada berbagai kategori lapangan usaha ekonomi di Daerah. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Daerah berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2017. Laju pertumbuhan ekonomi Daerah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
LPE Daerah dan LPE Provinsi Jawa Barat
Tahun 2014-2018

No	Kota/Provinsi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE/%)					
		2013	2014	2015	2016	2017*	2018**
1	Kota Sukabumi	5,41	5,43	5,13	5,66	5,43	5,54
2	Jabar	6,33	5,09	5,04	5,67	5,35	5,64

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

* Angka Sementara;

**Angka Sangat Sementara

2.2.1.4. Laju Inflasi

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan

harga

harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan atau *demand* dan penawaran atau *supply*. Daerah merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kota di Provinsi Jawa Barat yang merupakan lokasi pemantauan laju inflasi dan indeks harga konsumen. Laju inflasi di Daerah pada tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Laju Inflasi Daerah dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018

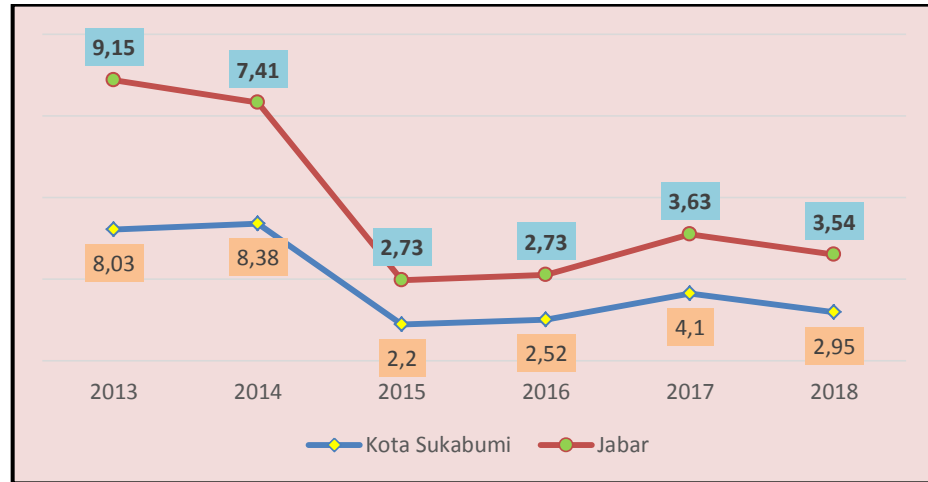
No	Kota/Provinsi	Laju Inflasi (%)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kota Sukabumi	8,03	8,38	2,20	2,52	4,10	2,95
2	Jawa Barat	9,15	7,41	2,73	2,73	3,63	3,54

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019

Angka inflasi di Daerah pada tahun 2013-2014 cenderung tinggi yaitu 8,03%-8,38% akibat kenaikan harga bahan bakar minyak yang diikuti kenaikan tarif dasar listrik dan harga kebutuhan bahan pokok lainnya yang mendorong inflasi meningkat pada tahun 2013 dan 2014. Angka inflasi di Daerah dapat dikendalikan pada tahun-tahun berikutnya dan mencapai 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) pada tahun 2018. Walau sempat mengalami kenaikan angka inflasi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,10 (empat koma sepuluh), rata-rata angka inflasi di Daerah berada di bawah angka inflasi Provinsi Jawa Barat. Penyebab kenaikan inflasi di Daerah dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta pada kelompok pengeluaran kesehatan. Untuk mengendalikan laju inflasi tersebut, koordinasi dan intensitas komunikasi terus ditingkatkan oleh Bank Indonesia dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota di Jawa Barat melalui Forum Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID

sebagai

sebagai upaya untuk menahan laju inflasi agar tetap terkendali. Laju Inflasi di Daerah dan Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 disajikan pada Gambar 2.12.



Gambar 2.12
Laju Inflasi Daerah dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018

(Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019)

2.2.1.5. Tingkat Kemiskinan

Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 mencapai 25.200 (dua puluh lima ribu dua ratus) jiwa dan menurun menjadi 23.200 (dua puluh tiga ribu dua ratus) jiwa pada tahun 2018. Pemerintah Daerah dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dari 8,05% (delapan koma nol lima) pada tahun 2013 menjadi 7,12% (tujuh koma dua belas persen) pada tahun 2018. Artinya pada periode tahun 2013 sampai 2018 Pemerintah Daerah berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,93% (nol koma sembilan puluh tiga persen). Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Daerah Tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tahun 2013-2018

No	Indikator	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa)	25,2	24,1	27,84	27,51	27,41	23,2
2	Persentase penduduk miskin (%)	8,05	7,65	8,79	8,59	8,48	7,12

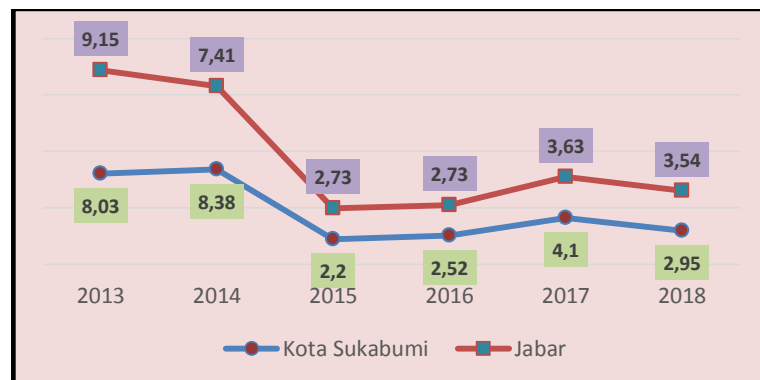
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019

Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat, Daerah memiliki tingkat kemiskinan di bawah Provinsi Jawa Barat. Persentase penduduk miskin di Daerah dan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 2.15 dan perbandingan persentase penduduk miskin Daerah dengan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Gambar 2.13.

Tabel 2.15
Persentase Penduduk Miskin Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

No	Kota/Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (%)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kota Sukabumi	8,05	7,65	8,79	8,59	8,48	7,12
2	Prov. Jawa Barat	9,61	9,18	9,57	8,77	7,83	7,45

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019



Gambar 2.13
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

(Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat)

2.2.1.6. Ketimpangan Kemakmuran

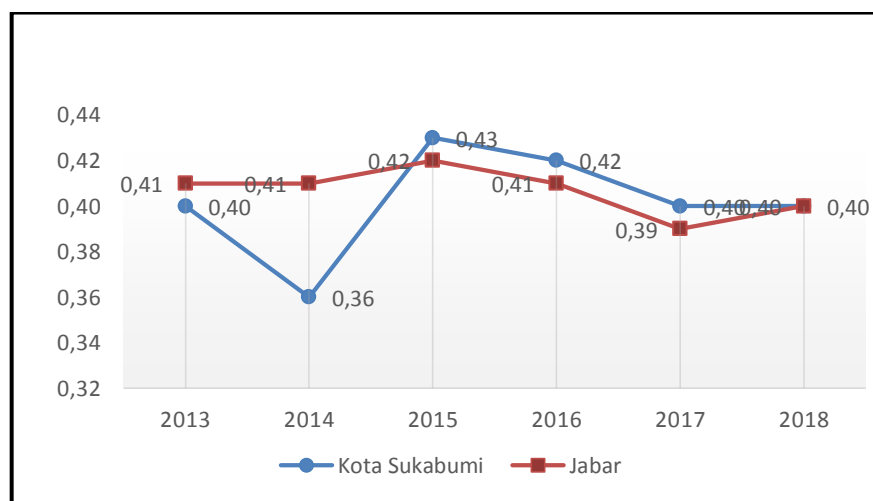
Ketimpangan sosial dapat diukur melalui berbagai indikator, salah satunya adalah dengan menggunakan *Gini Ratio* atau Koefisien Gini. Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang didasarkan pada Kurva Lorenz. Kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pada variabel tertentu misalnya pendapatan dengan distribusi *uniform* atau seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Ukuran kesenjangan Koefisien Gini berupa indeks yang berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks Gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Koefisien Gini ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995) :

1. *Gini Ratio* < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah;
2. $0,4 < \textit{Gini Ratio} < 0,5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (moderat); dan
3. *Gini Ratio* >0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi .

Pada tahun 2013-2018, indeks Gini Daerah menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Indeks Gini tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai angka 0,43 (nol koma empat puluh tiga). Angka ini relevan dengan kondisi kemiskinan yang mengalami kenaikan di tahun yang sama. Pada tahun 2016 indeks Gini Daerah telah

menurun

menurun meskipun secara angka berada pada 0,42 (nol koma empat puluh dua) dan masih berada di atas indeks Gini Provinsi Jawa Barat. Meskipun masih masuk dalam ketimpangan moderat, namun hal ini harus menjadi perhatian khusus. Ketimpangan yang tinggi akan menyebabkan lebih rawan terjadinya gesekan dan gejolak di masyarakat karena ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin jauh. Perkembangan indeks Gini Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 disajikan pada Gambar 2.14.



Gambar 2.14
Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Sukabumi
Dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2019)

2.2.1.7. PDRB Per Kapita

Produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita merupakan salah satu gambaran makro rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk selama satu tahun dalam suatu wilayah tertentu dan biasanya digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, nilai PDRB juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan nilai PDRB ini antara lain adalah :

1. untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi;
2. untuk mengetahui struktur perekonomian;
3. untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan; dan
4. untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

Berdasarkan perkembangan saat ini, telah dilakukan perubahan tahun dasar PDRB dari tahun 2000 ke tahun 2010.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Daerah tahun 2017 mencapai Rp.10.560.000.000.000,- (sepuluh trilyun lima ratus enam puluh milyar rupiah) atau mengalami pertumbuhan 8,64% (delapan koma enam puluh empat persen) dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp.9.720.000.000.000,- (sembilan trilyun tujuh ratus dua puluh milyar rupiah). Nilai pertumbuhan yang dimiliki oleh PDRB atas dasar harga berlaku masih dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga selain peningkatan produksi. Nilai PDRB Daerah atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010) tahun 2017 sebesar Rp.7.780.000.000.000,- (tujuh trilyun tujuh ratus delapan puluh milyar rupiah) atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,43% (lima koma empat puluh tiga persen), dari Rp.7.380.000.000.000,- (tujuh trilyun tiga ratus delapan puluh milyar rupiah) di tahun 2016. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan peningkatan produksi barang atau jasa yang nyata terjadi dan telah mengeliminir faktor kenaikan harga, sehingga mencerminkan LPE yang sesungguhnya tercipta. Jika dicermati, pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku bergerak dengan lebih cepat dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga konstan. Hal tersebut menunjukkan besarnya dampak perubahan harga atau inflasi terhadap perekonomian. Sekilas perekonomian tampak tumbuh dengan pesat padahal kenyataannya peningkatan produksi

sebenarnya

sebenarnya yang terjadi tidaklah setajam itu karena tergerus oleh faktor inflasi. Maka dari itu, untuk menilai pertumbuhan rill digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB Daerah Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
PDRB Daerah Tahun 2012-2017 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Penilaian	
	ADHB	ADHK
2013	7.309.646,73	6.310.682,60
2014	8.140.751,03	6.643.603,95
2015	8.971.328,27	6.985.333,30
2016*	9.718.975,96	7.379.481,72
2017**	10.555.670,15	7.780.422,70

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2018

2.2.1.8. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf atau AMH merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk berusia 15 tahun ke atas. Kegunaan dari indikator AMH ini adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis

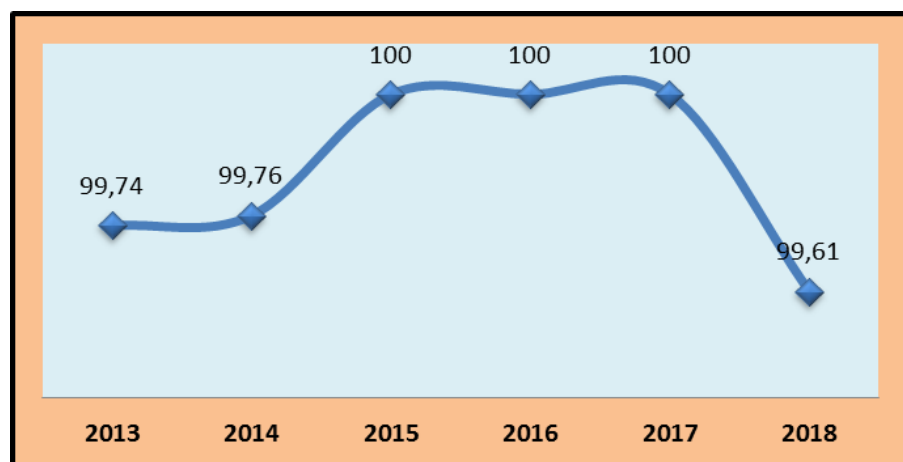
dalam

dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. AMH Daerah dalam kurun waktu 2013-2018 sudah mencapai rata-rata di atas 99% (sembilan puluh sembilan persen) artinya terdapat lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) penduduk berusia 15 (lima belas) tahun ke atas di Daerah yang bisa membaca dan menulis. Pencapaian AMH Daerah berada di atas capaian AMH Provinsi Jawa Barat yang berada di kisaran 96-98% sebagaimana disajikan pada Tabel 2.17 sedangkan capaian AMH Daerah Tahun 2013-2018 disajikan pada Gambar 2.15.

Tabel 2.17
Capaian AMH Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

No	Provinsi /Kota	AMH (%)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kota Sukabumi	99.74	99.76	100	100	100	99.61
2	Prov. Jawa Barat	96.87	98.29	98.29	98.78	98.76	NA

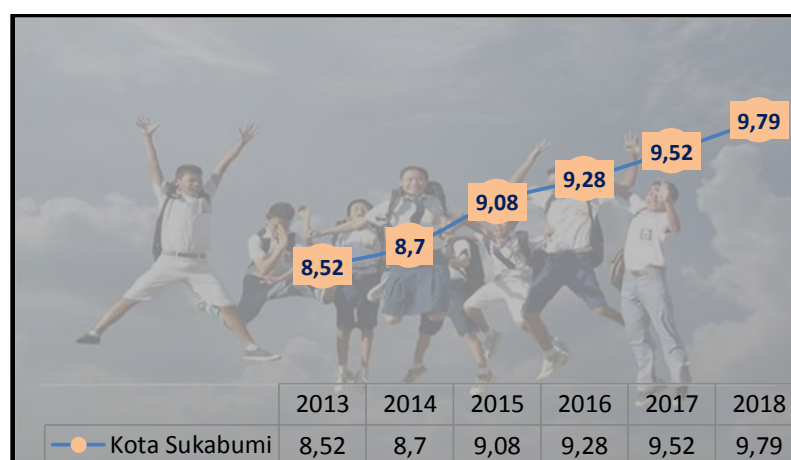
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019



Gambar 2.15
Capaian AMH Daerah Tahun 2013-2018
(Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019)

2.2.1.9. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah atau RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia di atas 15 tahun untuk menjalani pendidikan formal. Indikator RLS digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS Daerah dalam kurun waktu 2013-2018 meningkat 14,9% (empat belas koma sembilan) dari 8,52 (delapan koma lima puluh dua) tahun pada tahun 2013 menjadi 9,79 (sembilan koma tujuh puluh sembilan) tahun pada tahun 2018. Artinya rata-rata penduduk berusia 15 (lima belas) tahun ke atas di Daerah menamatkan pendidikan formal hingga kelas 9 (sembilan) pada jenjang SMP. Capaian RLS di Daerah disajikan pada Gambar 2.16.



Gambar 2.16
Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Daerah
Tahun 2013-2018

(Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019)

2.2.1.10. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah atau HLS didefinisikan lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 (tujuh) tahun ke atas.

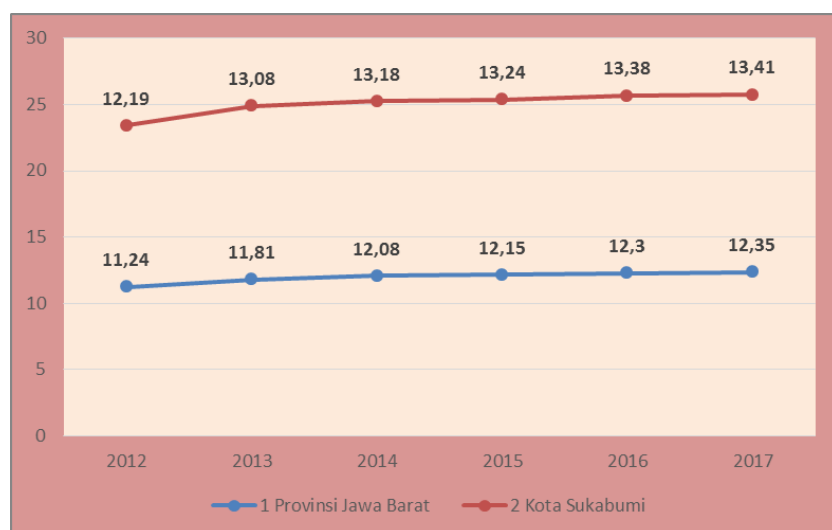
HLS

HLS Daerah pada tahun 2017 mencapai 13,41 (tiga belas koma empat puluh satu) tahun, meningkat 10% (sepuluh persen) dari angka HLS tahun 2012 yaitu 12,19 (dua belas koma sembilan belas) tahun. Angka HLS sebesar 13,41 (tiga belas koma empat puluh satu) tahun menunjukkan bahwa harapan lama sekolah anak di Daerah sudah masuk pada jenjang pendidikan tinggi dan sudah melampaui angka HLS Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2012-2017. Angka HLS Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017 disajikan pada Tabel 2.18. Sedangkan perkembangan HLS Daerah dan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Gambar 2.17.

Tabel 2.18
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017

No	Provinsi/ Kota	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Provinsi Jawa Barat	11,24	11,81	12,08	12,15	12,30	12,35
2	Kota Sukabumi	12,19	13,08	13,18	13,24	13,38	13,41

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Bappeda Kota Sukabumi diolah



Gambar 2.17
Perkembangan Angka HLS Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2017

(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat)

Dari tabel dan gambar diatas, terlihat bahwa peningkatan HLS Daerah tahun 2012-2017 relevan dengan peningkatan HLS Provinsi Jawa Barat, yang merupakan dampak dari program dan kegiatan di sektor pendidikan.

2.2.1.11. Angka Harapan Hidup (AHH)

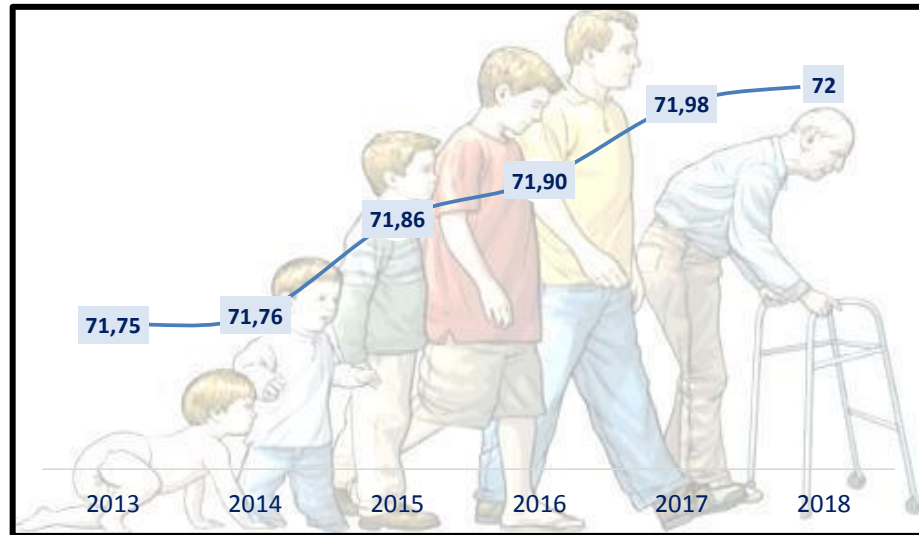
Angka harapan hidup atau AHH yaitu perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup atau rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir, yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, nilai AHH Daerah terus mengalami peningkatan dari 71,75 (tujuh puluh satu koma tujuh puluh lima) pada tahun 2013 menjadi 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2018 atau mengalami peningkatan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen). Namun demikian, AHH Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2018 masih berada di bawah AHH Provinsi Jawa Barat. Nilai AHH Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.19 sedangkan grafik perkembangan nilai AHH Daerah tahun 2013-2018 disajikan pada Gambar 2.18.

Tabel 2.19
AHH Daerah dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2012-2018

NO	Provinsi/ Kota	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Provinsi Jawa Barat	72,09	72,23	72,41	72,44	72,77	NA
2	Kota Sukabumi	71,75	71,76	71,86	71,90	71,98	72

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Bappeda Kota Sukabumi diolah



Gambar 2.18
Perkembangan AHH Daerah Tahun 2013-2018
(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Kota Sukabumi, diolah)

2.2.1.12. Persentase Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I

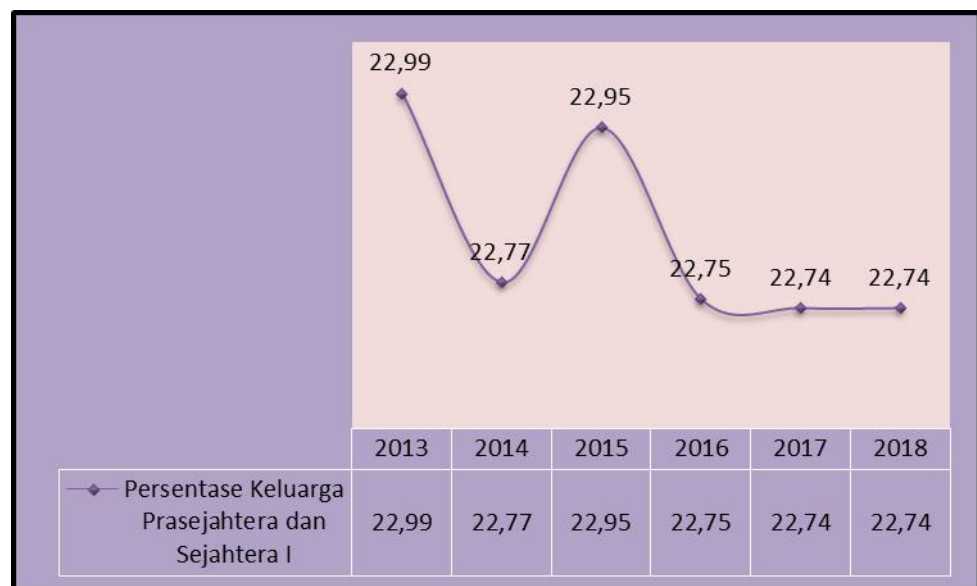
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN mendefinisikan miskin berdasarkan konsep atau pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera atau KPS, keluarga sejahtera I atau KS-I, keluarga sejahtera II atau KS-II, keluarga sejahtera III atau KS-III, dan keluarga sejahtera III plus atau KS-III plus. Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 (dua puluh satu) indikator dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor-faktor dominan tersebut terdiri dari :

1. pemenuhan kebutuhan dasar;
2. pemenuhan kebutuhan psikologi;
3. kebutuhan pengembangan; dan
4. kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya.

Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS-I. Kelompok inilah yang kemudian menjadi bagian dari target BKKBN dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keluarga prasejahtera

adalah

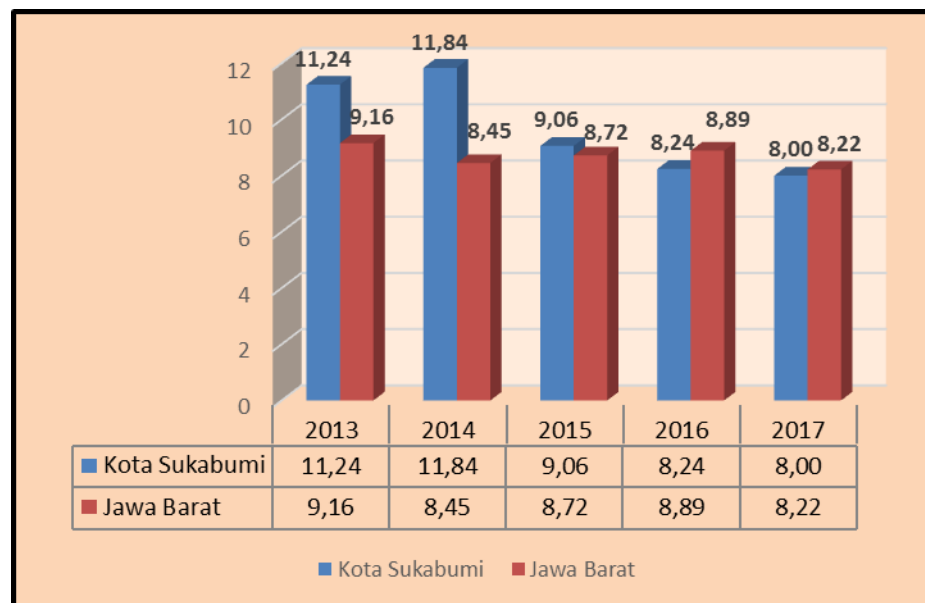
adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pokok atau pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pengajaran agama. Mereka yang dikategorikan sebagai KPS adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) kriteria KS-I. Selanjutnya KS-I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu satu atau lebih indikator pada tahapan KS-II. Persentase keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I di Daerah dalam kurun waktu 2013-2018 menurun sebesar 1% (satu persen) dari 22,99% (dua puluh dua koma sembilan puluh sembilan persen) pada tahun 2013 menjadi 22,74% (dua puluh dua koma tujuh puluh empat persen) pada tahun 2018. Persentase keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I di Daerah tahun 2013-2018 disajikan pada Gambar 2.19.



Gambar 2.19
Persentase Keluarga Prasejahtera dan
Keluarga Sejahtera-I di Daerah Tahun 2013-2018
(Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019)

2.2.1.13. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk ke dalam pengangguran. Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingkat pengangguran di Daerah dalam kurun waktu 2013-2017 menurun sebesar 28,82% (dua puluh delapan koma delapan puluh dua persen) dari 11,24% (sebelas koma dua puluh empat persen) pada tahun 2013 menjadi 8% (delapan persen) pada tahun 2017. Walaupun pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 TPT Daerah berada di atas Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2016-2017 TPT Daerah menurun bahkan berada di bawah provinsi Jawa Barat. Capaian TPT Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017 di sajikan pada Gambar 2.20.



Gambar 2.20
Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2017
(Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019)

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Tingkat kesejahteraan sosial dapat dilihat dari pembangunan manusia yang dilakukan. Keberhasilan pembangunan manusia terindikasikan oleh beberapa indikator kinerja, yang paling banyak dipakai adalah penggunaan indikator indeks pembangunan manusia atau IPM atau disebut juga *Human development index* atau HDI yang diperkenalkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). UNDP mengukur pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar yaitu :

1. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. pengetahuan (*knowledge*); dan
3. standar hidup layak (*decent standard of living*).

Nilai capaian IPM dapat digunakan untuk membandingkan keberhasilan dalam upaya pembangunan manusia antar daerah atau negara.

Pada tahun 2010, UNDP melakukan perubahan metodologi dalam perhitungan IPM, ada beberapa alasan yang melandasi perubahan metodologi perhitungan yaitu:

1. beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik;
2. produk domestik bruto atau PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; dan
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Dua perubahan yang dilakukan yaitu perubahan indikator dan perubahan metode perhitungan. Perubahan indikator yang dilakukan yaitu: Angka Melek Huruf atau AMH pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah atau HLS dan Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita diganti dengan Produk Nasional

Bruto

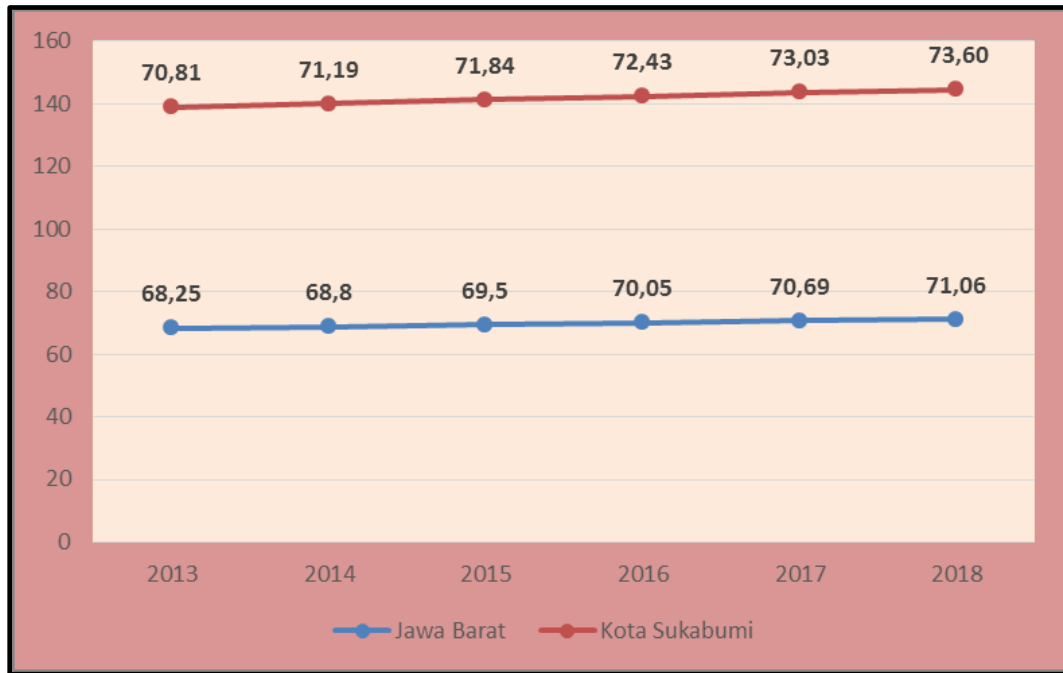
Bruto atau PNB per kapita. Sedangkan metode perhitungan berubah dari metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Nilai IPM Daerah pada kurun waktu Tahun 2013-2018 terus menunjukkan peningkatan dan berada di atas nilai IPM Provinsi Jawa Barat. IPM Daerah sudah berhasil masuk dalam kategori tinggi pada tahun 2013 dengan angka 70,81 (tujuh puluh koma delapan puluh satu), sedangkan Provinsi Jawa Barat baru masuk dalam kategori tinggi pada tahun 2016. Pada tahun 2017, IPM Daerah sudah mencapai angka 73,03 (tujuh puluh tiga koma nol tiga) dan menempati peringkat ke-7 (tujuh) dari 27 (dua puluh tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Nilai IPM Daerah dan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.20 dan Gambar 2.21. Sedangkan posisi nilai IPM Daerah dalam regional Provinsi Jawa Barat disajikan pada Gambar 2.22.

Tabel 2.20
Nilai IPM Daerah dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018

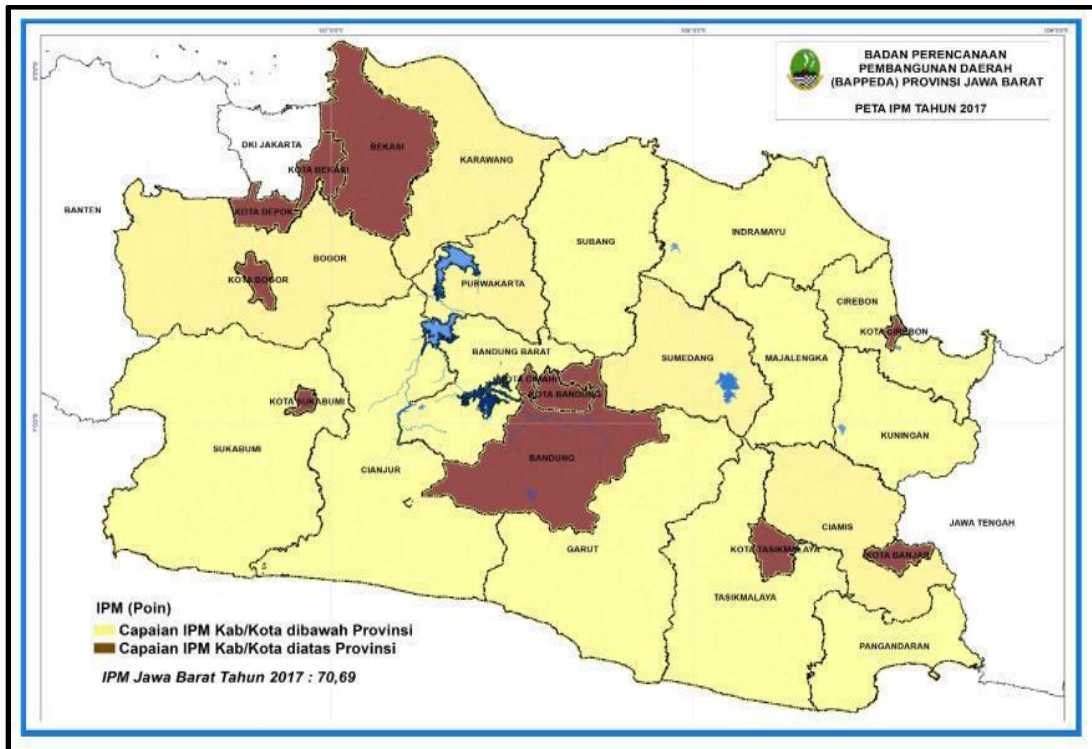
No	Keterangan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Provinsi Jawa Barat	68,25	68,8	69,5	70,05	70,69	71,06
2	Daerah	70,81	71,19	71,84	72,33	73,03	73,60

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019



Gambar 2.21
Grafik Nilai IPM Daerah dan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018

(Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2019)



Gambar 2.22
Nilai IPM Kota Sukabumi dalam Posisi Regional
Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

(Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2019)

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Daerah selama ini telah dikenal sebagai salah satu Kota Seni Budaya. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahun 2016, Wayang Sukuraga telah ditetapkan sebagai kesenian khas budaya Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga terus menyelenggarakan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan pagelaran seni budaya agar dapat mempertahankan kesenian dan kebudayaan Daerah, juga untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Maka dari itu, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Sebagai upaya penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat juga telah berdiri stadion olahraga Suryakencana di Jalan Pabuaran. Dalam kompleks stadion olahraga Suryakencana, berdiri kokoh gedung olahraga dan lapangan sepak bola yang representatif. Keberadaan stadion ini banyak melahirkan atlet olahraga prestasi. Daerah juga banyak mengantarkan atlet olahraga prestasi ke berbagai kejuaraan olahraga prestasi baik pada level regional Jawa Barat maupun nasional termasuk Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat dan Pekan Olahraga Nasional.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Daerah mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan

terdiri

terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah:

1. urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
3. urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum konkuren baik wajib maupun urusan pilihan.

2.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib

Urusan wajib dibagi menjadi dua yaitu urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar.

2.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu:

1. urusan pendidikan;
2. urusan kesehatan;
3. urusan pekerjaan umum dan tata ruang;
4. urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5. urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. urusan sosial.

1. *Urusan Wajib Pendidikan*

Indikator kinerja kunci pada urusan wajib pendidikan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Persentase capaian Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD di Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2018 fluktuatif, namun secara umum meningkat 14,5% (empat belas koma lima persen) dari 55.36% (lima puluh lima koma tiga puluh enam persen) pada tahun 2013 menjadi 63,4% (enam puluh tiga koma empat persen) pada tahun 2018. Persentase capaian PAUD tertinggi dicapai pada Tahun 2014 yaitu 82,49% (delapan puluh dua koma empat puluh sembilan persen).

b. Angka Melek Huruf

Indikator persentase penduduk yang berusia >15 (lima belas) tahun melek huruf atau idak buta aksara pada tahun 2013-2018 rata-rata mencapai diatas 99% (sembilan puluh sembilan persen) artinya 99% (sembilan puluh sembilan persen) penduduk Daerah berusia >15 (lima belas) tahun sudah tidak buta aksara.

c. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni atau APM pada jenjang pendidikan SD di Daerah pada tahun 2018 sudah mencapai 99,4% (sembilan puluh sembilan koma empat persen) artinya masih terdapat 0,6% (nol koma enam persen) anak berusia 7-12 tahun yang belum bersekolah. Nilai APM pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD meningkat 5,3% (lima koma tiga persen) dari tahun 2013 sebesar 94,33% (sembilan puluh empat koma tiga puluh tiga persen) menjadi 99,4% (sembilan puluh sembilan koma empat persen) pada tahun 2018.

APM pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP di Daerah pada tahun

2018 sudah mencapai 96,4% (sembilan puluh enam koma empat persen) artinya masih terdapat 3,6% (tiga koma enam persen) anak berusia 13-15 tahun yang belum bersekolah SMP. Nilai APM pada jenjang pendidikan SMP meningkat 19% (sembilan persen) dari tahun 2013 sebesar 81,06% (delapan puluh satu koma nol enam persen) menjadi 96,4% (sembilan puluh enam koma empat persen) pada tahun 2018.

Pada tahun 2017, urusan pendidikan menengah atas kembali menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi sedangkan pemerintah kabupaten/kota fokus untuk mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal atau kesetaraan. Dengan adanya alih kelola ini diharapkan mutu dan kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi.

d. Angka Putus Sekolah

Pada tahun 2018, sudah tidak terdapat lagi terdapat anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun yang putus sekolah baik pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD maupun pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP.

e. Angka Kelulusan

Tingkat kelulusan siswa pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP pada tahun 2018 sudah mencapai 100% (seratus persen).

f. Angka Melanjutkan

Persentase jumlah siswa sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP mencapai 110,2%, (seratus sepuluh koma nol dua persen) menurun 1,2% (satu koma dua

persen)

persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 111,57% (seratus sebelas koma lima puluh tujuh persen).

g. Guru yang Memenuhi Kualifikasi Strata-1 atau Diploma-IV

Kualitas pendidikan akan tercipta bila didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang mumpuni, hal ini dapat dilihat dari persentase guru yang berkualifikasi pendidikan S-1 atau D-IV pada tahun 2018 sudah mencapai 91,97% (sembilan puluh satu koma sembilan puluh tujuh persen), meningkat 12,1% (dua belas koma satu persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 82,96% (delapan puluh dua koma sembilan puluh enam persen).

2. *Urusan Wajib Kesehatan*

Indikator kinerja kunci pada urusan wajib kesehatan, yaitu sebagai berikut:

a. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Daerah cenderung fluktuatif pada kurun waktu tahun 2013-2018 dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 100% (seratus persen). Dalam hal ini, komplikasi kebidanan yang dimaksud adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi.

b. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2018 mencapai 97,9% (sembilan puluh tujuh koma sembilan persen), meningkat sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 92,14% (sembilan puluh dua koma empat belas persen). Hal

ini dapat dicapai berkat kerjasama yang optimal dari semua pihak terutama bidang praktek swasta, rumah sakit baik pemerintah dan swasta dan Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas di dalamnya.

c. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization*

Capaian cakupan kelurahan *universal child immunization* atau UCI pada tahun 2018 adalah 96,97% (sembilan puluh enam koma sembilan puluh tujuh persen) artinya 96,97% (sembilan puluh enam koma sembilan puluh tujuh persen) kelurahan di Daerah telah melaksanakan imunisasi kepada 80% (delapan puluh persen) sasaran imunisasi, menurun 3,03% (tiga koma nol tiga persen) dari capaian tahun 2017. Indikator yang digunakan adalah imunisasi BCG, DPT-Hb3, Polio 4, dan campak. Imunisasi merupakan langkah preventif untuk meminimalisasi terjadinya kondisi sakit pada anak. Semakin banyak kelurahan yang masuk kategori UCI maka akan semakin besar perlindungan terhadap balita dari penyakit. Strategi yang dilakukan petugas di antaranya adalah *sweeping* langsung terhadap anak bayi dan BALITA yang menjadi sasaran imunisasi dan digerakannya kembali masyarakat peduli imunisasi serta optimalisasi peran pengawas atau wakil *supervisor* atau wasor imunisasi yang terus memantau dan mengevaluasi capaian program secara rutin.

d. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Selama kurun waktu tahun 2013-2017, BALITA yang mengalami gizi buruk seluruhnya mendapatkan penanganan sesuai standar yaitu 100% (seratus persen).

e. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+), didapat dari perhitungan

persentase

persentase jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Pada tahun 2018, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) mencapai 144,82% (seratus empat puluh empat koma delapan puluh dua persen), meningkat 24,7% (dua puluh empat koma tujuh persen dari capaian tahun 2017).

f. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD selama kurun waktu 2013-2018 sudah mencapai 100% (seratus persen), artinya keseluruhan penderita DBD yang ditemukan mendapatkan penanganan sesuai standar.

g. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Pada tahun 2018, persentase masyarakat miskin yang berkunjung ke sarana kesehatan strata 1 mencapai 100% (seratus persen) meningkat 32,54% (tiga puluh dua koma lima puluh empat persen) dari capaian tahun 2017.

h. Cakupan Kunjungan Bayi

Kunjungan bayi adalah cakupan kunjungan bayi yang mendapat pelayanan paripurna minimal 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) kali pada usia 29 hari-2 bulan, 1 (satu) kali pada usia 3-5 bulan, 1 (satu) kali pada usia 6-8 bulan, dan 1 (satu) kali pada usia 9-11 bulan sesuai standar. Cakupan ini untuk mengetahui efektivitas, *continuum of care*, dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Dihitung dengan membandingkan jumlah bayi yang mendapat pelayanan minimal 4 (empat) kali dengan jumlah seluruh sasaran bayi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Cakupan kunjungan bayi tahun 2018

sebesar

sebesar 97,83% (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh tiga persen) meningkat 0,4% (nol koma empat persen) dari capaian tahun 2017 yang sebesar 97,43% (sembilan puluh tujuh koma empat puluh tiga persen). Peningkatan pencapaian ini disebabkan oleh sinergitas, koordinasi, dan pencapaian program yang sudah semakin baik sehingga berpengaruh terhadap pencapaian peningkatan kunjungan bayi.

3. *Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

Indikator kinerja kunci pada urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang, yaitu sebagai berikut:

a. Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik

Ketersediaan infratraktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Daerah pada tahun 2018 adalah 97,3 (sembilan puluh tujuh koma tiga persen) km atau sebesar 84,06% (delapan puluh empat koma nol enam persen) dari keseluruhan panjang jaringan jalan di Daerah yaitu 115,74% (seratus lima belas koma tujuh puluh empat persen), meningkat 2,6% (dua koma enam persen) dari capaian tahun 2017.

b. Rumah Tangga Bersanitasi

Untuk aspek tempat tinggal, diketahui bahwa rumah tinggal yang bersanitasi di Daerah pada tahun 2018 berjumlah 89.590 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh) unit rumah dari total 105.927 (seratus lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) unit rumah atau sebesar 84,57% (delapan puluh empat koma lima puluh tujuh persen). Capaian rumah tangga bersanitasi pada tahun 2018 menurun 3,18% (tiga koma delapan belas persen) dari capaian tahun

2017 yaitu sebesar 87,35% (delapan puluh tujuh koma tiga puluh lima persen). Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi yaitu:

- 1) fasilitas air bersih;
- 2) pembuangan tinja;
- 3) pembuangan air limbah; dan
- 4) pembuangan sampah.

Penurunan kinerja yang terjadi menunjukkan bahwa sebagian pembangunan rumah tinggal di Daerah masih belum memenuhi aspek dasar yang dibutuhkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui bantuan penyediaan MCK dan *septic tank* komunal terutama di kawasan kampung yang kumuh.

c. Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh yang masih ada di Daerah pada tahun 2018 adalah seluas 0,9101 (nol koma sembilan ribu seratus satu) km² dari total wilayah Daerah atau sebesar 1,89% (satu koma delapan puluh sembilan persen). Persentase kawasan kumuh di Daerah terus mengalami penurunan sejalan dengan pelaksanaan program pengurangan kawasan kumuh perkotaan.

d. Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Luas ruang terbuka hijau di Daerah tahun 2018 adalah 1.538,46 (seribu lima ratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam) Ha dari 4.842 (empat ribu delapan ratus empat puluh dua) Ha luas wilayah ber HPL/HGB atau sebesar 31,77% (tiga puluh satu koma tujuh puluh tujuh persen), menurun 0,5% (nol koma lima persen) dari capaian tahun 2017 sebesar 31,96% (tiga puluh satu koma sembilan puluh enam persen).

4. *Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Pemukiman*

Indikator kinerja kunci pada urusan wajib perumahan rakyat dan pemukiman, yaitu sebagai berikut:

a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Jumlah rumah tangga di Daerah yang menggunakan air bersih pada tahun 2018 adalah sebanyak 91.519 (sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan belas) kepala keluarga dari total 105.927 (seratus lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) kepala keluarga atau sebesar 86,39% (delapan puluh enam koma tiga puluh sembilan persen). Capaian ini menurun sebesar 2,6% (dua koma enam persen) dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 88,7% (delapan puluh delapan koma tujuh persen). Penurunan yang signifikan yaitu sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen) terjadi apabila dibandingkan dengan capaian rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2013 yaitu sebesar 94,16% (sembilan puluh empat koma enam belas persen).

b. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Kawasan kumuh yang masih ada di Daerah pada tahun 2018 adalah seluas 0,9101 (nol koma sembilan ribu seratus satu) km² dari total wilayah Daerah atau sebesar 1,89% (satu koma delapan puluh sembilan persen). Persentase kawasan kumuh di Daerah terus mengalami penurunan sejalan dengan pelaksanaan program pengurangan kawasan kumuh perkotaan.

c. Rumah Layak Huni

Jumlah rumah layak huni di Daerah pada tahun 2018 adalah sejumlah 100.296 (seratus ribu dua ratus sembilan puluh enam) unit rumah atau sebesar 97,04% (sembilan puluh tujuh koma nol empat persen) dari total jumlah unit rumah di Daerah sebesar 103.353 (seratus tiga ribu tiga ratus

lima puluh tiga) unit. Kondisi rumah layak huni di Daerah terus meningkat setiap tahun dengan persentase peningkatan sebesar 4,1% (empat koma satu persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 93,21% (sembilan puluh tiga koma dua puluh satu persen).

5. *Urusan Sosial*

Pada urusan wajib sosial terdapat 1 (satu) indikator yang mengalami perubahan yaitu terkait penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Dengan banyaknya golongan PMKS sebesar 26 (dua puluh enam) golongan namun sumber daya baik dana maupun SDM yang terbatas, kriteria penanganan PMKS dipersempit menjadi pemberian jaminan sosial kepada menjadi penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia. Indikator kinerja kunci pada urusan wajib sosial, yaitu sebagai berikut:

a. Persentase Penyandang Cacat Baik Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia yang Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Pada tahun 2018, jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial adalah 1.215 (seribu dua ratus lima belas) orang atau sebesar 73,99% (tujuh puluh tiga koma sembilan puluh sembilan persen) dari keseluruhan penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial yaitu sebesar 1.642 (seribu enam ratus empat puluh dua) orang. Capaian tahun 2018 menurun 20% (dua puluh persen) dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 92,68% (sembilan puluh dua koma enam puluh delapan persen), namun demikian, upaya peningkatan pelayanan sosial terus ditingkatkan.

b. Sarana

b. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi

Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi di Daerah pada tahun 2018 adalah 19 (sembilan belas) unit, menurun sebanyak 8 (delapan) unit dari capaian tahun 2017 yang mencapai 27 (dua puluh tujuh) unit.

c. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Jumlah PMKS yang mendapat bantuan di Daerah pada tahun 2018 adalah sejumlah 54.426 (lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh enam) orang dari total penyandang PMKS yaitu 99.240 (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh) orang atau sebesar 54,84% (lima puluh empat koma delapan puluh empat persen). Capaian pada tahun 2018 meningkat sebesar 31,25% (tiga puluh satu koma dua puluh lima persen) dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 41,78% (empat puluh satu koma tujuh puluh delapan persen).

2.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Terdapat 17 (tujuh belas) jenis urusan wajib non pelayanan dasar yaitu sebagai berikut:

1. urusan lingkungan hidup;
2. urusan kepemudaan dan olah raga;
3. urusan penanaman modal;
4. urusan koperasi dan UKM;
5. urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
6. urusan tenaga kerja;
7. urusan pangan;
8. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

9. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana atau KB;
10. urusan perhubungan;
11. urusan komunikasi dan informatika;
12. urusan pertanahan;
13. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
14. urusan budaya;
15. urusan statistik;
16. urusan kearsipan; dan
17. urusan perpustakaan.

1. *Urusan Lingkungan Hidup*

Pada urusan lingkungan hidup, terdapat 4 (empat) indikator yaitu sebagai berikut:

a. Penanganan sampah

Penanganan sampah pada tahun 2018 adalah 256.423,70 (dua ratus lima puluh enam koma empat ratus dua puluh tiga koma tujuh puluh) m³ atau sebesar 88,20% (delapan puluh delapan koma dua puluh persen) dari 290.715,59 (dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima belas koma lima puluh sembilan) m³ sampah yang diproduksi. Capaian pada tahun 2018 meningkat 8% (delapan persen) dari capaian tahun 2013.

b. Kebersihan

Indikator kebersihan diperoleh dari kondisi kebersihan pasar tradisional di Daerah yang memenuhi kriteria Adipura yang capaiannya selalu mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu 2013–2018, artinya 5 (lima) pasar tradisional di Daerah memenuhi kriteria Adipura.

c. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Daya tampung TPS terhadap keseluruhan jumlah penduduk pada tahun 2018 adalah 438,75 (empat ratus tiga puluh delapan koma tujuh puluh

lima)

lima) m³ permil. Kondisi ini menurun 25% (dua puluh lima persen) dari capaian tahun 2017.

d. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan di Daerah sudah berjalan baik dengan capaian rata-rata tahun 2013-2018 adalah 100% (seratus persen). Pada tahun 2018 terdapat 6 (enam) kasus permasalahan lingkungan dan seluruhnya dapat ditangani.

2. *Urusan Kepemudaan dan Olahraga*

Indikator pada urusan kepemudaan dan olah raga adalah sebagai berikut:

a. Gelanggang atau Balai Remaja (selain milik swasta)

Jumlah gelanggang olahraga yang terdapat di Daerah adalah 2 (dua) unit atau sebesar 0,0058% (nol koma nol nol lima puluh delapan persen). Kondisi ini sebenarnya sama setiap tahun dengan jumlah gelanggang atau balai remaja yang ada yaitu 2 (dua) unit, namun yang membedakan adalah peningkatan jumlah penduduk sehingga cakupan pelayanan dari gelanggang atau balai remaja tersebut mengalami penurunan.

b. Lapangan Olahraga

Jumlah lapangan olahraga yang terdapat di Daerah pada tahun 2018 mencapai 252 (dua ratus lima puluh dua) unit atau dengan kata lain cakupan pelayanannya terhadap jumlah penduduk Daerah adalah 0,73% (nol koma tujuh puluh tiga persen), meningkat secara signifikan dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 113,33% (seratus tiga belas koma tiga puluh tiga persen) namun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 menurun sebesar 23% (dua puluh tiga persen).

3. *Urusan Penanaman Modal*

Indikator pada urusan penanaman modal adalah persentase kenaikan atau penurunan nilai realisasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Pada tahun 2018, nilai PMDN mencapai Rp. 2.278.380.956.916,- (dua trilyun dua ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh enam sembilan ratus enam belas rupiah), dengan persentase kenaikan sebesar 280,43% (dua ratus delapan puluh koma empat puluh tiga persen) dibandingkan tahun lalu. Adapun kenaikan pada tahun 2017 mencapai 30,63% (tiga puluh koma enam puluh tiga persen) sehingga dengan kata lain kinerja nilai realisasi PMDN di Daerah tahun 2018 naik signifikan sebesar 815,5% (delapan ratus lima belas koma lima persen).

4. *Urusan Koperasi dan UKM*

a. Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif di Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2018 cenderung fluktuatif dengan capaian tertinggi pada tahun 2018 sebesar 62,23% (enam puluh dua koma dua puluh tiga persen), secara umum meningkat sebesar 6,69% (enam koma enam puluh sembilan persen) dari tahun 2013.

b. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Persentase usaha mikro dan kecil di Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2018 cenderung fluktuatif dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 85,66% (delapan puluh lima koma enam puluh enam persen), secara umum meningkat sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari tahun 2013. Persentase usaha mikro dan kecil tertinggi dicapai pada tahun 2015 sebesar 86,68% (delapan puluh enam koma enam puluh delapan persen) dan

capaian

capaian terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 32,64% (tiga puluh dua koma enam puluh empat persen).

5. *Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*

a. Kepemilikan KTP

Cakupan kepemilikan KTP di Daerah telah mencapai 99,08% (sembilan puluh sembilan koma nol delapan persen) pada tahun 2018, meningkat sebesar 20,59% (dua puluh koma lima puluh sembilan persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 82,16% (delapan puluh dua koma enam belas persen).

b. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 (seribu) penduduk pada tahun 2018 mencapai 513,7 (lima ratus tiga belas koma tujuh). Capaian kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2017 dan 2018 terlihat menurun dikarenakan ada perubahan perhitungan indikator. Pada tahun 2013-2016 perhitungan dilakukan terhadap seluruh kelompok usia, namun pada tahun 2017-2018 perhitungan hanya dilakukan terhadap penduduk dalam kelompok usia 0-18 tahun.

c. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Penerapan KTP nasional di Daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2018 sudah mencapai 100% (seratus persen).

6. *Urusan Tenaga Kerja*

a. Pelayanan Kepersertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja atau Buruh

Persentase pekerja atau buruh yang mendapat kepersertaan jaminan sosial pada tahun 2018 mencapai 98% (sembilan puluh delapan persen), meningkat secara signifikan sebesar 101% (seratus

satu persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 48,56% (empat puluh delapan koma lima puluh enam persen).

b. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan di Daerah terus mengalami peningkatan setiap tahun. Capaian pada tahun 2018 adalah 94,71% (sembilan puluh empat koma tujuh puluh satu persen) meningkat secara signifikan sebesar 214,33% (dua ratus empat belas koma tiga puluh tiga persen) dari capaian tahun 2013 yaitu 30,13% (tiga puluh koma tiga belas persen).

7. *Urusan Pangan*

a. Regulasi Ketahanan Pangan

Pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) regulasi ketahanan pangan yaitu Keputusan Wali Kota Nomor 228 Tahun 2017 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

b. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama pada tahun 2018 mencapai 190.201,77 (seratus sembilan puluh ribu dua ratus satu koma tujuh puluh tujuh) ton, menurun sebesar 9,6% (sembilan koma enam persen) dari capaian tahun 2017. Penurunan produksi tanaman pangan utama ini dikarenakan adanya pengurangan lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi penggunaan lain.

8. *Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

a. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2018 mencapai 15% (lima belas persen). Kondisi ini secara umum meningkat dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 9,57% (sembilan koma

lima puluh tujuh persen) namun lebih rendah dari capaian tahun 2017 sebesar 27,03% (dua puluh tujuh koma nol tiga persen).

b. Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 (lima belas) Tahun ke Atas

Penduduk perempuan berusia 15 (lima belas) tahun ke atas di Daerah sudah melek huruf dengan capaian tahun 2014-2018 sebesar rata-rata 100% (seratus persen) meningkat 0,9% (nol koma sembilan persen) dari capaian tahun 2013.

c. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja di Daerah mengalami peningkatan setiap tahun dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 59,14% (lima puluh sembilan koma empat belas persen). meningkat 73,7% (tujuh puluh tiga koma tujuh persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 34,05% (tiga puluh empat koma nol lima persen).

9. *Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau KB*

a. Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluhan Keluarga Berencana di Setiap Kelurahan

Rasio petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB dan penyuluhan keluarga berencana atau PKB di setiap kelurahan pada tahun 2018 mencapai 173,68 (seratus tujuh puluh tiga koma enam puluh delapan), sama dengan capaian tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017.

b. Prevalensi Peserta KB Aktif

Prevalensi peserta KB aktif di Daerah tahun 2018 sudah mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan pasangan usia subur. Kondisi ini menurun secara umum apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2013 yaitu

78,53%

78,53% (tujuh puluh delapan koma lima puluh tiga persen) dengan tingkat penurunan sebesar 4,4% (empat koma empat persen) namun meningkat sebesar 0,9% (nol koma sembilan persen) dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 74,4% (tujuh puluh empat koma empat persen).

10. *Urusan Perhubungan*

Cakupan pelayanan angkutan darat di Daerah adalah 43,48% (empat puluh tiga koma empat puluh delapan persen) dimana terdapat 2.092 (dua ribu sembilan puluh dua) angkutan darat untuk melayani 4.812 (empat ribu delapan ratus dua belas) orang penumpang angkutan darat. Kondisi ini meningkat sebesar 17,45% (tujuh belas koma empat puluh lima persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 37,02% (tiga puluh tujuh koma nol dua persen).

11. *Urusan Komunikasi dan Informatika*

a. Laman Milik Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sudah memiliki laman resmi yaitu www.sukabumikota.go.id. Laman ini berisi informasi tentang Pemerintah Daerah.

b. Pameran atau *Expo*

Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah mengadakan 16 (enam belas) kali pameran atau *expo*, capaian ini lebih kecil daripada capaian tahun 2017 yaitu sebesar 17 (tujuh belas) kali.

12. *Urusan Pertanahan*

a. Luas Lahan Bersertifikat Milik Pemda

Luas lahan milik Pemerintah Daerah yang sudah memiliki sertifikat adalah 64% (enam puluh empat persen) yaitu seluas 1.553.950 (satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh) m² dari total luas lahan milik pemerintah

seluas

seluas 2.442.301 (dua juta empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus satu) m². Kondisi ini menurun secara umum dengan tingkat penurunan 6,78% (enam koma tujuh puluh delapan persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 68,66% (enam puluh delapan koma enam puluh enam persen) namun meningkat sebesar 6,3% (enam koma tiga persen) dari capaian tahun 2017 sebesar 60,19% (enam puluh koma sembilan belas persen).

b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Persentase penyelesaian kasus tanah negara di Daerah selalu mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu tahun 2013-2018.

c. Penyelesaian Ijin Lokasi

Persentase penyelesaian izin lokasi di Daerah selalu mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu tahun 2013-2018. Artinya setiap permohonan izin lokasi di Daerah selalu terlayani.

13. *Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

a. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK aktif

Persentase PKK aktif di Daerah sudah mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu 2015-2018, meningkat secara umum dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 85,14% (delapan puluh lima koma empat belas persen).

b. Posyandu

Persentase Posyandu aktif di Daerah sudah mencapai 98,78% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh delapan persen) dalam kurun waktu 2013-2018 dengan capaian 100% (seratus persen) Posyandu aktif pada tahun 2013 serta kurun waktu 2015-2018. Persentase Posyandu aktif mengalami penurunan pada tahun 2014 dengan capaian

92,73% (sembilan puluh dua koma tujuh puluh tiga persen).

14. *Urusan Budaya*

a. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Jumlah festival seni dan budaya yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah 10 (sepuluh) kali, meningkat sebesar 11,11% (sebelas koma sebelas persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 9 (sembilan) kali per tahun.

b. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Di Daerah terdapat 31 (tiga puluh satu) sarana penyelenggaraan seni dan budaya, meningkat signifikan sebesar 520% (lima ratus dua puluh persen) secara umum dari capaian tahun 2013 yaitu 5 (lima) buah. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya paling banyak terdapat pada tahun 2015 yaitu 59 (lima puluh sembilan) buah.

c. Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Di Daerah terdapat 12 (dua belas) benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari 18 (delapan belas) benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang ada atau dengan kata lain capaiannya sebesar 67% (enam puluh tujuh persen). Secara umum kondisi ini meningkat 11,66% (sebelas koma enam puluh enam persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 60% (enam puluh persen).

15. *Urusan Statistik*

Terdapat 2 (dua) indikator kunci dalam pelaksanaan urusan statistik yaitu adanya Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota. Setiap tahun, BPS menerbitkan Buku Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kota.

16. *Urusan Kearsipan*

a. Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku

Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku dengan kata lain capaiannya sudah 100% (seratus persen). Penerapan pengelolaan arsip secara baku meningkat setiap tahun dengan persentase peningkatan 233,33% (dua ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) dari capaian tahun 2013 yaitu 30% (tiga puluh persen).

b. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan

Jumlah kegiatan peningkatan sumber daya manusia atau SDM pengelola kearsipan yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah 6 (enam) kali, meningkat 500% (lima ratus persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 1 (satu) kali.

17. *Urusan Perpustakaan*

a. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan pada tahun 2018 mencapai 93,36% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh enam persen) meningkat 118,89% (seratus delapan belas koma delapan puluh sembilan persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 42,65% (empat puluh dua koma enam puluh lima persen).

b. Pengunjung Perpustakaan

Persentase pengunjung perpustakaan Daerah pada tahun 2018 mencapai 98,82% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh dua persen) meningkat 154,75% (seratus lima puluh empat koma tujuh puluh lima persen) dari capaian tahun

2013 yaitu sebesar 37,79% (tiga puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan persen)

2.3.1.3. Urusan Pilihan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Daerah melaksanakan 6 (enam) urusan pilihan yaitu Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan di Daerah tahun 2018 adalah sebesar 85,42% (delapan puluh lima koma empat puluh dua persen) menurun sebesar 1,94% (satu koma sembilan puluh empat persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 87,36% (delapan puluh tujuh koma tiga puluh enam persen).

b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan di Daerah sudah mencapai 160,42% (seratus enam puluh koma empat puluh dua persen) meningkat 105,66% (seratus lima koma enam puluh enam persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen).

2. Urusan Pilihan Pertanian

a. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar

Produktivitas

Produktivitas padi di Daerah mencapai 7,03 (tujuh koma nol tiga) ton/ha pada tahun 2018. Capaian produktivitas padi di Daerah sangat fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2013-2018 dikarenakan besarnya pengaruh dari dampak perubahan iklim atau DPI. Secara umum provitas tanaman padi meningkat 8,8% (delapan koma delapan persen) dari capaian provitas padi tahun 2013 yaitu 6,46 (enam koma enam puluh empat) ton/ha. Capaian provitas tanaman padi tertinggi dicapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,69 (tujuh koma enam puluh sembilan) ton/ha

b. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Kontribusi pertanian terhadap PDRB juga terus menurun dalam kurun waktu tahun 2013-2018 walaupun sempat meningkat pada tahun 2015. Hal ini disebabkan perhitungan kontribusi pertanian terhadap PDRB dilihat dari sektor *on farm* dimana produksi pertanian cenderung menurun sejalan dengan berkurangnya luas lahan pertanian. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2018 mencapai 3,59% (tiga koma lima puluh sembilan persen). Capaian tersebut walau hampir sama dengan capaian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2013 yaitu sebesar 3,6% (tiga koma enam persen) namun menurun sebesar 6% (enam persen) dari capaian tahun 2017 yaitu sebesar 3,82% (tiga koma delapan puluh dua persen).

3. *Urusan Pariwisata*

a. Kunjungan Wisatawan

Kunjungan wisatawan di Daerah pada tahun 2018 mencapai 188.928 (seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan) orang, pencapaian ini secara umum meningkat

sebesar

sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari kunjungan wisatawan tahun 2013 sebesar 141.000 (seratus empat puluh satu ribu) orang. Namun demikian jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 menurun sebesar 23.785 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima) orang atau sebesar 11,18% (sebelas koma delapan belas persen) dari jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017 sebesar 212.713 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga belas) orang. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Daerah didorong dengan peningkatan akses transportasi dengan beroperasinya kembali moda transportasi kereta api .

b. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam kurun waktu 2015-2018 dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 2,90%.

4. *Urusan Perindustrian*

a. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Daerah cenderung mengalami penurunan dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 5,11% (lima koma sebelas persen) menurun sebesar 6,7% (enam koma tujuh persen) dari capaian tahun 2013 sebesar 5,48% (lima koma empat puluh delapan persen). Menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB Daerah sejalan dengan turunnya pertumbuhan industri di Daerah.

b. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri di Daerah cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2013-2018 dengan capaian tahun 2018 adalah 1,58% (satu koma lima puluh delapan persen) menurun sebesar 73% (tujuh puluh tiga persen)

dari

dari pertumbuhan industri tahun 2013 yaitu sebesar 5,98% (lima koma sembilan puluh delapan persen).

5. *Urusan Perdagangan*

a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Daerah terus menurun dalam kurun waktu tahun 2013-2018 dengan capaian tahun 2018 sebesar 39,09% (tiga puluh sembilan koma nol sembilan persen) menurun 14% (empat belas persen) dari capaian tahun 2013 yaitu sebesar 45,7% (empat puluh lima koma tujuh persen).

b. Ekspor Bersih Perdagangan

Perkembangan sektor perdagangan mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat yang dapat dilihat dari indikator nilai ekspor bersih perdagangan dalam US \$.

6. *Urusan Transmigrasi*

Persentase transmigran swakarsa atau peserta transmigrasi dengan keinginan sendiri selalu mencapai 100% (seratus persen) dalam kurun waktu tahun 2013-2018.

Capaian indikator kinerja kunci Daerah tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah Tahun 2013-2018

No	IKK	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1. Urusan Wajib Pendidikan							
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); %	55,36	82,49	62,94	80,02	67,72	63,4
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara); %	99,74	99,76	100	100	100	99,61
3	APM(APM) SD/MI/Paket A; %	94,33	84,75	76,07	96,38	96,75	99,4
4	APM(APM) SMP/MTs/Paket B; %	81,06	71,29	70,63	96,13	96,5	96,4
5	APM(APM) SMA/SMK/MA/Paket C; %	100,77	73,89	62,34	97,85		
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI; %	0	0	0	0,01	0,003	0
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs; %	0,29	0,23	0,02	0,13	0,07	0
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA; %	0,72	0,16	0,2	0,04		
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI; %	100	100	100,00	100	100	100
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs; %	99,98	100	100	100	100	100
11	Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA; %	100	100	99,70	100		
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs; %	111,57	109,82	107,57	115,37	112,4	110,2
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA; %	121,13	121,43	131,48	134,37	N/A	N/A
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV; %	82,96	27,63	88,57	90,53	92	93

No	IKK	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
2. Urusan Wajib Kesehatan							
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; %	100	98,63	95,98	97,25	96,13	100
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; %	92,14	93,65	98,3	98,97	96,84	97,9
3	Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI); %	75,76	96,97	100	93,94	100	96,97
4	Cakupan BALITA gizi buruk mendapat perawatan; %	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA; %	91,15	85,25	92,04	100	116,1	144,82
6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; %	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; %	100	73,43	95,14	69,02	103,3	100
8	Cakupan kunjungan bayi; %	71,86	92,18	96,95	93,99	97,43	97,83
3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							
1	Panjang jalan kota dalam kondisi baik; %	64,16	93,93	98,23	81,94	79,25	84,06
2	Rumah tangga bersanitasi; %	95,87	69,71	86,94	89,84	92,78	84,57
3	Kawasan kumuh; %	26,87	2,79	2,87	2,84	2,04	1,89
4	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB; %	2,93	79,87	23	31,7	32	31,77
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman							
1	Rumah tangga pengguna air bersih; %	94,16	92,64	84,2	85,97	94,21	86,39
2	Lingkungan pemukiman kumuh; %	26,87	2,79	2,87	2,84	2,04	1,89

No	IKK	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Rumah layak huni; %	93,21	95,51	95,51	95,98	95,98	97,04
5. Urusan Sosial							
1	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial; %		1,52	5,08	17,1	92,68	73,99
2	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi; buah	18	19	19	27	27	19
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial; %	11,14					
4	PMKS yang memperoleh bantuan sosial; %	148,17	16,18	36,99	59,03	41,78	54,84
B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
1. Urusan Lingkungan Hidup							
1	Penanganan sampah; %	81,61	84,52	83,65	81,86	84,04	88,20
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal; %	36,76					
3	Kebersihan; %		50	100	100	100	100
4	Tempat pembuangan sampah atau TPS per satuan penduduk; TPS/mil	2,18	0,12	3,73	592,79	584,19	438,75
5	Penegakan hukum lingkungan ; %	100	100	100	100	100	100
2. Urusan Kepemudaan dan Olah raga							
1	Gelanggang atau balai remaja (selain milik swasta); permil	0,0056	0	0,006	0,006	0,006	0,0058
2	Lapangan olahraga; permil	0,3904	32,28	0,15	0,21	0,29	0,73

No	IKK	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
3. Urusan Penanaman Modal							
1	Kenaikan atau penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah); %	11,4	85,14	182,39	-66, 24	30,63	280,43
4. Urusan Koperasi dan UKM							
1	Koperasi aktif ; %	57,39	61,38	44,56	60,71	61,15	61,23
2	Usaha mikro dan kecil; %	81,92	32,64	86,68	85,43	85,53	85,66
5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil							
1	Kepemilikan KTP; %	82,16	89,93	92,72	94,46	91,12	99,08
2	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk; %	922,9	923,00	922,57	925,27	504,24	513,7
3	Penerapan KTP nasional berbasis NIK; %	100	100	100	100	100	100
6. Urusan Tenaga Kerja							
1	Pelayanan kepersertaan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh;%		48,56	48,59	54,5	49,88	98
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja; %	66,41					
3	Pencari kerja yang ditempatkan; %	30,13	80,01	81,02	86,02	89,39	94,71
7. Urusan Pangan							
1	Regulasi ketahanan pangan; buah	5	Ada	Ada	Ada	1	1
2	Ketersediaan pangan utama; ton	239.265,27	382,29	237.707,26	210.505,96	210.517,8	190.201,77
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah; %	9,57	15,42	17,95	27,03	27,03	15
2	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas; %	99,09	100	100	100	100	100

No	IKK	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan; %	34,05	35,56	59,36	35,82	34,52	59,14
9. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB							
1	Rasio petugas lapangan KB atau PLKB dan penyuluhan KB atau PKB di setiap kelurahan; %		1,83	1,74	0,94	173,68	173,68
2	Prevalensi peserta KB aktif; %	78,53	72,6	73,57	73,2	74,4	75
3	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I; %	23,03					
10. Urusan Perhubungan							
1	Angkutan darat; %	37,02	2,27	48,93	31,82	43,48	43,48
11. Urusan Komunikasi dan Informatika							
1	Web site milik pemerintah daerah; ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Pameran atau <i>expo</i> ; kali	2	4	21	16	17	16
12. Urusan Pertanahan							
1	Luas lahan bersertifikat milik Pemda; %	68,66	57,59	57,23	56,54	60,19	64
2	Penyelesaian kasus tanah negara; %	100	100	100	100	100	100
3	Penyelesaian ijin lokasi; %	100	100	100	100	100	100
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa							
1	PKK aktif; %	85,14	88,72	100	100	100	100
2	Posyandu; %	100	92,73	100	100	100	100
14. Urusan Budaya							
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya; kali	9	5	7	6	10	10

No	IKK	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya; buah	5	2	59	51	31	31
3	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; %	60	0	100	100	67	67
15. Urusan Statistik							
1	Buku "Kota dalam angka"; ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB Kota"; ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
16. Urusan Kearsipan							
1	Penerapan pengelolaan arsip secara baku; %	30	84,38	100	87,5	87,88	100
2	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan; kali	1	1	2	4	6	6
17. Urusan Perpustakaan							
1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah; %	42,65	20,94	20,94	94,85	94,84	93,36
2	Pengunjung perpustakaan; %	38,79	34,72	55,39	95,6	92,21	98,82
C. URUSAN PILIHAN							
1. Urusan Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi perikanan; %	87,36	102,01	102,63	103,81	85,21	85,42
2	Konsumsi ikan; %	78	100	97,16	100,79	164,32	160,42
2. Urusan Pertanian							
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar; ton/ha	6,46	6,41	7,47	7,69	6,12	7,03
2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB; %	3,6	3,25	4,00	3,94	3,82	3,59

No	IKK	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
3. Urusan Pariwisata							
1	Kunjungan wisatawan; orang	141.000	86.431	127.235	116.790	212.713	188.928
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB; %	0,1	47,7979	2,7181	2,7693	2,84	2,90
4. Urusan Industri							
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB; %	5,48	5,1362	5,4212	5,1973	5,14	5,11
2	Pertumbuhan Industri ; %	5,98	2,3695	1,886	2,0194	2,02	1,58
5. Urusan Perdagangan							
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB; %	45,7	42,97	41,109	40,0577	39,41	39,09
2	Ekspor Bersih Perdagangan; US\$	(227.363.676)	(1.536.953)	(978.765.2700)	(190.888.9300)	1.298.244	1.965.131
6. Urusan Transmigrasi							
1	Transmigran swakarsa ; %	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, Setda Kota Sukabumi

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku atau ADHB dan Atas Dasar Harga Konstan atau ADHK. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, untuk mengetahui struktur perekonomian, untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan, dan untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

PDRB ADHB Daerah terus menunjukkan pertumbuhan, pada tahun 2012 PDRB ADHB Daerah masih berada pada angka Rp.7.300.000.000.000,- (tujuh trilyun tiga ratus milyar rupiah) dan terus meningkat hingga menjadi Rp. 10.500.000.000.000,- (sepuluh trilyun lima ratus milyar rupiah) pada tahun 2017. Perkembangan PDRB ADHB Daerah Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Perkembangan PDRB ADHB Daerah Tahun 2013-2017

No	Tahun	PDRB ADHB (dalam jutaan rupiah)
1	2013	7.309.646,73
2	2014	8.140.751,03
3	2015	8.971.328,27
4	2016	9.718.975,96
5	2017	10.555.670,15

Sumber: BPS Kota Sukabumi 2018

Dilihat dari segi kewilayahan, Daerah saat ini masih memiliki potensi di wilayah-wilayah pengembangan yang dapat difungsikan sebagai sentra-sentra pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam

peningkatan

peningkatan industri, pelayanan jasa, dan perdagangan komoditas pertanian guna mewujudkan kemandirian pangan. Potensi yang terdapat pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan menunjukkan semakin besarnya peluang untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis terpadu, mulai dari budidaya, agroindustri, dan pengembangan pemasarannya, sejalan dengan perkembangan penduduk dan perkembangan kota.

Potensi sektor industri di Daerah secara umum belum banyak memberikan kontribusi pada perekonomian Daerah. Namun dalam hal penyerapan tenaga kerja, tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor ini cukup penting dan masih bisa ditingkatkan. Selain perusahaan industri besar dan sedang yang secara reguler paling banyak menyerap tenaga kerja yang antara lain adalah industri tekstil dan pakaian jadi, serta berbagai jenis industri menengah dan kecil, akhir-akhir ini telah muncul kelompok baru yang dikenal dengan sektor industri kreatif yang dapat menjadi alternatif dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan di Daerah ke depan.

Pada sektor industri menengah, kecil, dan mikro nonformal sebagaimana pada umumnya di berbagai daerah, membutuhkan pembenahan dan pengelolaan yang serius. Mengingat peran sektor ini makin meningkat dari sisi jumlah maupun volume usaha, di samping sebagai alternatif penyerapan tenaga kerja yang dapat diandalkan pada saat aktivitas sektor formal melemah.

Potensi yang cukup besar ada di sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang menjadi kontributor utama pada tahun 2016. Pengembangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran akan berdampak pada perkembangan sektor pariwisata, karena merupakan sektor pendukungnya. Peluang pengembangan sektor pariwisata ke depan akan semakin besar sejalan dengan perkembangan kota dan rencana pengembangan jaringan jalan, antara lain rencana pembangunan jalan tol Ciawi-Padalarang yang melintasi Wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

Potensi lainnya adalah di sektor perdagangan nonformal, yang terdiri atas Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kelompok usaha atau jasa

lainnya

lainnya, mencakup pedagang keliling, warung makanan atau sembako, dan jasa layanan publik. Sektor ini menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan telah terbukti tahan terhadap guncangan krisis.

Sementara itu, sektor yang mengalami laju pertumbuhan negatif adalah pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, terutama pada subsektor tanaman bahan makanan. Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh negatif. Dengan demikian, fokus pembangunan ekonomi Daerah, seyogyanya diarahkan pada sektor-sektor jasa yang telah disebutkan sebelumnya, tanpa mengabaikan sektor-sektor lainnya sebagai penunjang.

Dilihat dari basis ekonomi atau *economic base*, Daerah memiliki sejumlah sektor basis, yaitu sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa keuangan, dan sektor jasa-jasa lainnya. Hal ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi terhadap setiap sektor, dan memilih sektor mana di Daerah yang akan dijadikan sektor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonominya.

Struktur ekonomi yang ditunjukkan dari PDRB Daerah pada tahun 2016, didominasi oleh sektor tersier dengan persentase mencapai 84,03% (delapan puluh empat koma nol tiga persen). Sedangkan sektor primer dan sekunder masing-masing memberikan kontribusi sebesar 3,82% (tiga koma delapan puluh dua persen) dan 12,15% (dua belas koma lima belas persen). Hal tersebut mengindikasikan bahwa corak perekonomian yang ada di Daerah lebih mengarah pada sektor jasa dan perdagangan besar. Kontribusi sektor tersier yang begitu besar disumbangkan oleh sektor perdagangan besar 39,41% (tiga puluh sembilan koma empat puluh satu persen)), sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,71% (sepuluh koma tujuh puluh satu persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,67% (sepuluh koma enam puluh tujuh persen). Struktur ekonomi Daerah menurut kelompok sektor atas dasar harga berlaku tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.23.

Tabel

Tabel 2.23
Struktur Ekonomi Daerah Menurut Kelompok Sektor Atas Dasar
Harga Berlaku Tahun 2012–2016 (Persen)

No	Kelompok Sektor	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Sektor Primer	4,06	4,00	3,93	3,82	3,59
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,06	4,00	3,93	3,82	3,59
	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sektor Sekunder	12,05	11,15	12,13	12,19	12,23
	Industri Pengolahan	5,58	5,42	5,23	5,19	5,11
	Pengadaan Listrik dan Gas	0,17	0,18	0,19	0,21	0,22
	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,14	0,13	0,12	0,13	0,13
	Konstruksi	6,16	6,51	6,61	6,66	6,77
3	Sektor Tersier	83,89	84,85	83,94	84,00	84,18
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	41,81	41,11	40,03	39,39	39,09
	Transportasi dan Pergudangan	9,31	9,82	10,60	10,70	10,60
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,54	2,72	2,77	2,84	2,90
	Informasi & Komunikasi	3,52	3,60	3,58	3,72	3,85
	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,17	9,94	10,29	10,66	10,93
	Real Estate	1,12	1,11	1,12	1,11	1,12
	Jasa Perusahaan	1,54	1,65	1,66	1,68	1,70
	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,25	5,83	5,71	5,50	5,24
	Jasa Pendidikan	3,38	3,63	3,77	3,82	3,99
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,53	1,63	1,68	1,73	1,77
	Jasa Lainnya	2,73	2,71	2,72	2,85	2,99

Sumber : BPS Kota Sukabumi (2017)

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Selain itu, sejak tahun 2012 terdapat pola penurunan kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Daerah dari rata-rata 4% (empat persen) menjadi hanya sekitar 3% (tiga persen). Sedangkan kontribusi sektor primer dan sektor sekunder mengalami

fluktuasi

fluktuasi dari tahun ke tahun. Penurunan kontribusi sektor primer pada perekonomian Daerah sepenuhnya disumbangkan oleh penurunan persentase sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada sektor sekunder, yang mengalami penurunan secara persisten sejak tahun 2012 adalah sektor industri pengolahan dari awalnya sebesar 5,79% (lima koma tujuh puluh sembilan persen) pada tahun 2012 menjadi sebesar 5,14% (lima koma empat belas persen) pada tahun 2016. Pada sektor tersier, sektor yang secara signifikan mengalami penurunan adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. Pada tahun 2012, sektor tersebut memberikan kontribusi di atas 41% (empat puluh satu persen), namun pada tahun-tahun setelahnya terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2016 hanya mencapai sekitar 39% (tiga puluh sembilan persen). Walaupun sektor tersebut merupakan sektor dengan kontribusi terbesar di Daerah namun kontribusinya dari tahun ke tahun terus menurun.

Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan secara persisten sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 adalah sektor konstruksi dari 5,99% (lima koma sembilan puluh sembilan persen) pada tahun 2012 menjadi 6,67% (enam koma enam puluh tujuh persen) pada tahun 2016, sektor transportasi dan pergudangan dari 8,50% (delapan koma lima puluh persen) pada tahun 2012 menjadi 10,71% (sepuluh koma tujuh puluh satu persen) pada tahun 2016, dan sektor jasa perusahaan dari 1,49% (satu koma empat puluh sembilan persen) pada tahun 2012 menjadi 1,68% (satu koma enam puluh delapan persen) pada tahun 2016.

Pada tahun 2017, sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi ditempati oleh sektor informasi dan komunikasi dengan laju pertumbuhan 12,41% (dua belas koma empat puluh satu persen), diikuti oleh sektor jasa lainnya sebesar 8,69% (delapan koma enam puluh sembilan persen), dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,13% (sembilan koma tiga belas persen). Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan sektor tersier jauh mengungguli sektor primer dan sekunder. Pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah sektor yang terus mengalami pelambatan pada empat tahun terakhir. Pertumbuhan masing-masing lapangan usaha

di Daerah pada kurun waktu tahun 2015-2016 disajikan pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Daerah Tahun 2013-2016

NO	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,49	4,66	1,90	0,38	-0,98
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	3,70	3,93	2,71	3,77	4,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,27	3,76	2,98	7,50	4,76
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,14	-1,03	1,91	3,62	3,10
6	Konstruksi	7,89	9,80	5,82	6,88	7,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,01	5,65	3,73	4,44	4,70
8	Transportasi dan Pergudangan	4,33	3,65	7,49	6,46	4,75
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,67	8,77	7,87	7,45	7,28
10	Informasi dan Komunikasi	7,45	11,67	10,13	12,41	10,35
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,47	2,63	7,59	8,42	6,56
12	Real Estate	2,06	5,23	5,58	6,44	7,99
13	Jasa Perusahaan	7,05	8,18	7,70	7,61	7,88
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-3,70	-3,52	1,21	1,37	0,20
15	Jasa Pendidikan	7,30	10,76	8,43	7,44	8,73

NO	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,70	13,63	11,25	9,13	8,74
17	Jasa Lainnya	4,88	6,50	7,30	8,69	9,88
PDRB ADHK (%)		5,41	5,43	5,13	5,66	5,43

Sumber : BPS Kota Sukabumi (2017)

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

Salah satu aspek dalam tata kelola perkotaan adalah *Infrastructure and Service Management* atau Infrastruktur dan Pengelolaan Pelayanan. Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perkotaan karena infrastruktur adalah suatu sarana yang mendukung perkembangan suatu kota, baik perkembangan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pengertian infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sedangkan pengertian penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. Salah satu manfaat infrastruktur adalah untuk meningkatkan perekonomian suatu kota. Kota yang memiliki potensi ekonomi dapat dikembangkan dengan pembangunan infrastruktur agar ekonomi daerah tersebut berkembang.

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin

meningkatnya

meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Salah satu indikator keberhasilan sektor perhubungan adalah dengan tersedianya fasilitas jalan. Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah. Semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian di perkotaan. Menurut statusnya jalan terbagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu jalan negara, jalan propinsi, dan jalan kabupaten/kota. Panjang jalan negara di Daerah pada tahun 2017 mencapai 8,50 (delapan koma lima puluh) km dengan kondisi baik sepanjang 7,00 (tujuh koma nol nol) km. Panjang jalan propinsi mencapai 33,55 (tiga puluh tiga koma lima puluh lima) km dengan kondisi baik sepanjang 26,33 (dua puluh enam koma tiga puluh tiga) km. Sementara itu panjang jalan kota mencapai 185,16 (seratus delapan puluh lima koma enam belas) km dengan rincian: sepanjang 129,25 km (seratus dua puluh sembilan koma dua puluh lima) memiliki kondisi jalan baik, sepanjang 48,29 (empat puluh delapan koma dua puluh sembilan) km memiliki kondisi jalan sedang, dan sepanjang 3,91 (tiga koma sembilan puluh satu) km memiliki kondisi jalan rusak.

Pelayanan transportasi umum masyarakat Daerah dilaksanakan melalui perusahaan angkutan dalam kota dan luar kota. Pada tahun 2017, tercatat ada 19 (sembilan belas) tujuan perjalanan bus yang diberangkatkan dari Terminal Bus Sukabumi. Tujuan yang paling banyak diminati oleh penduduk Daerah adalah Bandung. Pada tahun tersebut, tercatat ada 276.888 (dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan) penumpang yang diberangkatkan menuju Bandung. Rute lain yang cukup padat adalah Kota Sukabumi–Kampung Rambutan. Jumlah penumpang yang diberangkatkan menuju Kampung Rambutan tercatat sebanyak 30.070 (tiga puluh ribu tujuh puluh) orang.

Kereta api merupakan sarana transportasi yang relatif murah bagi masyarakat Daerah. Tanggal 15 Desember 2008 jalur tersebut mulai dibuka kembali dengan rute Sukabumi-Bogor dan rute Sukabumi-Cianjur. Pada tahun 2017, jumlah penumpang yang diangkut sebanyak 591.826 (lima ratus sembilan puluh satu delapan ratus dua puluh enam) orang dengan jumlah pendapatan PT. Kereta Api Stasiun Sukabumi mencapai Rp. 7.790.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Terus membaiknya perekonomian, baik domestik maupun global, serta positifnya prospek perekonomian daerah ke depan, mendorong semakin besarnya peluang investasi yang dapat masuk ke Daerah, namun demikian peluang tersebut harus didukung pula oleh penciptaan situasi dan kondisi Daerah yang kondusif bagi investasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi merupakan kondisi yang sifatnya multidimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor untuk berinvestasi. Beberapa faktor pendorong iklim berinvestasi tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Iklim Berinvestasi di Daerah Tahun 2013-2018

No	Indikator/Satuan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pelanggaran Perda (kali)	633	2914	1281	2126	1488	1720
2	Penyelesaian Pelanggaran Perda (persen)	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah Demo/Unjuk Rasa (aksi)	27	20	31	42	47	31
4	Pajak Daerah (Milyar Rp.)	21,156	28,399	29,688	41,565	43,365	55,741
5	Retribusi Daerah (Milyar Rp.)	9,926	10,889	10,975	8,795	8,795	8,331

No	Indikator/Satuan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
6	Jumlah Jenis Pajak Daerah (buah)	9	9	9	9	9	9
7	Jumlah Jenis Retribusi Daerah (buah)	12	12	12	11	11	12
8	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah)	2	2	3	6	7	8
9	Jumlah Layanan Perizinan (buah)	32 Perizinan dan 6 non perizinan	32 Perizinan dan 6 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	38 perizinan dan 3 non perizinan
10	Jumlah SOP terkait Pemberian Layanan Perizinan (buah)	32 Perizinan dan 6 non perizinan	32 Perizinan dan 6 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	42 perizinan dan 3 non perizinan	38 perizinan dan 3 non perizinan

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019

Ketentraman, ketertiban, dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada. Pada kurun waktu tahun 2013-2018 terdapat rata-rata 1.694 (seribu enam ratus sembilan puluh empat) kasus pelanggaran perda namun seluruhnya dapat ditangani dengan persentase penanganan sebesar 100% (seratus persen). Selain pelanggaran Perda, kejadian lain yang berpotensi dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban adalah adanya aksi demo atau unjuk rasa. Jumlah unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2018 adalah 31 (tiga puluh satu) aksi, meningkat sebesar 14% (empat belas persen) dari jumlah demo atau unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2013 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) aksi namun menurun sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari jumlah demo atau unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 47 (empat puluh tujuh) aksi.

Iklm investasi di Daerah dapat juga dilihat dari jenis serta penerimaan pajak dan retribusi daerah. Dalam kurun waktu tahun 2013-2018 terdapat 9 (sembilan) jenis pajak daerah. Jumlah penerimaan dari 9 (sembilan) pajak daerah tersebut terus mengalami peningkatan dengan capaian penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 sebesar Rp. 55.741.000.000,- (lima puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah), meningkat 163% (seratus enam puluh tiga persen) dari penerimaan pajak daerah tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 21.156.000.000,- (dua puluh satu milyar seratus lima puluh enam juta rupiah). Adapun jenis retribusi daerah yang ada di Daerah ada 12 (dua belas) jenis dengan jumlah penerimaan retribusi dalam kurun waktu tahun 2013-2018 fluktuatif dan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah penerimaan retribusi daerah pada tahun 2018 adalah Rp. 8.331.000.000,- (delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah), menurun sebesar 16% (enam belas persen) dari penerimaan retribusi daerah tahun 2013 yaitu Rp. 9.926.000.000,- (sembilan milyar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah).

Rasa aman dan kemudahan regulasi menjadi faktor yang menentukan dan mempengaruhi iklim berinvestasi. Jumlah Perda yang mendukung investasi pada tahun 2018 terdapat 8 (delapan) buah perda, meningkat 300% (tiga ratus persen) dari jumlah Perda yang mendukung iklim investasi pada tahun 2013 sebanyak 2 (dua) buah. Selain itu, dengan adanya Keputusan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah dimana Pelayanan Perizinan tersebut meliputi izin gangguan atau HO, izin usaha jasa kontruksi atau IUJK, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin tanda daftar industri atau TDI, izin usaha industri atau IUI, izin reklame, dan izin pengambilan air bawah tanah. Jumlah layanan perizinan yang ada pada tahun 2018 adalah 38 (tiga puluh delapan) layanan perizinan dan 3 (tiga) layanan non perizinan, yang masing-masing sudah dilengkapi dengan standar operasional prosedur atau SOP terkait pemberian layanan perizinan dengan jumlah pada tahun 2018 adalah 38 (tiga puluh delapan) SOP terkait

pemberian

pemberian layanan perizinan dan 3 (tiga) SOP terkait pemberian layanan non perizinan.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia atau SDM yang unggul merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan daya saing daerah sehingga fokus kepada kualitas SDM merupakan hal penting dalam pembangunan daerah. Salah satu indikator untuk melihat kondisi SDM adalah rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan atau *dependency ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 (enam puluh lima) tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk di Daerah Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26
Rasio Ketergantungan Penduduk di Daerah
Tahun 2013-2017

NO	TAHUN	NILAI RASIO KETERGANTUNGAN
1	2013	35,68
2	2014	35,23
3	2015	47,62
4	2016	47,63
5	2017	46,89

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS, 2014-2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan penduduk di Daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2015-2016 dimana rasio ketergantungan penduduk mencapai 47,63 (empat puluh tujuh koma enam puluh tiga). Pada tahun 2017, rasio

ketergantungan

ketergantungan penduduk menurun menjadi 46,89 (empat puluh enam koma delapan puluh sembilan).

2.5. ASPEK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) jenis sebagaimana disajikan pada Tabel 2.27 berikut.

Tabel 2.27
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perkiraan Realisasi 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
SPM PENDIDIKAN				
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	100%	DISDIKBUD
2.	Pendidikan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	100%	DISDIKBUD
3.	Pendidikan Kesetaraan	Program Pendidikan Non Formal	100%	DISDIKBUD
SPM KESEHATAN				
4.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	100%	Dinas Kesehatan
5.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	100%	Dinas Kesehatan
6.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	100%	Dinas Kesehatan
7.	Pelayanan kesehatan balita	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	100%	Dinas Kesehatan
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	Dinas Kesehatan
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	100%	Dinas Kesehatan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perkiraan Realisasi 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
10.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	100%	Dinas Kesehatan
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	100%	Dinas Kesehatan
12.	Pelayanan kesehatan diabetes melitus	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	100%	Dinas Kesehatan
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	100%	Dinas Kesehatan
14.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	100%	Dinas Kesehatan
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	100%	Dinas Kesehatan
SPM PEKERJAAN UMUM				
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	68.77%	DPUPRPKP2
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	87.57%	DPUPRPKP2
SPM PERUMAHAN RAKYAT				
18.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota/kabupaten	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	100%	BPBD

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perkiraan Realisasi 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
19.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	100%	DPUPRPKP2
SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
20.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	100%	DINAS SATPOL PP
21.	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100%	BPBD
22.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100%	BPBD
23.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100%	BPBD
24.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya KEbakaran	100%	BPBD
SPM SOSIAL				
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	60%	Dinas Sosial
26.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	55%	Dinas Sosial
27.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	55%	Dinas Sosial

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Perkiraan Realisasi 2019	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
28.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	55%	Dinas Sosial
29.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	Dinas Sosial

Sumber : Bappeda Kota Sukabumi diolah, 2019

2.6. ASPEK KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH ATAU BUMD

Dalam era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah Daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Dalam aspek ekonomi, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu BUMD. Pada hakikatnya BUMD mempunyai peran yang strategis dalam era otonomi daerah saat ini. Daerah memiliki 3 (tiga) BUMD yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi;
2. PD BPR Kota Sukabumi; dan
3. PD Waluya.

2.6.1. PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan suatu perusahaan yang berdiri sendiri dan berbentuk badan hukum, terlepas dari administrasi anggaran umum Pemerintah Daerah. Fungsi PDAM Tirta Bumi Wibawa adalah sebagai penyedia air bersih atau air minum untuk masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut kegiatan perusahaan meliputi:

1. pelayanan air bersih atau air minum melalui perpipaan beserta perangkatnya;
2. pelayanan air bersih atau air minum melalui non perpipaan; dan
3. usaha lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja pendapatan serta perhitungan laba rugi PDAM Tirta Bumi Wibawa tahun 2013-2017 disajikan masing-masing pada Tabel 2.28 dan Tabel 2.29.

Tabel 2.28
Kinerja Pendapatan PDAM Tirta Bumi Wibawa Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendapatan Operasional						
	a. Pendapatan Air (dalam juta)	17.81 5,4	17.94 6,7	18.64 1,3	19.40 4,7	19.35 5,2	22.22 0,5
	b. Pendapatan Non Air	1.899, 8	2.010, 5	1.457, 2	1.308, 4	1.120, 5	1.931, 4
	<i>Jumlah</i>	<i>19.71</i> <i>5,2</i>	<i>19.95</i> <i>7,3</i>	<i>20.09</i> <i>8,5</i>	<i>20.71</i> <i>3,1</i>	<i>20.47</i> <i>5,8</i>	<i>24.15</i> <i>1,9</i>
2	Pendapatan Non - Operasional						
	(Bunga Deposito, Jasa Giro, Jasa Sewa Rumah Dinas, Piutang Rekening Air, Rupa-rupa dan Pendapatan Diluar Usaha Lainnya)	162,5	361,9	225,2	274,9	158,9	1.290, 6
	Jumlah Total	19.87 7,8	20.31 9,3	20.32 3,8	20.98 8,1	20.63 4,7	2.096 ,2

Sumber : PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

Tabel 2.29
Perhitungan Laba Rugi PDAM Tirta Bumi Wibawa Tahun 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendapatan Usaha	19.71 5,2	19.95 7,3	20.09 8,5	20.71 3,1	20.47 5,8	24.15 1,9
2	Beban Langsung Usaha	5.532 ,8	5.783 ,8	6.857 ,3	6.110 ,5	5.993 ,4	6.749 ,7
	Labar/Rugi Kotor Usaha	14.18 2,3	14.17 3,5	13.24 1,2	14.60 2,6	14.48 2,2	17.40 2,2
3	Beban Tidak Langsung Usaha	13.76 8,2	13.82 8,6	12.09 5,3	13.62 5,6	12.57 3,8	16.77 2,1
	Labar/Rugi Usaha	414,1	344,8	1.145 ,8	976,9	1.908 ,4	630,1
4	Pendapatan/Beban di Luar Usaha	155,9	314,3	213,6	223,4	152,6	134,7
	Labar/Rugi Sebelum Pajak	570,1	659,2	1.359 ,5	1.200 ,4	2.061 ,1	764,8
5	Pajak PPH 29	-	-	180.0 9	-	-	-
	Labar/Rugi Bersih	570,1	659,2	1.179 ,4	1.200 ,4	2.061 ,1	764,8

Sumber : PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi

Dalam

Dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

1. PDAM Tirta Bumi Wibawa belum dapat memenuhi kepastian mengenai kualitas dan kontinuitas kepada pelanggan;
2. tingkat kehilangan air masih tinggi sebesar 44,40% (empat puluh empat koma empat puluh persen); dan
3. keterbatasan dana untuk meningkatkan kinerja aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam menghadapi permasalahan dalam pemberian pelayanan, Direktur PDAM Tirta Bumi Wibawa tetap berupaya melakukan peningkatan kinerja PDAM Tirta Bumi Wibawa melalui beberapa upaya sebagai berikut:

1. upaya untuk memenuhi aspek kualitas dan kontinuitas air yaitu dengan meningkatkan kompetensi SDM dan fasilitas pengujian laboratorium secara bertahap dalam mendukung kualitas air yang didistribusikan sesuai ketentuan serta meningkatkan kapasitas debit air, memperbaiki fasilitas jaringan, dan perpompaan, memperbaiki bocoran pipa pada jaringan transmisi dan distribusi;
2. melakukan efektivitas produksi dengan pengadaan dan pemasangan meter induk produksi serta melakukan rehabilitasi jaringan pipa transmisi dan distribusi; dan
3. pelepasan aset tidak produktif, peningkatan efektivitas penagihan, dan penyertaan modal secara berkesinambungan untuk mengatasi keterbatasan dana.

2.6.2. PD BPR Kota Sukabumi

Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai usaha simpan pinjam dengan tujuan untuk memberikan pinjaman bagi kalangan ekonomi lemah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, PD BPR menjalankan usaha-usaha sebagai berikut:

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan bentuk itu;
2. menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada para pengusaha mikro, kecil, dan pegawai yang mempunyai penghasilan tetap; dan
3. menempatkan dananya yang belum tersalurkan dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan pada bank lain.

PD BPR mempunyai sasaran yang ingin dicapai yaitu berkembangnya usaha yang sehat dan efisien. Adapun kinerja PD BPR pada tahun 2013 – 2017 disajikan pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Kinerja PD BPR Kota Sukabumi Tahun 2013-2018

No	Uraian	Angka Tahun ... (Dalam Juta)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi Dana		13.459,3	13.590,5	14.888,1	15.933,4	17.689,9
2	Realisasi Kredit	22.218,5	19.897,9	18.836,4	18.816,3	18.524,8	19.684,9
3	Realisasi Pendapatan	6.174,4	5.683,3	5.486,4	5.659,6	5.366,6	5.483
4	Realisasi Biaya		3.822,3	4.052,6	4.220,1	4.922,5	4.329,2
5	Realisasi Laba Kotor	1.823,9	1.861,0	1.301,9	1.439,5	444,0	1.153,8
6	Realisasi Laba Bersih		1.589,9	1.116,4	1.229,5	380,7	990,1
7	Realisasi PAD		874,4	614,0	676,2	209,4	544,5

Sumber : PD BPR Kota Sukabumi

Kinerja PD BPR mengalami peningkatan pada tahun 2018, baik dalam realisasi dana, kredit, pendapatan, biaya, laba kotor, laba bersih sehingga realisasi PAD pun meningkat. Terdapat beberapa hambatan yang berhasil diidentifikasi sebagai berikut :

1. sulitnya mencari tenaga pemasaran yang berpengalaman;
2. suku bunga kredit BPR lebih tinggi dari suku bunga kredit usaha rakyat;
3. rendahnya kualitas SDM BPR khususnya tenaga analis kredit dan Pemasaran; dan
4. beralihnya Debitur BPR ke bank umum yang ditunjuk sebagai pelaksana KUR.

Adapun

Adapun usaha-usaha yang dilakukan PD BPR untuk mengatasi hambatan di atas adalah sebagai berikut :

1. menurunkan suku bunga kredit dari 18% (delapan belas persen) menjadi 15% (lima belas persen);
2. membuat produk kredit baru yaitu kredit sertifikasi guru dan produk tabungan anak sekolah;
3. mengikut sertakan karyawan BPR mengikuti pelatihan analisis kredit dan merketing pada lembaga pelatihan LPPI jakarta; dan
4. menawarkan *top up* pinjaman pada debitur yang bagus.

2.6.3. PD Waluya Kota Sukabumi

PD Waluya merupakan BUMD yang berbentuk perusahaan atau korporasi. Perusahaan ini didirikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1996 pada tanggal 28 November 1996 dengan nama Perusahaan Daerah Waluya Farma. Dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan masyarakat, mendorong pertumbuhan potensi ekonomi daerah, dan terciptanya lapangan kerja, Perusahaan Daerah Waluya Farma berubah menjadi Perusahaan Daerah WALUYA (PD. WALUYA) pada tanggal 30 Desember 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008, yang bergerak dalam bidang usaha :

1. perdagangan besar farmasi atau PBF dan pedagang besar alat kesehatan atau PBAK;
2. bidang kesehatan atau apotek; dan
3. usaha dagang dan jasa lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pencapaian kinerja PD Waluya tahun 2017-2018 disajikan pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31
Pencapaian Kinerja PD Waluya Kota Sukabumi
Tahun 2017-2018

NO	URAIAN	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018
1	Aktiva Lancar	1.097.419.166	425.056.875
2	Aktiva Tetap	1.219.039.030	1.080.720.070

NO	URAIAN	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018
3	Total Aktiva	2.316.458.196	1.505.776.945
4	Hutang Jangka Pendek	3.050.179.717	2.156.771.862
5	Modal dan cadangan	7.500.000.000	7.500.000.000
6	Akumulasi Laba/rugi	(8.233.721.521)	(8.150.994.917)
7	Total Pasiva	2.316.458.196	1.505.776.945
8	Penjualan Laba Bersih	1.448.333.813	1.121.000.000
9	Harga Pokok Penjualan	638.578.382	504.316.432
10	Laba atau Rugi Kotor	809.755.431	616.683.568
11	Biaya Penjualan	13.330.183	16.200.000
12	Biaya Umum dan Administrasi	757.435.495	620.596.068
13	Laba atau Rugi Operasi	38.989.753	(20.112.500)
14	Pendapatan Biaya dan Lain- lain	-	-
15	Pendapatan lain-lain	106.351696	100.039.899
16	biaya Lain-lain	1.698.580	474.133
17	Jumlah Pendapatan biaya dan biaya Lain-lain	104.653.116	99.565.766
18	Laba atau Rugi Sebelum Pajak	143.642.869	79.453.266
19	Taksiran Pajak	14.483.339	11.210.000
20	LABA / (RUGI) BERSIH	129.159.530	68.243.266

Sumber : PD Waluya, 2018

2.7. ASPEK KERJASAMA DAERAH

Pasal 195 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

2.7.1. Kerjasama

2.7.1. Kerjasama Antar Daerah Tahun 2013-2018

Dalam memenuhi aspek kerjasama antar daerah maka kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2013-2018 sebagai berikut meliputi:

1. **APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)**, merupakan wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertujuan untuk membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar Pemerintah Daerah. Saat ini Apeksi beranggotakan 99 (sembilan puluh sembilan) pemerintah kota dan Daerah termasuk ke dalam Komisariat Wilayah III dengan beranggotakan 26 (dua puluh enam) pemerintah kota di 5 (lima) provinsi meliputi Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. **Kegiatan Citynet**, merupakan jaringan multipihak yang mempromosikan kerjasama dan kolaborasi semua jajaran dari berbagai pelaku dan pemerhati perkotaan dan pemukiman di Kawasan Asia-Pasifik. Anggota-anggotanya terdiri dari Pemerintah Kota/Kabupaten, LSM atau Organisasi Tingkat Nasional, Perguruan Tinggi, dan lain-lain. Salah satu tujuan Citynet adalah penguatan pemerintah kota dan kelompok masyarakat di tingkat lokal dengan peningkatan kapasitas serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat kota secara efektif dengan melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan.
3. **Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 06/MoU/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 180/Pj.41-Huk/2014** tentang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik. Maksud diadakannya kesepakatan bersama ini adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di kedua daerah dalam hal penyediaan pelayanan publik. Kerjasama dengan Kabupaten Sukabumi ini salah satunya adalah kegiatan penegasan batasan wilayah admintrasi Daerah dengan

Kabupaten

Kabupaten Sukabumi, yang menghasilkan outputnya berupa peta koridor dan pelacakan batas wilayah, selain kerjasama dalam hal memaduserasikan Rencana Tata Ruang Wilayah, saat ini, sedang dijajagi kemungkinan kerjasama dalam hal perlindungan sumber daya air, pengelolaan sampah regional, dan pengelolaan jaringan transportasi publik.

4. **Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Nomor 119/83/Otdaksm** tentang Penyelenggaraan Transisional Urusan Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Maksud diadakannya kesepakatan bersama ini adalah melaksanakan sinergitas kebijakan dan kegiatan operasional di lapangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, baik urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan, terutama di bidang pendidikan, bidang kelautan dan perikanan, bidang kehutanan, bidang energi dan sumberdaya mineral, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang perhubungan, dan bidang tenaga kerja di Jawa Barat.
5. **Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 562/2835/435.104/2015** tentang Penyelenggaraan Program Transmigrasi Umum di Lokasi UPT. Tokala Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini pihak Pemerintah Kabupaten Morowali Utara bertanggungjawab menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau tidak bermasalah serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigrasi lahan seluas 2,00 (dua koma nol nol) Ha tiap kepala keluarga dan mengusulkan dan mengusahakan terbitnya sertifikat hak milik atas tanah bagi transmigran yang berhak, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah penempatan.

6. **Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44/PK/2016 - Nomor 560/406/Disnaker** Tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah di Lokasi/Kawasan Pohorua Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam perjanjian kerja sama ini pihak Pemerintah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggungjawab menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau tidak bermasalah serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigrasi lahan seluas 1,50 (satu koma lima puluh) Ha tiap kepala keluarga mengusulkan dan mengusahakan terbitnya sertifikat hak milik atas tanah bagi transmigran yang berhak, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah penempatan.
7. **Sukabumi Summit 2016**, pada tahun 2016 Pemerintah Daerah melakukan Kerjasama dengan beberapa daerah melalui kegiatan “*Sukabumi Summit 2016*”. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa Kepala Daerah dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat seperti Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung serta dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain itu dihadiri juga oleh beberapa anggota DPR RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Sukabumi dan Cianjur. *Sukabumi Summit 2016* ini menghasilkan Deklarasi Bersama dalam rangka Percepatan Pembangunan Jalan Tol Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung. Pembangunan jalan tol ini menjadi bagian rencana pembangunan infrastruktur yang strategis dan diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar wilayah sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.
8. **Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Depok, Pemerintah Daerah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur** Nomor 119/178/KB/KS/IX/2017 - 050/71/KB/Pemhuk/2017 -

06/MoU/Ekbang&KD/2017 - 510/Pj.49-Hukham/2017 - 188/19/Huk/2017 tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal.

9. **Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung** Nomor 08/MoU/Ekbang&KD/2017 - Nomor 119/3470-Bag.KS tentang Kerja Sama Antar Daerah. Adapun maksud kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman *best practices* antar aparat pemerintah atau *city sharing*, menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
10. **Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi** Nomor 130/1618-Diskominfo - Nomor 489/295/kominfo/2017 tentang Pengembangan dan Implementasi Aplikasi *Smart City* Kota Bandung di Kota Sukabumi. Maksud kerja sama ini adalah sebagai sarana transfer berbagai aplikasi *smart city* yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

2.7.2. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Berbagai kegiatan kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yang telah dilakukan dari tahun 2013-2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan PT. ASKES Cabang Sukabumi Nomor 01/MoU/Adm.Pemb.&KD/2013 - Nomor 005/MoU/2013

tentang

tentang kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

2. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan PT. TASPEN (Persero) Nomor 04/MoU/Adm.Pemb.&KD/2013 tentang kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. BUDI BAKTI Nomor 04/PKS/Adm.Pemb&KD/2013 tentang Penyelenggaraan Pasar Raya Ramadhan Tahun 2013 M/1434 H di Kota Sukabumi.
4. Akta Notaris Luciana Tirtaman, SH nomor 60 tanggal 18 Juli 2013 tentang Akta Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. Garis 9 Perkasa mengenai perpanjangan perjanjian sewa menyewa bangunan kanopi yang terletak di Jalan Stasiun Barat dan Jalan Stasiun Timur, sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) los di atas lahan ± 1.819,07 (seribu delapan ratus sembilan belas koma nol tujuh) m².
5. Akta Notaris Luciana Tirtaman, SH Nomor 70 tanggal 30 September 2013 tentang Akta Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. Gilang Galuh Pratama mengenai Pengelolaan Perparkiran di Tepi Jalan Umum di Daerah. Adapun Objek Pengelolaan Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah pada 25 (dua puluh lima) ruas jalan. Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini CV. Gilang Galuh Pratama memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.213.920.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) per tahun. Untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima dikenakan kenaikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai kontribusi tahun sebelumnya.
6. Perjanjian Kerjasama antara Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Daerah dengan Pemerintah Daerah, Nomor 02/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 41/PC-IPSI/SMI/I/2014 tentang Perpanjangan Penyediaan Tenaga

Pengajar/Pelatih

Pengajar/Pelatih Pencak Silat Pada Jenjang SD, SMP, SMA/SMK Negeri/Swasta di Kota Sukabumi.

7. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. BUDI BAKTI Nomor 08/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Raya Ramadhan Tahun 2014 M/1435 H di Kota Sukabumi.
8. Akta Notaris Luciana Tirtaman, SH nomor 58 tanggal 24 Juli 2014 tentang Akta Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. Garis 9 Perkasa mengenai perpanjangan perjanjian sewa menyewa bangunan kanopi yang terletak di Jalan Stasiun Barat dan Jalan Stasiun Timur sebanyak 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) los di atas lahan \pm 1.819.07 (seribu delapan ratus sembilan belas koma nol tujuh) m². Saat ini Pemerintah Daerah tidak melakukan perpanjangan kerja sama bangunan kanopi ini dan para pedagang dapat mempergunakan kanopi tersebut tanpa adanya biaya sewa sampai dengan selesainya pembangunan pasar rakyat modern di lokasi eks Pasar Pelita.
9. Akta Notaris Luciana Tirtaman, SH Nomor 59 tanggal 24 Juli 2014 tentang Akta Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. Budi Bakti mengenai perpanjangan perjanjian sewa menyewa bangunan kanopi yang terletak di Gang Arab Komplek Pasar Pelita sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) los di atas lahan \pm 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) m². Saat ini Pemerintah Daerah tidak melakukan perpanjangan kerja sama bangunan kanopi ini dan para pedagang dapat mempergunakan kanopi tersebut tanpa adanya biaya sewa sampai dengan selesainya pembangunan pasar rakyat modern di lokasi eks Pasar Pelita.
10. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi Nomor 11/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 580.4/02/U/BP/2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

11. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Birru Wa Taqwa Nomor 12/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 30/BMT-BWT/XI/2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
12. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Nurul Ummah Nomor 13/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 022/KBMT/XI/2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
13. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Amanah Umat, Nomor 4/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 01.04/B/KBMT-Amat/XI/2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
14. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Syamsul Ulum Nomor 5/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 033/B.1/KBMT-SU/XI/2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Penguatan Permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
15. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan STIE-STMIK PASIM, Pesantren Dzikir Al Fath, Be One Corporation, PT. Charon Phokvan, Jelajah Nusa Nomor 01/MoU/Admpem&KD/2014.
16. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi Nomor 2/MoU/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 155/I.O/F/II/2014 tentang kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
17. Nota Kesepahaman antara Politeknik Negeri Jakarta dengan Pemerintah Daerah Nomor 3/MoU/Adm.Pemb.&KD/2014 -

Nomor

Nomor 340/PL3/HK/2014 tentang kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

18. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Daerah dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor 5/MoU/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor K.TEL.066/HK.840/DTB-/2014 tentang Penyediaan Layanan *Information Communication and Technology* atau ICT Telkom untuk Daerah *Cyber City*.
19. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Darutaqwa Nomor 01/PKS/Adbang&KD/2015 tentang Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan dan Peminjaman Sarana Berdagang Wisata Kuliner Daerah. Adapun kontribusi PT. Darutaqwa kepada Pemerintah Daerah adalah memberikan bagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh keuntungan bersih yang diterima.
20. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan CV. Beton Team Work Nomor 02/PKS/Adm.Bang.&KD/2015 - Nomor 007/BTW/PLM/01/2015 tentang Penataan dan Pemeliharaan Sarana Olahraga di Area Lapang Merdeka Daerah.
21. Akta Notaris Luciana Tirtaman, S.H., Nomor 43 Tanggal 25 Maret 2015 tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Anugrah Kencana Abadi (KSO) perihal Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Pelita Daerah. Dalam perjanjian ini terjadi wanprestasi, sehingga Pemerintah Daerah melakukan pemutusan kerja sama dengan PT. Anugrah Kencana Abadi (KSO).
22. Akta Notaris Luciana Tirtaman, S.H., Nomor 31 tanggal 21 April 2015 tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Prima Megah Olympindo perihal Pembangunan dan Pengelolaan Taman Rekreasi Santa dan Kawasan Pertokoan Pada Terminal Type A Daerah.
23. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan CV. BUDI BAKTI Nomor 03/PKS/Adbang&KD/2015 tentang

Penyelenggaraan Pasar Raya Ramadhan Tahun 2015 M/1436 H di Kota Sukabumi.

24. Akta Notaris Luciana Tirtaman, SH nomor 68 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk tentang Pemasangan *Microcell* dan Fiber Optik dengan Metode Kamufase di Kota Sukabumi.
25. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah, Nomor 09/PKS/Adbang&KD/2015 - Nomor 580.4/216/BP/2015 tentang Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
26. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (KBMT) Birru Wa Taqwa Nomor 10/PKS/Adbang&KD/2015 - Nomor 21/BMT-BWT/12/2015 tentang Pengelolaan Pinjaman Dalam Rangka program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
27. Perjanjian Sewa Menyewa Lahan antara Pemerintah Daerah dengan PT. Solu Sindo Kreasi Pratama yang terletak di Terminal Type A Daerah.
28. Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Ex-depot Pertamina Sukabumi antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pemerintah Daerah Nomor 037/K20200/2015-SO - Nomor 06/PKS-SM/Admbang&KD/2015. Adapun lahan yang disewa tersebut akan digunakan sebagai tempat penampungan sementara para pedagang Ex-Pasar Pelita untuk jangka waktu 2,5 (dua koma lima) tahun atau selama masa Pembangunan Pasar pelita yang baru.
29. Akta Notaris Hj. Lilis Supartini, S.H., M.Kn. Nomor 54 tanggal 27 Juli 2015 tentang Perjanjian Sewa menyewa Bangunan Milik Pemerintah Daerah dengan Bank Jabar Banten Cabang Sukabumi. Adapun bangunan yang disewa tersebut dipergunakan sebagai Kantor Kas Bank Jabar Banten untuk mempermudah transaksi keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah, selain itu juga dapat meningkatkan keamanan bagi para

nasabah Bank BJB yang berada dilingkungan Pemerintah Daerah.

30. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan PT. Indosat, Tbk Nomor 01/MoU/Adbang&KD/2016 - Nomor 728/HOD-HODA/LGL/16 tentang Kerjasama Pengembangan Program *Smart City* di Kota Sukabumi. Salah satu tindaklanjut dari nota kesepahaman ini adalah dilakukannya kerjasama antara Kantor Perpustakaan Daerah dengan PT. Indosat, Tbk dalam hal penyelenggaraan *i-library* di Daerah.
31. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Indosat, Tbk Nomor 04/PKS/Adbang&KD/2016 - Nomor 5100002358 tentang Pemanfaatan Lahan Untuk Pemasangan Jaringan Fiber Optik di Kota Sukabumi.
32. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Darutaqwa Nomor 06/PKS/Adbang&KD/2016 tentang Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan dan Peminjaman Sarana Berdagang Wisata Kuliner Kota Sukabumi.
33. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Supra Primatama Nusantara Nomor 09/PKS/Adbang&KD/2016 tentang Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik di Kota Sukabumi.
34. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Fortunindo Artha Perkasa perihal Pembangunan, Pengelolaan, dan Penyerahan (Bangun Guna Serah) Pasar Rakyat Modern Daerah. Akta Notaris Markus A. Mamesah, S.H., Nomor 320 tanggal 16 Juni 2017. Jangka waktu pengelolaan pasar rakyat modern yang diberikan kepada pihak PT. Fortunindo Artha Perkasa selama 25 (dua puluh lima) tahun setelah selesainya pembangunan pasar rakyat modern yang dibuktikan dengan berita acara selesainya pembangunan atau sejak diterimanya sertifikat laik fungsi dari instansi berwenang.
35. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan PT. Darutaqwa Nomor 31/PKS/Ekbang&KD/2017 tentang Perpanjangan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan dan Peminjaman Sarana Berdagang Wisata Kuliner Kota Sukabumi.

2.7.3. Kerjasama Dengan Instansi Lain

Berbagai kerjasama Pemerintah Daerah dengan Instansi lain yang telah dilakukan dari tahun 2013-2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Nomor 02/MoU/Adm.Pemb&KD/2013 - Nomor KEP/416/DL/3/2013 - Nomor PRJ-003/PW10/1/2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
2. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) Nomor 03/MoU/Admpemkd/2013 - Nomor 15/IT3/KsM/2013 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Adapun tindak lanjut dari nota kesepahaman ini adalah dilakukannya perjanjian kerja sama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor atau PSP3 IPB tentang Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau PLPPB dan Pemetaan Potensi Pengembangan Kawasan Agribisnis Daerah.
3. Kesepakatan Bersama antara Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Nomor 15/BKS/MoU/04/2013 - Nomor 05/MoU/Adm.Pemb&KD/2013 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial dalam Program Kesejahteraan Sosial Terpadu.
4. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Nomor 07/HUK/2013 - Nomor 06/MoU/Adm.Pemb&KD/2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terpadu Menuju Kota Sejahtera.
5. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Badan Pusat Statistik Daerah Nomor 07/MoU/Adm.Pemb&KD/2013 - Nomor 050/MoU/BPS Kota SMI/2013 tentang kesepakatan

untuk

untuk mengadakan kerjasama dan saling menunjang dalam pelaksanaan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

6. Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Pemerintah Daerah Nomor 26 Tahun 2013-10/MoU/Adm.Pem & KD/2013 tentang Pengembangan Unit Layanan Pengadaan Percontohan pada Pemerintah Kota Sukabumi.
7. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Universitas Padjadjaran Bandung Nomor 11/MoU/Adm.Pemb.&KD/2013 tentang Kesepakatan Untuk Mengadakan Kerja Sama dan Saling Menunjang Dalam Pelaksanaan Tugas di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
8. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trisakti Nomor 12/MoU/Adpemkd/2013 - Nomor 001/SPJ/STIET/ XI/2013 tentang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
9. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah Nomor 105/PKS/cb/PLPBK/2013 - Nomor 02/PKS/Adm.Pemb&KD/2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas.
10. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 03/PKS/Adm.Pemb&KD/2013-87A/PP.4/2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Spesialisasi atau DTSS Pelayanan Perpajakan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2013.
11. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah Nomor 162/NPK/cb/2013-09/PKS/Adm.Pemb.&KD/2013 tentang

Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan atau PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2013.

12. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor 13/PKS/Adm.Pemb.&KD/2013 - Nomor PRJ-21/PW 10/1/2013 tentang Penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
13. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Sukabumi tentang Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Wilayah Daerah Nomor 07/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 0053.SP/040/AREA SKI/2014 tentang Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Wilayah Kota Sukabumi.
14. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sukabumi Nomor 16/PKS/Adm.Pemb.&KD/2014 - Nomor 242/KTR/V-02/1214 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
15. Nota Kesepahaman antara Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sukabumi dengan Pemerintah Daerah Nomor W.11.PAS.PAS21.PK.01.07.01-1261 - Nomor 07/MoU/Adm.Pemb.&KD/2014 tentang Kesepakatan Untuk Mengadakan Kerjasama dan Saling Menunjang Dalam Pelaksanaan Tugas Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi, Sesuai Dengan Fungsi dan Kewenangan Masing-masing.
16. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Kodim 0607 Kota Sukabumi tentang Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian Nomor 01/MoU/Adbang&KD/2015 - Nomor B/71/I/2015. Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki para pihak dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Daerah.

17. Nota Kesepahaman antara Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi dengan Pemerintah Daerah Nomor 12/PKS/Adbang&KD/2015 - Nomor 930/KTR/V-02/1215. Adapun tujuan dilaksanakannya nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara untuk memenuhi kewajiban secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam rangka memenuhi kehidupan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang meliputi perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JK.
18. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sukabumi Nomor 12/PKS/Adbang&KD/2015 - Nomor 930/KTR/V-02/1215 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
19. Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Daerah, Nomor HK.201/1/7/STTD.2015 - Nomor 05/PKS/Adbang&K/2015 tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat.
20. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dengan Dinas Permukiman dan Perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah tentang Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Perusahaan Daerah Air Minum Terfasilitasi Di Daerah. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan pengembangan SPAM di Daerah.
21. Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Kota Sukabumi.

22. Nota Kesepahaman antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Wali Kota Nomor 17.21/MoU/1/09/2016 – Nomor 02/MoU/Adbng&KD/2016 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.
23. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Sukabumi Nomor 03/MoU/Adbang&KD/2016 - Nomor 260/KTR/V-02/1216.
24. Perjanjian Kerjasama antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Nomor 01 Tahun 2016 – Nomor 01/PKS/Adbang&KD/2016 Tentang Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI Rahmatan Lil’Alamin Berbasis IC pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK di Daerah.
25. Akta Notaris Luciana Tirtaman, S.H. Nomor 31 tanggal 30 Juli 2016 tentang Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tentang Pemanfaatan Lahan untuk Pemasangan Jaringan Fiber Optik.
26. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Kejaksaan Negeri Sukabumi Nomor 06/PKS/Adbang&KD/2016 - Nomor B-3545/0.2.14/GS.I/11/2016.
27. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Tim Penyelenggaraan dan Pengembangan Program Studi di Luar Domisili/Multikampus Institut Pertanian Bogor di Sukabumi Nomor 06/PKS/Adbang&KD/2016 - Nomor B-3545/0.2.14/GS.I/11/2016. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mendukung kegiatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Program Studi Di Luar Domisili/Multikampus Institut Pertanian Bogor di Daerah.
28. Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah Nomor 238/WPB.13/BD.03/2016 - Nomor 08/PKS/Adbang&KD/2016 Tentang Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

29. Perjanjian

29. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Sukabumi Nomor 11/PKS/Adbang&KD/2016 - Nomor 314/KTR/V-02/2016 tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
30. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Daerah Nomor 20/KOMINFO/HK.03.02/05/2017 - Nomor 04/MoU/Ekbang&KD/2017. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman kerjasama dalam implementasi gerakan menuju 100 *Smart City* di Daerah, sedangkan tujuannya adalah untuk menjalin kerjasama dan komunikasi bagi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program kegiatan secara terpadu.
31. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Nomor 05/MoU/Ekbang&KD/2017 - Nomor MoU-16/PW10/3/2017 tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Kota. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* di lingkungan Pemerintah Daerah.
32. Nota Kesepahaman antara Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) dengan Pemerintah Daerah Nomor 817/BBRVBD/II.1/RH.01.01/12/2017 - Nomor 10/MoU/Ekbang&KD/2017. Adapun Kerjasama yang dilakukan ini adalah dalam hal pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas daksa sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
33. Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi dengan Pemerintah Daerah tentang Pelaksanaan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

2.8. CAPAIAN KINERJA RPJMD PERIODE 2013-2018

Pengukuran pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di Daerah didasarkan pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018 dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2013 tentang Program Prioritas Pembangunan dan Indikasi Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018.

2.8.1. Pencapaian Misi I RPJMD Tahun 2013-2018

Misi I RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Mewujudkan Reformasi Birokrasi Menuju Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Bertaqwa dan Berilmu didukung oleh 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai. Pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah;
2. meningkatnya aktivitas masyarakat dalam kehidupan beragama dan kesetiakawanan sosial;
3. meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan;
4. terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas;
5. terwujudnya pendidikan budi pekerti, wawasan kebangsaan, dan kearifan lokal bagi masyarakat; dan
6. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya baca.

Capaian Misi I RPJMD pada tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32
Nilai Capaian Misi I RPJMD pada Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Indikator	Belum Memenuhi Target		Cukup Memenuhi		Memenuhi Target	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2014	13	0	0,00	0	0,00	13	100,00
2	2015	7	0	0,00	0	0,00	7	100,00
3	2016	9	0	0,00	1	11,11	8	88,89
4	2017	9	0	0,00	2	22,22	7	77,77
5	2018	9	1	11,11	1	11,11	7	77,77

Sumber : LKPJ Kota Sukabumi Tahun 2013-2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2014-2015 seluruh target pada Misi I berhasil dicapai. Persentase ketercapaian indikator Misi I pada tahun 2016-2018 cenderung mengalami penurunan dengan persentase sebesar 88,89% (delapan puluh delapan koma delapan puluh sembilan persen) pada tahun 2016 dan 77,77% (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh tujuh persen) pada tahun 2017-2018. Pada tahun 2016 dan 2018 terdapat 1 (satu) indikator yang termasuk ke dalam kategori cukup memenuhi target dengan persentase masing-masing 11,11% (sebelas koma sebelas). Pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori belum memenuhi target.

2.8.2. Pencapaian Misi II RPJMD Tahun 2013-2018

Misi 2 RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berwibawa, Jujur, Adil, Profesional, Mendengar, dan Melayani Masyarakat Dengan Ikhlas, didukung 9 (sembilan) sasaran yang akan dicapai, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. meningkatnya mutu pelaksanaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2. meningkatnya

2. meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang terpadu;
3. meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah berorientasi pada kepentingan publik;
4. meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi;
5. meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
6. meningkatnya penegakan dan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak; dan
7. meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan.

Capaian Misi II RPJMD pada Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33
Nilai Capaian Misi 2 RPJMD pada Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Indikator	Belum Memenuhi Target		Cukup Memenuhi		Memenuhi Target	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2014	18	1	5,55	1	5,55	16	88,90
2	2015	15	1	6,67	-	-	14	93,33
3	2016	14	1	7,14	-	-	13	92,86
4	2017	14	0	0,00	0	-	14	100,00
5	2018	14	1	7,14	-	-	13	92,86

Sumber : LKPJ Kota Sukabumi Tahun 2013-2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2013-2016 mayoritas indikator telah berhasil memenuhi target RPJMD. Terdapat masing-masing 1 (satu) indikator yang tidak berhasil mencapai target pada tahun 2013-2016. Pada tahun 2017, seluruh indikator sudah memenuhi target. Namun pada Tahun 2018, kembali terdapat 1 (satu) indikator belum memenuhi target.

2.8.3. Pencapaian Misi III RPJMD Tahun 2013-2018

Misi III RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Mewujudkan Pelayanan Dasar Yang Lebih Baik dan Berkualitas diukur melalui 17 (tujuh belas) sasaran yang akan dicapai, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. meningkatnya pemerataan, akses, mutu, relevansi, dan daya saing di setiap jenjang pendidikan;
2. meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
3. meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat;
4. terkendalinya kasus penyakit menular;
5. terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
6. meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan;
7. meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat;
8. meningkatnya kemandirian masyarakat dalam promotif dan preventif bidang kesehatan; dan
9. meningkatnya kualitas pelayanan sesuai standar;
- j. terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera;
- k. meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan;
- l. meningkatnya kualitas dan kuantitas potensi pemberdayaan masyarakat;
- m. terciptanya dan terkendalinya pemanfaatan ruang yang serasi;
- n. meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota;
- o. meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung kota; dan
- p. meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi jalan.

Capaian Misi III RPJMD pada Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34
Nilai Capaian Misi 3 RPJMD Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Indikator	Belum Memenuhi Target		Cukup Memenuhi		Memenuhi Target	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2014	50	4	8,00	5	10,00	41	82,00
2	2015	43	4	9,30	1	2,33	38	88,37
3	2016	44	2	4,55	0	0,00	42	95,55
4	2017	45	0	0,00	2	4,55	43	95,45
5	2018	45	1	2,22	1	2,22	43	95,55

Sumber : LKPJ Kota Sukabumi Tahun 2013-2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target pada tahun 2014-2018 dengan jumlah masing-masing 4 (empat) indikator pada tahun 2014 dan 2015, 2 (dua) indikator pada tahun 2016, dan 1 (satu) indikator pada tahun 2018. Pada tahun 2017, semua indikator sudah tercapai. Adapun tingkat ketercapaian indikator yang memenuhi target semakin meningkat tiap tahun dari 82,00% (delapan puluh dua koma nol nol persen) pada tahun 2014 menjadi 95,55% (sembilan puluh lima koma lima puluh lima persen) pada tahun 2018.

2.8.4. Pencapaian Misi IV RPJMD Tahun 2013-2018

Misi IV RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah diukur melalui 17 (tujuh belas) sasaran yang akan dicapai. Pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat, dan transparan sesuai peraturan yang berlaku;
2. meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN;
3. meningkatnya kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja;

4. meningkatnya

4. meningkatnya partisipasi angkatan kerja;
5. meningkatnya penyerapan tenaga kerja ;
6. meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha;
7. meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi;
8. meningkatnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan UKM;
9. meningkatnya iklim usaha perdagangan yang kondusif;
10. meningkatnya kondisi ketahanan pangan daerah;
11. meningkatnya kemandirian dan produktivitas lembaga usaha bidang agribisnis;
12. meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk agribisnis;
13. meningkatnya masyarakat kota sukabumi yang mengkonsumsi makanan non beras dan terigu;
14. tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata;
15. terwujudnya gedung kesenian untuk melestarikan dan mengembangkan budaya;
16. meningkatnya pembinaan lembaga atau kelompok seni dan budaya; dan
17. meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi.

Capaian Misi IV RPJMD pada Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35
Nilai Capaian Misi IV RPJMD pada Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Indikator	Belum Memenuhi Target		Cukup Memenuhi		Memenuhi Target	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2014	38	4	10,53	3	7,89	31	81,58
2	2015	28	3	10,71	2	7,14	23	82,14

No	Tahun	Jumlah Indikator	Belum Memenuhi Target		Cukup Memenuhi		Memenuhi Target	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
3	2016	28	3	10,71	2	7,14	23	82,14
4	2017	30	0	00,00	1	3,33	29	96,67
5	2018	30	0	00,00	0	0,00	30	100

Sumber : LKPJ Kota Sukabumi Tahun 2013-2018

Mayoritas indikator pada Misi IV RPJMD pada tahun 2014-2018 sudah memenuhi target >80% (delapan puluh persen) meskipun masih ada beberapa indikator yang belum memenuhi target. Dari tabel terlihat bahwa ada peningkatan persentase indikator yang memenuhi target dari 81,58% (delapan puluh satu koma lima puluh delapan persen) pada tahun 2014 menjadi 100% (seratus persen) pada tahun 2018.

2.8.5. Pencapaian Misi V RPJMD Tahun 2013-2018

Misi V RPJMD Tahun 2013-2018 adalah Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan Kota diukur melalui 6 (enam) sasaran strategis yaitu:

1. meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparatur dan masyarakat dalam penanganan resiko bencana;
3. meningkatnya pembinaan politik daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan;
4. terwujudnya kerukunan antar dan inter umat beragama sebagai perwujudan nilai-nilai agama;
5. meningkatnya penanganan persampahan perkotaan; dan
6. meningkatnya kebersihan dan keindahan kota.

Capaian Misi V RPJMD pada Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Nilai Capaian Misi V RPJMD pada Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Indikator	Belum Memenuhi Target		Cukup Memenuhi		Memenuhi Target	
			Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	2014	17	-	-	-	-	17	100,00
2	2015	14	-	-	-	-	14	100,00
3	2016	15	-	-	-	-	15	100,00
4	2017	16	-	-	-	-	16	100,00
5	2018	18	-	-	-	-	18	100,00

Sumber : LKPJ Kota Sukabumi Tahun 2013-2018

Pada misi 5, seluruh indikator telah masuk dalam kategori memenuhi target atau sebesar 100% (seratus persen).

Capaian kinerja RPJMD Tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2013-2018

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggungjawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Misi 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Menuju Sumber Daya Manusia yang Beriman , Bertaqwa dan Berilmu																	
1	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah	Program kelembagaan dan Ketatalaksanaan antar Pemerintah dan Pemda	Indeks reformasi birokrasi		51,22	53,27	57,27	61,27	65,27	51,22	-	50,7	67,92	68,03	68,79	indeks	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Kategori Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	A	A	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	nilai
2	Meningkatnya aktifitas masyarakat dalam kehidupan beragama dan kesetiakawanan sosial.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kenaikan ZIS.	20,66%	22,30%	23,94%	25,58%	27,22%	28,86%	20,66	20,57	24,74	21	70,11%	98,42%	%	Sekretariat Daerah
3	Meningkatnya sarana dan prasarana peribadatan.	Program pembinaan lembaga pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan	Persentase sarana dan prasarana peribadatan yang mendapat bantuan dari		70%	75%	80%	85%	90%	60,00	62,00	72,00	80,00	63,10%	24,00%	%	Sekretariat Daerah

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
			Pemda														
4	Terwujudnya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan penempatan tugas	80%	82%	84%	86%	88%	90%	80,00	83,00	93,00	100,00	82,04%	107,00%	%	BKPSDM
		Program pendidikan kedinasan	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan	85%	100%	100%	100%	100%	100%	85,00	97,00	102,30	100,00	97,67%	99,00%	%	BKPSDM
5	Terwujudnya pendidikan budi pekerti, wawasan kebangsaan dan kearifan lokal bagi masyarakat.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Cakupan sekolah pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum berbasis budi pekerti		8	11	14	17	21	-	12	15	24	17	17	Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
			Persentase siswa yang mendaftar ke SMP yang memiliki ijazah Madrasah Diniyah	40%	40%	50%	100%	100%	100%	40	100,00	71,00	100,00	100%	100%	%	
6	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya baca.	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan	30.000	60.000	90.000	120.000	150.000	180.000	30.000	77.596	50.145	106.342	105.276	181.030	orang/tahun	Dispusip
<p>Misi 2 :Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Berwibawa, Jujur, Adil, Profesional, Mendengar dan Melayani Masyarakat Dengan Ikhlas</p>																	
1	Meningkatnya mutu pengawasan dan pelaksanaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Opini BPK atas LKPD	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	opini	Inspektorat
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian indikator sasaran pembanguna	80	80	80	90	90	90	80	82,19	86,76	91,82	95,54	94,83	%	Bappeda

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	pengendalian pembangunan daerah yang terpadu	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	n yang tercantum dalam RPJMD														
		Program perencanaan bidang ekonomi															
		Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya															
3	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah berorientasi pada kepentingan publik.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rasio belanja langsung terhadap belanja daerah	51	51	51	51	51	51	51	51	54,04	56,3	62,09	61,62	%	BPKD
			Persentase peningkatan PAD	15	15	15	15	15	15	15	9,5	7,11	6,65	21,59	0,92	%	
4	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi.	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Jumlah OPD yang telah menerapkan e-Gov (terintegrasi)				7	12	13	-	-	-	7	26	38	OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
5	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.	Program kelembagaan dan Ketatalaksanaan antar Pemerintah dan Pemda	nilai rata-rata IKM	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	B	B	nilai	Sekretariat Daerah	
		Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Tingkat Kewilayahan	Jumlah Kelurahan yang berkategori:															
			1. Swasembada	7	7	10	15	18	20	7	3	8	9	13	12	Kelurahan	DP2KBP3 APM	
			2. Swakarya	21	21	19	15	13	11	21	18	25	24	17	18	Kelurahan		
3. Swadaya	5	5	4	3	2	2	5	12	0	0	3	3	Kelurahan					
6	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum untuk kepastian hukum	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum yang sesuai dengan kaidah dan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	90	90	90	90	90	90	90	90	100	232,93	89,20	%	Sekretariat Daerah		
7	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	78,76	85	90	92	95	98	78,76	89,93	92,72	94,46	98,5	96,55	%	Disdukcapil	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
n.			Cakupan penerbitan kartu keluarga	90	93	94	95	96	98	90		105,57	97,87	97	94,32	%	
			Cakupan penerbitan akta kelahiran	89,19	90	92	94	96	98,00	89,19	92,3	100,28	92,57	94,84	97,99	%	
			Cakupan penerbitan akta kematian	-	40	50	60	70	80	40		139	73,08	81	64,64	%	
8	Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan kearsipan daerah.	Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah OPD yang sudah menerapkan pengelolaan arsip secara baku	-	1	2	3	4	5	-	1	2	3	4	5	OPD	Dispusip
			Persentase kearsipan daerah berbasis digital	-	-	5	10	15	20	-	-	5	10	15	20	%	Dispusip
Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Yang Lebih Baik dan Berkualitas																	
1	Meningkatnya mutu , relevansi dan daya saing pelayanan pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM(APM) SD/MI/ Paket A	99,7	99,8	99,85	99,9	99,93	99,95	99,7	84,75	79,73	96,38	96,7	97,2	%	
			APM(APM) SMP/MTs/ Paket B	98,6	98,8	99,0	99,2	99,5	99,70	98,60	71,29	70,63	96,13	96,5	96,4	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
		Program Pendidikan Menengah	APM(APM) SMA/SMK/ Paket C	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,56	62,34	97,73	97,8	92,87	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Angka Melanjutkan (AM) SMA/SMK/ MA ke perguruan tinggi	20	23	26	29	31	34,00			26,27	29,56	31,4	49,7	%		
		Program manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase kepemilikan kartu cerdas siswa drop out dan miskin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		%
			Presentase siswa rawan DO SMA, SMK dan MA.	<18	<18	<18	<18	<18	<18	<18	<18	15	7,14	5,72	5,72	0,11		%
			Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	9,53	9,56	9,6	9,7	9,72	9,73	9,53	9,53	9, 57	9,75	9,71	9,73	Tahun		
		2	Meningkatnya kinerja pendidik, tenaga kependidikan dan pengawas pendidik.	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik, Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah kualifikasi S2	9	10	11	11,5	12	12,5	9	12	13,75	13,8	8,1		8,2

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
3	Meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu	130	130	135	130	125	120	130		127,31	97,64	116,47	116,73	per 100,000 KH	Dinas Kesehatan
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka kematian bayi	9,5	9,5	10	9,5	9	8,5	9,5	7,11	7,96	7,65	6,82	5,86	per 1000 KH	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	-	-	11	11	10,5	10	11		5,43	6,46	6,31	3,88	%	
			Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	-	-	10	9	8	7	10		4,59	5,57	7,75	6,05	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
4	Terkendalinya kasus penyakit menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Menular	100	100	100	100	100	100	100		120,91	108,64	107,87	109,29	%	
5	Terwujudnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	45	50	55	60	65	70	70		53,73	88,13	126,15	135,71	%	
		1. Program pelayanan Kesehatan untuk penduduk miskin 2. Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya, 3. Program Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Jumlah Rumah Sakit yang di fasilitasi Pemerintah Daerah	0	0	1	0	0	0	-	-		1	-	1	0	unit

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
6	Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	0	0	100	100	100	100	-		119,72	89,4	100	100,24	%	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat															
7	Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	100	100	95,71	101,45	103,3	100,13	100	%	
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan pengawasan legalitas dan keamanan produk makanan PIRT	100	100	100	100	100	100	100	66,00	104,4	100,11	108,65	100	%	
8	Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam promotif dan preventif bidang kesehatan	Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kelurahan siaga aktif strata mandiri	3	-	5	10	15	20,00	5		3,00	12,12	15,15	20,00	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
9	Meningkatnya kualitas pelayanan sesuai standar	Program Pangadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase pencapaian nilai akreditasi rumah sakit versi 2012		50	50	60	70	80	-	-	80	87,7	96,23	96,23	%	RSUD R. Syamsudin, SH
10	Terkendalinya pertumbuhan pendu-duk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera	Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan Program Keluarga Berencana	Rata-rata usia nikah pertama wanita	21,30	21,30	21,30	21,32	21,32	21,32	21,3	23,23	23,28	23,35	21,32	23,28	tahun	1. Disdukcapil 2. DP2KBP3 APM
		Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase keluarga prasejahtera dan sejahtera I	25,92	25,45	25,05	24,60	24,15	23,70	23,7	22,77	22,95	22,75	22,7	22,7	%	
		Program Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi dan Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	67,10	67,20	67,45	67,60	67,70	67,75	67,1	72,6	73,57	73,20	74,14	75,09	%	
11	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase anggota parlemen perempuan	10	30	30	30	30	30	10	16,67	16,67	17,24	17,14	17,14	%	DP2KBP3 APM

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Partisipasi pekerja Perempuan di Lembaga Eksekutif	14,97	15,37	15,77	16,17	16,57	16,97	14,97	54,68		27,03	27,21	46,91	%	
			Persentase realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	59	60	65	70	75	80	50		96,34	91,97	100	100	%	
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	35,45	35,5	35,55	35,61	35,69	35,78	35,45	35,56	35,6	35,82	36,01	59,14	%	
12	Meningkatnya kualitas dan kuantitas potensi pemberdayaan masyarakat	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	Persentase posyandu strata mandiri	9,62	20	30	40	50	60	9,62		26,4	30,97	47,57	57,17	%	
			Persentase LPM berprestasi	58,54	58,54	60,98	63,41	65,85	68,29	58,54		78,05	78,05	75	75	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
13	Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase penanganan PMKS	20	25	30	35	40	45	20,00	16,18	29,00	43,25	41,78	53,60	%	Dinas Sosial
14	Terwujudnya kota yang teratur sesuai penataan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kesesuaian fungsi lahan dengan dokumen tataruang hasil pengendalian pemanfaatan ruang	60	70	75	80	85	90	60		75	75	87	93,53	%	DPUPRKP2
		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH : Hutan Kota	3,18 Ha	3,78 Ha	7,08 Ha	9,08 Ha	10,08	11,08	3,18	4,8	7,09	7,09	12,18	12,18	Ha	Dinas Lingkungan Hidup
			Luas RTH : Taman kota dan jalur hijau	15Ha	16,50 Ha	16,67 Ha	16,90 Ha	17,1	17,3	15	15,06	15,82	15,69	20,83	24,68	Ha	
Program Pengelolaan areal pemakaman	Luas RTH : Lahan pemakaman	34,20Ha	34,3	34,4	34,5	34,6	34,7	34,2	34,2	34,44	34,58	35,87	36,07	Ha			
15	Meningkatnya kualitas lingkungan	Program pengembangan kinerja pengelolaan	Persentase penanganan sampah	83,35	83,5	83,63	83,76	83,89	84,02	83,35	84,5	83,65	84,31	84,5	84,3	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	hidup kota	persampahan															
		Perogram Pengembangan Perumahan	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	85,15	86,28	85,42	85,82	86,09	86,49	85,15	95,51	85,42	85,82	96,43	97,29	%	DP2KBP3 APM
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	63,63	64,3	65,6	68,3	71	72,3	63,63	83,8	65,6	99,96	70,9	87,57	%	
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah kampung iklim	-	1	2	3	4	5	-	3	4	4	12	16	Ha	Dinas Lingkungan Hidup
		Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	jumlah sungai bersih dan terpelihara	2	3	4	5	6	7	2		4	4	6	7	lokasi	
jumlah lokasi memenuhi baku mutu udara ambien	4		6	8	10	12	14	4		8	8	12	14	lokasi			
16	Meningkatnya kualitas dan keterse-diaan infrastruktur pendukung pendukung kota	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Kawasan kumuh	160	150	140	100	70	30	160	140	100		97,76	30	Ha	DPUPRPKP2
			Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunaka	87,02	88,72	90,42	92,12	93,82	95,52	87,02	77,64	90,42	92,12	97,83	95,52	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
			n Air Bersih														
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase kondisi jalan baik	66,49	67,27	69	71	73	75	66,49	67,46	70,09	76,62	79,24	91,98	%	Dishub
			Persentase kondisi jalan lingkungan baik	58,14	64,13	68,93	71,28	73,62	75,14	58,14	64,13	68,93	84,58	98,04	81,99	%	DPUPRPKP2
17	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi jalan	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase fasilitas perlengkapan jalan :														
			a. Rambu	50	56	62	68	74	80,00	50,00	71,76	73,69	79,92	84,32	85,96	%	Dishub
			b. Marka	40	60	80	100	100	100,00	40,00	76,49	99,38	129,38	539,49	679,49	%	
			c. APILL siap ATCS	67	75	83	92	100	100,00	66,67	91,67	0,00	91,67	91,67	100,00	%	
			d. Cermin Tikungan	38	48	58	68	78	88,00	37,50	87,50	127,50	152,50	137,50	175,00	%	
			e. Pagar Pengaman	13	15	17	19	21	23,00	13,00	51,00	56,00		69,20	70,70	%	
			f. PJU	79	82	86	90	94	97,00	78,75	87,21	92,81	97,36	97,97	102,26	%	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Misi 4 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah																	
1	Terwujudnya prosedur di bidang perizinan dan investasi yang lebih mudah, cepat, dan transparan sesuai peraturan yang berlaku	Program Peningkatan pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Perizinan tepat waktu	75	75	75	80	80	80,00	75,00	75,51	83,00	94,00	95,00	85,00	%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Nilai Investasi PMA (juta)	45.978	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	45,900	14,760	0,000	0,000	21.500	15.000	juta rp	
			Nilai Investasi PMDN (juta)	125.919	132.214	133.474	134.733	135.990	137.251	125.919	340.131	915.612	458.449	290.721	2.278.380	juta rp	
3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	40	45	50	55	60	65	40,00	64,25	59,99	41,8	99,94	71,34	%	Dinas Tenaga Kerja
4	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja		Persentase tenaga berbasis kompetensi	-	16		18	19	20	16,00	26,67	33,33	66,67	98,61	45	%	
5	Meningkatnya penyerapan	Program Peningkatan	Jumlah penyerapan	1038	5000	5000	5000	5000	5000	1.038	5.789	5.297	5.173	5.107	5.049	orang	

No.

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	tenaga kerja	Kesempatan Kerja	tenaga kerja														
6	Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha.	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Persentase peningkatan IKM Produktif	73	75	77	79	81	83	73,00	73,00	73,03	73,98	74,49	74,89	%	Diskopdagri n
		Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase peningkatan usaha mikro kecil dan menengah	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,50	0,50	85,04	87,34	0,69	0,92	%	
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pengembangan Pasar Rakyat	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	2	unit	
7	Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase peningkatan Koperasi Aktif	58,50	59,00	59,50	60,00	60,50	61,00	58,50	59,79	46,56	47,34	61,15	61,23	%	
8	Meningkatnya akses permodalan bagi pelaku koperasi dan UKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM	Persentase peningkatan LKM : KSP/ USP Aktif	97,3	97,8	98,3	98,8	99,3	99,8	97,30	98,70	96,25		95,4	95,58	%	
			Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang menerima	-	200	200	200	200	200	200	1.681	211	241	285	92	537	ukm

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
			penguatan permodalan														
9	Meningkatnya iklim usaha Perdagangan yang kondusif	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah kawasan Penataan PKL dan Pemberdayaan Pedagang	1	2	2	2	2	2	1	2	14	-	2	3	kawasa n	
10	Meningkatnya kondisi ketahanan pangan daerah	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Tingkat ketersediaan pangan pokok (beras)	120	125	125	125	125	125	120,00	125,00	220,44	188,35	261,61	128,68	%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
			Stabilitas harga dan pasokan pangan	80	80	80	80	80	80	80,00	90,00	98,53	109,11	97,37	111,74	%	
			Tingkat keamanan pangan	78	79	80	80	80	80	78,00	80,69	84	92,29	85,45	78	%	
11	Meningkatnya kemandirian dan produktivitas lembaga usaha bidang agribisnis	Program Peningkatan kesejahteraan petani dan program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan	Persentase LKM-PUAP dan LKD-Demapan berklasifikasi sehat	20,83	29,17	50	52	54	56,00	20,83	66,00	50,00	50,00	78,57	56,00	%	
			Tingkat keaktifan dan kemandirian lembaga usaha tani	11,03	13	15,86	20,69	25,52	30,34	11,03	20,15	26,92	33,12	36,84	50,00	%	

No.

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
12	Meningkatnya produksi, produktivitas, dan mutu produk agribisnis	Program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Tingkat pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan	-	-	0,5	1	1,5	2,00	-	-	-	-	2	2	%	
		Program pengembangan budidaya perikanan dan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Prosentase pelaku usaha perikanan yang menerapkan CBIB/CPIB	20	-	45	55	65	75	20,00		51,22	50	75	80	%	
		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dan program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	Provitasi padi	6,46	6,39	6,49	6,58	6,58	6,78	6,46		7,44	7,64	7,10	5,95	ton/ha	
		Program penanggulangan penyakit ternak dan program penerapan teknologi peternakan	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki NKV (Nomor Kontrol	-	-	20	40	60	80	-		20	36	80,00	100,00	%	

No.

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
			Veteriner)														
		Program Penataan dan Pengembangan kawasan agribisnis	Terbangunnya kawasan Agroeduwisata Cikundul (KAC)	-	-	-	-	1,00	-	-	-	1	1	1	-		
		Program pengembangan budidaya perikanan	Produktifitas budidaya perikanan	20,64 ton/ha	21,11 ton/ha	21,32 ton/ha	21,53 ton/ha	21,75	21,97	20,64		22,30	22,16	24,59	21,92	ton/ha	
13	Meningkatnya masyarakat Kota Sukabumi yang mengkonsumsi makanan non beras dan terigu	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Skor pola pangan harapan (PPH)	72	74	75	76	77	78	72,00	74,82	75,83	84,6	85,8	79,7	%	
14	Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata	Program Pengembangan dan pemasaran pariwisata	Waktu kunjungan wisata	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	2	4	hari	Disporapar
			jumlah wisatawan	95.700	105.770	110.000	115.000	120.000	125.000	95.700	141.300	127.235	117.638	212.713	188.928	orang	
15	Terwujudnya gedung kesenian untuk melestarikan	Program Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah Gedung Kesenian	0	0	0	1	0	0	-	-	-	-	1	0	gedung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	dan mengembangkan budaya																
16	Meningkatnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya	Program ekonomi kreatif berbasis seni budaya	Jumlah event pagelaran budaya	1	1	6	6	6	6	1	3	4	4	6	6	event	Disporapar
17	Meningkatnya pembinaan olahraga yang berorientasi pada prestasi	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat regional/ nasional	33,33	33,33	75	80	90	90	33,33	37,00	76	76	75	78	%	
Misi 5 : Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan Kota																	
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.	Program pemeliharaan kamtramtibnas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penyelesaian pelanggaran perda	-	-	55	65	80	92,50	-	75,00	85,00	85,00	81,00	89,60	%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase unjuk rasa yang terkendali	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan pengendalian keamanan lingkungan	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	90	95	95	95	95	95	90	100	100	100	100	100	%	1. Satuan Polisi Pamong Praja 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase penurunan tingkat tawuran pelajar	-	10	20	30	40	50,00	-	34,48	65,51	72,14	72,41	68,97	%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparaturnya dan masyarakat dalam penanganan resiko bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase tingkat kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana	1	1	1,05	1,1	1,16	1,22	1,00	1,00	1,00	1,10	1,16	1,22	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Tertanganinya korban bencana dari kejadian bencana	-	80	80	90	90	90,00				100,00	90,00	90,00	%	
			Zona tangguh	-	-	-	1	1	2,00				2,00	1,00	9,00	ZTB	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
			bencana														
3	Meningkatnya pembinaan politik daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan	Program Pendidikan politik masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada	76,79	77	0	0	0	78,00	76,79	80,26	-	-	0,00	78,10	-	
			Persentase Ormas, OKP, dan LSM yang terdaftar	45	60	70	80	80	80,00	45,00	62,98	71,90	80,29	81,07	81,94	%	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Terwujudnya kerukunan antar dan inter umat beragama sebagai perwujudan nilai-nilai agama	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase unjuk rasa yang disebabkan konflik inter dan antar umat beragama	22,85	10	10	10	10	10,00	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	%	
5	Meningkatnya penanganan persampahan perkotaan	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase reduksi sampah kota	1,25	1,84	2,55	3,23	3,88	4,51				6,16	6,37	5,86	%	Dinas Lingkungan Hidup
6	Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	jumlah jalan tertib sampah	7	8	9	10	11	12			9	9	12	13	ruas jalan	
			jumlah perumahan tertib	4	5	6	7	8	9			6	6	8	9	lokasi	

No.	Sasaran	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target						Realisasi						Satuan	OPD Penanggung jawab
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
			sampah														
		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH taman Kota dan jalur hijau dalam kondisi baik	62	68	73	77	81	86			79,2	76,8	86	86	%	
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Luas lahan ruang aktivitas perekonomian dan pemerintahan baru	-	-	4,5	2,5	0	0	-		3,8	8,7	0	0	ha	Sekretariat Daerah
7	Meningkatnya biopori dan tanaman yang menyerap air	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah RTH Jalur Hijau	22	22	24	26	28	30					28	31	lokasi	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah RTH Taman Kota	17	19	21	23	25	27					25	47	lokasi	

2.9. ANALISIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Salah satu hasil analisis lingkungan hidup yang sangat penting dalam proses perencanaan adalah analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Ambang batas secara sederhana didefinisikan sebagai suatu tingkatan yang masih dapat diterima. Dalam hal ini ambang batas yang digunakan adalah ambang batas penduduk, yaitu seberapa banyak penduduk yang dapat didukung suatu wilayah dengan ketersediaan sumber daya yang ada atau tersedia. Status DDLH kemudian ditentukan dengan melihat apakah jumlah penduduk suatu wilayah telah melewati ambang batasnya atau belum. Penentuan ambang batas dan status DDLH ini dilakukan melalui pendekatan menggunakan jasa ekosistem penyedia bahan pangan dan jasa ekosistem penyedia air bersih dengan asumsi tidak terjadi aliran materi atau energi atau *closed system*. Nilai kebutuhan dihitung berdasarkan Angka Kecukupan Energi atau AKE populasi untuk bahan pangan; dan kebutuhan air domestik dan tutupan lahan untuk air bersih. Sementara itu, ketersediaan dihitung berbasis jasa ekosistem, yaitu dengan menggunakan metode pembobotan berdasarkan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan untuk bahan pangan dan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia dan Pengaturan Air untuk air bersih. Peta

status

status DDLH disusun dengan memanfaatkan sistem grid skala ragam beresolusi 5" x 5" ($\pm 150\text{m} \times 150\text{m}$). Penggunaan sistem grid skala ragam ini menjadi suatu pendekatan yang mampu merepresentasikan DDLH wilayah dalam bentuk informasi spasial, tanpa harus menyamakan skala dari berbagai jenis data yang tersedia. Sistem grid skala ragam yang digunakan mengacu pada sistem grid Indonesia berbentuk dasar persegi dengan elemen utama, antara lain sistem koordinat geodetik dan datum geodetik *World Geodetic System* 1984 atau WGS 84; titik asal sistem koordinat grid, yaitu titik 90° BT, 15° LS; sistem penomoran; dan resolusi grid.

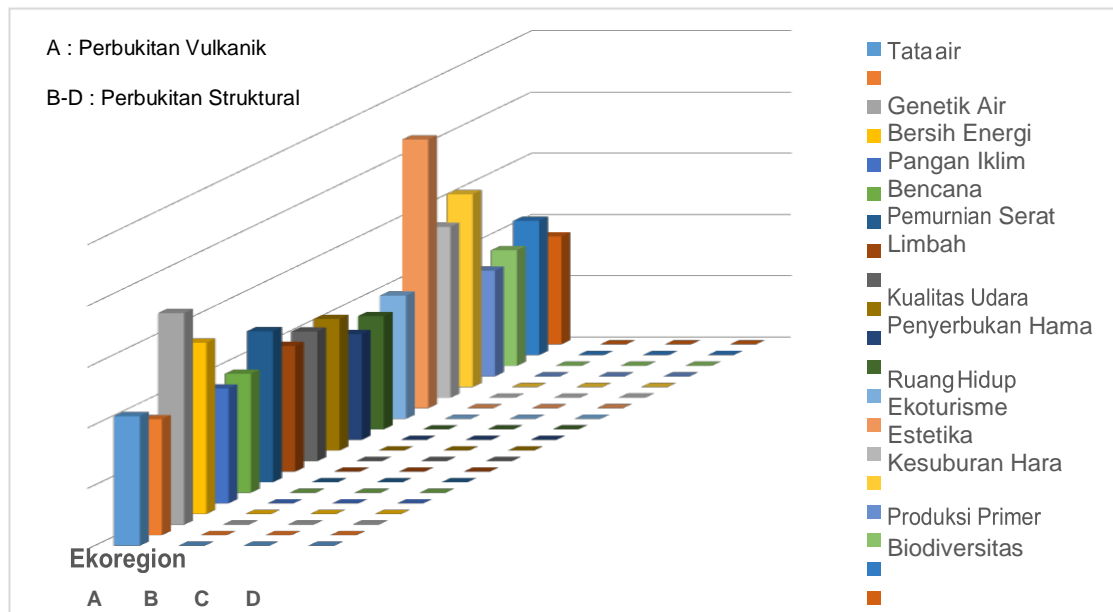
2.9.1. Proporsi Jenis Jasa Ekosistem Setiap Kecamatan

Jasa lingkungan merupakan manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem. Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atau DDDLH dapat direpresentasikan oleh jasa ekosistem, dengan pemahaman bahwa DDDLH merupakan kapasitas jasa ekosistem dalam mendukung perikehidupan makhluk hidup di suatu ekoregion. Semakin baik atau tinggi DDDLH suatu lokasi atau ekoregion, maka dapat dikatakan ekosistem di ekoregion tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat berfungsi dengan baik untuk menyediakan jasa ekosistemnya. Setiap ekoregion terdiri dari beberapa tipe ekosistem yang menghasilkan jasa. Jasa ekosistem dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu sebagai berikut :

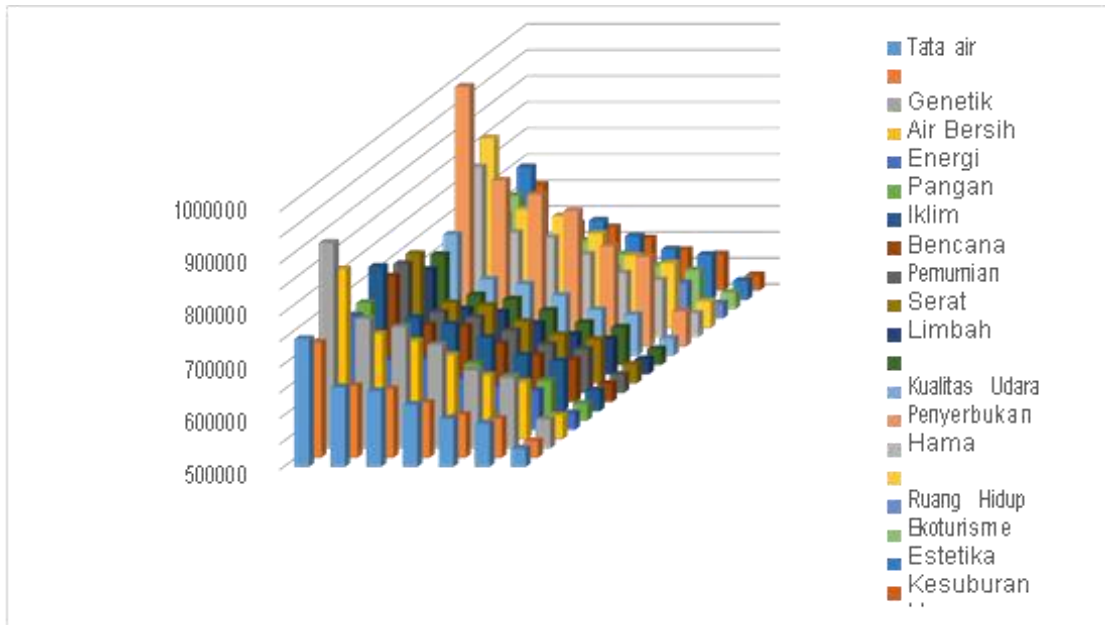
1. layanan penyedia atau *provisioning services* yaitu jasa atau produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya genetika, makanan, air, dan lain lain;
2. layanan pengaturan atau *regulating services* yaitu manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim, dan lain lain;
3. layanan kultural atau *cultural services* yaitu manfaat yang tidak bersifat material atau terukur dari ekosistem, seperti misalnya kekayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika, dan pengetahuan; dan

4. layanan pendukung atau *supporting services* yaitu jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, dll.

Setiap ekoregion memiliki jasa ekosistem yang lebih dominan dibandingkan jasa ekosistem lainnya. Untuk mengetahui jasa ekosistem dominan yang dihasilkan oleh setiap unit ekoregion, dilakukan pemetaan jasa ekosistem maksimum yang diperoleh dari perkalian antara luas satu unit wilayah ekoregion dengan setiap nilai Indeks Jasa Ekoregion atau IJE dalam unit wilayah ekoregion tersebut. Dari hasil perkalian tersebut didapatkan bahwa setiap satu wilayah ekoregion memiliki satu nilai maksimum dari 20 (dua puluh) nilai jasa ekosistem yang dihasilkan. Nilai maksimum tersebut menunjukkan jenis jasa ekosistem yang dominan untuk satu wilayah ekoregion. Proporsi jenis jasa ekosistem di setiap ekoregion di Daerah disajikan pada Gambar 2.23 sedangkan proporsi jenis jasa ekosistem di setiap ekoregion kecamatan disajikan pada Gambar 2.24.



Gambar 2.23
Proporsi Jenis Jasa Ekosistem di Setiap Ekoregion di Daerah
(Sumber : KLHS RPJMD, 2018)



Gambar 2.24
Proporsi Jenis Jasa Ekosistem di Setiap Kecamatan
di Daerah

(Sumber : KLHS RPJMD, 2018)

Dari Gambar 2.23 di atas dapat dilihat bahwa proporsi jasa ekosistem pada ekoregion perbukitan vulkanik lebih besar dibandingkan dengan proporsi jasa pada ekoregion perbukitan struktural. Hal ini terkait dengan ekoregion perbukitan vulkanik mempunyai cakupan yang lebih luas. Namun, hasil proporsi jasa per ekoregion tidak menunjukkan hasil maksimal sehingga dilakukan pemodelan grafis proporsi jasa ekosistem per-kecamatan yang menunjukkan hasil yang lebih jelas sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.24.

Pada Gambar 2.24, terlihat proporsi jasa ekosistem dari tinggi ke rendah – secara berurutan – yaitu pada Kecamatan Lembursitu, Cibeureum, Warudoyong, Cikole, Gunung Puyuh, Baros, dan Citamiang. Hasil proporsi menunjukkan jika Kecamatan Lembursitu memiliki proporsi jasa yang lebih tinggi diantara kecamatan lain. Hal tersebut disebabkan oleh luas wilayah Kecamatan Lembursitu yang lebih luas dibandingkan dengan kecamatan lain. Selain itu, jasa penyedia pangan di Kecamatan Lembursitu tinggi disebabkan oleh tutupan lahan eksisting masih didominasi oleh lahan pertanian. Jasa ekosistem dominan di setiap Kecamatan dengan jasa ruang hidup dan jasa penyedia air bersih yang dominan di semua kecamatan di Daerah disajikan pada Tabel 2.38.

Tabel

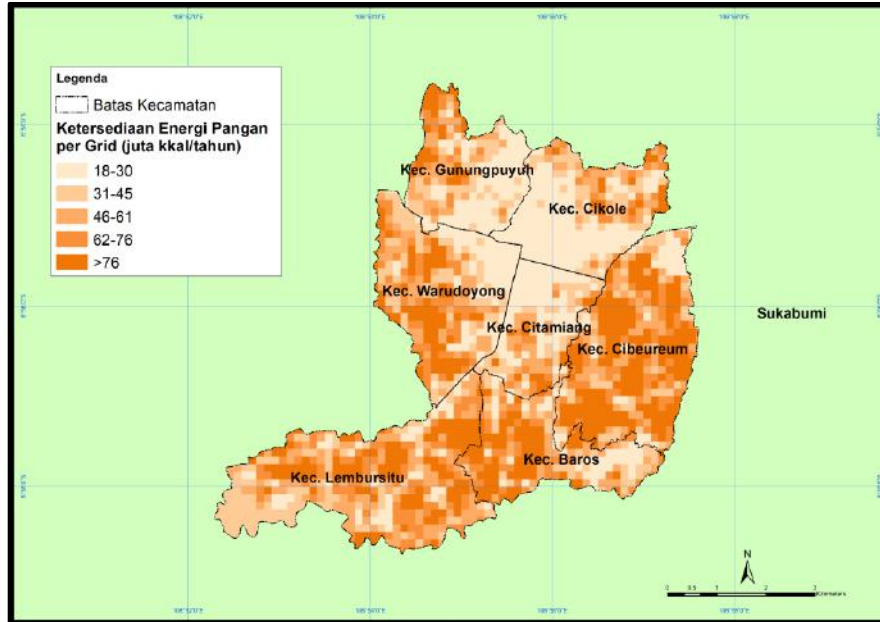
Tabel 2.38
Jasa Ekosistem Dominan di Setiap Ekoregion di Daerah

Kecamatan	Jasa Ekosistem Dominan	Kecamatan	Jasa Ekosistem Dominan
LEMBURSITU	1. Ruang Hidup	GUNUNG PUYUH	1. Ruang Hidup
	2. Air Bersih		2. Air Bersih
	3. Estetika		3. Estetika
	4. Energi		4. Energi
	5. Ekoturisme		5. Ekoturisme
BAROS	1. Ruang Hidup	WARUDOYONG	1. Ruang Hidup
	2. Air Bersih		2. Air Bersih
	3. Estetika		3. Estetika
	4. Energi		4. Ekoturisme
	5. Ekoturisme		5. Energi
CIBEUREUM	1. Ruang Hidup	CITAMIANG	1. Ruang Hidup
	2. Air Bersih		2. Air Bersih
	3. Estetika		3. Estetika
	4. Energi		4. Energi
	5. Ekoturisme		5. Ekoturisme
CIKOLE	1. Ruang Hidup		
	2. Air Bersih		
	3. Estetika		
	4. Energi		
	5. Ekoturisme		

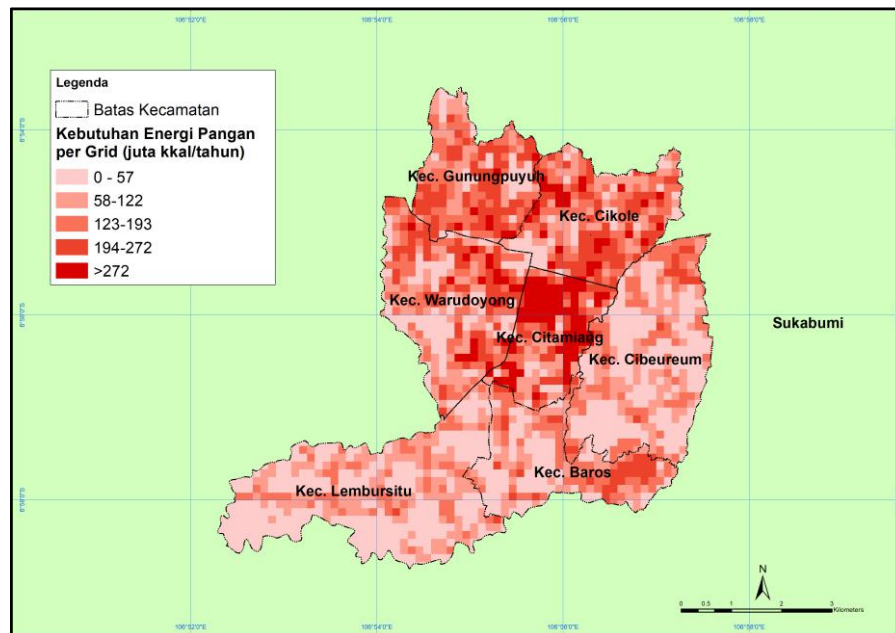
Sumber : KLHS RPJMD, 2018

2.9.2. Kapasitas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Pangan

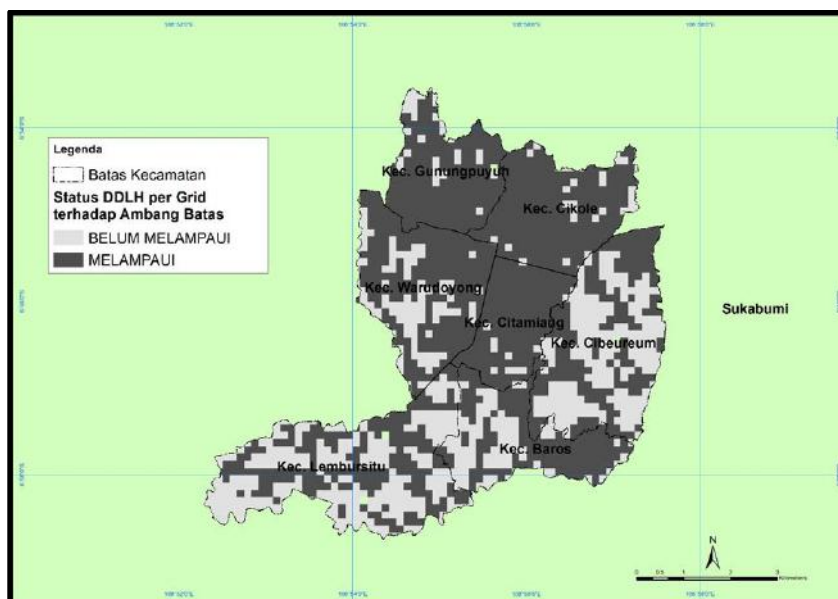
Penentuan status daya dukung penyedia pangan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan ambang batas, yaitu dengan menyelisihkan ambang batas terhadap jumlah penduduk eksisting, nilai selisih yang negatif menunjukkan bahwa status DDLH pangan wilayah tersebut telah melampaui. Hasil analisis untuk ketersediaan pangan, kebutuhan pangan, dan status DDLH pangan ditampilkan pada Gambar 2.25 sampai dengan Gambar 2.27.



Gambar 2.25
Peta Status Ketersediaan Pangan Di Daerah
Dalam Sistem Grid 5”x5”
(Sumber: Hasil Analisis, 2018)



Gambar 2.26
Peta Status Kebutuhan Pangan Di Daerah
Dalam Sistem Grid 5”x5”
(Sumber: Hasil Analisis, 2018)



Gambar 2.27
Peta Status DDLH Pangan Terhadap Ambang Batas
Di Daerah dalam Sistem Grid 5”x5”
(Sumber: Hasil Analisis, 2018)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa hampir semua wilayah kecamatan di Daerah telah melampaui ambang batas. Ketersediaan pangan, kebutuhan pangan serta selisihnya di Daerah disajikan pada Tabel 2.39.

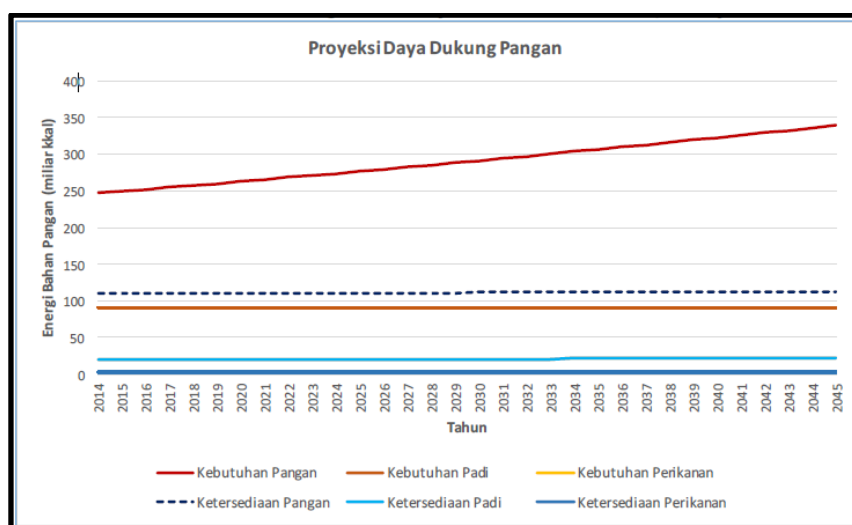
Tabel 2.39
Ketersediaan Pangan, Kebutuhan Pangan dan Status DDLH
Pangan terhadap Ambang Batasnya di Daerah

NO	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (Kkal/Tahun)	Kebutuhan Pangan (Kkal/Tahun)	Selisih (Kkal/Tahun)
1	Baros	14.933.952.066	25.185.766.500	-10.251.814.426
2	Cibereum	26.955.388.847	32.843.357.000	-5.887.968.151
3	Cikole	11.032.541.490	45.218.079.750	-34.185.538.265
4	Citamiang	6.507.479.414	38.878.869.250	-32.371.389.845
5	Gunungpuyuh	10.716.740.079	37.434.929.250	-26.718.189.171
6	Lembursitu	29.411.465.196	28.874.091.500	537.373.708
7	Warudoyong	18.487.953.894	43.555.979.250	-25.068.025.360
TOTAL		118.045.520.985	251.991.072.500	133.945.551.510

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Dari Tabel 2.39 di atas dapat diketahui bahwa secara umum Daerah sudah melampaui ambang batas penyediaan pangan. Dari 7 (tujuh) kecamatan di Daerah, Kecamatan Lembursitu merupakan satu-satunya kecamatan yang memiliki ketersediaan pangan melebihi kebutuhan pangannya, hal ini dikarenakan Kecamatan Lembursitu masih memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Kecamatan lainnya memiliki status DDLH Pangan yang melampaui ambang batasnya.

Analisis lebih lanjut dilakukan dengan model sistem dinamik untuk memproyeksikan daya dukung pangan sebagaimana disajikan pada Gambar 2.28.

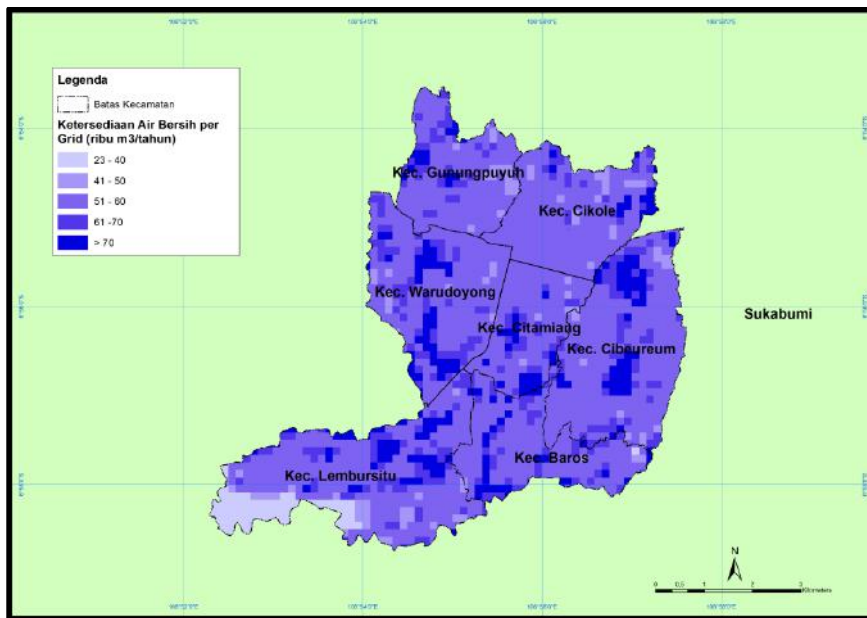


Gambar 2.28
Proyeksi Daya Dukung Pangan di Daerah
(Sumber: Hasil Analisis, 2018)

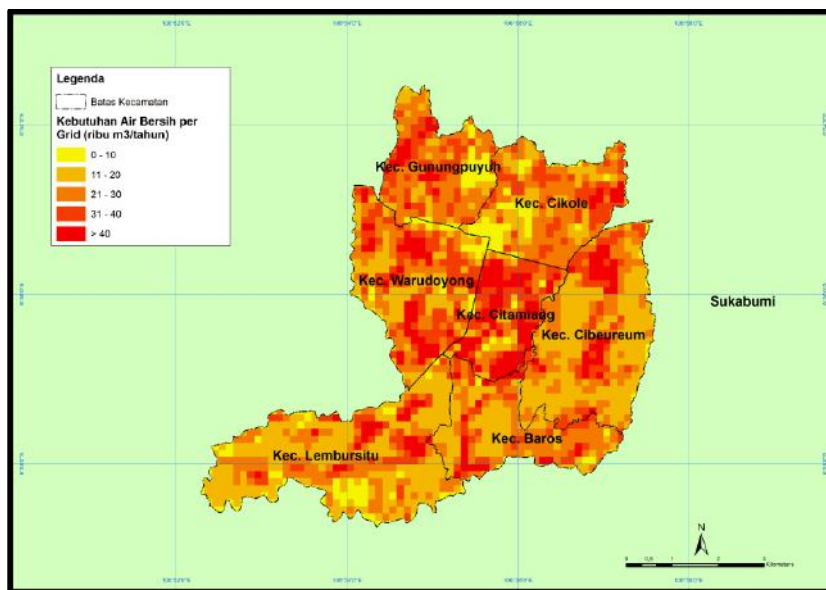
Pada grafik tersebut diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan pangan di Daerah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Sementara itu berdasarkan pada tren data pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk pemenuhan kebutuhan pangan di Daerah diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang tidak sebanding dengan kebutuhannya, sehingga gap antara kebutuhan dan ketersediaan sumber pangan akan semakin membesar. Pendekatan untuk nilai penyediaan pangan dilakukan dengan tren penyediaan beras dan perikanan, belum mempertimbangkan limitasi wilayah dan menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan pengadaan pangan di Daerah selalu konsisten setiap tahunnya.

2.9.3. Kapasitas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Air

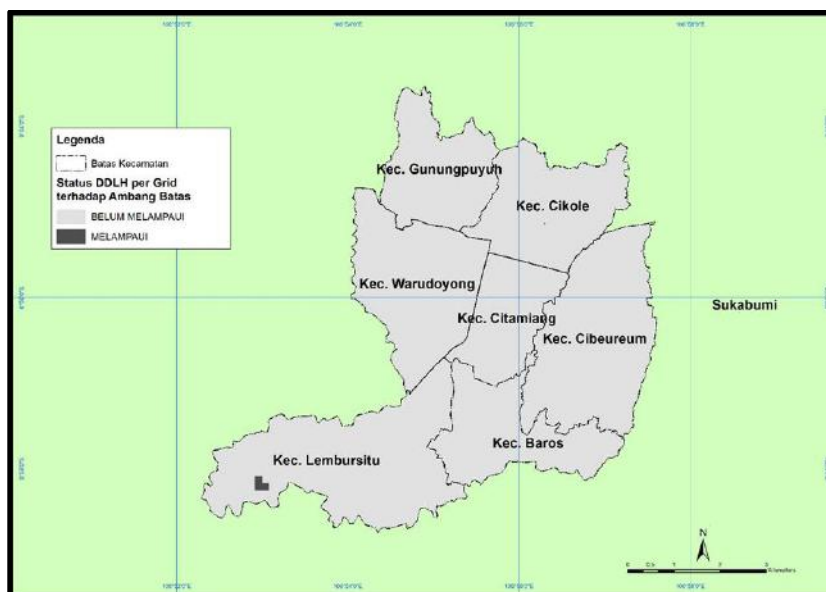
Sama halnya dengan penentuan status daya dukung penyedia pangan, status daya dukung penyedia air bersih juga diperoleh melalui penentuan ambang batas. Persebaran status daya dukung penyedia air bersih di Daerah disajikan pada Gambar 2.29 sampai dengan Gambar 2.31.



Gambar 2.29
Peta Status Ketersediaan Air Di Daerah
Dalam Sistem Grid 5”x5”
(Sumber: Hasil Analisis, 2018)



Gambar 2.30
Peta Status Kebutuhan Air Di Daerah
Tahun 2016 Dalam Sistem Grid 5”x5”
(Sumber: Hasil Analisis, 2018)



Gambar 2.31
Peta Status DDLH Untuk Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih
Di Daerah Tahun 2015 Dalam Sistem Grid 5”X5”

(Sumber: Hasil Analisis, 2018)

Dari Gambar 2.31 di atas, secara spasial dapat dilihat bahwa status daya dukung penyedia air yang belum melampaui daya dukungnya tersebar hampir di semua wilayah, kecuali di sebagian kecil di wilayah Kecamatan Lembursitu. Ketersediaan pangan, kebutuhan pangan Daerah serta selisihnya disajikan pada Tabel 2.40.

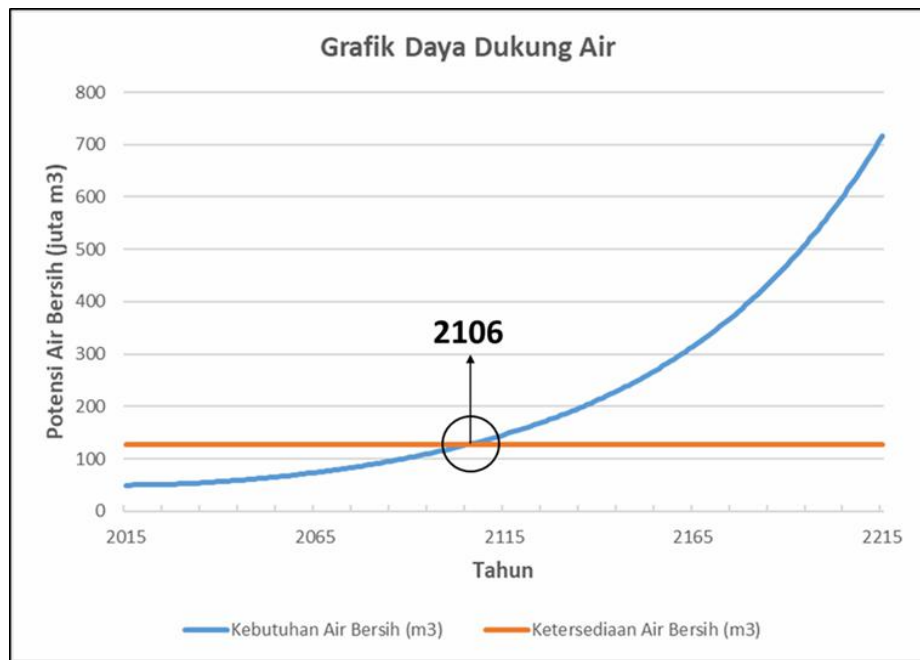
Tabel 2.40
Ketersediaan Pangan, Kebutuhan Pangan Daerah dan Status
DDLH Air terhadap Ambang Batasnya

NO	Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /Tahun)	Kebutuhan Domestik (m ³ /Tahun)	Kebutuhan Lahan (m ³ /Tahun)	Selisih (m ³ /Tahun)
1	Baros	14.963.540	2.772.922	3.131.204	9.059.414
2	Cibeureum	24.231.048	3.616.013	5.745.705	14.869.330
3	Cikole	15.998.260	4.978.454	1.531.856	9.487.949
4	Citamiang	9.803.872	4.280.515	1.668.108	3.855.248
5	Gunungpuyuh	13.687.301	4.121.539	1.957.134	7.608.628
6	Lembursitu	28.610.790	3.179.002	6.282.558	19.149.230
7	Warudoyong	20.441.806	4.795.459	4.066.419	11.579.929
TOTAL		127.736.617	27.743.904	24.382.984	75.609.729

Sumber : KLHS RPJMD, 2018

Secara umum, Daerah memiliki status DDLH air yang cukup baik dan belum melampaui ambang batas. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan air permukaan yang bersumber dari wilayah sungai melebihi dibandingkan kebutuhan air yang digunakan baik untuk kebutuhan domestik maupun kebutuhan untuk lahan pertanian dan industri. Kecamatan yang memiliki kondisi DDLH air yang paling baik adalah Kecamatan Lembursitu dengan selisih antara ketersediaan air dan kebutuhan air yang paling banyak yaitu sebesar 19.149.230 (sembilan belas juta seratus empat puluh sembilan dua ratus tiga puluh) m³/tahun adapun Kecamatan Citamiang memiliki selisih antara ketersediaan air dan kebutuhan air yang paling sedikit yaitu sebesar 3.855.248 (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan) m³/tahun.

Selanjutnya dengan menggunakan model sistem dinamik, dianalisis proyeksi daya dukung air sebagaimana disajikan pada Gambar 2.32.



Gambar 2.32
Proyeksi Daya Dukung Air di Daerah
(Sumber: Hasil Analisis, 2018)

Pada grafik tersebut diketahui bahwa titik kesetimbangan (jumlah ketersediaan sama dengan jumlah kebutuhan) terjadi pada tahun 2106. Berbeda dengan daya dukung pangan, ketersediaan air masih masih mengalami surplus hingga tahun 2106 dan mengalami

defisit

defisit setelah tahun 2106. Pendekatan yang dilakukan belum memperhitungkan limitasi luasan lahan.

2.10. CAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL'S

Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berperan penting sebagai acuan dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan. TPB dapat menjadi instrumen dalam perumusan isu strategis untuk penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan Program atau KRP, untuk menjamin bahwa KRP yang disusun dapat mendukung pencapaian TPB, mengingat pencapaian TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Terdapat tiga pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ketiga pilar ini sejalan dengan prinsip TPB yang mencakup tujuan kelompok ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Dengan demikian, isu-isu strategis – yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan – berkaitan erat dengan pencapaian TPB seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.33.



Gambar 2.33
Kaitan Antara Aspek Ekonomi, Sosial, Lingkungan dengan
Pencapaian TPB

(Sumber : Folke, dkk, 2016)

Gambar 2.33 di atas menceritakan bahwa kondisi lingkungan atau *biosphere* merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

2.10.1. Kondisi Umum Capaian Target TPB

Berdasarkan hasil dari analisis keterkaitan atau *crosscutting*, terdapat 204 (dua ratus empat) indikator TPB yang relevan terhadap kondisi Daerah. Indikator TPB tersebut dibagi ke dalam empat pilar, yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan, hukum dan tata kelola kelembagaan. Setiap indikator dalam tujuan TPB, memiliki capaian yang berbeda-beda. Setiap capaian tersebut ditampilkan pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Capaian TPB Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Jumlah Indikator	Telah mencapai target	Belum mencapai target	Perlu pendataan	Perlu peningkatan	Perlu penurunan	Tidak ada data (N/A)
1	Tanpa Kemiskinan	26	3	5	1	4	2	11
2	Tanpa Kelaparan	11	5	4	1	0	0	1
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	37	6	8	0	2	1	20
4	Pendidikan Berkualitas	13	3	5	0	4	1	0
5	Kesetaraan Gender	13	3	1	0	0	0	9
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	12	0	2	0	0	0	10

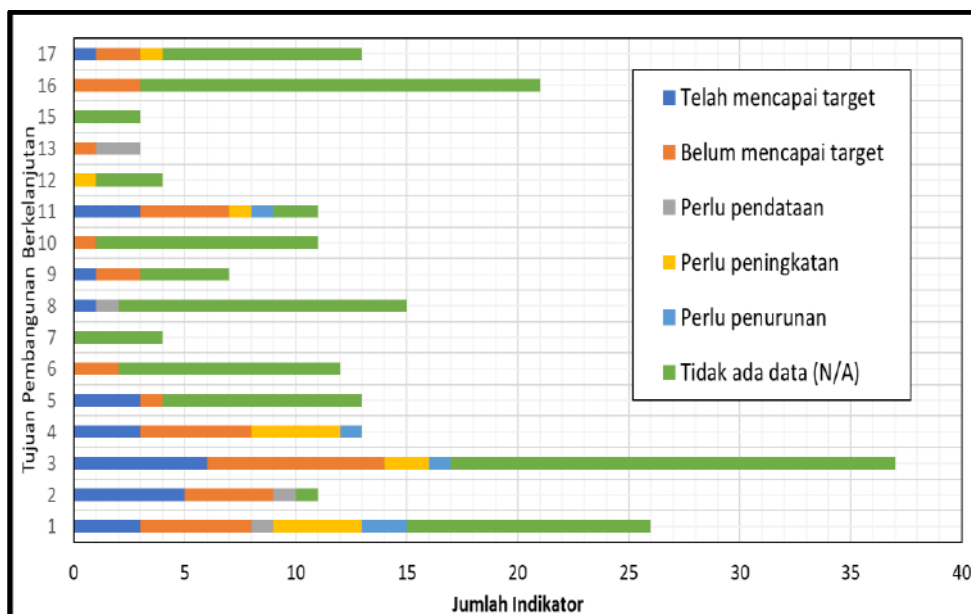
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Jumlah Indikator	Telah mencapai target	Belum mencapai target	Perlu pendataan	Perlu peningkatan	Perlu penurunan	Tidak ada data (N/A)
7	Menjamin Akses Energi	4	0	0	0	0	0	4
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	15	1	0	1	0	0	13
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	7	1	2	0	0	0	4
10	Mengurangi Kesenjangan	11	0	1	0	0	0	10
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	11	3	4	0	1	1	2
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	4	0	0	0	1	0	3
13	Penanganan Perubahan Iklim	3	0	1	2	0	0	0
15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	3	0	0	0	0	0	3
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	21	0	3	0	0	0	18
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	13	1	2	0	1	0	9
Total		204	26	38	5	13	5	117

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Indikator TPB di Daerah yang telah mencapai target nasional paling banyak adalah tujuan TPB 03 (Menjamin Kehidupan yang

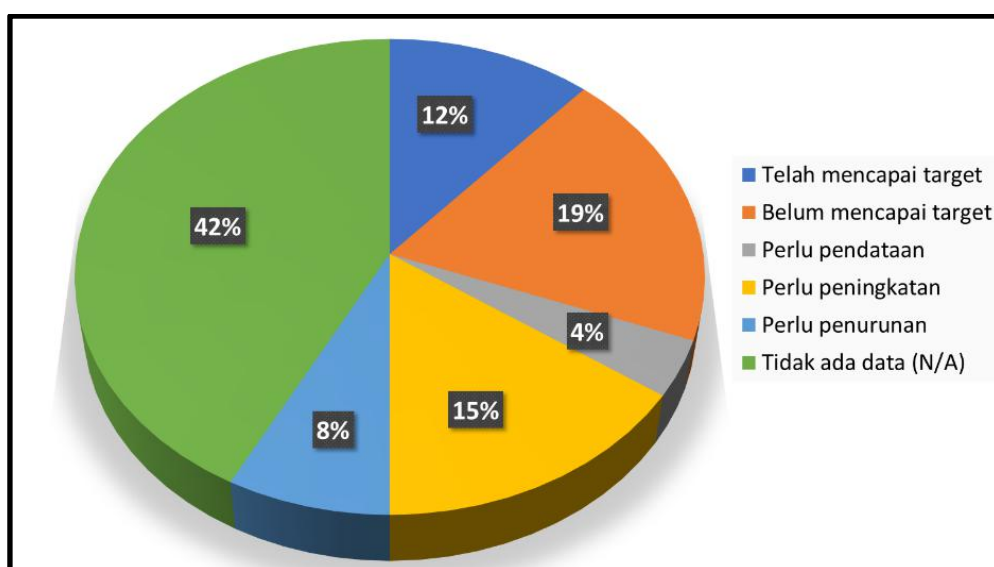
Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia) dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) indikator. Selanjutnya, pencapaian target nasional paling banyak kedua dan ketiga ada pada tujuan TPB 02 dan TPB 01 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun) dengan jumlah 11 (sebelas) dan 26 (dua puluh enam) indikator. Indikator TPB yang belum mencapai target nasional terbesar dan masih belum diketahui *gap*-nya dengan jumlah terbanyak juga terdapat di TPB 03. Secara lebih rinci, indikator TPB yang belum mencapai target nasional terbagi atas indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target serta indikator TPB sudah dilaksanakan dan belum mencapai target.

Indikator TPB yang perlu dilakukan penurunan dengan jumlah terbanyak yaitu pada tujuan TPB 01. Selanjutnya, terdapat tujuan TPB dengan indikator yang memiliki kriteria perlu pendataan terbanyak ada pada tujuan TPB 13 (Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya). Disisi lain, terdapat indikator TPB yang hanya memiliki kriteria belum diketahui nilai *gap* (N/A), yakni pada tujuan TPB 07 (Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua) dan TPB 15 (Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati). Total pencapaian indikator untuk masing-masing tujuan dalam TPB beserta dengan rincian masing-masing kelompok capaian disajikan pada Gambar 2.35.



Gambar 2.34
Grafik Capaian Indikator TPB Daerah
(Sumber : Hasil Analisis, 2018)

Persentase berdasarkan enam kriteria indikator TPB tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.36 dengan persentase terbesar yaitu 42% (empat puluh dua persen) yang dimiliki oleh kriteria indikator yang belum diketahui nilai gapnya (N/A). Adapun persentase terbesar kedua diikuti oleh kriteria indikator belum mencapai target dengan nilai 19% (sembilan belas persen). Kriteria telah mencapai target hanya mencapai nilai 12% (dua belas persen).

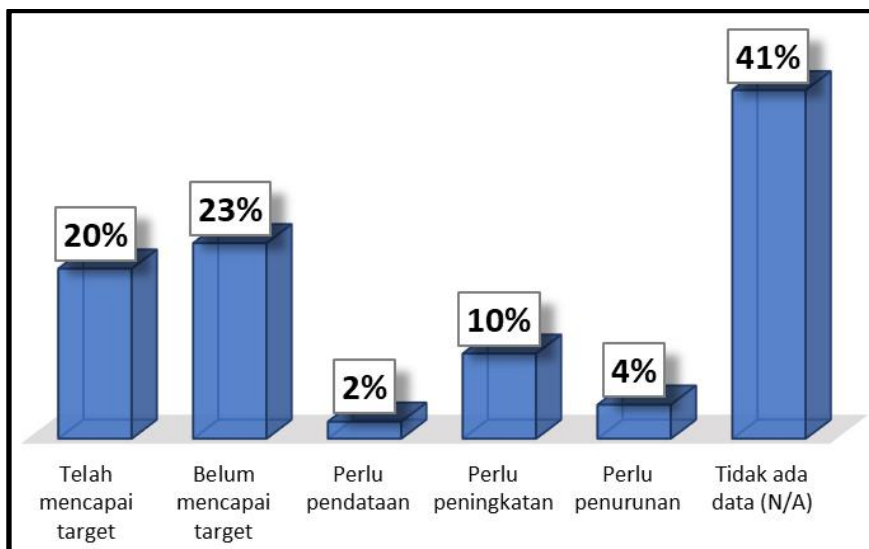


Gambar 2.35
Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap Target Proyeksi 2030
(Sumber : Hasil Analisis, 2018)

2.10.2. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup 5 (lima) tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Jumlah indikator pilar sosial adalah 100 (seratus) indikator. Persentase capaian indikator pilar sosial disajikan pada Gambar 2.36. Dari total 100 (seratus) indikator, terdapat 20 (dua puluh) indikator telah mencapai target, 23 (dua puluh tiga) indikator belum mencapai target, 2 (dua) indikator perlu pendataan, 10 (sepuluh) indikator perlu peningkatan, 4 (empat) indikator perlu penurunan, dan 41 (empat puluh satu) indikator tidak ada data.

Kondisi awal atau *baseline* indikator TPB dalam Pilar Sosial disajikan dalam Tabel 2.42.



Gambar 2.36
Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap Target Proyeksi 2030 dalam Pilar Sosial
(Sumber : Hasil Analisis, 2018)

Tabel 2.42
Kondisi Baseline Indikator TPB dalam Pilar Sosial

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2017)
1	1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	9.30%

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2017)
	1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	81,25% (2016)
		1.4.1.(g) APM(APM) SD/MI/ sederajat.	96,75%
		1.4.1.(h) APM(APM) SMP/MTs/ sederajat.	96,50%
		1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	92,00%
	1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Meninggal: 0,03% jiwa, hilang: 0 jiwa, terluka: 0 jiwa
		1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	1 kota
		1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	835 orang
		1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	141 orang
		1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	1 kota
		1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	114 (sedang)
		1.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp 2761150000
		1.5.3* Dokumen strategi	0 dokumen

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2017)
		pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	
	1.a. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Rp 3.000.000.000 (APBD), Rp 3.727.350.000 (8238 orang)
		1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Rp319.910.806.999
2	2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Konsumsi pangan : 2142 kkal/ hari
		2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	2,42%
		2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Kota Sukabumi tidak ada rawan pangan
		2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	0,004%
	2.2. Pada tahun 2030,	2.2.1* Prevalensi	4,09%

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2017)
	menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	
2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.		1,95%	
2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.		6,90%	
2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.		78,39%	
2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.		"PPH 2017 : 85.8 Konsumsi ikan : 39.47 kg/kap/tahun"	
3	3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).	116
	3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	7,82%
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.		4,47	
3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.		20,13	
	3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,04%
3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		199,6808699	
3.3.3* Kejadian		0,6%	

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2017)
		Malaria per 1000 orang.	
		3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	23 kabupaten/kota
		3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	1 orang
		3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	23 kabupaten/kota
	3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.	1,50%
		3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	1,46%
		3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	15
	3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	3.5.1(a) Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	0
		3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	9
	3.a. Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100%
	3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	10.77 per 100000 penduduk

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2017)
	berkembang pulau kecil.		
4	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	<p>4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.</p> <p>4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.</p> <p>4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.</p> <p>4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.</p> <p>4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.</p> <p>4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.</p>	<p>SD (Bahasa Indonesia: 73,70; matematika: 74,71; IPA: 65,87), SMP (Bahasa Indonesia: 63,80; matematika: 36,23; bahasa inggris: 48,42; IPA: 40,91)</p> <p>92,41%</p> <p>80,6%</p> <p>109,1%</p> <p>122,70%</p> <p>9.71 tahun</p>
	4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	67,20%
	4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi	4.5.1* Rasio APM(APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK)	SD: 99.75%, SMP: 103.65%, SMA: 103.3%

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2017)
	rentan.	perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	
	4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	99,99%
		4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	100,00%
	4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	a) SD 100%, SMP 100%; b) SD 6,6%, SMP 36,4%; c) SD 20%, SMP 65,91%; e) SD 100%, SMP 100%; f) SD L 35,4% P 21,2%, SMP L 26,4% P 17,3%
	4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Jumlah guru: SD: 1623, SMP: 811; SMA: 471, SMK: 651
5	5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	13 PERDA 4 PERWAL 24 KEPWAL"

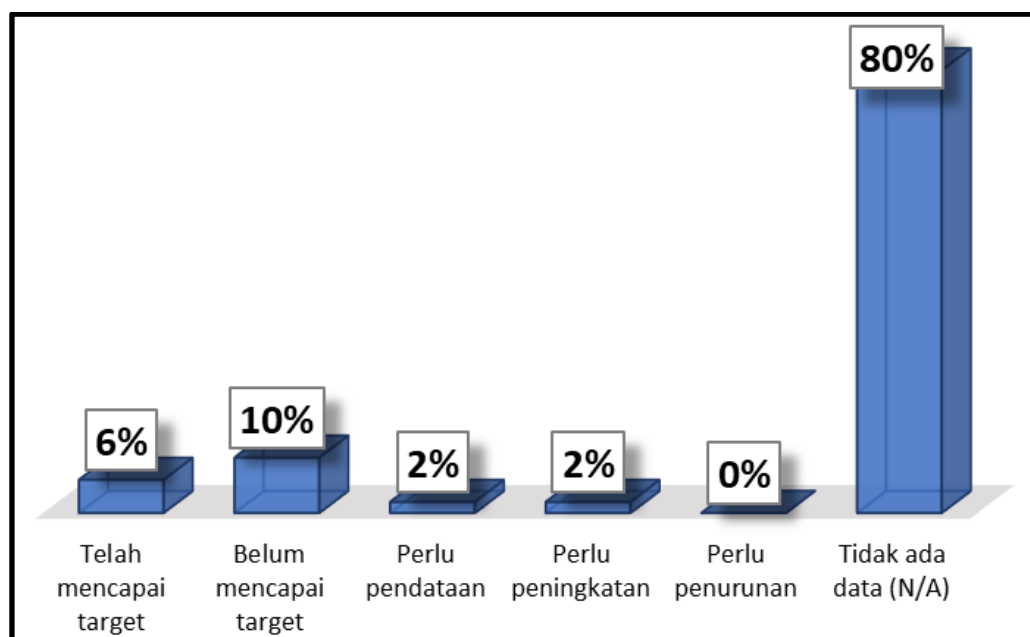
No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2017)
	5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1.(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	160,40%
	5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	134,25%
	5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	"LK = 73.27% PR = 69.80%"

Sumber : Hasil Analisis, 2018

2.10.3. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Jumlah indikator pilar ekonomi adalah 40 (empat puluh) indikator. Persentase capaian indikator pilar ekonomi disajikan pada Gambar 2.37. Dari total 40 (empat puluh) indikator, terdapat 3 (tiga) indikator telah mencapai target, 5 (lima) indikator belum mencapai target, 1 (satu) indikator perlu pendataan, 1 (satu) indikator perlu peningkatan, dan 40 (empat puluh) indikator tidak ada data.

Kondisi awal atau *baseline* indikator TPB dalam Pilar Ekonomi disajikan dalam Tabel 2.43.



Gambar 2.37
Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah terhadap Target Proyeksi 2030 dalam Pilar Ekonomi

(Sumber : Hasil Analisis, 2018)

Tabel 2.43
Kondisi Baseline Indikator TPB Dalam Pilar Ekonomi

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2017)
8	8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	69,04%
		8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	"Total UMKM tahun 2017 : 18446 unit
	8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp2.158.000 per 8 jam kerja
9	Secara Signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat	9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	231.846 orang

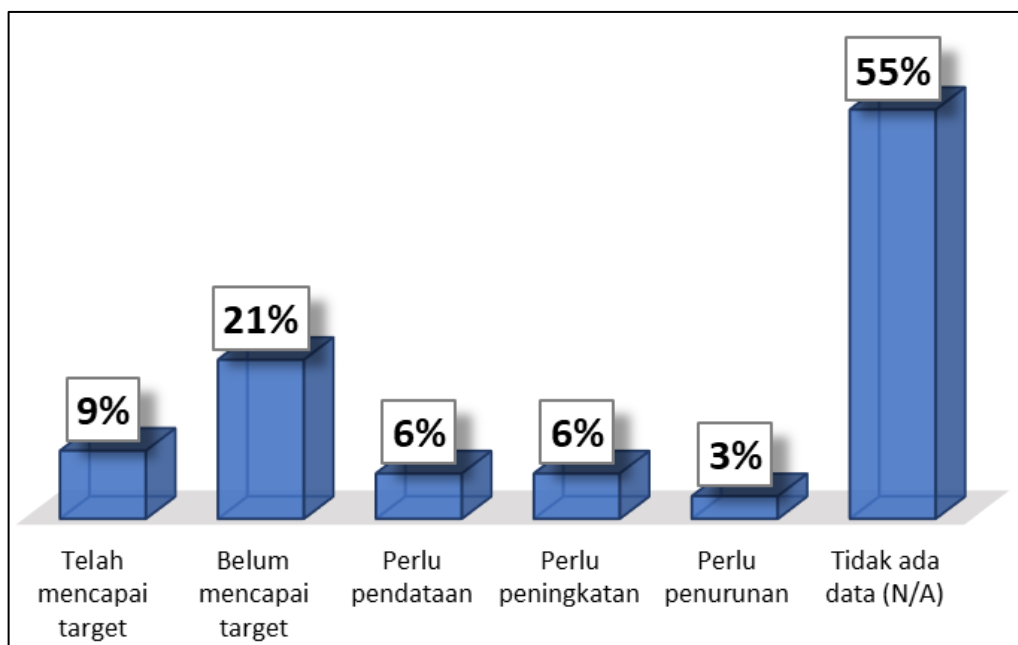
No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2017)
	proporsinya di negara kurang berkembang.		
	9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	72%
		9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet	42,47%
10	10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	9,3%
17	17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	96,97%
	17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	1
		17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	8836
		17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	96%

Sumber : Hasil Analisis, 2018

2.10.4. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup

Pilar lingkungan mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, dan Tujuan 15. Jumlah indikator untuk pilar lingkungan adalah 33 (tiga puluh tiga) indikator. Persentase capaian indikator pilar lingkungan disajikan pada Gambar 2.38. Dari total 33 (tiga puluh tiga) indikator, terdapat 3 (tiga) indikator telah mencapai target, 7 (tujuh) indikator belum mencapai target, 2 (dua) indikator perlu pendataan, 2 (dua) indikator perlu peningkatan, 1 (satu) perlu penurunan dan 18 (delapan belas) indikator tidak ada data.

Kondisi *baseline* Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup disajikan dalam Tabel 2.44.



Gambar 2.38
Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah Terhadap Target Proyeksi 2030 Dalam Pilar Lingkungan Hidup
(Sumber: Hasil Analisis, 2018)

Tabel 2.44
Kondisi Baseline Indikator TPB Dalam Pilar Lingkungan Hidup

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2017)
6	6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	27 desa/kelurahan
		6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	27 desa/kelurahan
11	11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.	11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	30%
		11.2.1.(b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	2 rute
	11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Meninggal : 0,03% jiwa, hilang: 0 jiwa, terluka: 0 jiwa, mengungsi : 0 jiwa
		11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	1 set
		11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp2.761.150.000
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	87%	

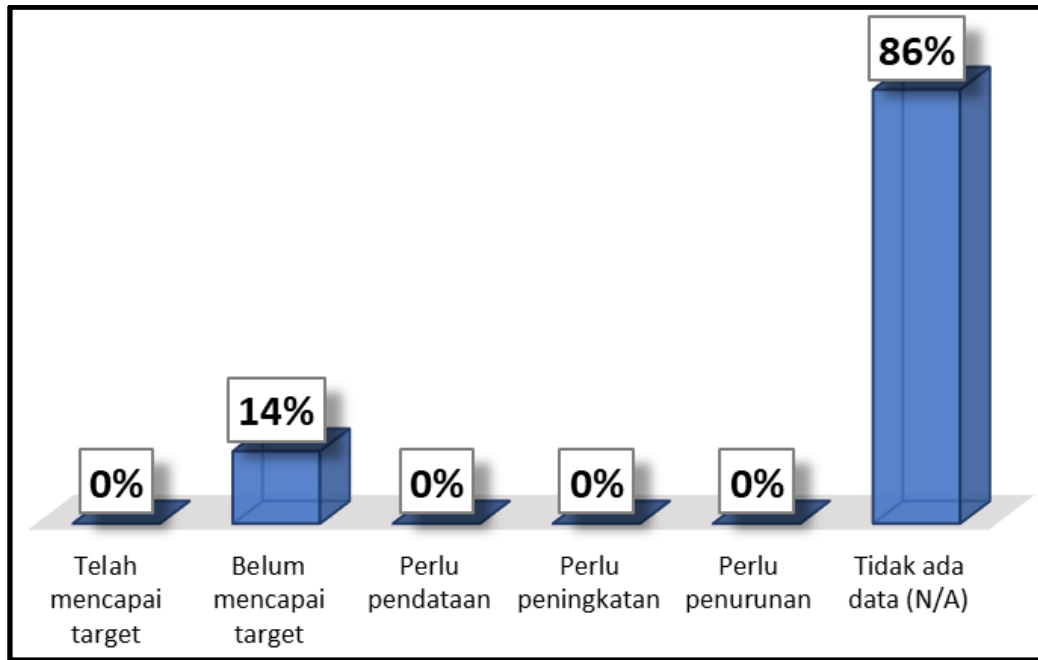
No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2017)
12	12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	587,7 kg/hari
13	13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Meninggal: 0,02%, Hilang: 0 jiwa, terkena dampak 0,02%

Sumber : Hasil Analisis, 2018

2.10.5. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola pemerintahan mencakup satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 16. Jumlah indikator pilar lingkungan adalah 21 (dua puluh satu) indikator. Persentase capaian indikator pilar lingkungan disajikan pada Gambar 2.39. Dari total 21 (dua puluh satu) indikator, belum terdapat indikator yang mencapai target, sebanyak 3 (tiga) indikator belum mencapai target dan 18 (delapan belas) indikator tidak ada data.

Kondisi *baseline* Indikator TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan disajikan dalam Tabel 2.44.



Gambar 2.39
Persentase Status Ketercapaian TPB di Daerah
terhadap Target Proyeksi 2030 dalam Pilar Hukum
dan Tata Kelola Pemerintahan
(Sumber: Hasil Analisis, 2018)

Tabel 2.45
Kondisi Baseline Indikator TPB Dalam Pilar Hukum
Dan Tata Kelola Pemerintahan

No TPB	Target	Indikator	Capaian (Tahun 2017)
16	16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	72,36%
	16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	14,28%
	16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	91,04%
		16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	92,00%

Sumber : Hasil Analisis, 2018

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Definisi keuangan negara dalam kedudukan hukum tertinggi tercantum dalam Pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang*”. Sedangkan definisi keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, “*Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*”

Keuangan negara perlu dikelola secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara telah menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum, antara lain :

1. akuntabilitas berorientasi pada hasil;
2. profesionalitas;
3. proporsionalitas;
4. keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan
5. pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan diaduknya asas-asas umum tersebut di dalam undang-undang tentang keuangan negara, pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penyusunan gambaran keuangan Daerah diperlukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan Daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan Daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan Daerah. Selanjutnya belanja Daerah sebagai komponen keuangan Daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi Daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kinerja pelaksanaan APBD Daerah meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013-2017
(Sebelum dilakukan Audit BPK)

NO.	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	PENDAPATAN	844.264.174.684	996.914.566.265	1.066.524.009.697	1.163.015.041.941	1.216.204.685.623	9,55
1.1	Pendapatan Asli Daerah	175.539.318.476	258.467.192.313	276.845.561.835	295.257,670.781	359.024.019.506	19,59
1.1.1	Pajak Daerah	21.156.636.386	28.399.453.587	29.688.546.027	41.565.643.464	43.365.617.424	19,65
1.1.2	Retribusi Daerah	9.926.090.182	10.889.136.325	10.975.693.725	8.695.308.540	8.755.114.704	(3,09)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.592.329.903	3.720.164.962	3.510.672.129	3.736.443.668	3.953.494.440	2,42
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	140.864.262.005	215.458.437.439	232.670.649.954	241.260.275.109	302.949.792.938	21,10
1.2	Dana Perimbangan	539.661.453.913	570.490.506.596	571.878.632.516	702.120.023.658	699.677.068.681	6,71
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	65.433.653.913	64.583.964.596	48.092.145.516	62.517.352.066	66.520.258.907	0,41
1.2.2	Dana Alokasi Umum	449.179.037.000	484.938.664.000	487.739.457.000	504.731.937.000	495.865.420.000	2,50

NO.	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	25.048.763.000	20.967.878.000	36.047.030.000	134.870.734.592	137.291.389.774	53,01
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	129.063.402.295	167.956.867.356	217.799.815.346	165.637.347.502	157.503.597.436	5,10
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	305.211.000	2.834.000.000	44.816.466.325	1.428.000.000	67,25
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	29.814.764.075	43.522.222.691	58.343.527.501	55.872.280.577	60.243.582.133	19,23
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	74.449.501.000	95.986.380.000	95.811.898.000	42.454.246.000	7.500.000.000	(43,66)
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	24.799.137.220	28.143.053.665	60.810.389.845	22.494.354.600	88.332.015.303	37,38
2	BELANJA	838.405.936.902	917.115.741.592	1.043.109.811.651	1.155.744.384.389	1.160.219.417.015	8,46
2.1	Belanja Tidak Langsung	439.583.423.412	459.010.799.740	471.324.089.050	505.109.345.522	439.739.793.710	0,01
2.1.1	Belanja Pegawai	403.279.679.033	430.450.033.805	438.397.814.900	472.988.783.880	390.669.710.210	(0,79)

NO.	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	28.488.933.473	23.216.612.950	25.024.409.300	26.772.248.750	42.097.614.160	10,25
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.163.953.000	3.827.550.000	4.259.750.000	3.181.415.000	4.978.500.000	(5,20)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan dan Kelurahan	550.384.106	598.607.185	642.114.850	715.373.492	715.373.392	6,77
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.100.473.800	917.995.800	3.000.000.000	1.451.524.400	1.278.595.948	3,82
2.2	Belanja Langsung	398.822.513.490	458.104.941.852	571.785.722.601	650.635.038.867	720.479.623.305	15,93
2.2.1	Belanja Pegawai	48.612.320.011	49.324.473.746	59.505.274.002	65.650.139.375	78.957.447.861	12,89
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	234.687.000.304	292.700.212.591	346.067.904.666	379.482.605.337	424.444.796.821	15,97

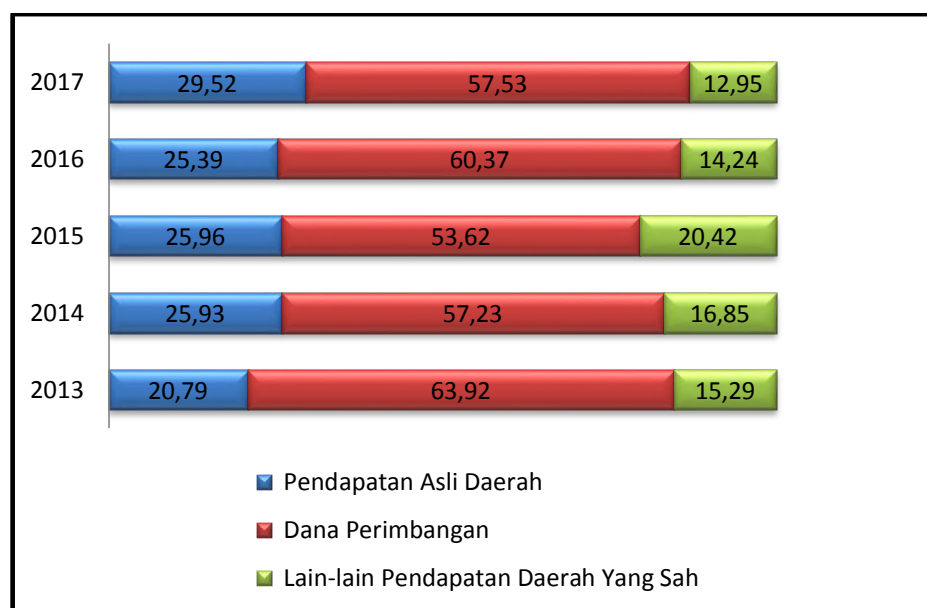
NO.	URAIAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
2.2.3	Belanja Modal	115.523.193.175	116.080.255.515	166.212.543.933	205.502.294.155	217.077.378.623	17,08
3	PEMBIAYAAN	609.770.171.868	613.406.505.913	689.963.456.506	822.047.496.587	780.538.732,842	6,37
3.1	Penerimaan Pembiayaan	70.108.717.934	42.915.999.291	118.084.823.964	119.927.472.904	80.861.664.131	3,63
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000,000	4.630.000,000	8.260.439.996	46.816.466.325	3.428.000.000	22,95

Sumber : LRA Kota Sukabumi Tahun 2013-2017

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada tahun 2013-2017 mengalami pertumbuhan sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari Rp. 844.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh empat milyar) pada tahun 2013 menjadi Rp. 1.200.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus milyar rupiah) pada pada tahun 2017.

Pendapatan Daerah diperoleh dari tiga pos yaitu pos pendapatan asli daerah, pos dana perimbangan, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2013-2017, porsi pendapatan Daerah paling tinggi disumbangkan oleh dana perimbangan. Berikut ini perkembangan porsi pos pendapatan Daerah tahun 2013-2017.



Gambar 3.1
Perkembangan Porsi Pos Pendapatan Daerah
Tahun 2013-2017

(Sumber: LRA Daerah Tahun 2013-2017 (diolah))

Dari gambar di atas terlihat bahwa dana perimbangan masih menjadi pos dengan kontribusi terbesar dalam pendapatan Daerah tahun 2013-2017. Porsi dana perimbangan terbesar dalam pendapatan Daerah terdapat pada tahun 2013 yaitu sebesar 63,92% (enam puluh tiga koma sembilan puluh dua persen) dan terendah pada

tahun

tahun 2015 sebesar 53,62% (lima puluh tiga koma enam puluh dua persen).

Kontribusi terbesar kedua terhadap pendapatan Daerah tahun 2013-2017 berasal dari porsi pos pendapatan asli daerah. Porsi pos pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan setiap tahun dari 20,79% (dua puluh koma tujuh puluh sembilan persen) pada tahun 2013 menjadi 29,52% (dua puluh sembilan koma lima puluh dua persen) pada tahun 2017. Adapun pendapatan Daerah terkecil berasal dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Porsi lain-lain pendapatan daerah yang sah terbesar terdapat pada tahun 2015 sebesar 20,42% (dua puluh koma empat puluh dua persen) dan porsi terkecil terdapat pada tahun 2017 sebesar 12,95% (dua belas koma sembilan puluh lima persen).

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa APBD Daerah masih cenderung bertumpu pada pendapatan yang berasal dari dana perimbangan atau dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Aspek kemandirian yang tercermin dari porsi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah belum berjalan dengan optimal.

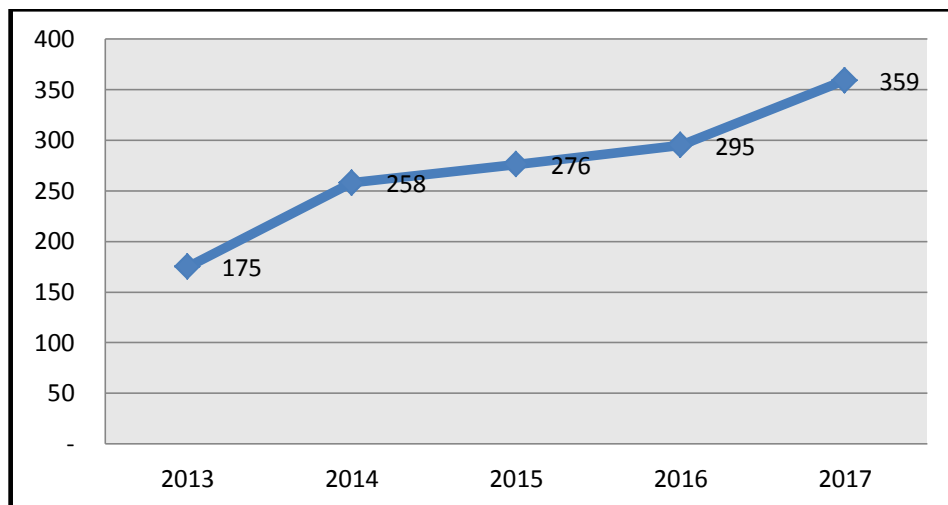
a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi asli daerah, ada empat pos dalam PAD yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2013 pendapatan asli daerah sebesar Rp. 175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar) kemudian terus meningkat hingga mencapai angka Rp. 359.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan milyar) pada tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa terdapat usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan

daerahnya

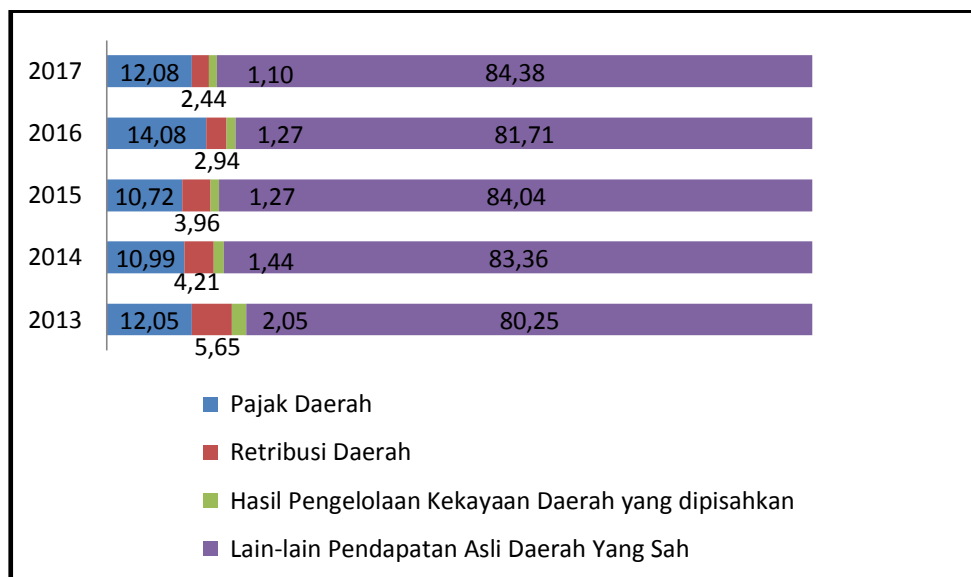
daerahnya dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2013-2017 disajikan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2
Grafik Realisasi Penerimaan PAD Daerah
Tahun 2013-2017

(Sumber: LRA Daerah Tahun 2013-2017(diolah)-Dalam Milyar)

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah paling tinggi berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, berikut ini perkembangan kontribusi pos-pos pendapatan asli daerah pada APBD Daerah tahun 2013-2017.



Gambar 3.3
Perkembangan Porsi Pos Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2013-2017

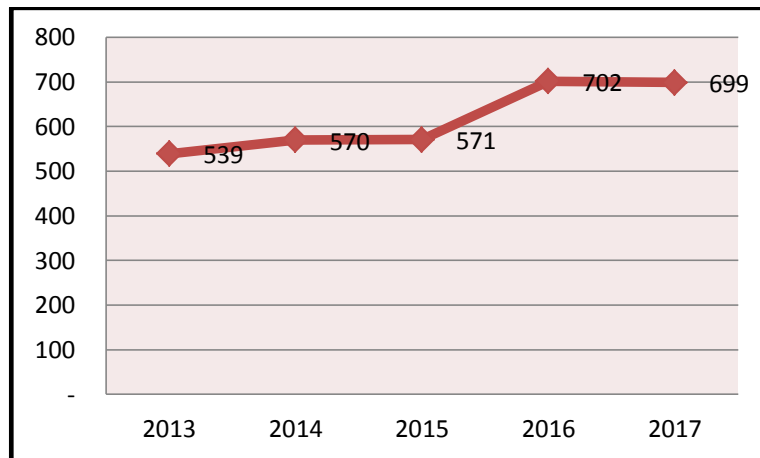
(Sumber: LRA Daerah Tahun 2013-2017 (diolah))

Pada gambar di atas terlihat bahwa porsi lain-lain pendapatan asli daerah menjadi pos dengan kontribusi terbesar, pada kurun waktu tahun 2013-2017 pos ini berkontribusi sebesar 80-84% dari total penerimaan pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah tertinggi kedua adalah pos pajak daerah yang berkontribusi sebesar 10-12% dari total pendapatan asli daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat. Dalam APBD, pos dana perimbangan terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Setiap sumber memiliki konsep dan tujuan yang berbeda.

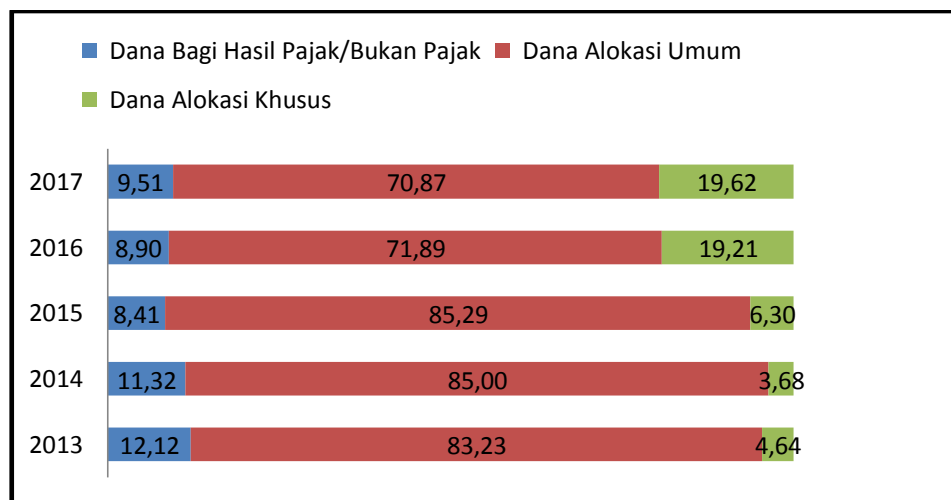
Dari Tabel 3.1 di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan penerimaan pendapatan Daerah yang bersumber dari dana perimbangan. Realisasi penerimaan dana perimbangan pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 539.000.000.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan milyar) dan terus meningkat hingga mencapai jumlah Rp. 699.000.000.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan milyar) pada tahun 2017 sebagaimana disajikan pada Gambar 3.4 berikut.



Gambar 3.4
Grafik Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Daerah Tahun 2013-2017

(Sumber: LRA Daerah Tahun 2013-2017 (diolah)-
Dalam Milyar)

Pada gambar di atas terlihat bahwa peningkatan penerimaan dana perimbangan Daerah meningkat secara signifikan pada tahun 2016 yaitu sebesar 22,94% (dua puluh dua koma sembilan puluh empat persen) dari tahun sebelumnya. Berikut ini kontribusi masing-masing pos dana perimbangan terhadap total penerimaan dana perimbangan Daerah.



Gambar 3.5
Perkembangan Porsi Pos Dana Perimbangan Daerah Tahun 2013-2017

(Sumber: LRA Daerah Tahun 2013-2017 (diolah))

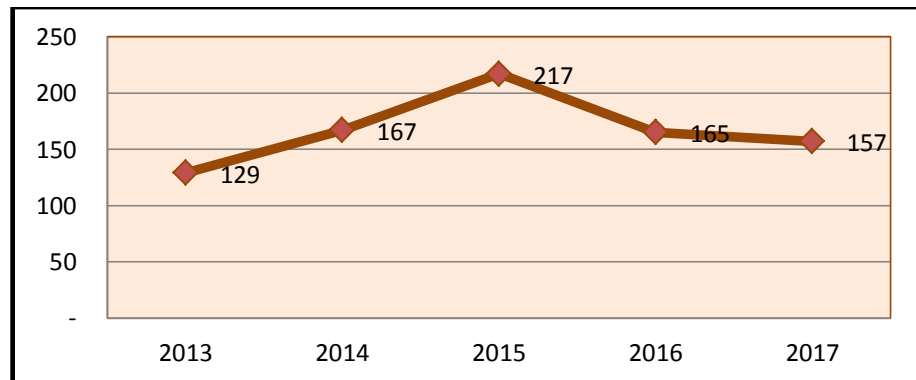
Pos DAU menjadi pos dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan dana perimbangan di Daerah meskipun

terus mengalami penurunan. DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerahnya.

Pos dengan kontribusi terbesar kedua adalah pos DAK yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2016 dari kontribusi sebesar 6,30% (enam koma tiga puluh persen) menjadi sebesar 19,21% (sembilan belas koma dua puluh satu persen) pada tahun 2017. Sedangkan pos bagi hasil pajak atau bukan pajak relatif stabil di rentang 8-12%.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Penerimaan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah di Daerah pada tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini berbeda dengan realisasi penerimaan pos pendapatan daerah lainnya.



Gambar 3.6
Grafik Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2013-2017

(Sumber: LRA Daerah Tahun 2013-2017 (diolah)- Dalam Milyar)

Penurunan

Penurunan pos ini disebabkan karena adanya penurunan penerimaan pada pos-pos pembentuknya, ada tiga pos yang mengalami penurunan penerimaan yaitu pos pendapatan hibah, pos dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan pos bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Hanya satu pos dengan peningkatan penerimaan yaitu dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

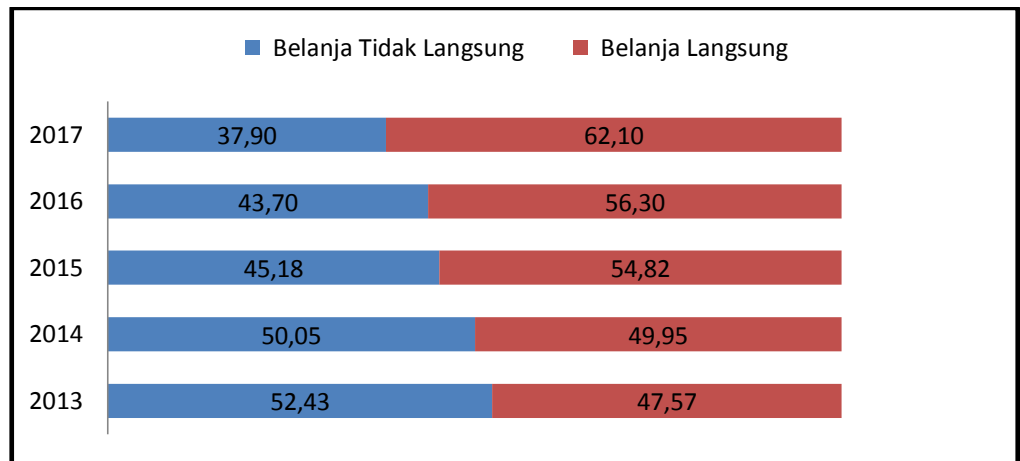
3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah dikelompokkan dalam dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Selama kurun waktu lima tahun dari 2013-2017, belanja daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,46% (delapan koma empat puluh enam persen) per tahun, dengan rincian belanja langsung meningkat rata-rata 13,48% (tiga belas koma empat puluh delapan persen) per tahun dan belanja tidak langsung meningkat rata-rata 15,75% (lima belas koma tujuh puluh lima persen) per tahun.

Realisasi

Realisasi belanja Pemerintah Daerah disajikan pada Gambar 3.7 sebagai berikut.



Gambar 3.7
Persentase Perkembangan Porsi Pos Belanja Daerah
Tahun 2013-2017

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:

- 1) belanja pegawai, dialokasikan untuk penyediaan gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) belanja hibah, dialokasikan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) belanja bantuan sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) belanja bantuan keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat

umum

umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang dianggarkan dalam belanja ini dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait;

- 5) belanja tidak terduga, ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa atau tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program atau kegiatan.

Belanja tidak langsung Pemerintah Daerah pada kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata 0,01% (nol koma nol satu persen). Pertumbuhan tertinggi pada komponen belanja hibah sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen).

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) belanja pegawai, merupakan pengeluaran untuk honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
- 2) belanja barang dan jasa, merupakan pengeluaran untuk pembelian atau pengadaan barang yang dinilai

manfaatnya

manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah; dan

- 3) belanja modal, merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Proporsi belanja langsung Pemerintah Daerah pada kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung meningkat yang semula 47,57% (empat puluh tujuh koma lima puluh tujuh persen) pada tahun 2013 naik menjadi 62,10% (enam puluh dua koma sepuluh persen) pada tahun 2017.

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

3.1.2. Neraca

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur atau pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Setiap elemen utama dari neraca daerah akan

diturunkan

diturunkan dalam beberapa sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan neraca Pemerintah Daerah dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Pemerintah Daerah

No	U R A I A N	Rata-rata Pertumbuhan
A	ASET	
A.I	ASET LANCAR	
1	Kas di Kas Daerah	37.08%
2	Investasi Jangka Pendek	-50.00%
3	Piutang Pajak	10.73%
4	Penyisihan Piutang Pajak	13.05%
5	Piutang Pajak Netto	1.99%
6	Piutang Retribusi	0.00%
7	Penyisihan Piutang Retribusi	1.43%
8	Piutang Retribusi Netto	-50.00%
9	Belanja Dibayar Dimuka	-19.20%
10	Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi	26.62%
11	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.49%
12	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	9.45%
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	-64.20%
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	0.00%
15	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	0.00%
16	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan Netto	0.00%
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	17.27%
18	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	23.69%
19	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	-15.17%
20	Piutang Lainnya	13.09%
21	Penyisihan Piutang Lainnya	16.69%
22	Piutang Lainnya Netto	19.95%
23	Persediaan	75.07%
24	Jumlah Aset Lancar	49.29%
A.II	INVESTASI JANGKA PANJANG	

No	URAIAN	Rata-rata Pertumbuhan
1	Investasi Nonpermanen	0.00%
2	Pinjaman Jangka Panjang	0.00%
3	Investasi dalam Surat Utang Negara	0.00%
4	Investasi Dana Bergulir	-5.81%
5	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	0.00%
6	Investasi Nonpermanen Lainnya	0.00%
7	Jumlah Investasi Nonpermanen	-5.81%
8	Investasi Permanen	0.00%
9	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	82.33%
10	Investasi Permanen Lainnya	0.00%
11	Jumlah Investasi Permanen	82.33%
12	Jumlah Investasi Jangka Panjang	71.37%
A.III ASET TETAP		
1	Tanah	-1.11%
2	Peralatan dan Mesin	17.80%
3	Gedung dan Bangunan	9.21%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.16%
5	Aset Tetap Lainnya	6.75%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	191.58%
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	9.63%
8	Jumlah Aset Tetap	6.53%
A.IV ASET LAINNYA		
1	Tagihan Penjualan Angsuran	0.00%
2	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	0.00%
3	Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0.00%
4	Tuntutan Perbendaharaan	0.00%
5	Tuntutan Ganti Rugi	-50.00%
6	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	0.00%
7	Tuntutan Ganti Rugi Netto	-50.00%
8	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00%
9	Aset Tak Berwujud	3.68%
10	Amortisasi Aset Tak Berwujud	65.92%

No	U R A I A N	Rata-rata Pertumbuhan
11	Aset Tak Berwujud Netto	1.22%
12	Aset Lain-Lain	-0.35%
13	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-0.75%
14	Aset lain-lain Netto	-10.63%
15	Jumlah Aset Lainnya	-19.60%
16	JUMLAH ASET	7.97%
B	KEWAJIBAN	
B.I	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-54.58%
2	Utang Bunga	0.00%
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00%
4	Pendapatan diterima dimuka	17.41%
5	Utang Belanja	0.00%
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	36.78%
7	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	34.76%
B.II	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
1	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0.00%
2	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0.00%
3	Premium (Diskonto) Obligasi	0.00%
4	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00%
5	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0.00%
6	JUMLAH KEWAJIBAN	52.73%
C.	EKUITAS	7.57%
1	Ekuitas	7.57%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.97%

Sumber : BPKD Kota Sukabumi, diolah

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang. Aset terdiri atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Kewajiban

Kewajiban merupakan dampak dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang terjadi dimasa lalu. Kewajiban memberikan informasi kepada pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas dan lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi, aset tetap, dan aset lainnya namun tidak termasuk dana cadangan dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

3.1.3. Kinerja Pendanaan Non APBD

3.1.3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Daerah selain bersumber dari APBD Daerah, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Daerah.

Tabel 3.3
Perkembangan Pendanaan APBN
(Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan) Daerah
Tahun 2013 - 2017

TAHUN	JENIS APBN		JUMLAH
	DANA DEKONSENTRASI	TUGAS PEMBANTUAN	
2013	-	9.540.225.000	9.540.225.000
2014	-	6.397.056.425	6.397.056.425
2015	-	13.896.557.111	13.896.557.111
2016	-	610.280.000	610.280.000
2017	-	-	-

Sumber : LKPJ AMJ 2013-2018 Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Daerah mendapatkan pendanaan dari APBN berupa tugas pembantuan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dengan perkembangan yang cukup fluktuatif. Jumlah dana tugas pembantuan yang diterima Daerah paling besar terdapat pada tahun 2015 sebesar Rp. 13.896.557.111,- (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus sebelas rupiah) sedangkan paling kecil terdapat pada tahun 2016 sebesar Rp. 610.280.000,- (enam ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Pada tahun 2017 Daerah tidak lagi mendapatkan pendanaan melalui tugas pembantuan. Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tiga Menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyatakan pemindahan pengalokasian pendanaan APBN dari dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.1.3.2. Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Pendanaan pembangunan non APBD Daerah yang lainnya selain dari APBN adalah program kemitraaan dan bina lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Sampai dengan saat ini sudah terdaftar sebanyak 2 (dua) mitra PKBL dan TJSL Daerah. Mitra PKBL dan TJSL diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini haruslah berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Program pembangunan yang

dikerjasamakan

dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang berkesinambungan atau *sustainable* serta berdampak positif terhadap masyarakat. Penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang untuk memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat di prediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Dukungan kerjasama pendanaan untuk pelaksanaan program pembangunan di Daerah yang bersumber dari TJSLP atau PKBL dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Rekapitulasi Pendanaan TJSLP/PKBL BUMD dan BUMN
Daerah Tahun 2013 - 2018

TAHUN	REALISASI		JUMLAH TOTAL
	BUMD	BUMN	
	PT Bank BJB.Tbk	PT Bank BNI. Tbk	
2013	250.000.000	-	250.000.000
2014	249.992.500	-	249.992.500
2015	300.192.000	-	300.192.000
2016	290.600.000	-	290.600.000
2017	462.500.000	65.450.000	527.950.000
2018	67.790.000	-	67.790.000
Jumlah	1.621.074.500	241.105.500	1.862.180.000

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas untuk realiasi program CSR atau TJSLP perusahaan yang bersumber dari BUMD dan BUMN di Daerah selama kurun waktu 6 (enam) tahun untuk anggaran tertinggi dilakukan oleh PT Bank BJB.Tbk dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.1.621.074.500,- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan keuangan Daerah sudah baik dimana tercermin dari opini laporan keuangan yang sudah masuk dalam kategori WTP (wajar tanpa pengecualian) oleh BPK RI. Kebijakan pengelolaan keuangan pada tahun atau periode sebelumnya dijadikan sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan lima tahun kedepan. Adapun kebijakan pengelolaan keuangan tersebut terdiri dari :

1. kebijakan pendapatan;
2. kebijakan belanja; dan
3. kebijakan pembiayaan.

a. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan dengan instensifikasi dan ekstensifikasi melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. melakukan pendataan ulang obyek pajak dan retribusi untuk akurasi dan pemutahiran data dalam menggali sumber penerimaan yang belum optimal;
2. meningkatkan efektivitas dan efesiensi pemungutan dengan cara menekan biaya operasionalnya;
3. melakukan upaya penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi yang menunggak melalui tim khusus yang dibentuk oleh Perangkat Daerah terkait;
4. pembuatan peraturan untuk menjaring wajib pajak dan retribusi daerah yang baru.

b. Kebijakan Belanja

Belanja daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada dasarnya terdapat dua jenis

belanja

belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kebijakan belanja daerah terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

1. memprioritaskan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan;
2. memprioritaskan pemenuhan rencana pembangunan RPJMD tahun 2013-2018;
3. sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018;
4. pendukung terhadap pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG`s);
5. pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah;
6. pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji;
7. pengalokasian hibah bansos;
8. pengalokasian anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), belanja operasional sekolah (BOS) pusat, pajak rokok sesuai dengan peruntukan yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
9. mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan penting dan mendesak lainnya.

c. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah secara substansial meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang, dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal atau investasi, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman. Sementara selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto*.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat dan relatif kurang diimbangi dengan sumber pembiayaan yang beragam dan pasti. Untuk kebijakan diarahkan pada pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Dari realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 2013–2016 menunjukkan terjadinya kenaikan, sedangkan pada tahun pada tahun 2017 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya pelimpahan pegawai Daerah ke Provinsi

pasca pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah.

Realisasi dan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2013–2017 secara rinci dapat di lihat pada Tabel 3.5 berikut sedangkan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Belanja Tidak Langsung	400.697.032.725	428.254.233.805	451.842.328.580	469.770.314.880	386.688.710.210
1.1	Gaji dan Tunjangan	351.003.841.361	378.579.045.841	393.286.061.889	401.262.961.358	327.684.057.130
1.2	Tambahan penghasilan PNS	48.520.777.500	48.119.946.350	56.886.751.550	66.348.046.150	56.808.374.350
1.3	Insentif pembangunan pemungutan pajak	836.340.916	1.292.448.000	1.255.146.416	1.810.765.825	1.893.191.434
1.4	Insentif pembangunan pemungutan retribusi	336.072.948	262.793.614	414.368.725	348.541.547	303.087.296
2	Belanja Langsung	9.711.242.255	57.319.348.949	70.992.304.735	79.076.152.825	96.973.114.360
2.1	Belanja Pegawai	48.612.320.011	49.324.473.746	59.505.574.002	65.650.139.375	78.957.447.861
2.2	Barang jasa					
	Belanja pakaian dinas dan atributnya	963.462.755	821.301.075	1.110.230.900	1.141.745.455	1.210.392.500
	Belanja pakaian kerja	1.079.307.850	1.201.042.500	1.297.755.450	1.269.761.966	1.422.812.750
	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	796.368.200	1.632.822.000	2.071.558.150	3.399.656.090	3.277.657.549
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.872.103.450	7.173.574.128	7.007.186.233	7.614.849.939	12.104.803.700
Total Belanja		410.408.274.980	485.573.582.754	522.834.633.315	548.846.467.705	483.661.824.570

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013-2017

Tabel 3.6
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah Tahun 2013-2017

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase (%)
1	2013	410.408.274.980	839.905.936.902	48,86
2	2014	485.573.582.754	921.745.741.592	52,68
3	2015	522.834.633.315	1.051.370.251.647	49,73
4	2016	548.846.467.705	1.202.560.850.714	45,64
5	2017	483.661.824.570	1.163.647.417.015	41,56

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013-2017

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus atau defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis pembiayaan daerah yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016, Daerah mengalami defisit sebesar Rp.39.000.000.000 (tiga puluh sembilan milyar rupiah), sedangkan pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2017 secara berturut-turut mengalami surplus sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pendapatan untuk membiayai semua belanja baik. Adapun kondisi defisit yang terjadi pada tahun 2016 ditutup dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan dana talangan pengadaan pangan, dan dana bergulir. Kondisi defisit riil anggaran secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel

Tabel 3.7
Defisit Riil Anggaran Daerah Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	844.264.174.684	996.914.566.265	1.066.524.009.697	1.163.015.041.941	1.216.204.685.623
	Dikurangi Realisasi :					
2	Belanja Daerah	838.405.936.902	917.115.741.592	1.043.109.811.651	1.155.744.384.389	1.160.219.417.015
3	Pengeluaran Pembiayaan daerah	1.500.000.000	4.630.000.000	8.260.439.996	46.816.466.325	3.428.000.000
	Surplus/Defisit Riil	4.358.237.782	75.168.824.673	15.153.758.050	(39.545.808.773)	52.557.268.608

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013-2017

Perencanaan penganggaran sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya atau SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Data SiLPA lima tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2013 sampai 2017, nilai SiLPA tertinggi terdapat pada tahun 2016 yaitu Rp. 119.927.472.904,- (seratus sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat rupiah) sedangkan SiLPA pada tahun 2017 sebesar Rp. 80.381.664.131,- (delapan puluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah). Komposisi penutup defisit riil anggaran pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Daerah Tahun 2013-2017

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	34.255.844.625	40.582.499.291	118.084.823.964	119.927.472.904	80.381.664.131
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah	630.000.000	2.332.500.000	1.200.000.000	-	480.000.000
6	Penerimaan Piutang Daerah	11.268.600	1.000.000	-	-	-

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013-2017

Tabel

Tabel 3.9
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 2013-2017

No	Uraian	Realisasi Silpa				
		2013 Rp	2014 Rp	2015 Rp	2016 Rp	2017 Rp
1.	Jumlah SILPA	34.255.844.625	40.582.499.291	118.084.823.964	119.927.472.904	80.381.664.131
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Di Psahkan	-	-	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5.	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	630.000.000	2.332500.000	1.200.000.000	-	480.000.000
6	Penerimaan Piutang Daerah	11.268.600	1.000.000	-	-	-

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Daerah Tahun 2013-2017

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja atau pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Berdasarkan capaian kinerja pendapatan Daerah tahun 2013-2017, maka pendapatan Daerah tahun 2018-2023 diharapkan dapat semakin meningkat. Peningkatan kinerja pendapatan Daerah tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. meningkatkan pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2. pemetaan potensi Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
3. meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui peningkatan digitalisasi sistem pembayaran pajak (Pantas);
4. meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
5. meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan Daerah;
6. meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;

7. meningkatkan

7. meningkatkan peran dan fungsi unit penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
8. revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah;
9. perlunya menggerakkan sumber-sumber lain sebagai sumber pembiayaan; dan
10. meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Belanja Daerah tahun 2018-2023 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Kebijakan belanja Daerah tahun 2018–2023 diarahkan untuk:

1. membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Daerah;
2. memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3. mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
4. mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan penanggulangan kemiskinan;
5. mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat; dan
6. memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan diantaranya untuk pengembangan kelembagaan, sarana prasarana pendidikan, potensi siswa, peningkatan kualitas dan kompetensi guru, fungsi kesehatan, dan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan Daerah tahun 2019–2023 disajikan pada Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019-2023

Keterangan		PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN	1.343.267.498.981	1.593.754.180.924	1.845.889.853.665	1.904.020.727.124	1.888.852.060.491
1.1	Pendapatan Asli Daerah	376.146.456.876	409.447.800.834	455.202.304.146	460.425.594.697	506.468.154.166
1.1.1	Pajak Daerah	38.335.999.280	44.169.599.208	46.386.559.129	51.025.215.042	56.127.736.546
1.1.2	Retribusi Daerah	7.894.423.000	8.683.865.300	9.552.251.830	10.507.477.013	11.558.224.714
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.650.000.000	4.015.000.000	4.416.500.000	4.858.150.000	5.343.965.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	326.266.034.596	352.579.336.326	394.846.993.187	394.034.752.642	433.438.227.906
1.2	Dana Perimbangan	751.816.309.703	902.703.587.728	1.063.816.291.790	1.081.395.933.414	1.085.699.711.048
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	67.392.188.195	70.729.149.136	78.406.440.627	69.432.537.237	70.821.187.981
1.2.2	Dana Alokasi Umum	521.154.579.057	590.569.755.150	622.848.242.908	622.958.492.097	651.565.187.806
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	163.269.542.451	241.404.683.442	362.561.608.255	389.004.904.080	363.313.335.261
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	215.304.732.402	281.602.792.362	326.871.257.729	362.199.199.014	296.684.195.278
1.3.1	Pendapatan Hibah	36.649.450.000	36.649.450.000	36.649.450.000	36.649.450.000	36.649.450.000
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya	63.760.235.608	66.948.247.388	70.295.659.758	73.810.442.746	77.500.964.883
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.794.565.000	48.794.565.000	51.794.565.000	53.794.565.000	33.794.565.000
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	81.100.481.794	129.210.529.973	168.131.582.971	197.944.741.268	148.739.215.395

Keterangan		PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	BELANJA	1.373.829.876.434	1.628.973.743.850	1.883.023.176.563	1.943.334.549.375	1.930.701.907.355
2.1	Belanja Tidak Langsung	514.995.085.700	530.885.238.612	547.284.704.989	564.210.423.532	581.679.924.213
2.1.1	Belanja Pegawai	473.400.034.780	487.602.035.823	502.230.096.898	517.296.999.805	532.815.909.799
2.1.2	Belanja Subsidi					
2.1.3	Belanja Hibah	33.250.077.370	34.912.581.239	36.658.210.300	38.491.120.815	40.415.676.856
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.129.600.000	5.155.248.000	5.181.024.240	5.206.929.361	5.232.964.008
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan dan Kelurahan	715.373.550	715.373.550	715.373.550	715.373.550	715.373.550
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
2.2	Belanja Langsung	858.834.790.734	1.098.088.505.238	1.335.738.471.575	1.379.124.125.844	1.349.021.983.141
2.2.1	Belanja Pegawai	52.259.524.667	54.872.500.900	57.616.125.945	60.496.932.243	63.521.778.855
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	566.661.790.387	708.588.749.835	833.427.799.855	820.737.564.394	757.678.841.535
2.2.3	Belanja Modal	239.913.475.680	334.627.254.502	444.694.545.775	497.889.629.207	527.821.362.751

Sumber : BPKD Kota Sukabumi, diolah 2018

Dari

Dari hasil proyeksi pendapatan dan belanja Daerah terlihat bahwa pendapatan Daerah terus menunjukkan peningkatan meskipun porsi terbesar masih bersumber dari dana perimbangan. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan Daerah masih harus tetap difokuskan dalam peningkatan kemandirian Daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah namun tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

Pada sisi belanja, porsi belanja langsung masih menjadi porsi terbesar dalam belanja Daerah khususnya untuk belanja barang jasa dan belanja modal. Sehingga diharapkan proses pembangunan dapat lebih baik.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Guna menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan Daerah. Kapasitas riil kemampuan Daerah disajikan pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	1.343.267.498.981	1.593.754.180.924	1.845.889.853.665	1.904.020.727.124	1.888.852.060.491
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa lebih Riil Perhitungan Anggaran	32.562.377.453	37.219.562.926	39.133.322.899	41.313.822.252	43.849.846.863
4	Penerimaan obligasi daerah	-	-	-	-	-
	Total penerimaan	1.375.829.876.434	1.630.973.743.850	1.885.023.176.564	1.945.334.549.376	1.932.701.907.354
	Dikurangi :					
1	Belanja Tidak Langsung	514.995.085.700	530.885.238.612	547.284.704.989	564.210.423.532	581.679.924.213
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	858.834.790.734	1.098.088.505.238	1.335.738.471.575	1.379.124.125.844	1.349.021.983.141

Sumber : BPKD Kota Sukabumi, diolah

3.3.3. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas atau *money follow programme* dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhannya. Adapun kelompok prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga termasuk hal tersebut;
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	858.834.790.734	1.098.088.505.238	1.335.738.471.575	1.379.124.125.844	1.349.021.983.141
	Prioritas I	133.081.006.491	139.735.056.816	146.721.809.656	154.057.900.139	161.760.795.146
1	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap pemda	34.462.416.667	36.185.537.500	37.994.814.375	39.894.555.094	41.889.282.849
2	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap BLUD	17.797.108.000	18.686.963.400	19.621.311.570	20.602.377.149	21.632.496.006
3	Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet)	62.276.318.774	65.390.134.713	68.659.641.448	72.092.623.521	75.697.254.697
4	Belanja Premi Asuransi	8.800.720.550	9.240.756.578	9.702.794.406	10.187.934.127	10.697.330.833
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.190.912.000	6.500.457.600	6.825.480.480	7.166.754.504	7.525.092.229
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.553.530.500	3.731.207.025	3.917.767.376	4.113.655.745	4.319.338.532
	Prioritas II	673.095.435.018	850.953.576.235	1.141.565.840.906	1.116.439.024.667	954.683.287.256
	Prioritas III	52.658.349.225	107.399.872.187	47.450.821.012	108.627.201.038	232.577.900.739

Sumber, BPKD Kota Sukabumi, diolah 2018

3.3.4. Sumber

3.3.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan lainnya dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Daerah membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, KPBU/PPP, dana umat, dan swasta.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Daerah selain bersumber dari APBD Daerah juga memperoleh dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Daerah.

b. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD Daerah yang lainnya adalah Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Yang dimaksud dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah mensinergikan penyelenggaraan program TJSL dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah. Prinsip pendanaan PKBL dan TJSL adalah rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah. Pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) adalah setiap perusahaan melaksanakan PKBL dan TJSL secara mandiri, artinya bahwa pengelolaan pendanaanya pun oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan bagian dari pendapatan Daerah. Penyelenggaraan program PKBL dan TJSL dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
2. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
3. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL.

Adapun program dan kegiatan pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSL dan PKBL meliputi 8 (delapan) aspek yaitu sebagai berikut :

1. sosial yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
2. lingkungan yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi, dan pemulihan lingkungan;
3. kesehatan yang diarahkan agar seluruh wilayah Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
4. pendidikan yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal, dan informal;
5. peningkatan daya beli diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, dan pasar tradisional;
6. infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan;

7. sarana dan prasarana keagamaan; dan
8. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan, provinsi, dan Daerah.

c. APBD Provinsi Jawa Barat

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui pembiayaan dengan APBD Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan Daerah sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga antara Daerah dan Provinsi Jawa Barat dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

d. Obligasi

Obligasi daerah merupakan alternatif kanal pembiayaan yang layak dipertimbangkan sebagai sumber pendanaan daerah, instrumen ini adalah efek berupa surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat, hanya untuk membiayai kegiatan investasi sarana prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. Namun pada dasarnya penerbitan obligasi daerah sangat bergantung pada kapasitas daerah tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana yang diajukan harus mempunyai nilai keuntungan secara ekonomis, keuntungan dari sarana prasarana tersebut digunakan untuk membayar pokok hutang beserta bunganya. Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan antara lain mampu menarik minat pemilik dana atau masyarakat untuk berinvestasi dan mampu menyediakan dana

dalam

dalam jumlah besar. Mekanisme penerbitan obligasi daerah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Obligasi Daerah. Pemerintah Daerah belum pernah menerbitkan obligasi daerah, namun Pemerintah Daerah serius menjajaki kemungkinan penerbitan obligasi daerah.

e. Pinjaman Bank Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan pinjaman bank berupa pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah pada prinsipnya diturunkan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah. Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah;
2. pinjaman daerah harus merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah;
3. pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas;
4. pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;

5. pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;
6. pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman;
7. pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
8. proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah; dan
9. seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah yang diantaranya adalah bersumber dari:

1. pemerintah pusat yaitu berasal dari APBN termasuk dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
2. pemerintah daerah lain;
3. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. lembaga keuangan bukan bank yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. masyarakat yaitu berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil dari pinjaman Daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu sebagai berikut :

1. pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas;
2. pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan;

3. pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik sebagai berikut :
 - a. menghasilkan penerimaan langsung;
 - b. menghasilkan penerimaan tidak langsung; dan
 - c. memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
4. khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

Pemerintah Daerah berencana akan melakukan pinjaman daerah dengan sumber pinjaman dari lembaga keuangan bank untuk pendanaan pembangunan.

f. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama atau PJKP, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1. proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha;
2. skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian atau kontrak kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha;
3. dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan, dan operasi proyek KPBU;
4. perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang atau lebih dari 15 tahun untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan
5. basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri dari :

1. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3. memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
4. memiliki peran strategik terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan keamanan nasional; dan/atau
5. membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut :

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran atau *on schedule-on budget*;

2. menjamin

2. menjamin kualitas pelayanan karena kinerja diperjanjikan dalam kontrak;
3. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan *governance* terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan yaitu Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi *availability payment* atau AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam *debottlenecking*, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah; dan
4. *best practice* KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 (sembilan belas) sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi atau *full cost recovery* atau kelayakan marjinal. Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha berjumlah 19 (sembilan belas) yaitu sebagai berikut:

1. infrastruktur transportasi;
2. infrastruktur jalan;
3. infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
4. infrastruktur air minum;
5. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
6. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat;
7. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
8. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
9. infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan;
10. infrastruktur minyak dan gas bumi;
11. infrastruktur konservasi energi;
12. infrastruktur fasilitas perkotaan;
13. infrastruktur kawasan;
14. infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata atau *tourism information center*;

15. infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan;
16. infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya;
17. infrastruktur kesehatan;
18. infrastruktur pemasyarakatan; dan
19. infrastruktur perumahan rakyat.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melalui skema pendanaan KPBU dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok yang terdiri dari :

1. kelompok pertama terdiri dari 6 (enam) jenis infrastruktur konektivitas yaitu transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru serta terbarukan, konservasi energi, dan telekomunikasi dan informatika;
2. kelompok kedua terdiri dari 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan yaitu air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, dan perumahan rakyat; dan
3. kelompok ketiga terdiri dari 6 (enam) jenis infrastruktur fasilitas sosial yaitu pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga, dan budaya, kawasan atau *technopark*, dan kesehatan.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pembangunan pada RPJMD Tahun 2013-2018, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Permasalahan pembangunan yang teridentifikasi pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

- 1) tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah relatif rendah;
- 2) belum meratanya jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan antar wilayah, yaitu masih ada beberapa kecamatan yang memiliki rasio guru terhadap murid di atas standar nasional, pada jenjang SMP;
- 3) belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana pendidikan, yang ditandai dengan kondisi ruang kelas

banyak

banyak yang rusak ringan dan masih ada yang rusak berat;

- 4) belum optimalnya kualitas, kompetensi, dan profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu masih terdapatnya guru yang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih rendah dari D4 dan uji kompetensi guru masih relatif rendah meskipun sudah menempati peringkat ke-4 tertinggi di Provinsi Jawa Barat;
- 5) nilai ujian nasional (UN) masih relatif rendah, pada jenjang pendidikan menengah nilai UN Daerah masih berada di bawah nilai rata-rata UN Nasional dan Jawa Barat;
- 6) pendidikan belum berfokus kepada mutu dan daya saing, masih ada sekolah formal yang berakreditasi C bahkan belum terakreditasi, begitu juga dengan lembaga pendidikan non formal seperti lembaga kursus dan pelatihan yang belum terakreditasi;
- 7) pembangunan jenjang PAUD, APK PAUD sudah cukup tinggi namun bisa terus dioptimalkan; dan
- 8) jumlah pengangguran terbuka paling tinggi berpendidikan SMA.

b. Kesehatan

- 1) derajat kesehatan masyarakat yang tercermin oleh Angka Harapan Hidup (AHH) Daerah masih di bawah capaian Provinsi Jawa Barat;
- 2) adanya pergeseran penyakit menular menjadi penyakit tidak menular, tiga penyakit tidak menular tertinggi di Daerah yaitu: hipertensi, diabetes melitus dan asma;
- 3) masih rendahnya angka jamban sehat di Daerah, yaitu baru sebesar 42,67% (empat puluh dua koma enam puluh tujuh persen);
- 4) angka kesembuhan penderita TB (*Tuberculosis*) selama 4 (empat) tahun ke belakang masih dibawah target yang ditetapkan dikarenakan tingginya angka *drop out*;
- 5) belum optimalnya pencapaian SPM kesehatan, dimana dari 12 (dua belas) indikator SPM baru 7 (tujuh) yang

sudah

sudah memenuhi target dan sisanya 5 (lima) SPM belum mencapai target 100% (seratus persen); dan

- 6) masih rendahnya keluarga dan rumah yang termasuk dalam kategori keluarga dan rumah sehat, yaitu baru sekitar 17,7 % (tujuh belas koma tujuh persen) dari total rumah di Daerah.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) belum meratanya pembangunan fisik dan infrastruktur perkotaan;
- 2) terjadinya berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan;
- 3) belum adanya RDTR Daerah;
- 4) belum optimalnya kualitas pelayanan dan pemerataan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur; dan
- 5) berkurangnya kualitas lingkungan yang mendukung pengembangan air minum di Daerah.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) kurangnya ketersediaan lahan pemakaman di Daerah;
- 2) tingginya kekumuhan di kawasan pusat kota; dan
- 3) belum optimalnya upaya penanganan kawasan permukiman kumuh.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Daerah masuk dalam Indeks Rawan Bencana (IRB) Tinggi;
- 2) paradigma penanggulangan bencana masih memiliki konsep *emergency response*, belum *preventive response*;
- 3) sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum memadai yaitu bangunan kantor BPBD tidak memadai dan belum tersedianya gudang logistik dan peralatan;
- 4) belum tersedianya sistem atau alat deteksi dini terjadinya bencana;
- 5) masih terbatasnya SDM terlatih dalam penanggulangan bencana; dan
- 6) tingginya angka kriminalitas.

f. Sosial

- 1) kurangnya kelengkapan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang akurat;
- 2) jangkauan pelayanan PMKS belum menyeluruh, artinya program atau kegiatan untuk PMKS belum bisa dilaksanakan per kecamatan atau per kelurahan;
- 3) tingginya dinamika dan mobilitas serta kompleksitas PMKS seiring dengan perkembangan permasalahan sosial sehingga pencapaian kinerja penanganan sosial sering kali tidak tampak atau terlihat;
- 4) belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan; dan
- 5) masih adanya konsep berpikir sebagian lembaga atau organisasi masyarakat bahwa permasalahan sosial merupakan isu sekunder yang dapat terselesaikan dengan sendirinya dan kurang populer.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Permasalahan pembangunan yang teridentifikasi pada 17 (tujuh belas) urusan wajib non pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

a. Tenaga Kerja

- 1) jumlah angkatan kerja yang sangat besar;
- 2) kualitas tenaga kerja relatif rendah;
- 3) kesempatan kerja masi atau pencari kerja masih besar.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) penanganan kasus yang kurang efisien dikarenakan sulitnya koordinasi antar anggota gugus tugas P2TP2A;
- 2) masyarakat belum memahami arah maksud dan tujuan kota layak anak serta tentang hak-hak anak;
- 3) rendahnya partisipasi lembaga berbasis gender dalam pembangunan Daerah;
- 4) semakin meningkatnya jumlah perempuan kepala keluarga di Daerah dan permodalan yang kurang memadai bagi kelompok PEKKA;

5) kurangnya

- 5) kurangnya minat perempuan untuk berpartisipasi dalam organisasi perempuan di Daerah;
- 6) kurangnya pemahaman para pihak mengenai Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
- 7) kurangnya tenaga ahli dalam penanganan korban tindak kekerasan.

c. Pangan

- 1) peningkatan produksi dan produktivitas pangan yaitu beras belum optimal akibat adanya kecenderungan penurunan luas lahan pertanian produktif sebagai dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian;
- 2) koordinasi dan sinergitas antara SKPD terkait dalam hal penyediaan, pengumpulan, dan pengelolaan data yang terkait dengan urusan ketahanan pangan masih belum optimal. Penyajian data dan informasi yang lengkap, akurat, dan *up to date* untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam hal kebijakan ketahanan pangan, selama ini belum bisa dilaksanakan secara cepat dan tepat, karena belum terbentuk sistem pengelolaan data ketahanan pangan yang terintegrasi dan *online* antar Perangkat Daerah penanggung jawab teknis atau pemangku kepentingan;
- 3) monitoring dan evaluasi terkait implementasi Surat Wali Kota Nomor 526/516 tanggal 19 Juni 2013 tentang Himbauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan atau *One Day No Rice* (ODTR) belum berjalan secara optimal;
- 4) pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah belum optimal; dan
- 5) volume cadangan pangan tingkat pemerintah belum memenuhi target SPM dan masih adanya kendala dalam sistem pemeliharaan dan peremajaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

d. Pertanahan

Urusan wajib pertanahan dapat berlangsung cukup baik dan tidak menemui kendala berarti dalam kurun waktu tahun 2013-2018.

e. Lingkungan Hidup

- 1) kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 2) menurunnya kualitas lingkungan;
- 3) belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan sampah;
- 4) adanya potensi berkurangnya RTH publik sebagai dampak dari pengembangan iklim investasi di Daerah; dan
- 5) terbatasnya SDM yang memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di Daerah menjadi kendala dalam penanganan kasus pengaduan pencemaran lingkungan didalam upaya penegakan hukum lingkungan.

f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen baik dokumen kependudukan maupun catatan sipil;
- 2) banyak penduduk yang belum menerima KTP-el walaupun sudah direkam karena duplikasi data maupun kesalahan perekaman;
- 3) terdapat data penduduk ganda pada *database* atau *server*;
- 4) sarana dan prasarana pendukung administrasi kependudukan tidak memadai; dan
- 5) kurangnya SDM yang menangani IT pada aplikasi SIAK dan AFIS KTP-el.

g. Pemberdayaan Masyarakat

Belum optimalnya peran lembaga dan organisasi yang ada di masyarakat seperti PKK, Posyandu, dan LPM.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) penurunan ketahanan keluarga;
- 2) keterbatasan SDM baik aparatur maupun kader di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- 3) peningkatan cakupan PUS peserta KB aktif belum diikuti dengan penurunan *unmet need* secara proporsional sebagai akibat dari fokus penggarapan program KB di

wilayah masih berorientasi pada peningkatan alih cara dibandingkan dengan porsi penggarapan kepada PUS yang tidak ber-KB khususnya kategori PUS Ingin Anak Ditunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) ;

- 4) belum optimalnya pelaksanaan kegiatan KIE dan pemanfaatan kegiatan KB momentum sebagai sarana pembinaan akseptor oleh para PLKB, PKB, TPD, dan K.

i. Perhubungan

- 1) kemacetan yang cukup tinggi;
- 2) belum optimalnya pelayanan angkutan umum massal di Daerah;
- 3) kurangnya penyediaan parkir dalam memenuhi tingginya bangkitan kegiatan di pusat Daerah; dan
- 4) belum ramahnya sarana dan prasarana perkotaan untuk pejalan kaki dan berkebutuhan khusus.

j. Komunikasi dan Informatika

- 1) terbatasnya alokasi dana untuk pengembangan jaringan komunikasi dan informasi sehingga pertumbuhan jaringan WAN lambat dan harus dilakukan secara bertahap;
- 2) terbatasnya sumberdaya manusia bidang telematika baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- 3) terbatasnya pemahaman, pemanfaatan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 4) masih mahalnya harga *bandwidth* internet yang berkualitas; dan
- 5) belum tersedianya *data center* yang menjadi sumber pengintegrasian data di Dinas Komunikasi dan Informatika.

k. Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro

- 1) usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi belum optimal;
- 2) pola kemitraan atau kerjasama antara Koperasi dan UMKM, dengan pengusaha besar belum optimal baik di bidang permodalan maupun pemasaran; dan

- 3) masih adanya kesan yang berkembang dimasyarakat bahwa dana bergulir dari pemerintah dianggap hibah, sehingga mengambat laju perguliran dan penguatan struktur permodalan bagi KUMKM.
1. Penanaman Modal
 - 1) luas wilayah Daerah yang relatif kecil dan masih terbatasnya ruang usaha di Daerah, menyulitkan untuk mendatangkan investor asing yang akan menanamkan modalnya di Daerah di sektor tertentu, khususnya sektor industri; dan
 - 2) kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan dan investasi.
 - m. Kepemudaan dan Olah Raga
 - 1) belum adanya Peraturan Daerah tentang sistem olahraga daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyelenggaraan Olahraga;
 - 2) masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung urusan kepemudaan dan olahraga; dan
 - 3) belum optimalnya pemanfaatan Sarana Olah Raga (SOR) baik di kalangan pemuda maupun masyarakat.
 - n. Statistik

Tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2013-2017.
 - o. Kebudayaan

Belum optimalnya pengelolaan kebudayaan sebagai bidang baru pada bidang pendidikan.
 - p. Perpustakaan
 - 1) rendahnya kunjungan ke perpustakaan;
 - 2) kurangnya SDM berupa tenaga fungsional pustakawan;
 - 3) gedung perpustakaan yang tidak memadai; dan
 - 4) masih terbatasnya koleksi buku.
 - q. Kearsipan
 - 1) kurangnya SDM di bidang kearsipan yaitu tenaga arsiparis; dan
 - 2) gedung depo arsip sudah tidak memadai.

3. Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Pada tahun 2013-2017, Daerah menyelenggarakan 6 (enam) urusan pilihan yaitu urusan pilihan pertanian, kelautan, dan perikanan, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan ketransmigrasian.

a. Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian masih belum bisa dikendalikan meskipun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah ditetapkan sehingga upaya untuk meningkatkan produksi pangan pokok yaitu beras dari dalam Daerah masih belum dapat berjalan optimal.

b. Kelautan dan Perikanan

- 1) tingkat konsumsi ikan daerah masih dibawah realisasi tingkat provinsi dan pusat;
- 2) peningkatan standarisasi budidaya perikanan melalui penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) pada tingkat masyarakat pembudaya ikan dan CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) pada tingkat BBI serta pelaku usaha pembenihan ikan di Daerah masih perlu ditingkatkan dalam hal fasilitasi sertifikasi maupun pengawasan penerapan di lapangan secara konsisten; dan
- 3) pengelolaan *coldstorage* Bungbulang belum optimal.

c. Perdagangan

- 1) belum terselesaikannya pembangunan pasar rakyat semi modern Pelita;
- 2) kurang tersedianya lokasi penampungan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang strategis dan representatif;
- 3) masih rendahnya tingkat kesadaran para PKL di bidang ketertiban, kebersihan, dan retribusi;
- 4) masih rendahnya frekuensi dan kualitas promosi produk KUMKM sehingga sulit menembus pangsa pasar di dalam dan luar negeri atau ekspor;

- 5) pola kemitraan dibidang pemasaran antara pedagang kecil, menengah dengan pengusaha besar belum optimal;
- 6) pengaruh globalisasi dan liberalisasi perdagangan terhadap mekanisme pasar; dan
- 7) belum optimal tingkatnya kesadaran para pengusaha untuk dapat memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Industri, sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bahan pengambilan kebijakan pembinaan selanjutnya.

d. Perindustrian

- 1) kegiatan usaha industri kecil pada umumnya masih menggunakan teknologi yang relatif sederhana dan produk yang dihasilkan belum dapat bersaing di pasar global;
- 2) belum seluruhnya industri kecil dan menengah (IKM) di Daerah merupakan IKM produktif. IKM produktif di Daerah baru mencapai 74,49% (tujuh puluh empat koma empat puluh sembilan persen) yang disebabkan masih banyaknya IKM yang memproduksi secara musiman atau sewaktu-waktu apabila ada pesanan;
- 3) masih rendahnya kemampuan penyerapan permodalan dan *skill* kreativitas para pelaku usaha dalam berinovasi;
- 4) pola kluster industri belum berjalan secara optimal;
- 5) globalisasi dan liberalisasi yang berpengaruh terhadap daya saing produk IKM;
- 6) belum optimal tingkatnya kesadaran para pengusaha untuk dapat memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Industri, sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bahan pengambilan kebijakan pembinaan selanjutnya.

e. Pariwisata

- 1) pariwisata ekonomi kreatif;

2) masih

- 2) masih minimnya Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang dimiliki Pemerintah Daerah mengakibatkan stagnasi jumlah wisatawan yang masuk ke Daerah, melainkan sebagai transit wisata; dan
 - 3) masih sedikitnya SDM atau pegawai yang kompeten.
- f. Ketransmigrasian
- 1) SDM masih kurang terutama pejabat fungsional;
 - 2) belum adanya penjajagan lokasi yang akan dijadikan tujuan penempatan transmigran; dan
 - 3) penentuan lokasi yang akan dijadikan tujuan penempatan dan diperlukan dukungan dana yang memadai.

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat dimasa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu strategis dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu:

1. permasalahan pembangunan Daerah;
2. dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Daerah; dan
3. KLHS RPJMD.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang

telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Penyusunan RPJMD membutuhkan kerangka analisis isu-isu strategis yang didukung oleh kemampuan untuk menangkap setiap interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi interaksi tersebut, antara lain situasi global, meliputi aspek-aspek yang terjadi melampaui batas-batas administrasi Negara, dan situasi nasional. Keterkaitan antar isu strategis dimaksudkan dapat mendorong penguatan dan penerapan prioritas dalam perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan fakta-fakta. Karena itu, penyusunan RPJMD yang dikonseptualisasi akan bergerak dari realitas dasar mencakup pembangunan di segala bidang yang diharapkan lebih dapat memperhatikan perkembangan realitas lain menyangkut keadaan yang menggambarkan penciptaan realitas dasar diantara arus eksternalisasi isu global yang mampu mempengaruhi isu nasional dan regional.

4.2.1. Isu Nasional

Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional seperti diamanatkan dalam visi RPJMN, pada tahun 2025 Indonesia diharapkan sudah memasuki gerbang sebagai negara berpendapatan tinggi dan maju dan terlepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah. Banyak negara berkembang yang terperangkap dalam posisi negara berpendapatan menengah atau *middle income trap* atau MIT dan tidak berhasil bertransformasi menjadi negara maju. Untuk itu sesuai arahan RPJPN, pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Hal ini untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki landasan pembangunan yang mantap sehingga bisa terlepas dari perangkap

negara menengah, sehingga mulai tahun 2025 dapat memasuki gerbang untuk menjadi negara maju pada tahun 2030. Berdasarkan arahan tersebut diatas, pembangunan Indonesia diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam kaitan ini, struktur perekonomian Indonesia harus bertransformasi menuju ekonomi dengan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi berlandaskan kemampuan SDM berkualitas, dengan didukung infrastruktur yang handal serta perluasan inovasi dan penerapan teknologi. Reformasi komprehensif di segala bidang pembangunan sangat diperlukan untuk menjamin proses transformasi positif yang dapat mendorong perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi secara berkelanjutan. Sasaran utama lainnya adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan semakin tingginya tingkat pendapatan masyarakat, berkurangnya kemiskinan secara signifikan, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, terjaganya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, yang didukung dengan sistem politik, stabilitas keamanan, dan ketertiban hukum.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **mandiri** berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri;
2. **maju** dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
3. **adil** berarti tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah; dan

4. **makmur** berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Dalam mewujudkan visi tersebut dilaksanakan 8 (delapan) misi yaitu:

1. mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; pembangunan infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4. mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial

minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

5. mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.
7. mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia

yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional, dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

Setiap program, terdapat substansi inti yang berisi aspek-aspek pada sebuah program yang dilengkapi dengan target yang terukur. Substansi inti ini hendaknya menjadi target bersama yang harus dikejar oleh seluruh daerah, tidak terkecuali oleh Daerah.

4.2.2. Isu-isu Internasional

4.2.2.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*

Pada tanggal 30 Mei 2013, *High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda* mengeluarkan “*A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development*,” sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru atau *new global partnership* yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang. Komitmen ini kemudian berujung pada terbentuknya kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada bulan September 2015 yang disahkan oleh PBB di New York.

Terdapat 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari:

1. tidak adanya kemiskinan;
2. bebas dari kelaparan;
3. sehat dan sentosa;
4. pendidikan berkualitas;
5. persamaan gender;
6. air bersih dan sanitasi;
7. energi bersih dan terjangkau;
8. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. industri, inovasi, dan infrastruktur;
10. berkurangnya ketimpangan;
11. kota dan komunitas berkelanjutan;
12. konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
13. perubahan iklim ditangani;
14. sumberdaya laut dipelihara;
15. ekosistem darat dipelihara;
16. perdamaian, keadilan, dan lembaga yang efektif; dan
17. adanya kerjasama global.

4.2.2.2. Kerjasama Internasional

Peran konstruktif dan kepemimpinan Indonesia semakin diakui di kancah internasional. Saat ini, Indonesia merupakan kekuatan ekonomi yang semakin meningkat, demokrasi yang dinamis, negara terkemuka dalam perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara atau ASEAN, kerjasama ekonomi asia-pasifik atau APEC, dan anggota dari G-20. Sementara itu, Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan juga telah menginisiasi kerjasama ekonomi dengan beberapa blok perdagangan semisal *trans pacific partnership* (TPP), Indonesia-EU, *free trade area of the asia pacific* (FTAAP), *regional comprehensive economic partnership* (RCEP).

Indonesia juga telah memasuki era perdagangan bebas wilayah ASEAN dan sekitarnya dalam kerangka *asean economic community* (AEC), *asean-china free trade area* (ACFTA), dan juga telah mengisi peran yang cukup signifikan pada level kerjasama global dan multilateral.

Bagi Indonesia keterlibatan ini merupakan sebuah wadah yang jika dioptimalisasi maka Indonesia dapat mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya. Indonesia berupaya mengatasi tantangan dalam negeri dan pada saat yang sama memainkan peran penting di panggung pembangunan dunia. Pada forum-forum tersebut Indonesia berhasil mengembangkan diri sebagai negara terkemuka dalam mengatasi tantangan pembangunan global yang mempengaruhi kemakmuran dalam negeri. Selain itu, Indonesia ingin mencapai daya saing ekonomi dari sumber daya alam yang terus meningkat, sumber daya manusia yang lebih baik, dan peningkatan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 2020.

Berkenaan dengan hal tersebut, tantangan terbesar bagi Indonesia adalah memanfaatkan keberadaannya di forum-forum global dan regional tersebut sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa. Pemerintah Republik Indonesia saat ini telah melakukan kerja sama pembangunan internasional, dimana kerja sama tersebut merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional.

4.2.3. Krisis Global

Lima tahun kedepan akan menjadi sebuah tantangan besar bagi Indonesia. Berbagai isu domestik dan internasional akan terus mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia kedepan. Namun demikian, tekanan inflasi sudah mulai melunak sebagai konsekuensi dari turunnya tren harga-harga komoditas di pasar internasional. Perekonomian global yang belum menunjukkan tanda-tanda pulih memberikan imbas yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus melambat serta menyebabkan tren depresiasi rupiah yang cukup persisten. Sementara itu secara internal, belum tuntasnya infrastruktur pendukung produksi juga memberikan dampak terhadap melambatnya kinerja ekspor yang pada gilirannya turut memberikan tekanan yang berlebihan pada rupiah

Stagnasi yang melanda di negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi perlambatan tersebut. Perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia, apalagi pada saat ini Indonesia sedang hangat-hangatnya menjalin kerjasama dengan Negeri Tirai Bambu tersebut. Perlambatan ekonomi di Tiongkok berdampak pada sektor riil sehingga membawa dampak terhadap turunnya harga komoditas di pasar internasional.

Patut menjadi catatan bahwa faktor-faktor utama yang dewasa ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat rentan akan *shock*. Meskipun mengalami perlambatan, apabila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti AS, Tiongkok, dan Singapura yang cenderung stagnan dan mengalami penurunan pertumbuhan, perekonomian Indonesia sebenarnya masih menunjukkan kinerja menuju ke arah yang semakin baik. Ekspansi fiskal melalui pengeluaran pemerintah diharapkan semakin meningkat pada periode selanjutnya sehingga diharapkan dapat menjadi stimulus positif untuk menggerakkan perekonomian.

Dalam kaitannya dengan penyusunan isu strategis Daerah, sebagian atau seluruh aspek dalam isu-isu internasional yang telah dijabarkan diatas, dapat dipilih sebagai aspek yang diberi perhatian besar dalam pembangunan Daerah 5 (lima) tahun mendatang. Hal ini dapat diawali dengan menjadikan isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, peningkatan daya saing serta daya tahan daerah terhadap krisis sebagai isu strategis RPJMD serta mengkaitkan isu-isu tersebut dengan dengan permasalahan riil di lapangan.

4.2.4. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RPJMD

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan jangka menengah di Daerah, dengan memperhatikan

potensi.....

potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, dan adaptasi. Mengingat pentingnya KLHS RPJMD, maka hasilnya akan digunakan sebagai salah satu masukan bagi penyusun RPJMD.

Dalam kaitan dengan pencapaian target pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perumusan isu strategis pada pembangunan Daerah 5 (lima) tahun ke depan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola kelembagaan yang terjadi saat ini sesuai hasil dari KLHS RPJMD. Kondisi eksisting dari keempat kondisi tersebut merupakan kondisi awal atau *baseline* dari Daerah dalam mencapai target dari setiap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan di Daerah. Berdasarkan kajian pada Bab 2, hanya 12% (dua belas persen) dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah berhasil dicapai oleh Daerah pada saat ini, sisanya sebanyak 19% (sembilan belas persen) merupakan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang belum mencapai target, 4% (empat persen) merupakan target yang memerlukan pendataan, 15% (lima belas persen) merupakan target yang memerlukan peningkatan, 8% (delapan persen) merupakan target yang memerlukan penurunan, dan 42% (empat puluh dua persen) merupakan target yang tidak dapat dianalisis karena ketidakterediaan data. Kesenjangan antara kondisi *baseline* dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang perlu dicapai, menjadi dasar untuk perumusan isu strategis dalam pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program. Proses pengkajian isu strategis dilakukan melalui tahapan berikut yaitu:

1. Tahap Identifikasi Isu Strategis

a. Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan setiap pilar yang dikelompokkan menjadi 33 (tiga puluh tiga) isu strategis pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, dilakukan proses sintesis terhadap kriteria strategis isu pembangunan berkelanjutan yang berjumlah sebanyak enam kriteria yaitu:

- 1) cakupan dampak luas;
- 2) multi pemangku kepentingan;
- 3) memerlukan kebijakan yang lebih tinggi;

4) dampak

- 4) dampak kumulatif;
- 5) dampak jangka panjang; dan
- 6) antar sektor.

Isu pembangunan berkelanjutan dianggap bersifat strategis apabila memenuhi keenam kriteria tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa dari 33 (tiga puluh tiga) isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hanya isu yang terkait dengan rendahnya daya beli masyarakat yang mempunyai kesesuaian yang sedikit sehingga diperoleh kesimpulan dengan nilai 4 (empat).

b. Identifikasi dan perumusan isu strategis berdasarkan hasil telaahan 6 (enam) muatan KLHS menghasilkan 12 (dua belas) isu strategis, yaitu sebagai berikut:

- 1) daya dukung pangan di Daerah sudah melampaui ambang batas daya dukungnya;
- 2) daya dukung air di Daerah sebagian besar belum melampaui ambang batas daya dukung;
- 3) terjadi indikasi konflik tumpang tindih antara kawasan pola ruang dengan kondisi eksisting tahun 2016;
- 4) meningkatnya sumber pencemar parameter BOD, COD, dan TSS setiap tahun;
- 5) pesatnya pertumbuhan penduduk di Daerah;
- 6) timbulan sampah Daerah dominan pada kawasan permukiman di dataran ekoregion perbukitan vulkanik;
- 7) sumber pencemar parameter BOD, COD, dan TSS meningkat setiap tahun;
- 8) nilai persentase efisiensi pemanfaatan penyedia pangan dan air bergantung kesesuaian kondisi eksisting terhadap perencanaan pola ruang;
- 9) potensi keanekaragaman hayati di Daerah direpresentasikan dalam pola dan nilai *shape index* dimana pola *shape index* cenderung mengikuti pola persebaran RTH eksisting;
- 10) Potensi rawan bencana gerakan tanah, kebakaran, dan kekeringan terjadi di beberapa wilayah Daerah,

sedangkan

sedangkan bencana gempa bumi berpotensi tinggi di seluruh wilayah Daerah;

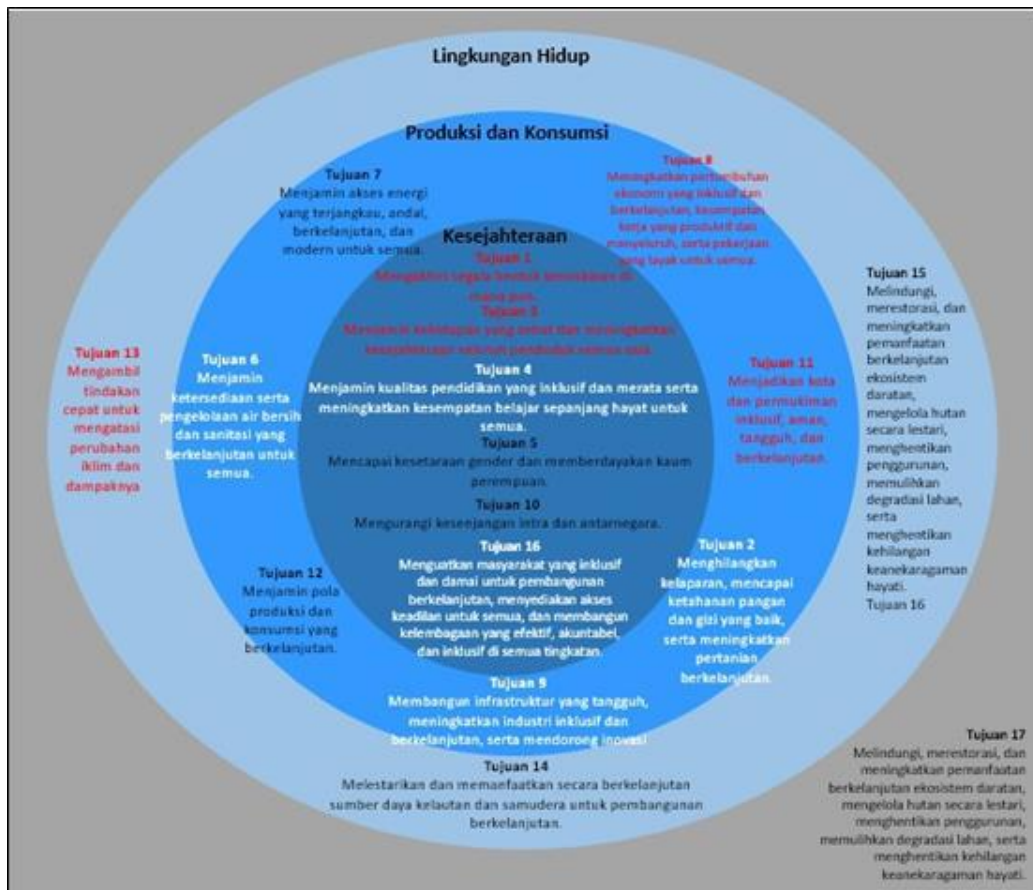
- 11) hampir seluruh Kecamatan memiliki nilai Indeks Jasa Ekoregion (IJE) perlindungan terhadap bencana yang tinggi; dan
- 12) daerah memiliki indeks daya lenting yang cukup tinggi.

2. Tahap Analisis Isu Strategis

Analisis isu strategis dilakukan dengan menggunakan metode *crosscutting* antara hasil identifikasi isu dan telaahan enam muatan KLHS RPJMD terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan cara:

- a. menghitung *gap* atau kesenjangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah; dan
- b. sintesis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terhadap isu yang dihasilkan dan muatan KLHS.

Hal tersebut di atas dimaksudkan untuk memperoleh isu strategis yang diprioritaskan penanganannya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Daerah, khususnya dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Sintesis hasil pengelompokkan isu strategis terhadap pencapaian TPB diampilkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1
Pengelompokan Isu Strategis terhadap Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Sumber : Hasil Analisis, 2018)

Gambar tersebut menunjukkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dikelompokkan kedalam tiga *layer* konsentrik atau tiga aspek yang saling terkait. Sejumlah 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ingin dicapai dikelompokkan kedalam tiga aspek tersebut. Pencapaian tujuan pada *layer* pertama akan mendorong pencapaian tujuan lainnya pada layer berikutnya.

Beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang masih memiliki isu atau kendala dalam pencapaiannya diperlihatkan dengan warna merah pada Gambar 4.1. Hal yang juga perlu menjadi catatan adalah keterkaitan antara satu tujuan atau target dengan tujuan atau target yang lainnya. Hasil studi yang dilakukan oleh Nilsson dkk. (2013) menunjukkan keterkaitan antara satu tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan tujuan lainnya, di mana beberapa tujuan memiliki peran sinergi, sementara yang lain berperan sebagai pendorong (*enablers*) atau bahkan penghambat (*counteracting/cancelling*). Sebagai contoh, tujuan pembangunan

infrastruktur pembangunan berpotensi menghambat tujuan pelestarian kawasan ekosistem daratan (Zhou & Moinuddin, 2017). Memperhatikan keterkaitan ini menjadi penting dalam menentukan prioritas di dalam pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah. Hasil dari gambar tersebut juga menunjukkan adanya tantangan yang signifikan di Daerah dalam mencapai beberapa target TPB sebagai berikut :

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 1, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 2 yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 8, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 11, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan; dan
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 13, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Dari kelima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan prioritas yang memerlukan perhatian khusus adalah:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 11 (menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan);
2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 1 (mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun); dan
3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 13 (mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya).

Dengan adanya tiga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan prioritas yang memerlukan perhatian khusus yang diperoleh dari hasil sintesis isu strategis serta pengaruhnya terhadap pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah, akan membantu dalam proses analisis kebijakan dan strategi RPJMD agar sesuai dan dapat mendukung pencapaian TPB di Daerah.

4.2.5. Isu Strategis Terkait Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu :

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
6. sosial.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) jenis yaitu :

1. pendidikan anak usia dini;
2. pendidikan dasar;
3. pendidikan kesetaraan;
4. pelayanan kesehatan ibu hamil;

5. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. pelayanan kesehatan balita;
8. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. pelayanan kesehatan diabetes melitus;
13. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV);
16. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
17. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah;
19. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
20. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
21. pelayanan informasi rawan bencana;
22. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
27. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
28. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
29. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

4.2.6. Perumusan Isu Strategis RPJMD

Perumusan isu strategis RPJMD dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis dari berbagai

sumber diantaranya yaitu permasalahan pembangunan Daerah, dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Daerah serta KLHS RPJMD. Selain hal tersebut, supaya tercipta sinergitas dan konsistensi dengan arah pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka perumusan isu strategis juga juga diselaraskan dengan isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat, RPJPD serta isu strategis hasil kajian dengan 6 muatan KLHS disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Perumusan Isu Strategis RPJMD

ISU STRATEGIS			
N O	RPJMD PROVINSI JAWA BARAT	RPJPD	ISU STRATEGIS BERDASARKAN 6 MUATAN KLHS
1	Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	Kualitas dan daya saing SDM yang antara lain ditandai oleh solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat, pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya SDM serta kinerja pengelolaan SDM.	Daya dukung pangan di Daerah sudah melampaui ambang batas daya dukungnya
2	Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial	Akses, kualitas dan relevansi pendidikan yang diiringi manajemen pelayanan pendidikan, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat	Daya dukung air di Daerah sebagian besar belum melampaui ambang batas daya dukung
3	Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan oleh masyarakat di Daerah dan sekitarnya melalui mekanisme asuransi kesehatan serta upaya promotif dan preventif	Terjadi konflik tumpang tindih antara kawasan pola ruang dengan kondisi eksisting tahun 2016
4	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	Kegiatan usaha yang berdaya saing dan integrasi vertikal maupun horizontal dalam sistem agribisnis	Meningkatnya sumber pencemar parameter BOD, COD, dan TSS setiap tahun
5	Reformasi birokrasi	Penguatan kemitraan dengan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional	Pesatnya pertumbuhan penduduk di Daerah

ISU STRATEGIS			
N O	RPJMD PROVINSI JAWA BARAT	RPJPD	ISU STRATEGIS BERDASARKAN 6 MUATAN KLHS
6			Timbulan sampah Daerah dominan pada kawasan permukiman di dataran ekoregion perbukitan vulkanik
7			Hampir seluruh kecamatan memiliki nilai Indeks Jasa Ekoregion (IJE) perlindungan yang tinggi terhadap bencana
8			Nilai persentase efisiensi pemanfaatan penyedia pangan dan air bergantung kesesuaian kondisi eksisting terhadap perencanaan pola ruang
9			Potensi rawan bencana gerakan tanah, kebakaran, dan kekeringan terjadi di beberapa wilayah Daerah
10			Daerah memiliki indeks daya lenting yang cukup tinggi
11			Potensi keanekaragaman hayati di Daerah direpresentasikan dalam pola dan nilai <i>shape index</i> yang cenderung mengikuti pola persebaran RTH Eksisting

Sumber : Hasil analisis 2018

Setelah

Setelah mempertimbangkan berbagai isu pembangunan maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Daerah. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama yang harus diselesaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta seluruh Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai isu-isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 5 (lima) isu strategis Daerah, sebagai berikut:

- 1) kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, dan sosial kemasyarakatan;
- 2) infrastruktur dan tata kota;
- 3) daya saing ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) kualitas lingkungan hidup; dan
- 5) penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi pembangunan jangka menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah. Visi pembangunan jangka menengah Daerah menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka menengah harus menjawab permasalahan pembangunan Daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Daerah, adalah:

**“Terwujudnya Kota Sukabumi
yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera”**

Visi tersebut diwujudkan menjadi visi RPJMD dan diterjemahkan ke dalam pilar-pilar visi yang dirumuskan dan dijelaskan pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Perwujudan Visi RPJMD

Visi	Pilar-Pilar Visi	Penjelasan Pilar-Pilar Visi
Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius Nyaman dan Sejahtera	Religius	pembangunan Daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Daerah yang memiliki sikap dan perilaku yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain.
	Nyaman	pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Daerah pun menjadikan Daerah yang nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik serta layanan publik yang berkualitas.
	Sejahtera	suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara adil. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah indeks pembangunan manusia, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi

Sumber : Hasil analisis 2018

5.2. MISI

Dalam mewujudkan visi RPJMD, maka ditetapkan beberapa misi RPJMD, yaitu:

1. mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga;
2. mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
3. mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar; dan
4. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dan inovatif.

Empat butir misi di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah di temakan dalam bentuk visi pembangunan Daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut, maka penjabaran misi diatas dapat dijelaskan dalam sub - sub bab berikut:

5.2.1. Misi 1

Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.

Pernyataan Misi 1 di atas secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk:

1. membangun masyarakat yang berkarakter melalui pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
2. mengembangkan, memberdayakan, dan membina pemuda;
3. mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan lokal;
4. meningkatkan perlindungan sosial serta pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan
5. meningkatkan peran keluarga dalam pembangunan manusia.

Dalam upaya pencapaian Misi 1 maka dirumuskan perencanaan terintegrasi dalam langkah pencapaian Misi 1 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.1 berikut:



Gambar 5.1
Perencanaan Terintegrasi Pencapaian Misi 1
(Sumber : Hasil analisis 2018)

5.2.2. Misi 2

Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan

Pembangunan tata ruang dan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di Daerah. Pernyataan Misi 2 tersebut secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk:

1. membangun

1. membangun infrastruktur kota dan permukiman yang mengacu pada implementasi kebijakan dan perencanaan sesuai *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030* serta tetap memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau;
2. mengendalikan pemanfaatan ruang;
3. optimalisasi pemanfaatan sistem transportasi umum; dan
4. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dalam upaya pencapaian Misi 2 maka dirumuskan perencanaan terintegrasi dalam langkah pencapaian Misi 2 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.2 berikut:



Gambar 5.2
Perencanaan Terintegrasi Misi 2
(Sumber : Hasil analisis 2018)

5.2.3. Misi 3

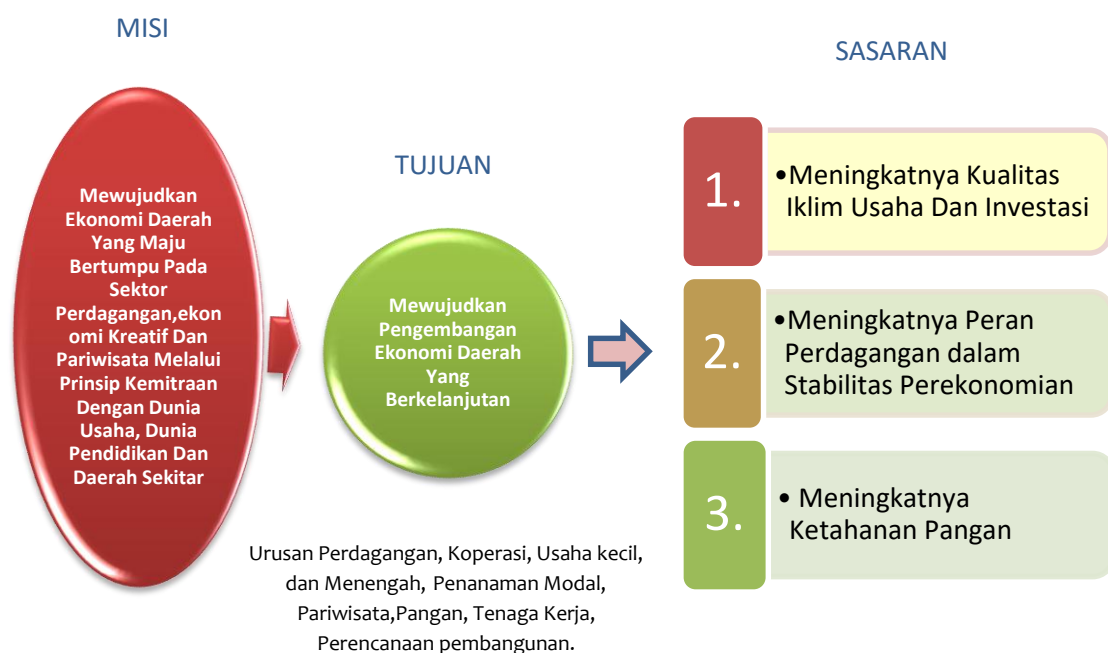
Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar.

Pernyataan Misi 3 tersebut secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk:

1. mewujudkan

1. mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan melalui peningkatan iklim investasi dengan menghilangkan semua jenis hambatan atau kendala perijinan dan pengelolaan usaha yang selalu memperhatikan daya dukung potensi wilayah, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta mengutamakan keberpihakan terhadap upaya penumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar;
2. meningkatkan UMKM dan ekonomi kreatif lainnya melalui prinsip kemitraan; dan
3. meningkatkan ketahanan pangan.

Dalam upaya pencapaian Misi 3 maka dirumuskan perencanaan terintegrasi dalam langkah pencapaian Misi 3 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.3 berikut:



Gambar 5.3
Perencanaan Terintegrasi Misi 3
(Sumber : Hasil analisis 2018)

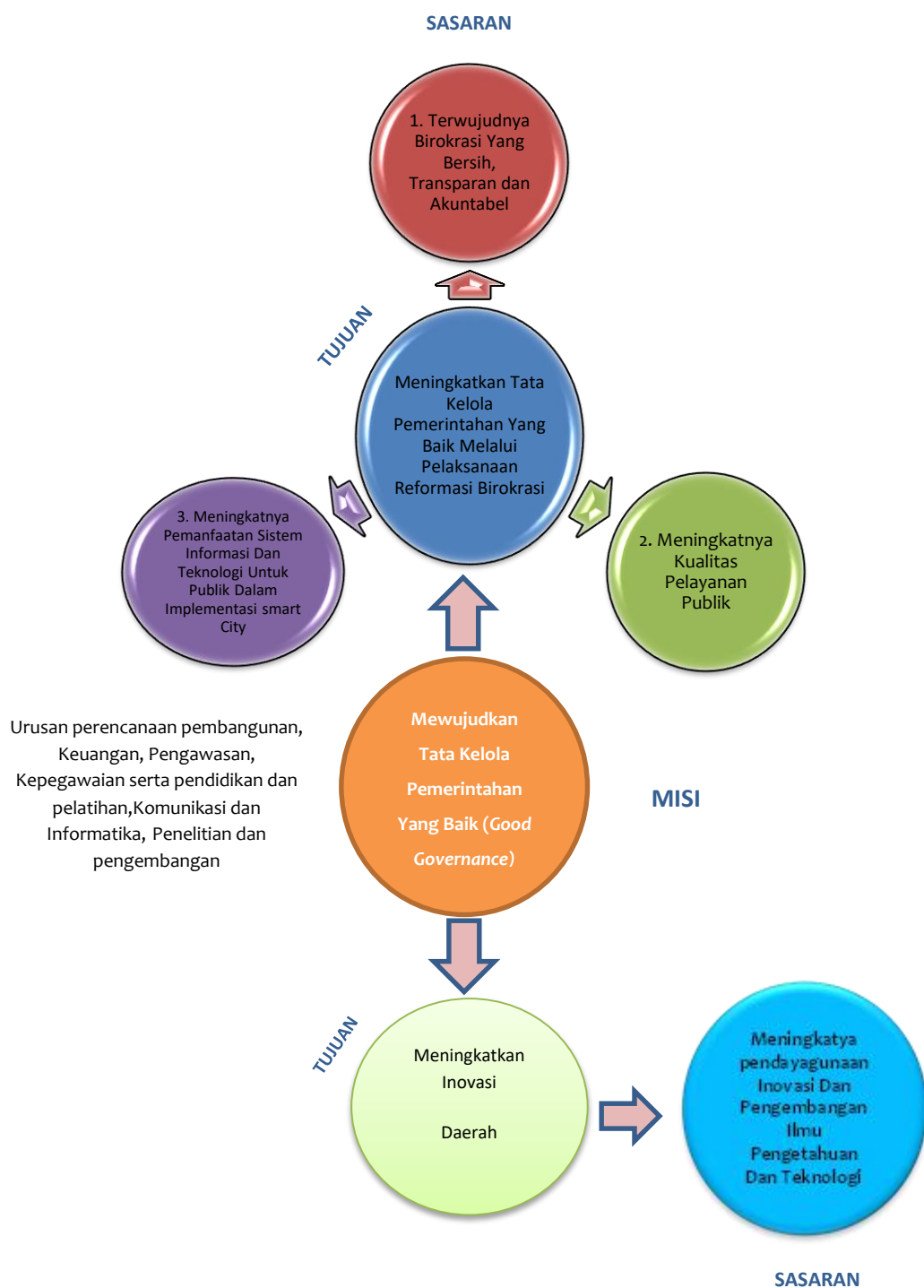
5.2.4. Misi 4

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif.

Pernyataan Misi 4 tersebut menunjukkan komitmen Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

daerah

untuk terwujudnya birokrasi bersih, transparan, dan akuntabel dengan memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi, serta meningkatkan inovasi Daerah. Dalam upaya pencapaian Misi 4 maka dirumuskan perencanaan terintegrasi dalam langkah pencapaian Misi 4 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.4 berikut:



Gambar 5.4
Perencanaan Terintegrasi Misi 4
(Sumber : Hasil analisis 2018)

Berdasarkan

Berdasarkan proses perencanaan terintegrasi yang sudah dirumuskan untuk mencapai masing-masing misi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dapat dilihat bahwa pembangunan Daerah sudah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Uraian visi, misi, dan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan disajikan dalam bagan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 5.5 berikut:



Gambar 5.5
Prioritas Pembangunan dan Misi dalam Pencapaian
Visi RPJMD

Dari Gambar 5.5 tersebut dapat dilihat alur perumusan visi sampai dengan prioritas pembangunan. Pencapaian visi pembangunan jangka menengah daerah Daerah ditopang oleh 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah yang kemudian diterjemahkan dalam 5 (lima) prioritas pembangunan. Bagan alur tersebut berbentuk seperti bangunan rumah, dimana prioritas pembangunan menjadi pondasi bangunan dan misi pembangunan menjadi pilar-pilarnya yang menopang atap bangunan yaitu visi pembangunan jangka menengah. Hal ini menunjukkan keterkaitan satu sama lain dimana visi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan tidak akan tercapai apabila prioritas pembangunan tidak dilaksanakan dan misi pembangunan jangka menengah tidak tercapai.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Daerah ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, kebijakan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat serta isu-isu strategis pembangunan Daerah yang telah ditetapkan pada Bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasikan dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sehingga menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Daerah.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil atau *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Daerah

selaras dengan arah kebijakan RPJPD dan menjadi sarana untuk melaksanakan serta mewujudkan sasaran RPJPD.

Proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah menggunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategis yang berperan dalam pencapaian visi dan misi RPJMD. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan RPJMD.

Tujuan dan sasaran RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, apa yang akan dicapai atau diubah dalam pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Berdasarkan hasil perumusan, penjabaran visi dan misi RPJMD terdiri dari 8 (delapan) tujuan dengan 8 (delapan) indikator tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran dengan 26 (dua puluh enam) indikator sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Adapun kerangka berpikir logis pencapaian masing-masing misi RPJMD disajikan pada Gambar 5.6 sampai dengan Gambar 5.9 sedangkan rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja RPJMD disajikan pada Tabel 5.2.

5.3.1. Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 1 RPJMD

Dalam rangka pencapaian Misi 1 yaitu **Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga**, maka dirumuskan kerangka berpikir logis pencapaian Misi 1 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.6.



Gambar 5.6.
Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 1 RPJMD
(Sumber : Hasil analisis, 2018)

5.3.2. Kerangka

5.3.2. Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 2 RPJMD

Dalam rangka pencapaian Misi 2 yaitu **Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan**, maka dirumuskan kerangka berpikir logis pencapaian Misi 2 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.7.

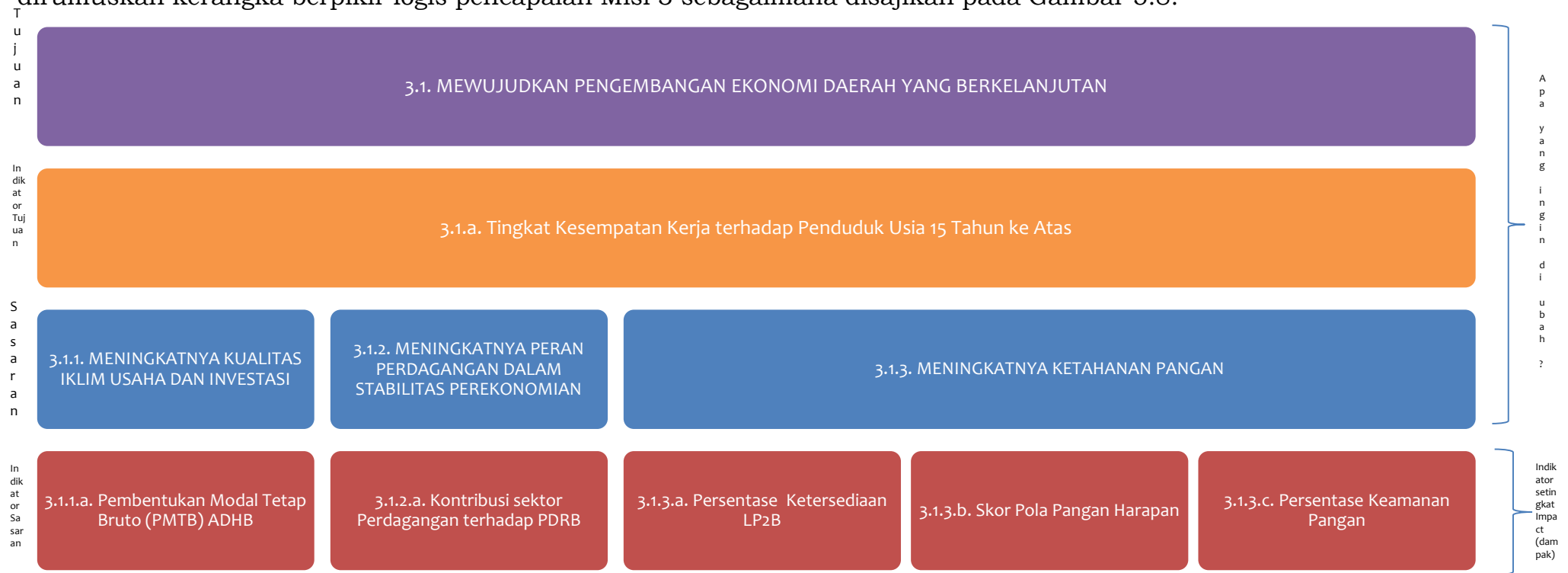


Gambar 5.7.
Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 2 RPJMD
(Sumber : Hasil analisis, 2018)

5.3.3. Kerangka

5.3.3. Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 3 RPJMD

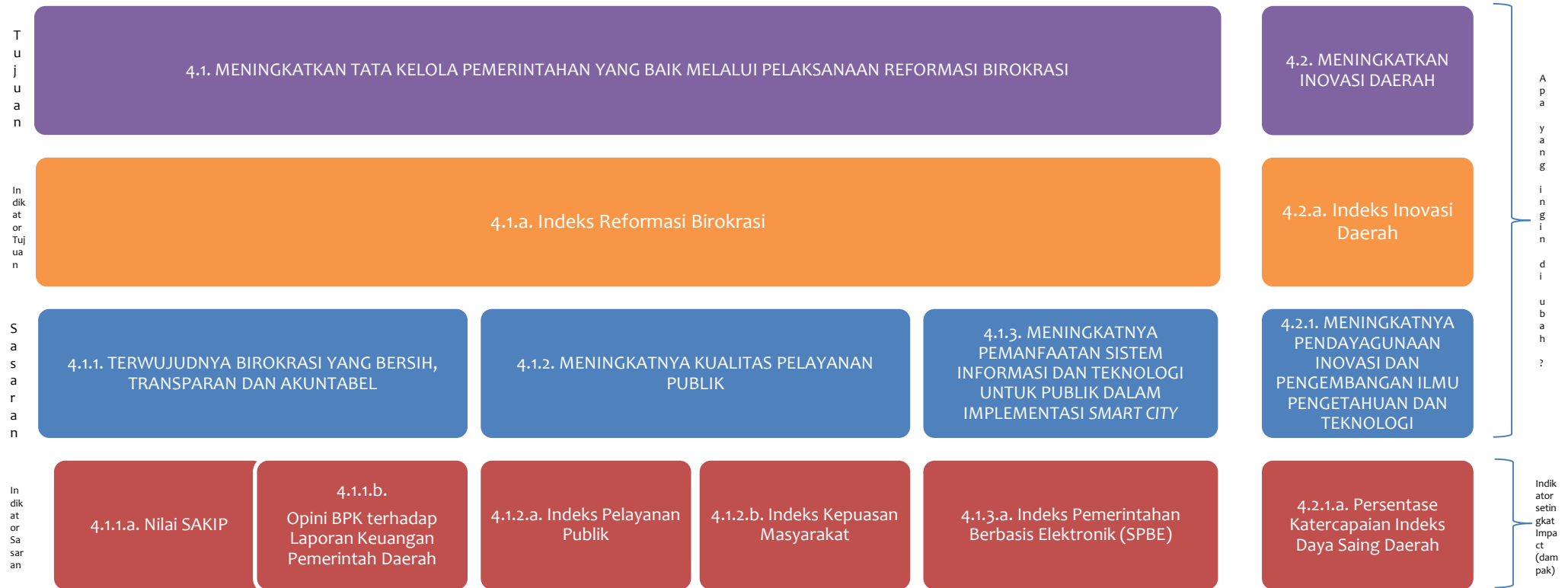
Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar**, maka dirumuskan kerangka berpikir logis pencapaian Misi 3 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.8.



Gambar 5.8.
Kerangka Berikir Logis Pencapaian Misi 3 RPJMD
(Sumber : Hasil analisis, 2018)

5.3.4. Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Misi 4 RPJMD

Dalam rangka pencapaian misi **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif**, maka dirumuskan kerangka berpikir logis pencapaian Misi 4 sebagaimana disajikan pada Gambar 5.9.



Gambar 5.9.
Kerangka Berikir Logis Pencapaian Misi 4 RPJMD
(Sumber : Hasil analisis, 2018)

Tabel

Tabel 5.2
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR (2023)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA											
MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF, DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA											
1.1 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA		a. Indeks kerukunan umat beragama	Angka	94,68	94,68	94,98	95,28	95,58	95,88	96,18	96,18
	1.1.1	MENINGKATNYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN	Angka	94,68	94,68	94,98	95,28	95,58	95,88	96,18	96,18
	1.1.2	MENINGKATNYA DISIPLIN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Persen	N/A	N/A	63,70	64,00	64,30	64,60	64,90	64,90
1.2 MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KESEHATAN		a. Angka harapan hidup	Angka	71,95	72,00	72,05	72,10	72,15	72,20	72,25	72,25
	1.2.1	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	Angka	0,177	0,177	0,207	0,257	0,287	0,317	0,367	0,367

Tujuan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR (2023)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.3 MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN SERTA MENUMBUHKAN MASYARAKAT YANG KREATIF DAN BERBUDAYA		a. Indeks pendidikan	Angka	69,80	69,80	69,81	69,82	69,82	69,83	69,83	69,83
	1.3.1 MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG MERATA DAN BERMUTU	a. Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,52	9,79	9,75	9,77	9,79	9,81	9,83	9,83
	1.3.2 MENINGKATNYA PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN, MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PRESTASI OLAHRAGA KOTA SUKABUMI	a. Indeks pembangunan pemuda	Persen	N/A	N/A	53,63	54,13	54,63	55,13	55,63	55,63
1.4 MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BAHAGIA DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		a. Indeks ketahanan keluarga	Angka	67,76	67,76	67,81	67,86	67,91	67,96	68,01	68,01
	1.4.1 MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	a. Indeks pembangunan gender	Angka	91,01	91,01	91,07	91,13	91,19	91,25	91,31	91,31
	1.4.2 MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	a. Indeks ketahanan keluarga	Angka	67,76	67,76	67,81	67,86	67,91	67,96	68,01	68,01

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR (2023)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN											
2.1 MEWUJUDKAN LAYANAN DASAR KOTA LAYAK HUNI YANG AMAN DAN NYAMAN	2.1.1 TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN	a. Indeks kota layak huni	Angka	N/A	N/A	45	46	47	48	49	49
		a. Persentase penilaian aspek fisik indeks layak huni	Persen	N/A	N/A	41	42	43	44	Tujuan45	45
		b. Persentase penilaian aspek kualitas lingkungan hidup	Persen	N/A	N/A	41	42	43	44	45	45
		c. Persentase Penilaian Aspek transportasi	Persen	N/A	N/A	51	52	53	54	55	55
		d. Persentase penilaian aspek fasilitas	Persen	N/A	N/A	41	42	43	44	45	45
		e. Persentase penilaian aspek utilitas	Persen	N/A	N/A	51	52	53	54	55	55
	2.1.2 TERWUJUDNYA KESIAPSIAGAAN KEBENCANAAN	a. Persentase pengurangan risiko bencana	Persen	1,00	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	2, 50

Tujuan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR (2023)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	2.1.3 TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	Point	42,67	42,67	42,83	43,30	43,23	43,44	43,64	43,64
	2.1.4 TERWUJUDNYA KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK	a. Persentase kawasan kumuh	Persen	0,21	0,21	0,17	0,13	0,08	0,04	0,00	0,00
MISI 3 MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN, EKONOMI KREATIF, DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR											
3.1	MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJUTAN	a. Tingkat kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	persen	54,57	56,22	57,85	59,46	61,05	62,62	64,18	64,18
	3.1.1 MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Milyar Rupiah	N/A	N/A	100	105	110	115	120	550
	3.1.2 MENINGKATNYA PERAN PERDAGANGAN DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN	a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	39,435	39,435	39,485	39,510	39,535	39,560	39,585	39,585
	3.1.3 MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN	a. Persentase ketersediaan LP2B	persen	1,90	1,90	3,80	5,65	7,50	9,35	11,20	11,20

Tujuan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR (2023)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		b. Skor pola pangan harapan	persen	77,90	79,70	78,70	79,10	79,50	79,99	80,30	80,30
		c. Persentase keamanan pangan	persen	85,45	78,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF											
4.1 MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI		a. Indeks reformasi birokrasi	Skala	68,03	68,79	69,00	69,50	70,00	70,50	71,00	71,00
	4.1.1 TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Nilai SAKIP	Skor	74,49	74,49	80,00	81,35	83,07	84,78	86,50	86,50
		b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	4.1.2 MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	a. Indeks pelayanan publik	Angka	N/A	2,62	2,60	2,75	3,00	3,10	3,25	3,25
		b. Indeks kepuasan masyarakat	Angka	79,28	79,28	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	82,00
4.1.3 MENINGKATNYA PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI UNTUK PUBLIK	a. Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2*	2*	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,50	

Tujuan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR (2023)
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.2 MENINGKATKAN INOVASI DAERAH		a. Indeks inovasi daerah	Persen	25	57	60	65	70	75	80	80
	4.2.1	MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	a. Persentase ketercapaian indeks daya saing daerah	Persen	25	57	60	65	70	75	80

Sumber: Hasil Analisis, 2018

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi.

Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan Daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Rumusan strategi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPJMD

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
1.1 Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	1.1.1 Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan pemahaman wawasan kebangsaan	1. Meningkatkan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan 2. Meningkatkan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tokoh agama 3. Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan 4. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat	
	1.1.2 Meningkatnya disiplin, keamanan, dan ketertiban masyarakat	1. Meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda 2. Meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban 3. Meningkatkan pendidikan politik yang berkualitas	
	1.2. Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan	1.2.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
			2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan
			3. Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan
			4. Menurunkan angka kematian

TUJUAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1.3 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta menumbuhkan masyarakat yang kreatif dan berbudaya	1.3.1 Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu	1. Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini 2. Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dasar sembilan tahun 3. Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal 4. Meningkatkan tata kelola pendidikan yang berkualitas 5. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal
	1.3.2 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga, dan prestasi olah raga Daerah	1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga
1.4 Mewujudkan masyarakat yang bahagia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1.4.1 Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, dan anak	1. Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak 2. Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak 3. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 4. Meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan

TUJUAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	1.4.2 Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga 2. Mengembangkan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 3. Optimalisasi kelompok bina keluarga 4. Optimalisasi program ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga 5. Menyusun kebijakan terkait pengendalian pertumbuhan penduduk 6. Optimalisasi program keluarga berencana, reproduksi remaja, dan pelayanan kontrasepsi 7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja 8. Menyusun kebijakan terkait tenaga kerja 9. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 10. Meningkatkan optimalisasi program peningkatan kesempatan kerja 11. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif 12. Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial 13. Meningkatkan pelayanan dasar dan penghidupan penduduk miskin dan rentan miskin

TUJUAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
2.1 Mewujudkan layanan dasar kota layak huni yang aman dan nyaman	2.1.1 Terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Meningkatkan sarana dan prasarana jalan
		2. Mengembangkan penataan ruang wilayah
		3. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman
	2.1.2 Terwujudnya kesiapsiagaan kebencanaan	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kawasan rawan bencana (KRB)
		2. Meningkatkan kesiagaan, pencegahan, dan penanggulangan bahaya kebakaran
	2.1.3 Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	1. Meningkatkan pengendalian pencemaran tanah, air, dan udara
		2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan
		3. Meningkatkan pengendalian kerusakan lingkungan
		4. Meningkatkan kerjasama pengelolaan persampahan
5. Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan		
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		

TUJUAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	2.1.4 Terwujudnya kawasan permukiman yang layak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penataan kawasan kumuh 2. Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman
3.1 Mewujudkan pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan	3.1.1 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	1. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
		2. Meningkatkan pelayanan sektor perizinan berbasis IT
		3. Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
		4. Mengembangkan ekonomi kreatif
5. Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi		
6. Mengembangkan disain Daerah sebagai objek wisata <i>heritage</i>		
3.1.2 Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian	1. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah	
	2. Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan	

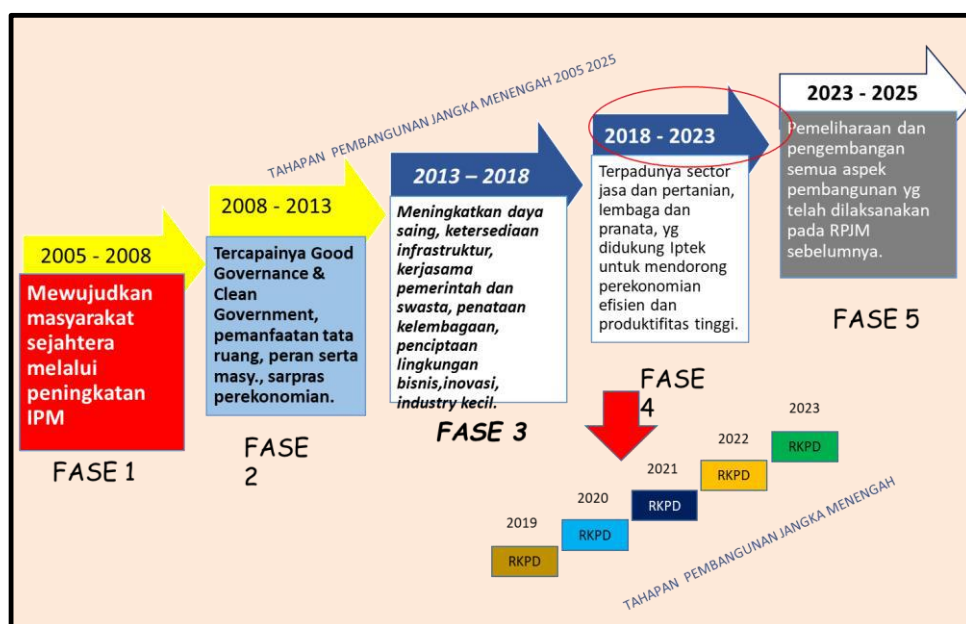
TUJUAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	3.1.3 Meningkatnya ketahanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA) 2. Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
4.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi	4.1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 3. Meningkatkan pengawasan pembangunan daerah 4. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT 5. Meningkatkan manajemen pegawai ASN 6. Meningkatkan pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi 7. Meningkatkan pengordinasian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) 8. Meningkatkan evaluasi dan pembinaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	4.1.2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan pada standar pelayanan serta standar operasional prosedur (SOP)
		2. Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.
	4.1.3 Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan <i>smart city</i>	1. Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan
		2. Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
4.2 Meningkatkan inovasi daerah	4.2.1 Meningkatkan pendayagunaan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Meningkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan inovasi daerah
		2. Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan inovasi daerah
		3. Meningkatkan pengembangan jejaring di daerah, regional dan nasional
		4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta kerjasama dengan akademisi

Sumber: hasil analisis

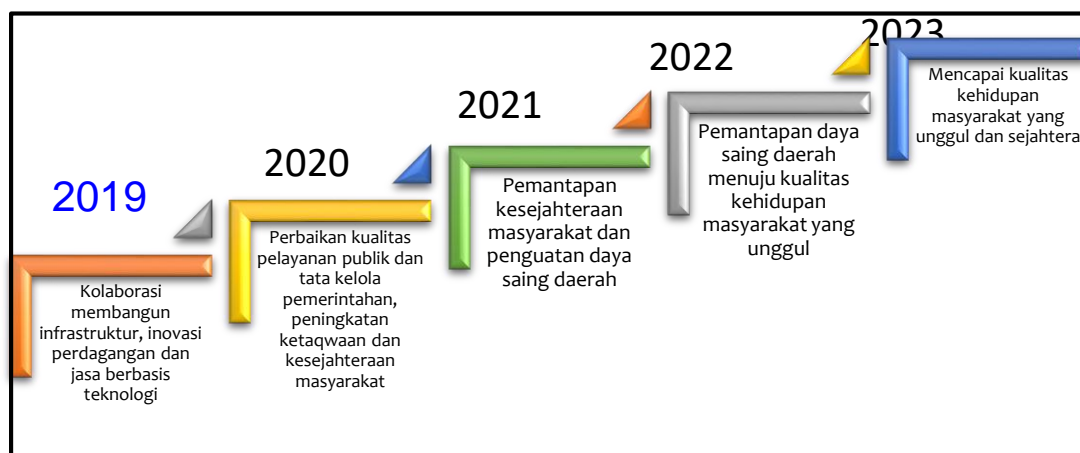
Pelaksanaan pembangunan periode 2018-2023 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD yang memiliki tema **“Terpadunya sektor jasa dan pertanian, lembaga dan pranata, yang didukung IPTEK untuk mendorong perekonomian efisien dan produktifitas tinggi”**. Tema pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang lebih lanjut akan dijabarkan dalam tema pembangunan setiap tahun dan menjadi pedoman bagi penentuan fokus atau tema pembangunan dalam RKPD. Tema pembangunan lima tahunan dalam setiap periode RPJPD disajikan pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1
Tema Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD dan Penjabarannya ke RKPD

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus pembangunan akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai periode RPJMD. Penerapan tema atau fokus tersebut memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Daerah setiap tahun dalam rangka pencapaian target pembangunan di RPJMD. Fokus pembangunan tahunan Pemerintah Daerah

mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Gambar 6.2 berikut ini.



Gambar 6.2
Tema atau Fokus Pembangunan Tahunan Periode 2018-2023

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dijabarkan dalam fokus atau tema pembangunan setiap tahun, maka dirumuskan arah kebijakan yang merupakan penjabaran dari strategi-strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah.

Arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan pada Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<p>Kolaborasi membangun infrastruktur, inovasi perdagangan, dan jasa berbasis teknologi,</p> <p><i>Dengan arah kebijakan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pendidikan dasar, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan dasar 2. Mendorong pengembangan perdagangan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta pengembangan penggunaan IPTEK 	<p>Perbaiki kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat,</p> <p><i>Dengan arah kebijakan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan keagamaan dan penanaman nilai-nilai luhur melalui muatan lokal di pendidikan dasar 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan reformasi birokrasi 	<p>Pemantapan kesejahteraan masyarakat dan penguatan daya saing daerah,</p> <p><i>Dengan arah kebijakan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan tingkat pengangguran 2. Peningkatan kualitas hidup Sumber Daya Manusia melalui penjaminan akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan 3. Penguatan perekonomian daerah melalui peningkatan kemitraan dengan swasta 	<p>Pemantapan daya saing daerah menuju kualitas kehidupan masyarakat yang unggul,</p> <p><i>Dengan arah kebijakan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan tingkat pengangguran 2. Penguatan perekonomian daerah yang kreatif dan berkelanjutan serta peningkatan daya saing melalui kemitraan dengan swasta dan akademisi didukung 3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang inovatif berbasis elektronik (<i>e-government</i>) 	<p>Mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang unggul dan sejahtera,</p> <p><i>Dengan arah kebijakan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan 2. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar yang semakin berkualitas 3. Pemantapan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang inovatif berbasis elektronik (<i>e-government</i>)

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<p>3. Peningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana serta kualitas lingkungan hidup</p> <p>4. Penguatan ketahanan pangan, mendorong pengembangan agroeduwisata, dan pengembangan pertanian berbasis IPTEK</p> <p>5. Penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan, dan profesionalisme ASN</p> <p>6. Penanggulangan kemiskinan, PMKS, dan pengangguran.</p>	<p>3. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran</p> <p>4. Peningkatan pembangunan dukungan infrastruktur pada pusat pertumbuhan baru.</p>	<p>4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government)</p> <p>5. Peningkatan pembangunan dukungan infrastruktur pada pusat pertumbuhan baru.</p>	<p>4. Peningkatan pembangunan dukungan infrastruktur pada pusat pertumbuhan baru.</p>	<p>4. Peningkatan pembangunan dukungan infrastruktur pada pusat pertumbuhan baru.</p>

Sumber : Hasil Analisis Bappeda (2018)

6.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PENDEKATAN SPASIAL

Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam penyusunan RPJMD. Penerapan pendekatan spasial ini dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi yang pada saat ini sedang dilakukan penyusunan revisi atau perubahan RTRW. Konsep perubahan RTRW ini akan digunakan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan pendekatan spasial. Hal ini dimaksudkan agar terwujud keselarasan antara RTRW dan RPJMD.

Tujuan penataan ruang Daerah adalah untuk mewujudkan ruang Daerah yang produktif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang berbasis pada bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Oleh karena itu kebijakan penataan ruang di Daerah akan diarahkan agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, berkelanjutan, produktif, mengamankan, dan melestarikan kawasan lindung, mengembangkan struktur ruang yang polisentris atau memiliki banyak pusat pelayanan dan mengembangkan infrastruktur yang ramah lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, dirumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang Daerah yang meliputi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis.

Pengembangan stuktur ruang di Daerah memiliki beberapa kebijakan yang meliputi :

1. Perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan kegiatan kota lainnya secara optimal. Strategi pencapaiannya adalah:
 - a. membagi wilayah kota menjadi tiga pusat pelayanan kota yang masing-masing dilayani oleh pusat-pusat pelayanan yang memiliki peran, fungsi, dan struktur kegiatan utama secara spesifik; dan

b. membentuk

- b. membentuk pusat kegiatan kawasan pariwisata, pusat perdagangan kota, pendidikan, dan kesehatan secara berhirarki.
2. peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem sirkulasi kota yang optimal. Hal ini akan dicapai dengan strategi berupa menentukan hierarki pusat kegiatan pelayanan skala regional dan lokal meliputi pusat kegiatan pelayanan dan komersial dan pusat kegiatan wisata.
3. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota. Hal ini akan dicapai dengan beberapa strategi yaitu :
 - a. mendistribusikan fasilitas sosial dan ekonomi secara merata di setiap pusat kegiatan;
 - b. mengembangkan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan dan sumber daya air;
 - c. mengembangkan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata;
 - d. meningkatkan kapasitas jaringan jalan;
 - e. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan;
 - f. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada wilayah yang memiliki potensi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru;
 - g. pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan energi;
 - h. meningkatkan pemerataan pelayanan air minum;
 - i. mengembangkan sarana pengolahan air bersih untuk dapat dikonsumsi secara langsung atau langsung diminum dari jaringan kran;
 - j. mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan cara

pengolahan setempat per wilayah melalui teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;

- k. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah;
- l. menata jaringan drainase yang terpadu dan saling terkoneksi;
- m. mengembangkan jalur pejalan kaki dengan dilengkapi jalur berjalan bagi penyandang cacat;
- n. mengembangkan jalur evakuasi bencana sebagai bagian upaya mitigasi bencana; dan
- o. menyediakan lapangan terbuka untuk zona penyangga dan tempat evakuasi.

Pengembangan pola ruang di Daerah memiliki beberapa kebijakan yang meliputi:

1. pelestarian kawasan lindung terutama di daerah sempadan sungai dan wilayah utara Daerah untuk keberlanjutan lingkungan Daerah. Hal ini akan dicapai dengan beberapa strategi yaitu:
 - a. kerjasama dengan Kabupaten Sukabumi untuk penyelamatan ekosistem;
 - b. melestarikan daerah resapan air;
 - c. mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sempadan mata air yang dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik, dan mengurangi kuantitas debit air;
 - d. membatasi kegiatan di kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai hanya untuk kepentingan pariwisata yang tidak merubah fungsi lindung;
 - e. mengelola kawasan lindung secara terpadu;
 - f. melakukan konservasi tanah dan air pada kawasan lindung;
 - g. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
 - h. menyelamatkan keutuhan potensi keanekaragaman

- hayati;
- i. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau hingga 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Daerah dalam mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan.
2. pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal ini akan dicapai dengan beberapa strategi yaitu :
 - a. mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan agar tetap terjadi keseimbangan perkembangan antar wilayah;
 - b. mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota;
 - c. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem insentif dan disinsentif; dan
 - d. mengendalikan kegiatan industri yang tidak menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan.
 3. pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana. Hal ini akan dicapai dengan beberapa strategi yaitu:
 - a. menata pemanfaatan ruang terbangun pada pusat kegiatan secara merata untuk mencegah kawasan permukiman padat;
 - b. pembangunan perkotaan harus didasarkan pada daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan;
 - c. melarang untuk membangun di kawasan yang memiliki potensi terjadi rawan bencana longsor dan bencana alam;
 - d. mengintensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau melalui kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau;
 - e. menata ruang untuk kegiatan perdagangan, perumahan, pertanian, dan pengembangan obyek wisata yang saling bersinergi;
 - f. mengembangkan lingkungan permukiman dengan

kepadatan rendah di wilayah yang termasuk pada daerah rentan bencana; dan

g. meremajakan dan merehabilitasi lingkungan perumahan yang menurun kualitasnya, dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.

4. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Hal ini akan dicapai dengan beberapa strategi yaitu:

a. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan dengan kawasan budi daya terbangun; dan

b. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan atau Setukpa Lemdikpol Polri.

Pengembangan kawasan strategis di Daerah memiliki beberapa kebijakan yang meliputi:

1. penguatan kawasan strategis sosial budaya. Hal ini akan dicapai dengan beberapa strategis yaitu:

a. mengembangkan kawasan pusat pendidikan tinggi skala regional; dan

b. mengembangkan kawasan pusat perkantoran pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. peningkatan daya saing investasi dan kesempatan ekonomi pada kawasan strategis ekonomi. Hal ini akan dicapai dengan beberapa strategi yaitu:

a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan;

b. pengembangan kawasan agrowisata dan kawasan pariwisata yang terpadu sebagai daya tarik dan obyek wisata;

c. pengembangan ruang untuk sektor informal;

d. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah; dan

e. memberikan insentif dan stimulan untuk mempercepat perwujudan kawasan strategis berupa peningkatan

pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi.

Sebagai upaya untuk menyelaraskan kebijakan ruang antar wilayah Provinsi Jawa Barat, penyusunan RPJMD juga memasukkan strategi dan arah kebijakan penataan ruang Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Kebijakan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan kebijakan pengembangan wilayah pada penataan ruang wilayah Jawa Barat, Daerah termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Sukabumi, dimana Daerah memiliki fungsi sebagai pusat pengolahan agribisnis dan peternakan, agropolitan, wisata agro, industri nonpolutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan, dan jasa yang mendukung fungsi PKW Sukabumi. Daerah yang terletak di wilayah selatan Provinsi Jawa Barat, ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi perkembangannya yaitu pengembangan kota perlu memperhatikan daya dukung lingkungan sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki. Kerentanan terhadap risiko bencana alam (gempa, letusan gunung berapi, gerakan tanah, dan bahaya geologi lainnya); gangguan terhadap hulu DAS, menghindari alih fungsi lahan lindung dan lahan pertanian sawah produktif. Penetapan tersebut mempertimbangkan keterkaitan fungsional antar 6 (enam) wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Barat dan merupakan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan integrasi pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

2. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Berdasarkan kebijakan pengembangan struktur ruang, pengendalian perkembangan sistem kota di wilayah yang berada di Selatan termasuk Daerah diarahkan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan serta tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya; penataan dan pengembangan infrastruktur ditujukan untuk menjadi

pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali, dan pendorong untuk mewujudkan sistem kota di Jawa Barat; mendorong peran Daerah sebagai bagian dari wilayah pengembangan (WP) Sukabumi untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk; mengutamakan pembangunan hunian vertikal pada kawasan permukiman perkotaan guna optimalisasi dan efisiensi ruang budidaya yang semakin terbatas, terutama pada kawasan yang perlu dikendalikan serta mengamankan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan rencana tata ruang pertahanan dan keamanan.

3. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang

- a. kebijakan pengembangan kawasan lindung terdiri dari pencapaian luas kawasan lindung sebesar 45% (empat puluh lima persen) di Provinsi Jawa Barat dan menjaga kualitas kawasan lindung; dan
- b. kebijakan pengembangan kawasan budidaya, pengembangan pola ruang diarahkan untuk mempertahankan lahan sawah berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan Jawa Barat dan nasional serta mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan SDA, guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari 2 (dua) hal sebagai berikut:

- a. perwujudan struktur ruang yang ditujukan untuk pengembangan infrastruktur strategis seperti jaringan prasarana jalan, perhubungan, sumberdaya air, dan permukiman; sedangkan
- b. perwujudan pola ruang ditujukan untuk pencapaian 45% (empat puluh lima persen) kawasan lindung di Provinsi Jawa Barat, penyediaan ruang ketahanan pangan; pelaksanaan prinsip-prinsip mitigasi bencana meliputi tahap pencegahan

dan

dan mitigasi, tahap kesiapsiagaan, tahap tanggap darurat, tahap pemulihan, dan mitigasi bencana berdasarkan jenis bencana; serta perwujudan ruang investasi sektor perekonomian yang meliputi KUKM, industri, perdagangan, pariwisata, dan lintas sektor.

6.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018-2023

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan prioritas pembangunan Daerah. Prioritas pembangunan Daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Prioritas pembangunan Daerah disajikan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, disajikan berdasarkan sasaran RPJMD. Dengan sifat prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan prioritas pembangunan Daerah juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Prioritas pembangunan jangka menengah Daerah, meliputi:

1. peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berakhlak mulia;
2. peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan implementasi reformasi birokrasi yang inovatif berbasis teknologi informasi;
3. peningkatan pemenuhan pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat;
4. peningkatan dukungan infrastruktur untuk pembangunan; dan
5. pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu sebagai berikut:

1. ***Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama***, merupakan program untuk mewujudkan pilar religius yang sudah ditetapkan dalam visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu pembangunan Daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Daerah yang memiliki sikap dan perilaku yang taat

atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain. Program kerja yang akan dilaksanakan adalah peningkatan kualitas lembaga keagamaan (peningkatan kualitas manajemen, peningkatan fasilitas keagamaan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan basis ekonomi), gerakan magrib mengaji, gerakan subuh berjamaah, pembiasaan akhlakul karimah, peningkatan toleransi, program *family straightening* (pelatihan pranikah, pelatihan parenting, konseling keluarga), dan promosi kota halal *friendly*;

2. **Program Optimalisasi Puskesmas**, merupakan program untuk peningkatan mutu dan layanan Puskesmas di setiap kecamatan dengan menyediakan dokter spesialis, peralatan medis, layanan BPJS nonstop 24 jam, dan ambulan SIGAP. Dengan tambahan satu perawat di setiap kelurahan atau *home care* sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi pelayanan warga yang memerlukan pengobatan, pertolongan medis di tiap kecamatan agar terhindar dari penumpukan pasien di RSUD sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih optimal;
3. **Program Peningkatan Literasi**, merupakan program untuk mengembangkan budaya literasi, mengajak warga untuk semakin gemar membaca dengan mengadakan acara-acara menarik di Daerah yang dilaksanakan oleh penggerak perpustakaan keliling;
4. **Forum Silih Asih Silih Asuh atau Uduan Online**, merupakan program pemerintah untuk mendorong kesetiakawanan warga kota untuk saling membantu, silih asih silih asuh dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan secara kewenangan maupun secara anggaran sehingga masyarakat diberi ruang untuk berkontribusi;
5. **Program Rumah Singgah**, merupakan program untuk menyediakan rumah singgah bagi warga Daerah yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan medis di

RSUP rujukan yaitu RS Hasan Sadikin serta menyiapkan tenaga administrasinya agar pasien terlayani dengan baik;

6. **Kelurahan Sport Center**, merupakan program penyediaan fasilitas olahraga yang berkualitas di setiap kelurahan;
7. **Program Students Camp**, merupakan program pendidikan agama, kedisiplinan, pembentukan karakter anak bangsa yang berdurasi tidak panjang atau *short course* bagi siswa SMA dan SMK sederajat. Pelaksanaannya berdurasi 1 (satu) bulan sampai 3 (tiga) bulan dan tidak hanya di dalam kelas saja tapi di luar ruang atau *outdoor* juga, pada saat siswa baru masuk tahun ajaran baru dan menjelang kelulusan;
8. **Program Revitalisasi Pedestrian**, merupakan konsep penataan integrasi Kawasan Lapang Merdeka sehingga dapat menjadi ruang terbuka publik yang lebih nyaman serta dapat menjadi salah satu *landmark* kota;
9. **Program Sukabumi KECE**, merupakan program pembentukan wirausaha muda yang berusia 16–30 tahun melalui pembentukan *mindset* dan mental pengusaha dengan diberikan bantuan permodalan, pemasaran, dan pembukuannya;
10. **Program Kredit Anyelir**, merupakan program bantuan permodalan yang terintegrasi dengan program Sukabumi KECE, diberikan kepada wirausaha baru atau WUB yang telah dinyatakan lulus pelatihan;
11. **Program Little Sukabumi**, merupakan program pusat layanan informasi, pusat belanja, dan *display* produk unggulan Daerah yang bersinergi dengan daerah lain yaitu Bandung, Jakarta, Yogyakarta, dan Bali;
12. **Program Sukabumi Creative Hub**, merupakan program pembangunan ruang kreasi bagi warga dengan menyediakan studio foto, televisi, *fashion*, ruang ICT, galeri seni, serta bioskop mini untuk pemutaran film karya anak bangsa, ruang belajar, kafetaria, radio komunitas anak muda, studio rekaman, dan lain sebagainya;
13. **Program Pendidikan Vokasi**, merupakan program pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan keahlian tertentu atau

vokasi yang relevan dengan dunia kerja dan usaha;

14. **Program Sukabumi Artist Association**, merupakan program yang menjembatani seniman dengan pihak-pihak perusahaan agar karya-karya para seniman di Daerah bisa terpublikasikan, dikenali, dan dinikmati masyarakat yang tidak saja memiliki nilai estetis namun juga memiliki nilai bisnis;
15. **Program Sukabumi Participatory Responder atau SUPER**, merupakan sebuah aplikasi resmi milik Pemerintah Daerah yang terintegrasi langsung dengan e-LAPOR yang menawarkan kemudahan bagi warga untuk berinteraksi dengan Pemerintah Daerah baik untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, pengaduan atas pelayanan publik, pertanyaan, dan lain sebagainya.

Selain program unggulan tersebut di atas, terdapat beberapa program reguler Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disesuaikan dengan program di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan usulan program baru sebagaimana tercantum pada Tabel 6.3 berikut.

Tabel 6.3
Definisi Janji Politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Ke Dalam Program Prioritas

Misi	Program Reguler Kepala Daerah		Kesesuaian Program Di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Program Baru	Perangkat Daerah
(1)	(2)		(3)	(4)
Misi 1	1	Program Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan	- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Bag. Kesra Setda
		- Gerakan maghrib mengaji	- Program Pembinaan Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan	
		- Gerakan sholat subuh berjamaah		
		- Peningkatan kualitas kelembagaan keagamaan (masjid, madrasah, majelis taklim, pesantren); peningkatan kualitas		

Misi

Misi	Program Reguler Kepala Daerah		Kesesuaian Program Di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Program Baru	Perangkat Daerah
(1)	(2)		(3)	(4)
		<p>managemen, sumber daya manusia dan penguatan basis ekonomi</p> <p>- Promosi kota halal <i>friendly</i> (hotel halal, resto halal, kontrakan halal, karaoke halal, bebas rentenir)</p> <p>- Promosi peningkatan toleransi antar ummat beragama</p> <p>- Promosi peningkatan toleransi antar ummat beragama</p>	<p>- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p> <p>- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p>	<p>Kesbangpol</p> <p>Kesbangpol</p>
	3	<p>Program Keluarga Kuat</p> <p>- Program konseling keluarga atau curhat keliling serta fasilitasi penyelesaian masalah sosial berbasis keluarga</p> <p>- Pelatihan Pra Nikah dan <i>Parenting</i></p> <p>- Kampung KB</p> <p>- Gerakan keluargaku surgaku (gerakan ayah mengasuh, gerakan matikan tv pukul 18.00 – 21.00, piknik bareng dll)</p> <p>- Pesantren kilat khusus pelajar dengan potensi kenakalan tinggi (<i>student camp</i>)</p> <p>- Program ospek bersama</p> <p>- Pelarangan penggunaan motor oleh pelajar</p> <p>- Gerakan anti perundungan</p> <p>- Gerakan anti geng motor (<i>law enforcement</i>)</p>	<p>- Program Peningkatan Ketahanan Keluarga</p> <p>- Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri</p> <p>- Level Kebijakan</p> <p>- Program Pendidikan Karakter</p> <p>- Program Student Camp</p> <p>- Level Kebijakan</p> <p>- Program Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal</p>	<p>Daldukkb</p> <p>Disdikbud</p> <p>Pol PP</p>

Misi	Program Reguler Kepala Daerah		Kesesuaian Program Di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Program Baru	Perangkat Daerah
(1)	(2)		(3)	(4)
	4	Program peningkatan pelayanan dan kelembagaan kesehatan - Peningkatan kualitas pelayanan puskesmas: - Waktu pelayanan 24 jam - Tersedianya dokter spesialis - Tersedianya layanan <i>home care</i> - <i>Universal health coverage</i> 100% di tahun 2019	- Program Pengadaan, Peningkatan, Dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Pustu Dan Jaringannya - Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinkes
	5	Program peningkatan kualitas hidup masyarakat berbasis lingkungan dan gaya hidup	- Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
	6	Program penguatan dan pelayanan kesehatan untuk mencegah kematian ibu dan kematian bayi	- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	
	7	Program promosi dan preventif kesehatan	- Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	
	8	Program pendidikan usia dini terintegrasi program keluarga kuat	- Program Anak Usia Dini	Disdikbud
	9	Program pengembangan pendidikan luar sekolah berbasis ekonomi kreatif	- Program Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Berbasis Ekonomi Kreatif	
	10	Program optimalisasi tata kelola pendidikan	- Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Disdikbud
	11	Program peningkatan aktifitas kebudayaan berbasis kewilayahan dan lembaga pendidikan formal dan nonformal	- Program Pengembangan nilai budaya - Program Pengelolaan	

Misi	Program Reguler Kepala Daerah		Kesesuaian Program Di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Program Baru	Perangkat Daerah
(1)	(2)		(3)	(4)
			Kekayaan Budaya - Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
	12	Program peningkatan budaya literasi berbasis komunitas dan wilayah	- Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan
	13	Program pemberdayaan pemuda berbasis karya dan prestasi	- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	DISPORAPAR
	14	Program inisiasi kota kreatif	- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	
	15	Program pembinaan keolahragaan	- Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	
	16	Program peningkatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial	- Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Program Peningkatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan Sosial - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
	17	Program peningkatan keamanan ketentraman ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	- Program Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal - Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Pol PP
Misi 2	1	Program pengendalian pemanfaatan ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan	- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	DPUPRKP2

Misi	Program Reguler Kepala Daerah		Kesesuaian Program Di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Program Baru	Perangkat Daerah
(1)	(2)		(3)	(4)
	2	Program pembuatan pusat pertumbuhan baru di daerah selatan	- Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	
	3	Proram penataan ruang Sukabumi Utara yang terintegrasi	- Program Perencanaan Tata Ruang	
	4	Program ruang publik budaya	- Program Ruang Publik Budaya	Disdikbud
	5	Program penataan transportasi publik yang nyaman, mudah, murah dan cepat	- Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	DISHUB
	6	Program lalu lintas berbudaya	- Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	
	7	Program peningkatan pedestrian yang layak	- Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	
- Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan				
	8	Program kemantapan struktur jalan	- Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	
	9	Program pengelolaan sampah efektif dan efisien	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DLH
	10	Program perluasan ruang terbuka hijau	- Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	
	11	Program peningkatan akses air bersih	- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	DPUPRKP2
	12	Program pengelolaan permukiman berbasis masyarakat	- Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	
Misi 3	1	Program pariwisata berbasis kuliner dan sejarah daerah	- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	DISPORAPAR
	2	Program pengembangan produk, pasar dan sarana pariwisata daerah sekitar	- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
	3	Program peningkatan kualitas ekonomi kreatif	- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	

Misi	Program Reguler Kepala Daerah		Kesesuaian Program Di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Program Baru	Perangkat Daerah
(1)	(2)		(3)	(4)
	4	Program kampung kreatif tematik	- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	
	5	Program pusat kewirausahaan berbasis kelurahan	- Program Kewirausahaan dan Kompetitif UKM	DISKOPDA-GRIN
	6	Program penciptaan wirausaha muda		
	7	Program kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi untuk pertumbuhan ekonomi	- Program Kerjasama Pembangunan	BAPPEDA
		- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		
	8	Program peningkatan iklim dan realisasi investasi	- Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	DISKOPDA-GRIN
		- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		
		- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		
		- Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	DPMPTSP	
		- Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi		
	9	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	- Program Pembinaan Kaki Lima dan Asongan	DISKOPDA-GRIN
	10	Program perluasan jangkauan pemasaran	- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
	11	Program revitalisasi tata kelola pasar-pasar tradisional	- Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
	12	Program pengembangan pertanian dan peternakan	- Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DKP3

Misi

Misi	Program Reguler Kepala Daerah		Kesesuaian Program Di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Program Baru	Perangkat Daerah
(1)	(2)		(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan - Program peningkatan produksi hasil peternakan - Program Penataan dan Pengembangan Kawasan Agribisnis - Program pengembangan budidaya perikanan 	
	13	Program peningkatan pasar hasil pertanian dan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan - Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan - Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 	
Misi 4	1	Program kinerja berbasiskan kualitas pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Program Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - Program Ketatalaksanaan Dan Kelembagaan Antar Pemerintah Dan Pemerintah Daerah 	<p>BPKD</p> <p>Inspektorat</p> <p>BAGIAN ORGANISASI SETDA</p>

Misi	Program Reguler Kepala Daerah		Kesesuaian Program Di Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Program Baru	Perangkat Daerah
(1)	(2)		(3)	(4)
	2	Program peningkatan respon terhadap keluhan masyarakat	- Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	DISKOMINFO
	3	Program peningkatan partisipatif masyarakat berbasis rukun warga	- P2RW (Hibah)	BPKD
	4	Program pembinaan dan pengembangan sumberdaya aparatur	- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPSDM
			- Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
	5	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	DISKOMINFO
			- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
	6	Program penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota	- Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	POL PP
	7	Program perencanaan pembangunan	- Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
	8	Program kerjasama pembangunan lintas batas	- Program Kerjasama Pembangunan Lintas Batas	
	9	Program penataan administrasi kependudukan	- Program Penataan Administrasi Kependudukan	DUKCAPIL
	10	Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa	- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	DISKOMINFO
	11	Program penataan peraturan perundang-undangan	- Program Penataan Perundang-Undangan	BAGIAN HUKUM
	12	Program percepatan pelayanan perizinan	- Program Peningkatan Pelaksanaan Perizinan	DPMPSTP

Sumber : Hasil Analisis 2018

Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana diuraikan diatas, menjadi sebuah amanat yang harus diprioritaskan. Selain program unggulan tersebut, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal atau SPM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) jenis sebagaimana disajikan pada Tabel 6.4 berikut.

Tabel 6.4
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian Tahun ...					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	
SPM PENDIDIKAN								
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	100%	100%	100%	100%	100%	DISDIKBUD
2.	Pendidikan Dasar	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	DISDIKBUD
3.	Pendidikan Kesetaraan	Program Pendidikan Non Formal	100%	100%	100%	100%	100%	DISDIKBUD
SPM KESEHATAN								
4.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
5.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
6.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian Tahun ...					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	
7.	Pelayanan kesehatan balita	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
10.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
12.	Pelayanan kesehatan diabetes melitus	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
14.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian Tahun ...					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (P2M)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
SPM PEKERJAAN UMUM								
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	68.77%	68,77%	69,37%	69,97%	70,57%	DPUPRPKP2
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	87.57%	87,57%	88,77%	89,97%	91,17%	DPUPRPKP2
SPM PERUMAHAN RAKYAT								
18.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota/kabupaten	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
19.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan	100%	100%	100%	100%	100%	DPUPRPKP2

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian Tahun ...					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	
SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
20.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100%	100%	100%	100%	100%	DINAS SATPOL PP
21.	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
22.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
23.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
24.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
SPM SOSIAL								
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	60%	62	65	67	70	Dinas Sosial
26.	Rehabilitasi sosial dasar	Program Pelayanan dan	55%	58%	60%	62%	65%	Dinas Sosial

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian Tahun ...					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	
	anak terlantar di luar panti	Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						
27.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	55%	58%	60%	62%	65%	Dinas Sosial
28.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	55%	58%	60%	62%	65%	Dinas Sosial
29.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial

Sumber : Bappeda Daerah diolah, 2019

Program pembangunan Daerah tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan Daerah. Program pembangunan Daerah disajikan dalam 2 (dua) tabel yaitu Tabel 6.5 yang memuat program pembangunan Daerah disertai pagu indikatif tahun 2019 dan Tabel 6.6 memuat program pembangunan Daerah disertai pagu indikatif tahun 2020-2023. Hal ini dilakukan karena terdapat beberapa perbedaan nomenklatur program pada tahun 2019 dan tahun 2020 – 2023.

Selain program pembangunan Daerah, terdapat beberapa proyek strategis yang akan dilaksanakan di Daerah yang dibiayai dari berbagai sumber anggaran. Hal ini merupakan cerminan dari aspek kolaborasi dalam hal pendanaan dan menunjukkan adanya pertimbangan efisiensi penentuan program sesuai dengan prioritas pembangunan. Proyek strategis Daerah tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 6.7.

Tabel 6.5
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Tahun 2019

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF ,DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA							
TUJUAN								
1.1	MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	94,68	94,68	94,98	-	-
SASARAN								
1.1.1	MENINGKATNYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	94,68	94,68	94,98	-	-
PROGRAM								
1	Program Layanan sosial dan kesejahteraan rakyat	Persentase peningkatan jamaah mesjid jami kelurahan	Persen	-	-	-	714.850.000	BAG. KESRA
2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan kegiatan keagamaan swadaya masyarakat	Persen	-	-	-	5.420.690.000	BAG. KESRA
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Unjuk Rasa yang disebabkan konflik antar dan inter umat beragama	Persen	≤ 10	≤ 10	≤ 10	143.455000	KESBANGPOL

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Program Pembinaan Lembaga Sosial, Kesehatan dan Keagamaan	Persentase penanganan aliran keagamaan atau kepercayaan masyarakat yang menyimpang	Persen	-	-	100	52.827.000	KESBANGPOL
SASARAN								
1.1.2	MENINGKATNYA DISIPLIN, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	Indeks Rasa Aman	Persen	N/A	N/A	63,70	-	-
PROGRAM								
1	Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang terantisipasi	Persen	-	-	100	199.231.000	KESBANGPOL
2	Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen	100	-	100	540.000.000	SATPOL PP
TUJUAN								
1.2	MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KESEHATAN	Angka Harapan Hidup	Angka	71,95	72,00	72,05	-	-
SASARAN								
1.2.1	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,177	0,177	0,207	-	-

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	MASYARAKAT							
PROGRAM								
1	Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase keluarga tidak sehat meningkat kemandiriannya (Keluarga Mandiri Level IV)	Angka	20	22	25	798.144.000	DINKES
2	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	116,50	116,50	125	220.355.000	DINKES
3	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Bayi	per 100.000 KH	6,82	6,82	9	79.205.000	DINKES
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase BALITA <i>stunting</i>	Persen	23,10	-	23	186.783.000	DINKES
5	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Lansia yang dilakukan skrining kesehatan	Persen	36,24	-	100	157.630.000	DINKES
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular	Persen	100	-	100	440.987.000	DINKES
7	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (UHC)	Persen	95	95.00	100	9.379.568.000	DINKES
8	Program Pengembangan lingkungan sehat	Persentase rumah sehat	Persen	51	51.00	100	174.615.000	DINKES
9	Program promosi kesehatan	Persentase pelayanan	Persen	-	-	100	220.140.000	DINKES

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan pemberdayaan masyarakat	promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai standar						
10	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan	Persen	-	-	100	709.749.000	DINKES
11	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit ternak/hewan	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan hewan	Persen	-	-	-	106.675.000	DKP3
12	Program Peningkatan Dan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			-	-	-	300.000.000.000	RSUD R Syamsudin
		a. Persentase Pencapaian nilai akreditasi rumah sakit sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)	Persen	65	65	70	-	RSUD R Syamsudin
		b. Persentase <i>contact rate</i> pasien dengan usia > 72 tahun	Persen	-	31,09	32	-	RSUD R Syamsudin

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan/Kecamatan	Persentase tingkat pemberdayaan masyarakat	Persen	-	57.17	61	1.558.500.000	DP2KBP3APM
TUJUAN								
1.3	MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN SERTA MENUMBUHKAN MASYARAKAT YANG KREATIF DAN BERBUDAYA	Indeks Pendidikan	Angka	69.80	69.80	69.81	-	-
SASARAN								
1.3.1	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG MERATA DAN BERMUTU	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,52	9,79	9,75	-	-
PROGRAM								
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Persen	67,72	63,40	68,70	100.000.000	DISDIK
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	-	-	-	-	-	40.000.000	DISDIK
		a. APM SD	Persen	96,70	99,40	99,50	-	DISDIK
		b. APM SMP	Persen	96,50	96,40	97,00	-	DISDIK
3	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Penurunan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah	Persen	58	58	47	40.000.000	DISDIK

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Program Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Berbasis Ekonomi Kreatif	Persentase terselenggaranya pendidikan vokasi	Angka	-	150.000.000 (60 orang)	70,00	925.000.000	DISNAKER
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional	Persen	-	54,80	56,69	520.000.000	DISDIK
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase SMP Negeri yang melaksanakan PPDB <i>Online</i>	Persen	100	100	100	162.370.000	DISDIK
7	Program Pendidikan Karakter	Persentase penurunan kasus kenakalan pelajar	siswa	-	-	-	510.000.000	DISDIK
8	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan minat baca	Persen	-	-	-	489.000.000	DISPUSIP
9	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pengelolaan keragaman budaya	Kegiatan	-	4	4	31.500.000	DISDIK
SASARAN								
1.3.2	MENINGKATNYA PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN, MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PRESTASI OLAHRAGA DAERAH	Indeks Pembangunan Pemuda	Persen	N/A	N/A	53,63	-	-
PROGRAM								

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah peran serta pemuda	Angka	8,00	-	9,00	150.000.000	DISPORA
2	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah raihan medali pada event olahraga tingkat provinsi dan nasional	Angka	46,00	-	9,00	487.500.000	DISPORA
3	Program Pembentukan Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) di Sekolah	Jumlah kelas olahraga yang terbentuk	Angka	-	-	1,00	633.000.000	DISPORA
4	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah wirausaha muda pemula	Angka	-	-	40	150.000.000	DISPORA
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase kelurahan <i>sport center</i>	Persen	-	-	15,15	1.000.000.000	DISPORA
6	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase peningkatan pengetahuan tentang bahaya narkoba	Angka	100	-	100	50.000.000	DISPORA
1.4	MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BAHAGIA DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	67,76	67,76	67,81	-	-
SASARAN								

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Indeks Pembangunan Gender	Angka	91,01	91,01	91,07	-	-
PROGRAM								
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	-	-	-	-	-	166.977.500	<u>KODE</u> DP2KBP3APM
		a. Persentase PD yang Melaksanakan PPRG	Persen	-	-	45,46	-	DP2KBP3APM
		b. Persentase peningkatan pelayanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak	Persen	-	-	100	-	DP2KBP3APM
		c. Status penilaian kla	status	-	-	Madya	-	DP2KBP3APM
TUJUAN								
1.4.2	MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	67,76	67,76	67,81	-	-
PROGRAM								
1	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga	Persentase keluarga sejahtera II	Persen	-	-	76	279.409.800	DP2KBP3APM
2	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase peningkatan kelompok UPPKS yang aktif	Persen	-	-	85	50.000.000	DP2KBP3APM

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Program Keluarga Berencana	Total fertility rate	Angka	-	-	2,40	150.979.784	DP2KBP3APM
4	Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Persentase remaja siap menikah yang mendapat penyuluhan	Persen	-	18	20	97.039.250	DP2KBP3APM
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial	Persen	10	-	15	753.955.800	INDOS
6	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	302.769.000	DINSOS
		a. Persentase tuna sosial (terutama gelandangan dan pengemis) terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	-	-	55	-	DINSOS
		b. Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	-	-	55	-	DINSOS
		c. Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	-	-	55	-	DINSOS

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		d. Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	-	-	55	-	DINSOS
7	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	-	-	60	32.231.000	<u>KODE</u> DINSOS
8	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya.	Persentase keluarga miskin BDT yang tertangani	persen	72	-	76	630.935.000	DINSOS
2	MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN							
TUJUAN								
2.1	MEWUJUDKAN LAYANAN DASAR KOTA LAYAK HUNI YANG AMAN DAN NYAMAN	Indeks Kota Layak Huni	Angka	N/A	N/A	45	-	-
SASARAN								
2.1.1	TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN							
		a. Persentase penilaian Aspek Fisik Indeks Layak Huni	Persen	N/A	N/A	41		

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		b. Persentase penilaian Aspek Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	N/A	N/A	41		
		c. Persentase penilaian Aspek transportasi	Persen	N/A	N/A	51		
		d. Persentase penilaian Aspek Fasilitas	Persen	N/A	N/A	41		
		e. Persentase penilaian Aspek Utilitas	Persen	N/A	N/A	51		
PROGRAM								
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase kondisi jalan yang mantap	Persen	79,24	-	79	10.577.258.000	DISHUB
2	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	Persen	100	100	100	400.000.000	DISHUB
3	Program Pengelolaan RTH	Persentase pemeliharaan PJU	Persen	100	100	100	2.280.674.550	DISHUB
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan pusat pemerintahan	Dokumen	-	-	1,00	500.000.000	DPUPRPKP2
5	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jar. Irigasi/Rawa dan Jar. Lainnya	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	-	-	-	1500 m'	5.438.677.500	DPUPRPKP2
6	Pembangunan Talud/Turap/Bronjong	Persentase turap/talud/bronjong yang terbangun dalam	-	-	-	5 Unit	1.052.454.500	DPUPRPKP2

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		kondisi baik						
7	Program Perencanaan Strategis Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	-	-	-	-	-	888.000.000	BAPPEDA
		a. Persentase pencapaian pemenuhan program dan kegiatan infrastruktur dan tata ruang	Persen	90	90	90	-	BAPPEDA
		b. Persentase perangkat daerah mitra bidang fisik dan penataan wilayah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	-	80	100	-	BAPPEDA
		c. Persentase perangkat daerah mitra bidang fisik dan penataan wilayah yang memenuhi target program pembangunan daerah	Persen	95,54	94,83	91	-	BAPPEDA
8	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian dengan dokumen tata ruang	Persen	95	95	95	55.000.000	DPUPRPKP2

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pengendalian pemanfaatan ruang dengan dokumen perencanaan tata ruang	Persen	80	80	75	105.000.000	DPUPRPKP2
10	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase angkutan umum yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor	Persen	80	80	80,08	856.463.600	DISHUB
SASARAN								
2.1.2	TERWUJUDNYA KESIAPSIAGAAN KEBENCANAAN	Persentase Pengurangan Risiko Bencana	Persen	1	1	1,25	-	-
PROGRAM								
1	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	-	-	-	-	-	400.000.000	BPBD
		a. Persentase kesiapsiagaan dan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persen	1,22	1,22	1,51	-	BPBD
		b. Jumlah zona tangguh bencana	ztb	9	9	13	-	BPBD

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		c. Tertanganinya korban dari kejadian bencana	Orang	100	100	100	-	BPBD
2	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran	Persen	90	90	90	309.075.500	BPBD
SASARAN								
2.1.3	TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	42,67	42,67	42,83	-	-
PROGRAM								
1	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase capaian kualitas udara ambien memenuhi baku mutu	%	60	60	60	45.150.000	DLH
2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	221.952.000	DLH
		a. Persentase peningkatan kualitas air sungai	Persen	3	3	3	-	DLH
		b. Capaian penggunaan produk yang ramah lingkungan	Persen	100	100	100	-	DLH
3	Program Perlindungan Konservasi SDA	-	-	-	-	-	73.000.000	DLH
		a. Persentase jumlah kampung iklim di	%	4,00	4,00	5,00	-	DLH

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		wilayah Daerah						
		b. Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam	%	100,00	100,00	-	-	DLH
4	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luasan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)	Ha	21,30	21,30	21,30	3.406.956.000	DLH
5	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	181.485.000	DLH
		a. Persentase penyediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	100,00	100,00	100,00	-	DLH
		b. Persentase peran serta sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persen	16,00	16,00	18,00	-	DLH
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase upaya peningkatan pelayanan penanganan sampah	Persen	-	18,00	20,00	3.370.000.000	DLH

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	16.000.000.000	DLH
SASARAN								
2.1.4	TERWUJUDNYA KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,21	0,21	0,17	-	-
PROGRAM								
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	-	-	-	-	-	200.000.000	DPUPRPKP2
		a. Persentase penduduk berakses air minum	Persen	68,17	68,17	68,77	-	DPUPRPKP2
		b. Persentase rumah tinggal bersanitasi (MCK)	Persen	87,57	87,57	-	-	DPUPRPKP2
2	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	-	-	-	-	-	4.100.000.000	DPUPRPKP2
		a. Persentase jalan lingkungan yang baik	Persen	81,99	81,99	84,19	-	DPUPRPKP2
		b. Pencapaian targetan penanganan kawasan DAS Cipelang	Persen	-	-	100,00	-	DPUPRPKP2
3	Program Pengembangan Perumahan	Persentase jumlah rumah layak huni	Persen	96,12	96,12	96,41	4.500.000.000	DPUPRPKP2
4	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase kawasan kumuh	Persen	0,21	0,21	0,17	4.000.000.000	DPUPRPKP2

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Persentase pencapaian target pembangunan drainase	Persen	100,00	100,00	100,00	3.000.000.000	DPUPRPKP2
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase STBM	Persen	-	-	6,50	136.391.260	DINKES
3	MISI 3 MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN, EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR							
TUJUAN								
3.1	MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJUTAN	Tingkat kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	persen	54,57	56,22	57,85	-	-
SASARAN								
3.1.1	MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Milyar Rupiah	N/A	N/A	100,00	-	-
PROGRAM								
1	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	-	-	-	-	729.000.000	DISKOPDAGRIN
		a. Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh penguatan permodalan	persen	-	-	70,00	-	DISKOPDAGRIN
		b. Persentase wirausaha muda baru yang terbentuk melalui	persen	-	-	50,00	-	DISKOPDAGRIN

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Program Sukabumi KECE						
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase pertumbuhan investor yang berinvestasi	persen	-	-	-	175.567.100	DPMPSTP
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase aktifasi sub sektor ekonomi kreatif	persen	31,25	-	31,25	438.000.000	DISPORAPAR
4	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM yang mendapat legalitas usaha	Persen	-	-	100,00	100.000.000	DISKOPDAGRIN
5	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan industri	Persen	2,00	-	0,20	218.000.000	DISKOPDAGRIN
6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah destinasi pariwisata berbasiskan kuliner dan sejarah	lokasi	3,00	-	-	100.000.000	DISPORAPAR
7	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Persen	80,00	80,00	80,00	303.617.300	EKBANG
8	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau <i>job fair</i>	Persen	-	-	12,50	260.000.000	DISNAKER
9	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan keterampilan pencari	persen	-	-	2,50	620.000.000	DISNAKER

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		kerja						
SASARAN								
3.1.2	MENINGKATNYA PERAN PERDAGANGAN DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	39,435	39,435	39,485	-	-
PROGRAM								
1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pengembangan dan pembangunan pusat- pusat perdagangan	unit	2,00	-	-	275.249.000	DISKOPDAGRIN
2	Program Pembinaan PKL dan Pedagang Asongan	Jumlah kawasan penataan PKL dan pemberdayaan pedagang	kawasan	3,00	-	-	100.000.000	DISKOPDAGRIN
SASARAN								
3.1.3	MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN							
		a. Persentase Ketersediaan LP2B	persen	1,90	1,90	3,80	-	-
		b. Skor Pola Pangan Harapan	persen	77,90	79,70	78,70	-	-
		c. Persentase Keamanan Pangan	persen	85,45	78,00	86,00	-	-
PROGRAM								
1	Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Persentase perlindungan Lahan Pertanian Pangan	persen	1,90	-	3,80	2.339.200.000	DKP3

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Berkelanjutan (LP2B)						
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	-	-	-	-	-	207.316.000	DKP3
		a. Angka kecukupan energi	kkal/kap/ hari	2,209	-	2,209	-	DKP3
		b. Angka kecukupan protein	gr/kap/hari	69,7	-	69,7	-	DKP3
		c. Persentase keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH)	Persen	85	-	86	-	DKP3
3	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	Persentase keamanan pangan produk perikanan	Persen	10	-	20	38.768.000	DKP3
4	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV Atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	25	-	30	77.070.000	DKP3

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.1	MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF							
TUJUAN								
4.1	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	68,03	68,79	69,00	-	-
SASARAN								
4.1.1	TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Nilai SAKIP	Skor	74,49	74,49	80,00	-	-
		b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	-	-
PROGRAM								
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						2.170.431.500	BAPPEDA
		a. Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	-	80	100	-	BAPPEDA
		b. Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	-	BAPPEDA

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		c. Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	-	BAPPEDA
		d. Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target program pembangunan daerah	Persen	95,54	94,83	100	-	BAPPEDA
2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					-	726.952.000	INSPEKTORAT
		a. Nilai pengawasan kinerja pada SAKIP	Persen	65,2	-	70,5	-	INSPEKTORAT
		b. Persentase SAKIP PD bernilai baik	Persen	70	-	80	-	INSPEKTORAT
		c. Tingkat maturitas SPIP	Level	1	-	2	-	INSPEKTORAT
		d. Persentase Unit WBK/WBBM	Persen	0,06	-	5,00	-	INSPEKTORAT
		e. Persentase tindak lanjut temuan BPK	Persen	80,9	-	81,0	-	INSPEKTORAT
		f. Persentase tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Persen	70	-	85	-	INSPEKTORAT
3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase pemenuhan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang	Persen	75	75	100	100.000.000	INSPEKTORAT

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		sesuai peraturan dan kebijakan nasional						
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah						407.850.300	TAPEM
		a. Nilai pelaporan kinerja pada SAKIP	Nilai	11,15	-	11,50	-	TAPEM
		b. Nilai hasil EKPPD	Nilai	3,39	-	3,40	-	TAPEM
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	699.104.750	SEMUA URUSAN (OPD)
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	Persen	-	-	-	475.367.000	BKPSDM
7	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum yang harmonis	Persen	100,00	-	100,00	380.362.500	BAGIAN HUKUM
8	Program Ketatalaksanaan dan Kelembagaan Antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah			-	-	-	271.520.000	BAGIAN ORGANISASI
		a. Persentase perangkat daerah dengan peringkat komposit 4	Persen	N/A	-	60,00	-	BAGIAN ORGANISASI

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		(P-4)						
		b. Persentase Perangkat Daerah dan BUMD yang memiliki proses bisnis	Persen	N/A	-	25,00	-	BAGIAN ORGANISASI
		c. Nilai manajemen perubahan	Angka	3,06	-	0,08	-	BAGIAN ORGANISASI
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	4.472.021.500	BPKD
		a. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah	Bln	31 Maret	31 Maret	31 Maret	-	BPKD
		b. Penyampaian raperda apbd murni tepat waktu	bln	September	September	September	-	BPKD
		c. Persentase peningkatan sumber pendapatan pajak daerah	Persen	15	15	5	-	BPKD
		d. Pemanfaatan informasi teknologi dalam pengelolaan pendapatan	sistem	-	-	-	-	BPKD
		e. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak	-	85	86	2	-	BPKD

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		f. Persentase tingkat pemahaman wajib pajak	Persen	15	15	3	-	BPKD
		g. Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan aset sesuai peraturan	SKPD	33	33	32	-	BPKD
SASARAN								
4.1.2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	a. Indeks Pelayanan Publik	Angka	N/A	N/A	2,60	-	-
		b. Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,28	79,28	80,00	-	-
PROGRAM								
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan			-	-	-	1.210.513.000	DISDUKCAPIL
		a. Cakupan kepemilikan kartu keluarga	Persen	94,41	-	100,00	-	DISDUKCAPIL
		b. Cakupan kepemilikan KTP-el	Persen	99,08	-	100,00	-	DISDUKCAPIL
		c. Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	96,63	-	100,00	-	DISDUKCAPIL
		d. Cakupan kepemilikan akta kematian	Persen	74,46	-	100,00	-	DISDUKCAPIL
		e. Cakupan pemanfaatan data	Persen	N/A	9,68	100,00	-	DISDUKCAPIL

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		kependudukan						
2	Program Ketatalaksanaan dan Kelembagaan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan pada setiap jenis pelayanan dan atau indeks pelayanan publik	Persen	N/A	-	20,00	148.832.000	BAGIAN ORGANISASI
3	Program Ketatalaksanaan dan Kelembagaan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki nilai IKM baik	Persen	68.57	-	71.00	55,117,000	BAGIAN ORGANISASI
SASARAN								
4.1.3	MENINGKATNYA PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI UNTUK PUBLIK	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2*	2*	2.10	-	-
PROGRAM								
1	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase penerapan pengadaan barang/jasa di Daerah melalui sarana aplikasi yang terintegrasi	Persen	-	-	90.00	250,000,000	BPBJ
2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa	Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa	Persen	-	-	-	100,000,000	DISKOMINFO

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	-	-	95,00	165.372.500	DISKOMINFO
TUJUAN								
4.2	MENINGKATKAN INOVASI DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	Persen	25.00	57.00	60.00	982,982,650	-
SASARAN								
4.2.1	MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Persentase ketercapaian Indeks Daya Saing Daerah	Persen	25.00	57.00	60.00	982,982,650	-
PROGRAM								
1	Program Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Inovasi Daerah						591,256,000	BAPPEDA
		a. Persentase inovasi Daerah yang terfasilitasi	Persen	-	-	56.52	-	BAPPEDA
		b. Persentase penelitian dan pengkajian dengan melibatkan akademisi	Jumlah	-	-	-	-	BAPPEDA
2	Program Penelitian Pengkajian dan Penguatan Kondisi Pemerintahan	Persentase penelitian dan pengkajian dengan melibatkan akademisi	Persen	-	-	57.00	200,000,000	BAPPEDA

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Daerah							
3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan/Kecamatan	Persentase Posyantek aktif di kelurahan dan kecamatan	Persen	-	-	20.00	191,726,650	DP2KBP3APM

Tabel 6.6
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2020-2023

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA													
TUJUAN														
1.1	MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA	a. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	95,28	-	95,58	-	95,88	-	96,18	-	96,18	-	-
SASARAN														
1.1.1	MENINGKATNYA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN	a. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	95,28	-	95,58	-	95,88	-	96,18	-	96,18	-	-
PROGRAM														
1	Program Layanan sosial dan kesejahteraan rakyat	a. Persentase peningkatan jamaah mesjid jami kelurahan	Persen	-	1.030.470.000	-	1.102.602.900	-	1.179.786.100	-	1.262.372.000	-	4.575.231.000	BAG. KESRA
2	Program Pembinaan Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan	a. Persentase peningkatan kegiatan keagamaan swadaya masyarakat	Persen	-	6.914.139.000	-	3.896.231.000	-	4.168.968.000	-	4.460.796.000	-	19.440.134.000	BAG. KESRA
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	a. Persentase unjuk rasa yang disebabkan konflik antar dan inter	Persen	≤ 10	220.000.000	≤ 10	235.000.000	≤ 10	245.000.000	≤ 10	255.000.000	≤ 10	955.000.000	KESBANGPOL

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		umat beragama												
4	Program Pembinaan Lembaga Sosial, Kesehatan dan Keagamaan	a. Persentase Penanganan aliran keagamaan atau kepercayaan masyarakat yang menyimpang	Persen	100	125.000.000	100	125.000.000	100	135.000.000	100	150.000.000	100	535.000.000	KESBANGPOL
SASARAN														
1.1.2	MENINGKATNYA DISIPLIN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	a. Indeks Rasa Aman	Persen	64,00	-	64,30	-	64,60	-	64,90	-	64,90	-	-
PROGRAM														
5	Program Peningkatan Kewaspadaan, Antisipasi dan Kondusifitas di daerah	a. Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang terantisipasi	Persen	100	280.000.000	100	320.000.000	100	330.000.000	100	340.000.000	100	1.270.000.000	KESBANGPOL
6	Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	a. Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang tertangani	Persen	100	705.000.000	100	785.000.000	100	865.000.000	100	945.000.000	100	3.300.000.000	SATPOL PP

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TUJUAN														
1.2	MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KESEHATAN	a. Angka Harapan Hidup	Angka	72,10	-	72,15	-	72,20	-	72,25	-	72,25	-	-
SASARAN														
1.2.1	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	a. Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,257	-	0,287	-	0,317	-	0,367	-	0,367	-	-
PROGRAM														
7	Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat	a. Persentase keluarga tidak sehat meningkat kemandiriannya (Keluarga Mandiri Level IV)	Angka	30	1.196.873.000	35	1.376.403.950	40	1.582.864.543	45	1.820.294.224	45	5.976.435.716	DINKES
8	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	a. Angka kematian ibu	per 100.000 KH	125	233.161.000	122	256.477.100	122	282.124.810	120	310.337.291	120	1.082.100.201	DINKES
9	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	a. Angka kematian bayi	per 100.000 KH	9,00	86.989.000	8,50	95.687.900	8,50	105.256.690	8,00	115.782.359	8,00	403.715.949	DINKES
10	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	a. Persentase BALITA <i>stunting</i>	Persen	22,50	197.961.300	22,00	217.757.430	21,00	239.533.173	20,00	263.486.490	20,00	918.738.393	DINKES
11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	a. Persentase Lansia yang dilakukan skrining kesehatan	Persen	100	163.813.500	100	180.194.850	100	198.214.335	100	218.035.769	100	760.258.454	DINKES

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	a. Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular	Persen	100	1.431.126.900	100	1.574.239.590	100	1.731.663.549	100	1.904.829.904	100	6.641.859.943	DINKES
13	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	a. Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (UHC)	Persen	100	17.181.194.194	100	18.899.313.613	100	20.789.244.975	100	22.868.169.472	100	79.737.922.254	DINKES
14	Program Pengembangan lingkungan sehat	a. Persentase rumah sehat	Persen	100	281.124.338	100	309.236.771	100	340.160.448	100	374.176.493	100	1.304.698.050	DINKES
15	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	a. Persentase pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai standar	Persen	100	234.805.000	100	258.285.500	100	284.114.050	100	312.525.455	100	1.089.730.005	
16	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	a. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan	Persen	100	804.438.175	100	884.881.993	100	973.370.192	100	1.070.707.211	100	3.733.397.570	DINKES
17	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit ternak/hewan	a. Persentase peningkatan pelayanan kesehatan hewan	Persen	-	250.000.000	-	4.450.000.000	-	160.000.000	-	170.000.000	-	5.030.000.000	DKP3
18	Program				300.000.000.000	-	300.000.000.000	-	300.000.000.000	-	300.000.000.000	-	1.200.000.000.000	RSUD R Syamsudin

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peningkatan Dan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)			-										
		a. Persentase pencapaian nilai akreditasi rumah sakit sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)	Persen	75	-	80	-	85	-	85	-	85	-	RSUD R Syamsudin
		b. Persentase <i>contact rate</i> pasien dengan usia > 72 tahun	Persen	34	-	36	-	38	-	40	-	40	-	RSUD R Syamsudin
19	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan/Kecamatan	a. Persentase tingkat pemberdayaan masyarakat	Persen	62	2.121.595.000	63	2.121.595.000	64	2.121.595.000	65	2.121.595.000	65	8.486.380.000	DP2KBP3APM
TUJUAN														
1.3	MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN SERTA MENUMBUHKAN MASYARAKAT YANG KREATIF DAN BERBUDAYA	a. Indeks Pendidikan	Angka	69,82	-	69,82	-	69,83	-	69,83	-	69,83	-	-

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SASARAN														
1.3.1	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG MERATA DAN BERMUTU	a. Angka Rata- Rata Lama Sekolah	Tahun	9,77	-	9,79	-	9,81	-	9,83	-	9,83	-	-
PROGRAM														
20	Program Pendidikan Anak Usia Dini	a. APK PAUD	Persen	70,20	1.225.000.000	71,70	400.000.000	73,20	600.000.000	74,70	650.000.000	74,70	2.875.000.000	DISDIK
21	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	-	-	-	200.000.000	-	550.000.000	-	600.000.000	-	650.000.000	-	2.000.000.000	DISDIK
		a. APM SD	Persen	99,60	-	99,70	-	99,80	-	99,90	-	99,90	-	DISDIK
		b. APM SMP	Persen	97,50	-	98,00	-	98,50	-	99,90	-	99,90	-	DISDIK
22	Program Pendidikan Non Formal	a. Persentase penurunan anak usia sekolah yang tidak sekolah	Persen	35,00	148.000.000	23,00	500.000.000	12,00	500.000.000	-	500.000.000	-	1.648.000.000	DISDIK
23	Program Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Berbasis Ekonomi Kreatif	a. Persentase terselenggaranya pendidikan vokasi	Angka	75	975.000.000	80	1.125.000.000	85	1.380.000.000	90	1.430.000.000	90	4.910.000.000	DISNAKER

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
24	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional	Persen	58.17	523.965.800	60.16	800.000.000	63.80	900.000.000	66.65	1.000.000.000	66.65	3.223.965.800	DISDIK
25	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	a. Persentase SMP Negeri yang melaksanakan PPDB Online	Persen	100	200.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.050.000.000	DISDIK
26	Program Pendidikan Karakter	a. Persentase penurunan kasus kenakalan pelajar	siswa	-	600.000.000	-	650.000.000	-	700.000.000	-	750.000.000	-	2.700.000.000	DISDIK
27	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	a. Persentase peningkatan minat baca	Persen	-	1.400.000.000	-	1.680.000.000	-	1.935.000.000	-	2.200.000.000	-	7.215.000.000	DISPUSIP
28	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	a. Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	Budaya	10	712.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	300.000.000	40	1.512.000.000	DISDIK
29	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	a. Jumlah pengelolaan keragaman budaya	Kegiatan	5	160.000.000	6	625.000.000	7	730.000.000	8	805.000.000	10	2.320.000.000	DISDIK
SASARAN														
1.3.2	MENINGKATNYA PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN, MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PRESTASI OLAHRAGA KOTA	a. Indeks Pembangunan Pemuda	Persen	54,13	-	54,63	-	55,13	-	55,63	-	55,63	-	-

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	SUKABUMI													
PROGRAM														
30	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	a. Jumlah peran serta pemuda	Angka	12	350.000.000	14	402.500.000	16	455.125.000	18	507.881.250	69	1.715.506.250	DISPORA
31	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	a. Jumlah raihan medali pada event olahraga tingkat provinsi dan nasional	Angka	20	755.000.000	15	970.000.000	49	4.785.000.000	31	1.000.000.000	124	7.510.000.000	DISPORA
32	Program Pembentukan Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) Di Sekolah	a. Jumlah kelas olahraga yang terbentuk	Angka	2	1.236.000.000	3	1.854.000.000	4	2.472.000.000	5	3.090.000.000	15	8.652.000.000	DISPORA
33	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	a. Jumlah wirausaha muda pemuda	Angka	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	200	600.000.000	DISPORA
34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	a. Persentase Kelurahan Sport Center	Persen	15,15	1.400.000.000	15,15	1.400.000.000	9,09	1.400.000.000	6,06	1.400.000.000	60,61	5.600.000.000	DISPORA

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
35	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	a. Persentase peningkatan pengetahuan tentang bahaya narkoba	Angka	100	60.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	90.000.000	100	300.000.000	DISPORA
TUJUAN														
1.4	MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BAHAGIA DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	a. Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	67,86	-	67,91	-	67,96	-	68,01	-	68,01	-	-
SASARAN														
1.4.1	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	a. Indeks Pembangunan Gender	Angka	91,13	-	91,19	-	91,25	-	91,31	-	91,31	-	-
PROGRAM														
36	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	- -	-	-	371.493.000	-	374.000.000	-	377.000.000	-	379.000.000	-	1.501.493.000	DP2KBP3APM
		a. Persentase PD yang melaksanakan PPRG	Persen	51,52	-	57,58	-	63,64	-	66,67	-	66,67	-	DP2KBP3APM
		b. Persentase peningkatan pelayanan pengaduan kekerasan perempuan dan anak	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-	DP2KBP3APM

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		c. Status penilaian Kla	status	Madya	-	Madya	-	Madya	-	Madya	-	-	-	DP2KBP3APM
TUJUAN														
1.4.2	MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	a. Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	67,86	-	67,91	-	67,96	-	68,01	-	68,01	-	-
PROGRAM														
37	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga	a. Persentase keluarga sejahtera II	Persen	76,50	900.000.000	77,00	980.000.000	77,50	1.060.000.000	78,00	1.140.000.000	78,00	4.080.000.000	DP2KBP3APM
38	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	a. Persentase peningkatan kelompok UPPKS yang aktif	Persen	86	75.000.000	87	100.000.000	88	115.000.000	89	140.000.000	89	430.000.000	DP2KBP3APM
39	Program Keluarga Berencana	a. Total fertility rate	Angka	2,40	207.180.200	2,40	219.160.050	2,40	233.539.850	2,40	250.786.850	2,40	910.666.950	DP2KBP3APM
40	Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	a. Persentase remaja siap menikah yang mendapat penyuluhan	Persen	20	60.776.200	20	62.000.000	20	64.000.000	20	66.000.000	20	252.776.200	DP2KBP3APM
41	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	a. Jumlah Kampung KB yang Dibentuk dan dibina	Lokasi	17	100.000.000	18	150.000.000	19	175.000.000	20	200.000.000	20	625.000.000	DP2KBP3APM
42	Program Pemberdayaan Komunitas Miskin yang tertangani	a. Persentase masyarakat miskin yang tertangani	Persen	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	DPUPRKP2
43	Program Peningkatan Nilai-Nilai Kesetiakawanan sosial	a. Persentase PSKS yang aktif dalam upaya peningkatan	Persen	20	835.143.516	25	904.553.684	30	949.787.420	35	995.882.964	35	3.685.367.583	DINSOS

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		kesejahteraan sosial												
44	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	- -	-	-	435.000.000	-	493.500.000	-	551.850.000	-	617.385.000	-	2.097.735.000	DINSOS
		a. Persentase tuna sosial (terutama gelandangan dan pengemis) terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	58	-	60	-	62	-	65	-	65	-	DINSOS
		b. Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	58	-	60	-	62	-	65	-	65	-	DINSOS
		c. Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	58	-	60	-	62	-	65	-	65	-	DINSOS

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		d . Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	58	-	60	-	62	-	65	-	65	-	DINSOS
45	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	a. Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	62	95.000.000	65	104.500.000	67	114.950.000	70	126.445.000	70	440.895.000	DINSOS
46	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya.	a. Persentase keluarga miskin BDT yang tertangani	persen	77	694.028.500	78	760.931.350	79	832.024.485	80	907.726.934	80	3.194.711.269	DINSOS
2	MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN													
TUJUAN														
2.1	MEWUJUDKAN LAYANAN DASAR KOTA LAYAK HUNI YANG AMAN DAN NYAMAN	a. Indeks Kota Layak Huni	Angka	46	-	47	-	48	-	49	-	49	-	-
SASARAN														
2.1.1	TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN													

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		a. Persentase penilaian Aspek Fisik Indeks Layak Huni	Persen	42		43		44		45		45		
		b. Persentase penilaian Aspek Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	42		43		44		45		45		
		c. Persentase penilaian Aspek transportasi	Persen	52		53		54		55		55		
		d. Persentase penilaian Aspek Fasilitas	Persen	42		43		44		45		45		
		e. Persentase penilaian Aspek Utilitas	Persen	52		53		54		55		55		
PROGRAM														
47	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	a. Persentase kondisi jalan yang mantap	Persen	82,40	26.348.983.800	82,74	27.368.882.180	83,36	29.590.770.398	83,77	35.034.847.438	83,77	118.343.483.816	DISHUB
48	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	a. Jumlah kejadian genangan	Kejadian	42	450.000.000	41	470.000.000	40	492.000.000	40	516.200.000	40	1.928.200.000	DISHUB
49	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	a. Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	Persen	100	5.829.115.000	100	6.664.486.500	100	1.315.535.150	100	1.150.938.665	100	14.960.075.315	DISHUB
50	Program Pengelolaan RTH	a. Persentase pemeliharaan	Persen	100	7.852.074.554	100	3.137.282.009	100	3.451.010.210	100	3.796.111.231	100	18.236.478.003	DISHUB

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		PJU												
51	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	- -	-	-	5.500.000.000	-	11.236.000.000	-	11.359.600.000	-	1.495.560.000	-	29.591.160.000	DISHUB
		a. Persentase pencapaian kawasan <i>off street parking</i>	Persen	50	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DISHUB
		b. Persentase pencapaian SAUM	Persen	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DISHUB
52	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Negara serta Pengembangan Jasa Konstruksi	- -	-	-	2.150.000.000	-	240.000.000.000	-	240.000.000.000	-	60.000.000.000	-	542.150.000.000	DPUPRKP2
		a. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan pusat pemerintahan	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	DPUPRKP2
		b. Persentase pencapaian pembangunan kawasan pusat pemerintahan	Persen	10	-	40	-	40	-	10	-	100	-	DPUPRKP2
53	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jar. Irigasi/Rawa dan Jar. Lainnya	a. Persentase jaringan irigasi kondisi baik	m'	1.500	4.715.000.000	1.500	5.220.000.000	1.500	3.740.000.000	1.500	2.940.000.000	7.500	16.615.000.000	DPUPRKP2

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
54	Program Pembangunan Talud/Turap/ Bronjong	a. Persentase turap/ talud/ bronjong yang terbangun dalam kondisi baik	unit	7	2.075.000.000	9	2.575.000.000	9	2.550.000.000	5	1.050.000.000	35	8.250.000.000	DPUPRPKP2
55	Program Perencanaan Strategis Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	- -	-	-	920.000.000	-	940.000.000	-	960.000.000	-	980.000.000	-	3.800.000.000	BAPPEDA
		a. Persentase pencapaian pemenuhan program dan kegiatan infrastruktur dan tata ruang	Persen	91	-	92	-	93	-	94	-	94	-	BAPPEDA
		b. Persentase Perangkat Daerah mitra Bidang Fisik dan Penataan Wilayah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	BAPPEDA
		c. Persentase Perangkat Daerah mitra Bidang Fisik dan Penataan Wilayah yang memenuhi target program	Persen	92	-	93	-	94	-	95	-	95	-	BAPPEDA

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		pembangunan daerah												
56	Program Perencanaan Tata Ruang	a. Persentase tingkat ketersediaan prana- ta penataan ruang (RTRW, RDTR & RTBL KSK)	Persen	60	350.000.000	70	250.000.000	80	150.000.000	-	300.000.000	80	1.050.000.000	DPUPRPKP2
57	Program Pemanfaatan Ruang	a. Persentase kesesuaian dengan dokumen tata ruang	Persen	95	60.500.000	95	66.000.000	95	71.500.000	95	77.000.000	95	275.000.000	DPUPRPKP2
58	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	a. Persentase kesesuaian pengendalian pemanfaatan ruang dengan dokumen perencanaan tata ruang	Persen	70	115.500.000	65	131.000.000	60	146.500.000	55	157.000.000	55	550.000.000	DPUPRPKP2
59	Program Ruang Publik Budaya	a. Jumlah ruang publik budaya	Lokasi	1	8.000.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	9.500.000.000	DISDIK
60	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	a. Persentase angkutan umum yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor	Persen	83,10	3.927.157.960	83,86	3.014.056.756	84,57	1.105.991.432	86,56	1.212.338.075	83,64	9.259.544.222	DISHUB
SASARAN														
2.1.2	TERWUJUDNYA KESIAPSIAGAAN KEBENCANAAN	a. Persentase Pengurangan Risiko Bencana	Persen	1,50	-	1,75	-	2,00	-	2,50	-	2,50	-	-

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PROGRAM														
61	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	- -	-	-	440.000.000	-	484.000.100	-	532.402.000	-	585.896.600	-	2.042.298.700	BPBD
		a. Persentase kesiapsiagaan dan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persen	1,80		2,90		2,38		2,67		2,67	-	BPBD
		b. Jumlah zona tangguh bencana	ztb	17		21		25		29		29	-	BPBD
		c. Tertanganinya korban dari kejadian bencana	Orang	100		100		100		100		100	-	BPBD
62	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	a. Persentase kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran	Persen	90	339.985.000	90	373.985.000	90	411.385.000	90	452.525.000	90	1.577.880.000	BPBD
SASARAN														
2.1.3	TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	43,30	-	43,23	-	43,44	-	43,64	-	43,64	-	-
PROGRAM														

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
63	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	a. Persentase capaian kualitas udara ambien memenuhi baku mutu	Persen	60	150.000.000	60	175.000.000	80	200.000.000	80	226.000.000	80	751.000.000	DLH
64	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- -	-	-	340.000.000	-	400.000.000	-	460.000.000	-	520.000.000	-	1.720.000.000	DLH
		a. Persentase peningkatan kualitas air sungai	Persen	7	-	10	-	14	-	17	-	17	-	DLH
		b. Capaian penggunaan produk yang ramah lingkungan	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DLH
65	Program Perlindungan Konservasi SDA	- -	-	-	650.000.000	-	730.000.000	-	821.000.000	-	924.700.000	-	3.125.700.000	DLH
		a. Persentase jumlah kampung iklim di wilayah Kota Sukabumi	%	5	-	6	-	6	-	7	-	7	-	DLH
		b. Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam	%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DLH
66	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	a. Luasan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan	Ha	21,35	5.428.308.980	21,38	5.746.139.878	21,41	6.095.753.866	21,44	6.480.329.252	21,44	23.750.531.976	DLH

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Perkotaan (RTHKP)												
67	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	a. Luas areal pemakaman	Ha	34,80	400.000.000	34,90	500.000.000	35,00	600.000.000	35,10	350.000.000	35,10	1.850.000.000	DLH
68	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA & Lingkungan Hidup	- -	-	-	270.000.000	-	324.000.000	-	388.800.000	-	466.560.000	-	1.449.360.000	DLH
		a. Persentase penyediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DLH
		b. Persentase peran serta sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persen	20	-	22	-	24	-	60	-	60	-	DLH
69	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	a. Persentase upaya peningkatan pelayanan penanganan sampah	Persen	22	3.224.200.000	24	3.409.570.000	26	3.616.527.000	27	3.847.779.700	27	14.098.076.700	DLH
70	Program Peningkatan Sarana dan Prasarasna	a. Persentase pemuhan kebutuhan sarana dan	Persen	100	32.000.000.000	100	32.000.000.000	-	-	-	-	40	64.000.000.000	DLH

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Aparatur	prasarana aparatur												
SASARAN														
2.1.4	TERWUJUDNYA KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK	a. Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,13	-	0,08	-	0,04	-	-	-	-	-	-
PROGRAM														
71	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	- -	-	-	8.400.000.000	-	8.400.000.000	-	8.400.000.000	-	8.400.000.000	-	33.600.000.000	DPUPRPKP2
		a. Persentase penduduk berakses air minum	Persen	68,77	-	69,37	-	69,97	-	70,57	-	70,57	-	DPUPRPKP2
		b. Persentase rumah tinggal bersanitasi (MCK)	Persen	88,77	-	89,97	-	91,17	-	92,37	-	92,37	-	DPUPRPKP2
72	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	- -	-	-	4.150.000.000	-	4.200.000.000	-	4.250.000.000	-	4.300.000.000	-	16.900.000.000	DPUPRPKP2
		a. Persentase jalan lingkungan yang Baik	Persen	87,79	-	91,40	-	95,00	-	98,60	-	98,60	-	DPUPRPKP2
		b. Pencapaian targetan penanganan kawasan DAS Cipelang	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DPUPRPKP2
73	Program Pengembangan Perumahan	a. Persentase jumlah rumah layak huni	Persen	96,70	4.500.000.000	96,99	4.500.000.000	97,28	4.500.000.000	97,57	4.500.000.000	97,57	18.000.000.000	DPUPRPKP2

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
74	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	a. Persentase kawasan kumuh	Persen	0,13	4.000.000.000	0,08	4.000.000.000	0,04	4.000.000.000	-	4.000.000.000	-	16.000.000.000	DPUPRPKP2
75	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	a. Persentase pencapaian target pembangunan drainase	Persen	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	12.000.000.000	DPUPRPKP2
76	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	a. Persentase STBM	Persen	13,00	150.030.380	19,50	165.033.420	26,00	181.536.760	32,50	199.690.430	32,50	696.290.990	DINKES
3	MISI 3 MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN, EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR													
TUJUAN														
3.1	MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJUTAN	a. Tingkat kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	persen	59,46	-	61,05	-	62,62	-	64,18	-	64,18	-	-
SASARAN														
3.1.1	MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Milyar Rupiah	105	-	110	-	115	-	120	-	550	-	-
PROGRAM														
77	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	-	-	-	7.090.000.000	-	3.040.000.000	-	3.040.000.000	-	1.990.000.000	-	15.160.000.000	DISKOPDAGRIN

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		a. Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh penguatan permodalan	persen	80	-	90	-	95	-	100	-	100	-	DISKOPDAGRIN
		b. Persentase wirausaha muda baru yang terbentuk melalui Program Sukabumi KECE	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISKOPDAGRIN
78	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	a. Persentase wirausaha muda baru yang terbentuk melalui program Sukabumi KECE	persen	50	4.080.000.000	50	2.040.000.000	50	2.040.000.000	50	1.326.000.000	50	9.486.000.000	DISKOPDAGRIN
79	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	a. Persentase pertumbuhan investor yang berinvestasi	persen	8,33	205.000.000	7,14	240.000.000	6,67	275.000.000	6,25	310.000.000	1 Triliun	1.030.000.000	DPMPTSP
80	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	a. Realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp. Milyar	210	30.000.000	220	35.000.000	230	40.000.000	240	45.000.000	240	150.000.000	DPMPTSP
81	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	a. Persentase aktivasi sub sektor ekonomi kreatif	persen	31,25	850.000.000	37,50	13.450.000.000	37,50	950.000.000	43,75	950.000.000	43,75	16.200.000.000	DISPORAPAR

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
82	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	a. Persentase IKM yang mendapat legalitas usaha	Persen	100	110.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000	100	500.000.000	DISKOPDAGRIN
83	Program pengembangan industri kecil dan menengah	a. Pertumbuhan industri	Persen	0,3	700.000.000	0,4	800.000.000	0,5	800.000.000,0	0,6	800.000.000,0	4,0	3.100.000.000,0	DISKOPDAGRIN
84	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	a. Pertumbuhan industri	Persen	0,3	100.000.000	0,4	50.000.000	0,5	50.000.000,0	0,6	50.000.000,0	0,6	250.000.000,0	DISKOPDAGRIN
85	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	a. Jumlah destinasi pariwisata berbasis kuliner dan sejarah	lokasi	1	250.000.000	1	250.000.000	2	250.000.000	2	400.000.000	6	1.150.000.000	DISPORAPAR
86	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	a. Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Persen	80	303.617.300	80	303.617.300	80	303.617.300	80	303.617.300	80	1.214.469.200	EKBANG
87	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	a. Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau <i>job fair</i>	Persen	13,75	270.000.000	15,00	270.000.000	16,25	270.000.000	17,50	-	-	810.000.000	DISNAKER
88	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Persentase peningkatan keterampilan pencari kerja	persen	3,75	400.000.000	5,00	430.000.000	6,25	460.000.000	7,50	490.000.000	7,50	1.780.000.000	DISNAKER
SASARAN														

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.1.2	MENINGKATNYA PERAN PERDAGANGAN DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN	a. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	39,510	-	39,535	-	39,560	-	39,585	-	39,585	-	-
PROGRAM														
89	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	a. Jumlah pengembangan dan pembangunan pusat-pusat perdagangan	unit	1	10.010.000.000	2	40.610.000.000	1	30.610.000.000	-	610.000.000	4	81.840.000.000	DISKOPDAGRIN
90	Program Pembinaan PKL dan Pedagang Asongan	a. Jumlah kawasan penataan PKL dan pemberdayaan pedagang	kawasan	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	-	-	6	600.000.000	DISKOPDAGRIN
SASARAN														
3.1.3	MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN													
		a. Persentase Ketersediaan LP2B	persen	5,65	-	7,50	-	9,35	-	11,20	-	11,20	-	-
		b. Skor Pola Pangan Harapan	persen	79,10	-	79,50	-	79,99	-	80,30	-	80,30	-	-
		c. Persentase Keamanan Pangan	persen	87,00	-	88,00	-	89,00	-	90,00	-	90,00	-	-
PROGRAM														
91	Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	a. Persentase perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	persen	5,65	2.750.000.000	7,50	3.110.000.000	9,35	3.475.000.000	11,20	3.830.000.000	11,20	13.165.000.000	DKP3

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		(LP2B)												
92	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	- -	-	-	247.678.000	-	281.488.000	-	325.085.000	-	375.469.500	-	1.229.720.500	DKP3
		a. Angka kecukupan energi	kkal/kap/hari	2.231,09	-	2.253,40	-	2.275,90	-	2.298,60	-	2.298,6	-	DKP3
		b. Angka kecukupan protein	gr/kap/hari	70,4	-	71,1	-	71,8	-	72,5	-	72,5	-	DKP3
		c. Persentase keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH)	Persen	87	-	88	-	89	-	90	-	90	-	DKP3
93	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	a. Persentase keamanan pangan produk perikanan	Persen	25	40.000.000	30	43.000.000	35	45.000.000	40	47.500.000	40	175.500.000	DKP3
94	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	a. Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV Atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	35	150.000.000	40	160.000.000	45	170.000.000	50	180.000.000	50	660.000.000	DKP3

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.1	MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF													
TUJUAN														
4.1	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	a. Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	69,50	-	70,00	-	70,50	-	71,00	-	71,00	-	-
SASARAN														
4.1.1	TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Nilai SAKIP	Skor	81,35	-	83,07	-	84,78	-	86,50	-	86,50	-	-
		b. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	WTP	-	-
PROGRAM														
95	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			-	2.646.489.750	-	1.889.941.225	-	2.049.045.848	-	3.218.150.432	-	9.803.627.255	BAPPEDA
		a. Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	BAPPEDA
		b. Persentase konsistensi penjabaran	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	BAPPEDA

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		program RPJMD kedalam RKPD												
		c. Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	BAPPEDA
		d. Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target program pembangunan daerah	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	BAPPEDA
96	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			-	884.952.000	-	888.651.750	-	888.651.750	-	888.651.750	-	3.550.907.250	INSPEKTORAT
		a. Nilai pengawasan kinerja pada SAKIP	Persen	75,0	-	80,5	-	85,0	-	90,0	-	90,0	-	INSPEKTORAT
		b. Persentase SAKIP PD bernilai baik	Persen	85	-	90	-	95	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT
		c. Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	-	3	-	3	-	4	-	4	-	INSPEKTORAT
		e. Persentase tindak lanjut temuan BPK	Persen	81,9	-	84,0	-	85,0	-	90,0	-	90,0	-	INSPEKTORAT

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		f. Persentase tindaklanjut temuan hasil pengawasan	Persen	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	INSPEKTORAT
97	Program Penataan Reformasi Birokrasi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000	INSPEKTORAT
		a. Persentase tingkat pengawasan dalam penataan RB	Level	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	INSPEKTORAT
		b. Persentase unit WBK/WBBM	Persen	5	-	10	-	15	-	20	-	20	-	INSPEKTORAT
		c. Level maturitas APIP	Level	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	INSPEKTORAT
98	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	a. Persentase pemenuhan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang sesuai peraturan dan kebijakan nasional	Persen	100	100.000.000	100	100.000.000	100	75.000.000	100	50.000.000	100	325.000.000	INSPEKTORAT
99	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				448.635.200		493.498.800		542.847.900		597.133.500		2.082.115.400	TAPEM
		a. Nilai Pelaporan Kinerja pada SAKIP	Nilai	12,00	-	12,25	-	12,50	-	13,00	-	13,00	-	TAPEM
		b. Nilai hasil EKPPD	Nilai	3,42	-	3,44	-	3,46	-	3,48	-	3,48	-	TAPEM

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
100	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	a. Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	1.063.126.005	100	1.262.653.698	100	1.392.701.304	100	1.535.721.109	100	5.254.202.116	SEMUA URUSAN (OPD)
101	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	a. Persentase meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	Persen	-	894.440.000	-	1.303.356.000	-	1.890.027.000	-	1.740.072.000	-	5.827.895.000	BKPSDM
102	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	a. Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	Persen	95	1.639.000.000	95	1.966.800.000	95	2.360.160.000	95	2.832.192.000	95	8.798.152.000	BKPSDM
103	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	a. Persentase produk hukum yang harmonis	Persen	100	380.362.500	100	380.362.500	100	380.362.500	100	380.362.500	100	1.521.450.000	BAGIAN HUKUM
104	Program Ketatalaksanaan dan Kelembagaan Antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah			-	394.006.000	-	344.406.600	-	376.847.260	-	411.531.986	-	1.526.791.846	BAGIAN ORGANISASI
		a. Persentase Perangkat Daerah dengan peringkat komposit 4 (P-4)	Persen	70	-	80	-	85	-	90	-	90	-	BAGIAN ORGANISASI
		b. Persentase Perangkat Daerah dan BUMD yang memiliki proses bisnis	Persen	50	-	80	-	90	-	100	-	100	-	BAGIAN ORGANISASI

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
105	Program Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	a. Nilai manajemen perubahan	Angka	N/A	N/A	3,10	85.000.000	3,11	90.000.000	3,12	100.000.000	3,12	275.000.000	BAGIAN ORGANISASI
106	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- -	-	-	4.575.475.500	-	5.033.023.050	-	5.536.325.355	-	6.089.957.891	-	21.234.781.796	BPKD
		a. Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bln	31 Maret	-	31 Maret	-	31 Maret	-	31 Maret	-	31 Maret	-	BPKD
		b. Penyampaian Raperda APBD Murni tepat waktu	bln	September	-	September	-	September	-	September	-	-	-	BPKD
		c. Persentase peningkatan sumber pendapatan pajak daerah	Persen	0,05	-	0,05	-	0,05	-	0,05	-	-	-	BPKD
		d. Pemanfaatan informasi teknologi dalam pengelolaan pendapatan	sistem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BPKD
		e. Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak	-	0,02	-	0,02	-	0,02	-	0,02	-	-	-	BPKD
		f. Persentase tingkat pemahaman wajib pajak	Persen	0,03	-	0,03	-	0,03	-	0,03	-	0,03	-	BPKD

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		g. Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan aset sesuai peraturan	SKPD	32	-	32	-	32	-	32	-	-	-	BPKD
SASARAN														
4.1.2	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	a. Indeks Pelayanan Publik	Angka	2,75	-	3,00	-	3,10	-	3,25	-	3,25	-	-
		b. Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,50	-	81,00	-	81,50	-	82,00	-	82,00	-	-
PROGRAM														
107	Program Penataan Administrasi Kependudukan			-	1.349.209.300	-	1.506.530.230	-	1.682.183.253	-	1.881.301.530	-	6.419.224.313	DISDUKCAPIL
		a. Cakupan kepemilikan kartu keluarga	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DISDUKCAPIL
		b. Cakupan kepemilikan KTP-el	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DISDUKCAPIL
		c. Cakupan kepemilikan Akte Kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DISDUKCAPIL
		d. Cakupan kepemilikan akta kematian	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DISDUKCAPIL
		e. Cakupan pemanfaatan data kependudukan	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DISDUKCAPIL

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
108	Program Pengembangan Kebijakan Pelayanan Publik	a. Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan pada setiap jenis pelayanan dan atau indeks pelayanan publik	Persen	40	155.000.000	60	165.000.000	70	175.000.000	80	185.000.000	100	680.000.000	BAGIAN ORGANISASI
109	Program Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	a. Persentase unit pelayanan publik yang memiliki nilai IKM baik	Persen	N/A	N/A	73	70.000.000	74	80.000.000	75	90.000.000	75	240.000.000	BAGIAN ORGANISASI
SASARAN														
4.1.3	MENINGKATNYA PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI UNTUK PUBLIK	a. Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,20	-	2,30	-	2,40	-	2,50	-	2,50	-	-
PROGRAM														
110	Program Pelayanan dan Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa	a. Persentase penerapan pengadaan barang/jasa di Daerah melalui sarana aplikasi yang terintegrasi	Persen	90	275.000.000	100	300.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	100	1.250.000.000	BPBJ
111	Program Pengelolaan Aplikasi	Optimalnya Pengelolaan Aplikasi	Persen	N/A	N/A	80	290.000.000	80	210.000.000	80	210.000.000	80	710.000.000	DISKOMINFO

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Informatika	Pelayanan Publik												
112	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa	a. Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa	Persen	-	100.000.000	-	150.000.000	-	152.500.000	-	155.125.000	-	557.625.000	DISKOMINFO
113	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	95	165.372.500	95	173.641.125	95	185.796.000	95	198.802.000	95	723.611.624	DISKOMINFO
TUJUAN														
4.2	MENINGKATKAN INOVASI DAERAH	a. Indeks Inovasi Daerah	Persen	65	1.485.000.000	70	1.575.000.000	75	1.840.000.000	80	1.945.000.000	80	7.827.982.650	-
SASARAN														
4.2.1	MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	a. Persentase ketercapaian Indeks Daya Saing Daerah	Persen	65	1.485.000.000	70	1.575.000.000	75	1.840.000.000	80	1.945.000.000	80	7.827.982.650	-
PROGRAM														
107	Program Penelitian dan Inovasi Daerah				1.255.000.000		1.325.000.000		1.565.000.000		1.645.000.000		5.790.000.000	BAPPEDA
		a. Persentase fasilitasi atas pengembangan inovasi	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BAPPEDA
		b. Persentase keterlibatan aktor pembangunan dalam	Persen	67,39	-	78,26	-	89,13	-	100,00	-	100,00	-	BAPPEDA

KODE

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/ IMPACT/ OUTCOME)	SATUAN	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG- JAWAB
				2020		2021		2022		2023		TARGET	Rp.	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		penelitian dan pengkajian												
108	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan/ Kecamatan	a. Persentase posyantek aktif di kelurahan dan kecamatan	Persen	40	230.000.000	60	250.000.000	80	275.000.000	100	300.000.000	100	1.055.000.000	DP2KBP3APM

Tabel

Tabel 6.7
Rencana Proyek Strategis Daerah Tahun 2019 – 2023

NO.	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN					TARGET
		APBN	APBD PROV	APBD	KPBU	SWASTA	
1	Jalan lingkar Sukabumi		√				2023
2	<i>Double track</i> kereta api Bogor–Sukabumi	√					2021
3	Pembangunan alun-alun		√				2020-2022
4	Pembangunan <i>creative centre</i>		√				2020-2022
5	Penataan pedestrian Jalan Ir. H. Djuanda		√				2019
6	Penataan pedestrian Jalan A. yani		√				2020 -2021
7	Pedestrian integrasi Lapang Merdeka Kota Sukabumi		√				2019
8	Penataan kawasan Gedung Juang, Lapang Merdeka, dan alun-alun		√				2019
9	Pembangunan pasar induk			√			2021
10	Pembangunan gedung parkir					√	2020

NO.	KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN					TARGET
		APBN	APBD PROV	APBD	KPBU	SWASTA	
11	Perluasan dan penataan lahan TPA			√			2020
12	Pembangunan gapura			√			2020
13	pembangunan kawasan pusat pemerintahan			√			2020-2023
13	Pembangunan gedung DPRD			√			2020
14	Kawasan wisata Cikundul		√				2020-2023
15	Penataan sungai Cipelang		√				2020-2023

Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2019

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Perencanaan program Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
2. berbasis permasalahan serta isu strategis Daerah;
3. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal atau SPM;
4. peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah, dan kualitas lingkungan hidup; dan
5. penerapan sub urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Rencana program Perangkat Daerah untuk periode tahun 2019-2023 berjumlah 411 (empat ratus sebelas) program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah, maka dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD.

Kerangka pendanaan pembangunan Daerah tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 7.1. Adapun indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Daerah tahun 2019 disajikan pada Tabel 7.2 sedangkan indikasi rencana program prioritas yang

disertai kebutuhan pendanaan Daerah tahun 2020-2023 disajikan pada Tabel 7.3 berikut ini.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023

Keterangan	PROYEKSI				
	2019	2020	2021	2022	2023
BELANJA	1.373.829.876.434	1.628.973.743.850	1.883.023.176.563	1.943.334.549.375	1.930.701.907.355
Belanja Tidak Langsung	514.995.085.700	530.885.238.612	547.284.704.989	564.210.423.532	581.679.924.213
Belanja Pegawai	473.400.034.780	487.602.035.823	502.230.096.898	517.296.999.805	532.815.909.799
Belanja Subsidi					
Belanja Hibah	33.250.077.370	34.912.581.239	36.658.210.300	38.491.120.815	40.415.676.856
Belanja Bantuan Sosial	5.129.600.000	5.155.248.000	5.181.024.240	5.206.929.361	5.232.964.008
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan dan Kelurahan	715.373.550	715.373.550	715.373.550	715.373.550	715.373.550
Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
Belanja Langsung	858.834.790.734	1.098.088.505.238	1.335.738.471.575	1.379.124.125.844	1.349.021.983.141
Belanja Pegawai	52.259.524.667	54.872.500.900	57.616.125.945	60.496.932.243	63.521.778.855
Belanja Barang dan Jasa	566.661.790.387	708.588.749.835	833.427.799.855	820.737.564.394	757.678.841.535
Belanja Modal	239.913.475.680	334.627.254.502	444.694.545.775	497.889.629.207	527.821.362.751

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Daerah Tahun 2019

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	target	Rp	
				1	2	3	4	
1	URUSAN WAJIB							
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1.01.01	PENDIDIKAN							
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							DISDIK
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	10.838.248.085	DISDIK
1.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	1.513.588.815	DISDIK
1.01.1.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	100	100	71.910.000	DISDIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	36.865.000	DISDIK
1.01.1.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG JASA DAN ASSET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai permendagri No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	29.400.000	DISDIK
1.01.1.01.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	100	100	100	43.886.000	DISDIK
1.01.1.01.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Angka partisipasi kasar PAUD	Persen	67,20	63,40	68,70	1.122.455.000	DISDIK
1.01.1.01.01.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN						33.202.297.500	DISDIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Angka partisipasi murni (APM) SD	Persen	99,40	99,40	99,50	-	DISDIK
		Angka partisipasi murni (APM) SMP	Persen	96,40	96,40	97,00	-	DISDIK
1.01.1.01.01.18.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Persentase penurunan anak usia sekolah yang tidak sekolah	Persen	58		0	4.027.946.000	DISDIK
1.01.1.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional	persen			65	1.323.965.800	DISDIK
1.01.1.01.01.21.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Persentase SMP negeri yang melaksanakan PPDB <i>online</i>	Persen	16		0	2.708.287.000	DISDIK
1.01.1.01.01.23	PROGRAM OPENYELENGGARAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PUSAT	Persentase jumlah sekolah yang menerima BOS pusat	Persen	100	100	100	36.649.450.000	DISDIK
1.01.1.01.01.xx	PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER	Persentase penurunan kasus kenakalan siswa	Persen				510.000.000	DISDIK
1.01.02.	KESEHATAN							
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN							DINKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	target	Rp	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	7.236.160.100	DINKES
1.01.1.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100		100	1.518.214.000	DINKES
1.01.1.01.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100		100	91.813.000	DINKES
1.01.1.01.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100		100	10.000.000	DINKES
1.01.1.01.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100		100	94.032.200	DINKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.02.07.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai permendagri No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	100		100	69.261.000	DINKES
1.01.1.01.02.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Dokumen	100		100	173.935.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.15.	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan	Persen	100		100	3.159.921.750	DINKES
1.01.02.1.01.02.16.	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase keluarga tidak sehat meningkat kemandiriannya (keluarga mandiri level IV)	Persen	20		25	9.686.736.200	DINKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.02.1.01.02.17.	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Persentase sediaan farmasi dan pangan yang memenuhi syarat kesehatan	Persen	20	25	100	166.746.250	DINKES
1.01.02.1.01.02.19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai standar	Persen	0		100	559.190.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.20.	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Persentase BALITA <i>stunting</i>	Persen	23,1	23,1	23	286.783.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.21.	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase rumah sehat	Persen	51	51	100	1.023.853.250	DINKES
1.01.02.1.01.02.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR (P2M)	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular	Persen	100		100	3.107.534.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.23.	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna	Persen	1	1	1	2.800.716.700	DINKES
1.01.02.1.01.02.25.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan	Persen	100		100	33.680.140.768	DINKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	kehatan sesuai kebutuhan						
1.01.02.1.01.02.28.	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (UHC)	persen	87,32	95	100	32.352.486.462	DINKES
1.01.02.1.01.02.29.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Angka kematian bayi	per 100.000 KH	6,82	6,82	9	79.205.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.30.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Persentase lansia yang dilakukan skrining kesehatan	persen	30,17	36	100	157.630.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.32.	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Angka kematian ibu	per 100.000 KH	116,5	116,5	125	679.355.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.33.	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	persen	100	100	100	2.200.000.000	DINKES
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan	persen	100	100	100		DINKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		keehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan						
1.01.02.1.01.02.35.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PPK-BLUD	Persentase masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan UPT BLUD	persen	0	0	50	6.137.428.419	DINKES
1.01.02.1.01.02.36.	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	Cakupan peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	persen	80	80	100	13.679.425.370	DINKES
1.01.02.02.	RSUD R.SYAMSUDIN SH							RSUD R. Syamsudin
1.01.02.1.01.02.26.	PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT						37.301.666.645	RSUD R. Syamsudin
		Pengadaan alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Persen			100	-	RSUD R. Syamsudin
		Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran (pajak rokok)	Persen			100	-	RSUD R. Syamsudin

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		peningkatan sarana dan prasarana RSUD R syamsudin SH DAK (pembangunan gedung 8 lantai)	Persen			100	-	RSUD R. Syamsudin
		Pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan regional pembangunan gedung pusat penunjang (APBD I)	Persen			100	-	RSUD R. Syamsudin
		Pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan regional pengadaan alat kedokteran (APBD I)					-	RSUD R. Syamsudin
1.01.02.1.01.02.34.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BLUD						300.000.000.000	RSUD R. Syamsudin
		Peningkatan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah	Persen			100		RSUD R. Syamsudin

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		sakit dan pengembangan SDM						
		Peningkatan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit bidang umum dan keuangan	Persen			100		RSUD R. Syamsudin
		Peningkatan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit bidang pelayanan dan keperawatan	Persen			100		RSUD R. Syamsudin
		Peningkatan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit bidang pendidikan dan bagian mutu	Persen			100		RSUD R. Syamsudin
		Peningkatan administrasi pengelolaan dan	Persen			100		RSUD R. Syamsudin

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pengembangan SDM						
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM							
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN							DPUPRPKP2
1.01.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN						1.517.971.600	DPUPRPKP2
		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen			100		DPUPRPKP2
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan pusat pemerintahan	Dokumen			1		DPUPRPKP2
1.01.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						6.203.577.000	DPUPRPKP2

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen			100		DPUPRPKP2
		Persentase bangunan sesuai dengan tata ruang kota	Gedung			3		DPUPRPKP2
1.01.03.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	100	100	100	50.000.000	DPUPRPKP2
1.01.03.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	100	100	100	13.742.000	DPUPRPKP2
1.01.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase kondisi jalan lingkungan baik	Persen			84.19	184.780.500	DPUPRPKP2
1.01.03.01.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	Persentase pencapaian target pembangunan drainase	M	196.547		198.047	2.023.837.700	DPUPRPKP2
1.01.03.01.17.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Persentase turap/talud/bronjong kondisi baik	Unit			5	1.052.454.500	DPUPRPKP2

Kode

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.03.01.18.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase kondisi jalan lingkungan baik	Dokumen			3	184.780.800	DPUPRPKP2
1.01.03.01.21.	TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN						2.005.725.000	DPUPRPKP2
		Persentase kondisi jalan lingkungan baik	Dokumen			10		DPUPRPKP2
		Persentase turap/talud/bronjong yang terbangun dalam kondisi baik	M3			500		DPUPRPKP2
		Persentase pencapaian target pembangunan drainase	Dokumen			10		DPUPRPKP2
1.01.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	M'			1.500	5.438.677.500	DPUPRPKP2
1.01.03.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH						1.200.000.000	DPUPRPKP2

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase penduduk berakses air minum	Persen	68	68	69		DPUPRPKP2
		Persentase rumah tinggal bersanitasi (MCK)	Persen	88	88	86		DPUPRPKP2
1.01.03.01.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN/KECAMATAN						7.175.000.000	DPUPRPKP2
		Persentase jalan lingkungan yang baik	Persen	82	82	84.19		DPUPRPKP2
		Pencapaian targetan penanganan kawasan DAS Cipelang	Persen	-	-	3		DPUPRPKP2
		Persentase kepala keluarga dengan akses air bersih	Persen	68	68	69		DPUPRPKP2
1.01.03.01.31.	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya keunggulan dan kemandirian pelaku sektor jasa konstruksi di Kota Sukabumi	Orang					DPUPRPKP2

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	target	Rp	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.03.01.32.	PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya keunggulan dan kemandirian pelaku sektor jasa konstruksi di Kota Sukabumi	Orang					DPUPRPKP2
1.01.03.01.33.	PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya keunggulan dan kemandirian pelaku sektor jasa konstruksi di Kota Sukabumi	Persen		100	100	223.150.000	DPUPRPKP2
1.01.03.01.xx.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG SERTA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							DPUPRPKP2
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan pusat pemerintahan	Dokumen	-				DPUPRPKP2
		Persentase pencapaian pembangunan kawasan pusat pemerintahan	Persen	-				DPUPRPKP2

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.03.01.35.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG						290.000.000	DPUPRPKP2
		Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruang	Persen	80	50%	60%		DPUPRPKP2
		Persentase tingkat ketersediaan pranata penataan ruang (RTRW, RDTR & RTBL KSK)	Persen	50	-	-		DPUPRPKP2
1.01.03.01.36.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG						7.555.000.000	DPUPRPKP2
		Jumlah lapang milik pemerintah yang di tata	Lapang			1		DPUPRPKP2
		Persentase kesesuaian dengan dokumen tata ruang	Persen	95	95	95		DPUPRPKP2
1.01.03.01.37.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Persentase kesesuaian pengendalian pemanfaatan ruang dengan dokumen perencanaan tata ruang	Persen	80	80	75	105.000.000	DPUPRPKP2

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							DLH
1.01.03.1.02.05.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH						100.000.000	DLH
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN							DISHUB
1.01.03.1.02.09.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN							DISHUB
		Persentase kondisi jalan yang mantap	Persen	79,24		4,83	177.742.000	DISHUB
		Ruas jalan kota yang mantap	Km	91,72		-	-	DISHUB
		Panjang trotoar yang ramah pejalan kaki dan berkebutuhan khusus				2,92	4.900.000.000	DISHUB
		Revitalisasi pedestrian kawasan Jl. Ahmad Yani, Jl. Ir. H. Juanda, lapangan merdeka, Jl. Ciwangi, dan jl. Kapt. Harun Kabir				2	5.500.000.000	DISHUB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.03.1.02.09.18.	PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase kondisi jalan yang mantap					20.985.271.910	DISHUB
1.01.03.1.02.09.20.	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah data inspeksi kondisi jalan					50.000.000	DISHUB
1.01.03.1.02.09.21.	PROGRAM CEPAT TANGGAP JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah ruas jalan yang harus ditangani dalam situasi segera					5.206.611.910	DISHUB
1.01.03.1.02.09.23.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan					95.000.000	DISHUB
1.01.03.1.02.09.38.	PROGRAM PENEINGKATAN PEDESTIAN YANG LAYAK DAN LAHAN PARKIR	Persentase jalan trotoar yang ramah pejalan kaki dan berkebutuhan khusus	Persen	4,98			5.500.000.000	DISHUB
1.01.04	PERUMAHAN RAKYAT							
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN							DPUPRPKP2

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.04.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase jumlah rumah layak huni	Persen	96,12	96	96,41	5.022.698.000	DPUPRPKP2
1.01.04.01.16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN		Dokumen			1,00	261.092.500	DPUPRPKP2
1.01.04.01.17	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	Persentase kawasan kumuh	Persen	0,21	0	0,17	4.000.000.000	DPUPRPKP2
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL							DINSOS
1.01.04.1.01.06.20	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Persentase area taman makam pahlawan yang dipelihara	Persen			82	30.000.000	DINSOS
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							DLH
1.01.04.1.02.05.20.	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Luas areal pemakaman	Ha	34,60	35,00	34,70	650.000.000	DLH
1.01.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							SATPOL PP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	target	Rp	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	3.123.613.500	SATPOL PP
1.01.1.01.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	454.165.000	SATPOL PP
1.01.1.01.05.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100	100	100	369.725.000	SATPOL PP
1.01.1.01.05.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	100	50	32.480. 550	SATPOL PP
1.01.1.01.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	9.621.000	SATPOL PP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.05.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	100	100	100	4.530.000	SATPOL PP
1.01.05.1.01.05.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tertangani	Persen	100		100	355.702.500	SATPOL PP
1.01.05.1.01.05.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Persentase tingkat gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	Persen	100		100	755.829.500	SATPOL PP
1.01.05.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							BPBD
v1.01.1.01.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparaturnya terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90		90	815.985.100	BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	90		90	201.856.000	BPBD
1.01.1.01.05.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	90		90	219.910.000	BPBD
1.01.1.01.05.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen	90		90	103.377.000	BPBD
1.01.1.01.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase jumlah dokumen, laporan kinerja, dan laporan keuangan OPD yang tepat waktu	Persen	90		90	18.526.500	BPBD
1.01.1.01.05.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	90		90	42. 640.000	BPBD
1.01.05.1.01.05.19.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM						503.429.000	BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persen	1,22		1,51	-	BPBD
		Jumlah zona tangguh bencana	Zotabe	9		13	-	BPBD
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi dari korban bencana	Persen	100		100	-	BPBD
1.01.05.1.01.05.21.	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL						161.571.000	BPBD
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam	Persen	90		90	-	BPBD
		Persentase perbaikan rumah korban akibat bencana alam	Persen	90		90	-	BPBD
1.01.05.1.01.05.22.	PROGRAM PENINGKATAN						361.533.000	BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN							
		Persentase kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran	Persen	1		2	-	BPBD
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan di evakuasi dari korban kebakaran	Persen	90		90	-	BPBD
5.00.01.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							KESBANGPOL
	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang terantisipasi	Persen	100	100	100	199.231.000	KESBANGPOL
1.01.05.5.00.01.17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Persentase fasilitasi koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat	Persen	100	100	100	156.233.000	KESBANGPOL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.06	SOSIAL							
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL							DINSOS
1.01.1.01.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	621.699.000	DINSOS
1.01.1.01.06.02	PROGRAM PELAYANAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	1.625.194.000	DINSOS
1.01.1.01.06.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100	100	100	19.500.000	DINSOS
1.01.1.01.06.05	PROGRAM PELAYANAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	100	100	4.456.500	DINSOS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.1.01.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	14.845.500	DINSOS
1.01.1.01.06.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG /JASA DAN ASET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai permendagri No.19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	2.290.000	DINSOS
1.01.1.01.06.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	80	80	82	25.098.500	DINSOS
1.01.06.1.01.06.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN						415.935.000	DINSOS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	target	Rp		
				1	2	3	4		5
	SOSIAL (PMKS) LAINNYA								
		Persentase masyarakat miskin BDT yang tertangani	Persen	72		76			DINSOS
1.01.06.1.01.06.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL						302.769.000		DINSOS
		Persentase tuna sosial (terutama gelandangan dan pengemis) terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	45		55			DINSOS
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	100		100			DINSOS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(SPM)						
		Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	45		55		DINSOS
		Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	45		55		DINSOS
		Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	45		60		DINSOS
		Persentase PMKS lainnya yang tertangani	Persen	45		46		DINSOS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.01.06.1.01.06.18	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	45		60	32.231.000	DINSOS
1.01.06.1.01.06.21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL						1.033.955.800	DINSOS
		Persentase PSKS yang aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial	Persen	10		15		DINSOS
		Persentase keluhan masyarakat miskin yang ditindaklanjuti dan selesai melalui UPT SLRT	Persen	100		82		DINSOS
		Persentase keluarga miskin BDT yang tertangani	Persen	72		76		DINSOS
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
1.02.01	TENAGA KERJA							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA							DISNAKER
1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen			100	538.409.300	DISNAKER
1.02.1.02.01.02	PROGRAM SARANA PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen			100	482.090.000	DISNAKER
1.02.1.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen			100	59.500.000	DISNAKER
1.02.1.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen			100	99.425.000	DISNAKER
1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen			100	7.868.700	DISNAKER
1.02.1.02.01.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan	Persen			100	18.011.200	DISNAKER

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dokumen penganggaran						
1.02.01.1.02.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persen			3	508.000.000	DISNAKER
1.02.01.1.02.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Persentase peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau <i>job fair</i>	Orang			500	250.000.000	DISNAKER
1.02.01.1.02.01.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja	Persen			100	449.710.500	DISNAKER
1.02.01.1.02.01.18.	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCT PRIORITAS DAERAH)	Persentase peningkatan keterampilan pencari kerja	Persen				550.000.000	DISNAKER
1.02.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.08.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							DP2KBP3APM
1.02.08.01.15.	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Persentase kapasitas perempuan dan anak dalam pembangunan	Persen	N/A	30%	30	50.000.000	DP2KBP3APM
1.02.02.1.02.08.16.	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase penguatan dan pengembangan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah dan penyedia layanan	Persen	N/A	75	75	211.739.328	DP2KBP3APM
1.02.02.1.02.08.xx.	PROGRAM PENINGKATAN PERANSERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Persentase pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan	Persen		30	30	104.000.000	DP2KBP3APM
1.02.03	PANGAN							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN							DKP3
1.02.1.02.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	81		100	1.380.880.000	DKP3
1.02.1.02.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	81		100	510.960.370	DKP3
1.02.1.02.03.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	81		90	94.000.000	DKP3
1.02.1.02.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	81		90	32.460.000	DKP3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.03.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai permendagri No.19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	81		90	2.480.000	DKP3
1.02.1.02.03.01.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	81		90	18.800.000	DKP3
1.02.03.1.02.03.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN						645.948.500	DKP3
		a. Skor PPH	Poin	87		79	-	DKP3
		b. Angka kecukupan energi	KKAL/KAP/hari	2209		2423	-	DKP3
		c. Angka kecukupan protein	GR/KAP/hari	69,70		107,1	-	DKP3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		d. Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dan pangan asal hewan (PAH)	Persen	85		86	-	DKP3
		e. Angka ketersediaan cadangan pangan pokok pemerintah	Kg	0		15099	-	DKP3
		f. Persentase ketersediaan data ketahanan pangan atau pertanian	Persen	100		100	-	DKP3
		g. Persentase penggunaan KTI dalam pembelian pupuk bersubsidi	Persen	-		25		DKP3
		h. Persentase luas lahan pertanian yang mengikuti AOTP	Persen			20		DKP3
		i. Persentase peningkatan luas lahan pertanian organik yang tersertifikasi	Persen			10		DKP3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		j. Persentase petani hortikultura yang memiliki sertifikat prima	Persen			10		DKP3
1.02.04	PERTANAHAN							
1.02.14.4.00.01.15.	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN						44.400.000	BAG. TAPEM
1.02.05	LINGKUNGAN HIDUP							
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							DLH
1.02.1.02.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	10.401.072.725	DLH
1.02.1.02.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	20.111.254.900	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.05.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100	100	100	200.000.000	DLH
1.02.1.02.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	21.920.000	DLH
1.02.1.02.05.07.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai PERMENDAGRI No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	9.670.000	DLH
1.02.1.02.05.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketepatan perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	100	100	100	34.323.500	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.05.1.02.05.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						4.407.000.000	DLH
		Persentase pengurangan sampah	Persen		18	20	-	DLH
		Persentase penanganan sampah	Persen		73	80	-	DLH
		Persentase pelayanan kebersihan	Persen		50	55	-	DLH
		persentase pemrosesan akhir sampah	Persen		100	100	-	DLH
1.02.05.1.02.05.16.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						931.653.500	DLH
		Persentase dokumen kebijakan digunakan dalam pengambilan keputusan	Persen	50	50	50	-	DLH
		Persentase usaha dan/atau kegiatan melaporkan hasil	Persen	3	5	5	-	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup						
		Cakupan pelaksanaan program pelaporan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman	Persen	100	100	100	-	DLH
		Persentase peningkatan kualitas air sungai	Persen	3	0	3	-	DLH
		Persentase dokumen kajian dampak lingkungan digunakan dalam pengambilan keputusan	Persen	100	100	100	-	DLH
		Persentase capaian penggunaan produk yang ramah lingkungan		0	0	0	-	DLH
		Persentase peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persen	10	11	11	-	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Cakupan wilayah pelayanan pengambilan lumpur tinja	Persen	0	30	35	-	DLH
1.02.05.1.02.05.17.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM						73.000.000	DLH
		Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Persen	100	100	-		DLH
		Persentase jumlah kampung iklim di wilayah kota sukabumi	Persen	4	4	5		DLH
1.02.05.1.02.05.19.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP						181.485.000	DLH
		Persentase penyediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	100	100	100		DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase jumlah peran serta sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persen	16	16	18		DLH
1.02.05.1.02.05.20.	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI						133.861.500	DLH
		Persentase capaian kualitas udara ambien memenuhi baku mutu	Persen	60	60	60		DLH
		Persentase ketaatan masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran	Persen	0	8	13		DLH
1.02.05.1.02.05.24.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Luasan pengelolaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP)	Ha	21,3	21,3	21,30	1.050.000.000	DLH
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN							DISHUB
1.02.05.1.02.09.24.	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Jumlah lampu pju yang terpasang di seluruh Daerah	Titik	0		129	1.566.674.550	DISHUB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							
1.02.11.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						11.050.000	
1.02.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1.02.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90		100	1.408.135.000	DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90		100	174.187.100	DISDUKCAPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.06.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100		100	70.000.000	DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	90		100	110.000.000	DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	90		100	42.062.000	DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai permendagri no.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	100		100	5.000.000	DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketesesuaian perencanaan anggaran oleh	Persen	90		100	21.300.000	DISDUKCAPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKP						
1.02.1.02.06.01.15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						1.454.514.000	DISDUKCAPIL
		Cakupan kepemilikan KTP-el	Persen	99,08		100		DISDUKCAPIL
		Cakupan kepemilikan kartu keluarga	Persen	94,41		100		DISDUKCAPIL
		Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	96,63		100		DISDUKCAPIL
		Cakupan kepemilikan akta kematian	Persen	74,46		100		DISDUKCAPIL
		Cakupan pemanfaatan data kependudukan	Persen	N/A	9,7	100		DISDUKCAPIL
1.02.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.08.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							DP2KBP3APM
1.02.07.1.02.08.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN/KECAMATAN	- Persentase tingkat pemberdayaan masyarakat; - Persentase swadaya masyarakat	persen	N/A	- 40,76; - 49,28	-49; -49,3	2.634.159.200	DP2KBP3APM
1.02.07.1.02.08.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	Persentase kelurahan cepat berkembang	persen	N/A	51	54	214.377.000	DP2KBP3APM
1.02.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.08.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							DP2KBP3APM
1.02.1.02.08.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	658.169.988	DP2KBP3APM
1.02.1.02.08.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	80	80	80	125.238.000	DP2KBP3APM
1.02.1.02.08.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	100	100	15.510.000	DP2KBP3APM
1.02.1.02.08.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	100	100	100	14.000.000	DP2KBP3APM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.08.1.02.08.15.	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	-CPR; CU/PUS; PA/PUS -UKPW -MKPJ <i>-unmet need</i>	Persen		67,80; 21,32; 23,55; 11,25;	67,80; 21,32; 23,55; 11,25;	146.284.000	DP2KBP3APM
1.02.08.1.02.08.16.	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)	Rata-rata usia nikah pertama	Tahun		21.32	21.32	212.794.250	DP2KBP3APM
1.02.08.1.02.08.17.	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	-CPR; CU/PUS; PA/PUS -UKPW -MKPJ <i>-unmet need</i>	Persen		67,80; 21,32; 23,55; 11,25;	67,80; 21,32; 23,55; 11,25;	31.063.784	DP2KBP3APM
1.02.08.1.02.08.18.	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	-CPR; CU/PUS; PA/PUS -UKPW -MKPJ <i>-unmet need</i>	Persen		67,80; 21,32; 23,55; 11,25;	67,80; 21,32; 23,55; 11,25;	53.650.000	DP2KBP3APM
1.02.08.1.02.08.20.	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR						481.062.000	DP2KBP3APM
1.02.08.1.02.08.XX	PROGRAM KETAHANAN KELUARGA (FAMILY STRENGTHENING)	Persentase keluarga sejahtera II	Persen		75	76	329.409.800	DP2KBP3APM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.08.1.02.08.22.	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan	Persen		65%	70	88.149.000	DP2KBP3APM
1.02.08.1.02.08.23.	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Persentase keluarga sejahtera II	Persen		75	76	60.000.000	DP2KBP3APM
1.02.08.1.02.08.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU	Jumlah kelompok bina keluarga (BKB-BKR-BKL)	KLP	280		280	736.304.800	DP2KBP3APM
1.02.09	PERHUBUNGAN							
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN							DISHUB
1.02.1.02.09.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	5.376.455.940	DISHUB
1.02.1.02.09.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen			100	1.367.357.600	DISHUB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen			100,00	423.543.250	DISHUB
1.02.1.02.09.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen			5	162. 421.350	DISHUB
1.02.1.02.09.08.	PROGRAM PERNECANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen			1	9.801.500	DISHUB
1.02.1.02.09.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Program aplikasi PPTV visim	Dokumen	1		1	612.404.900	DISHUB
		Dokumen rencana jaringan lalu lintas dan angkutan jalan						DISHUB
1.02.1.02.09.16.	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui peralatan dan perlengkapan pengujian					458.260.000	DISHUB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.09.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN						200.000.000	DISHUB
		Tingkat keselamatan dalam berlalu lintas meningkat	Persen					DISHUB
		Persentase angkutan umum yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor	Persen			80,08		DISHUB
		Dokumen perencanaan dan evaluasi trayek angkutan umum dan saum	Dokumen					DISHUB
		SAUM	Dokumen					DISHUB
		DED gedung atau lahan parkir baru	Dokumen		-			DISHUB
		Jumlah gedung atau lahan parkir baru	Titik		-			DISHUB
1.02.1.02.09.19.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS						800.000.000	DISHUB
		Persentase ketersediaan fasilitas						DISHUB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	target	Rp	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Perlengkapan jalan :						
		1. Rambu	Buah	67,87		6,00	70.650.000	DISHUB
		2. ITS	Titik	66,12		-	-	DISHUB
		3. <i>Warning light</i>	Unit	100,00		2,00	66.000.000	DISHUB
		4. Cermin tikungan	Buah	81,67		14,00	63.350.000	DISHUB
		5. Marka	M'	43		5.700	200.000.000	DISHUB
		6. Pagar pengaman	Paket	68,95			200.000.000	DISHUB
		Jumlah pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Orang	200,00		200	200.000.000	DISHUB
1.02.1.02.09.20.	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR						238.896.200	DISHUB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Terpenuhinya kebutuhan PKB						DISHUB
		tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor	Persen					DISHUB
1.02.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							DISKOMINFO
1.02.1.02.10.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen			90	1.311.208.300	DISKOMINFO
1.02.1.02.10.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen			90	308.415.000	DISKOMINFO
1.02.1.02.10.06.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen			90	16.320.000	DISKOMINFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.10.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh Perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen			90	22.355.500	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa	Persen			90	328.617.700	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.17.	PROGRAM FASILITAS PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Peningkatan wawasan sdm dalam penyebarluasan informasi	Persen			90	165.372.500	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.18.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Persentase penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persen			90	518.943.000	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.19.	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI (DBHCHT)	Persentase penyebaran informasi ketentuan bidang cukai tembakau yang tersampaikan	Persen			80	100.000.000	DISKOMINFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH							BAG. HUMAS & PROTOKOL
1.02.10.1.02.10.18.	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA						308.952.000	BAG. HUMAS & PROTOKOL
1.02.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							DISKOPDAGRIN
1.02.1.02.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	785.329.150	DISKOPDAGRIN
1.02.1.02.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	271.404.350	DISKOPDAGRIN
1.02.1.02.11.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk	Persen	100	100	100	20.400.000	DISKOPDAGRIN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		peningkatan disiplin manajemen						
1.02.1.02.11.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	100	100	150.000.000	DISKOPDAGRIN
1.02.1.02.11.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	100	100	100	19.403.000	DISKOPDAGRIN
1.02.05.1.02.11.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan perusakkan lingkungan hidup	Persen	100	100	100	11.050.000	DISKOPDAGRIN
1.02.11.1.02.11.15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	Persentase usaha mikro dan kecil	Persen	85,53		85,00	300.000.000	DISKOPDAGRIN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	target	Rp	
				1	2	3	4	
1.02.11.1.02.11.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH						54.953.000	DISKOPDAGRIN
		UMKM naik kelas	Usaha Mikro	-		30	-	DISKOPDAGRIN
1.02.11.1.02.11.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH						893.258.000	DISKOPDAGRIN
		Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang menerima penguatan permodalan	UMK	92		200	-	DISKOPDAGRIN
		Jumlah promosi produk usaha mikro kecil menengah melalui pameran	Produk	-		10	-	DISKOPDAGRIN
		Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh penguatan	Persen	-		70	-	DISKOPDAGRIN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		permodalan						
1.02.11.1.02.11.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI						357.307.000	DISKOPDAGRIN
		Persentase peningkatan koperasi aktif	Persen	61,23		63	-	DISKOPDAGRIN
		Persentase peningkatan koperasi yang melaksanakan RAT	Persen	35,93		36	-	DISKOPDAGRIN
4.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH							BAG. EKBANG & KD
1.02.11.4.00.01.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH						43.000.000	BAG. EKBANG & KD
1.02.12	PENANAMAN MODAL							
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU							DPMPSTP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SATU PINTU							
1.02.1.02.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	80		80	804.177.400	DPMPTSP
1.02.1.02.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	80		80	80.170.000	DPMPTSP
1.02.1.02.12.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	80		80	6.485.000	DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase pertumbuhan investor yang berinvestasi	persen				223.357.100	DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.16	PROGRAM PENINGLATAN IKLIM INVESTASI DAN	Persentase terkendalinya prosedur pelayanan	Persen	95		70	235.353.000	DPMPTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	target	Rp	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	REALISASI INVESTASI	perizinan secara berkala						
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta Rupiah			200.000		DPMPTSP
		Realisasi investasi PMA dan PMDN	Juta Rupiah			200.000	-	DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.17	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH						21.525.000	DPMPTSP
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk pemanfaatan dan pengembangan potensi unggulan daerah	Persen	70		70	-	DPMPTSP
		Persentase potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah yang terinformasikan untuk investasi	persen	100	100	100	-	DPMPTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.12.1.02.12.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN PERIZINAN	Jumlah ijin yang diterbitkan	Persen	90		70	95.125.000	DPMPTSP
1.02.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1.02.13.01.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA							DISPORAPAR
1.02.1.02.13.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100		100	1.016.005.350	DISPORAPAR
1.02.1.02.13.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	100		100	125.000.000	DISPORAPAR
1.02.1.02.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	100		100	133.000.000	DISPORAPAR
1.02.1.02.13.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Dokumen	6		1	62.670.000	DISPORAPAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.13.1.02.13.17.	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	Jumlah wirausaha muda pemula	Orang	-		40	100.000.000	DISPORAPAR
1.02.13.1.02.13.18.	PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	Persentase peningkatan pengetahuan tentang bahaya narkoba	Persen	1		1	40.000.000	DISPORAPAR
1.02.13.1.02.13.20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	Jumlah raihan medali pada event olahraga tingkat provinsi dan nasional	Skor	46		9	1.944.455.000	DISPORAPAR
1.02.13.1.02.13.21.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA						2.649.545.000	DISPORAPAR
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga kota sukabumi	Unit			5	-	DISPORAPAR
		Persentase kelurahan sport center	Persen			15	-	DISPORAPAR
1.02.14	STATISTIK							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							DISKOMINFO
1.02.14.1.02.10.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH	Tingkat ketersediaan data pembangunan dan informasi statistik sektoral	Persen			100	85.600.000	DISKOMINFO
4.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH							BAG. EKBANG & KD
1.02.14.4.00.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH						130.000.000	BAG. EKBANG & KD
1.02.16	KEBUDAYAAN							
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							DISDIK
1.02.16.1.01.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	Jenis	5	5	5	149.900.000	DISDIK
1.02.16.1.01.01.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jumlah seni budaya yang dilestarikan	Kegiatan	4	5	3	962.100.000	DISDIK
1.02.16.1.01.01.17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah pengelolaan keragaman budaya	Kegiatan	4	4	4	304.506.500	DISDIK
1.02.13.01.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA							DISPORAPAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.16.1.02.13.16.	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jumlah destinasi pariwisata berbasis kuliner dan sejarah	Lokasi	3			100.000.000	DISPORAPAR
1.02.17	PERPUSTAKAAN							
1.02.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH							DISPUSIP
1.02.1.02.17.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90		90	435.637.250	DISPUSIP
1.02.1.02.17.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	85		90	2.082.250.000	DISPUSIP
1.02.1.02.17.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	90		90	6.725.000	DISPUSIP
1.02.1.02.17.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan	Persen	80		-	2.950.000	DISPUSIP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dokumen penganggaran						
1.02.1.02.17.15	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan minat baca	Persen	3		3	783.900.000	DISPUSIP
1.02.18	KEARSIPAN							
1.02.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH							DISPUSIP
1.02.18.1.02.17.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Meningkatnya tertib arsip		SKPD		33	156.000.000	DISPUSIP
1.02.18.1.02.17.17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan		Jmh arsip		500	94.000.000	DISPUSIP
2.	URUSAN PILIHAN							
2.00.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN							DKP3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.01.1.02.03.20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Provitass perikanan budidaya	ton/ha	24,59		24,71	355.147.000	DKP3
2.00.01.1.02.03.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan						625.597.000	DKP3
		a. Persentase keamanan pangan produk perikanan	%	10		20	-	DKP3
		b. Angka konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	39,47		41,07	-	DKP3
2.00.02	PARIWISATA							
1.02.13.01.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA							DISPORAPAR
2.00.02.1.02.13.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah event yang diselenggarakan		6		5	387.000.000	DISPORAPAR
2.00.02.1.02.13.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah pengunjung ke destinasi wisata		-		5,00	387.200.000	DISPORAPAR
2.00.02.1.02.13.18.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang aktif		3		3	438.000.000,00	DISPORAPAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.03	PERTANIAN							
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN							DKP3
2.00.03.1.02.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI						129.890.000	DKP3
		a. Persentase lembaga usaha tani yang berbadan hukum	Persen	-		5	-	DKP3
		b. Persentase lembaga usaha tani dengan kategori kelas utama	Persen	-		5	-	DKP3
2.00.03.1.02.03.16	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Tingkat konsumsi buah dan sayuran	Gr/kap/hari	-		195,15	65.938.000	DKP3
2.00.03.1.02.03.17	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN						95.310.000	DKP3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	target	Rp	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		a. Persentase lembaga usaha tani yang menerapkan mekanisasi pertanian dengan baik	Persen	79,52		50	-	DKP3
		b. Tingkat pendayagunaan dan pemanfaatan fasilitas pengolahan hasil pertanian	Persen	-		75	-	DKP3
2.00.03.1.02.03.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN	Provitass padi	Ton/ha GKG	7,1		6,16	34.153.000	DKP3
2.00.03.1.02.03.19.	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh dalam melakukan metode penyuluhan	Persen	0		80	124.862.500	DKP3
2.00.03.1.02.03.20.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Persen	90		100	106.675.000	DKP3
2.00.03.1.02.03.21.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Produksi daging	Ton	-		5.561,79	144.130.000	DKP3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.03.1.02.03.22.	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	Tingkat konsumsi pangan hewani	(gr/kap /hr)	-		68	1.061.981.000	DKP3
2.00.03.1.02.03.24.	PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGRIBISNIS						453.390.000	DKP3
		a. Persentase peningkatan peserta sekolah agro di KAC	Persen	10		10	-	DKP3
		b. Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha agribisnis dalam Sukabumi Agrokreatif Expo (SAE)	Persen	10		10	-	DKP3
2.00.03.1.02.03.25	Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan						2.339.200.000	DKP3
		a. Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	1,90		54,00	-	DKP3
		b. Persentase peningkatan LP2B milik Pemerintah Daerah	Persen			3,6	-	DKP3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.03.1.02.03.26	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner						77.070.000	DKP3
		a. Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat PRA-NKV atau NKV (nomor kontrol veteriner)	Persen	25		30	-	DKP3
		b. Persentase penerapan SOP pemotongan hewan kurban di masyarakat	Persen			20	-	DKP3
2.00.04	KEHUTANAN							
2.00.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
2.00.06	PERDAGANGAN							
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							SATPOL PP
2.00.06.1.01.05.20.	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI (DBHCHT)	Cakupan penurunan penggunaan barang kena cukai ilegal	Persen	100		100	250.000.000	SATPOL PP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							DISKOPDAGRIN
2.00.06.1.02.11.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN						160.841.600	DISKOPDAGRIN
		Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera dan di tera ulang	UTTP	188		100	-	DISKOPDAGRIN
		Jumlah peserta sosialisasi meteorologi legal	Orang	-		120	-	DISKOPDAGRIN
2.00.06.1.02.11.18	PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI						496.169.000	DISKOPDAGRIN
		Jumlah draft rancangan peraturan walikota	Dokumen	-		1	-	DISKOPDAGRIN
		Jumlah pengembangan dan pembangunan	Unit	2		-	-	DISKOPDAGRIN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pusat-pusat perdagangan						
		Persentase pemanfaatan profil, prognosa, informasi harga, dan pengawasan barang penting atau strategis	Persen	-		80	-	DISKOPDAGRIN
		Jumlah produk unggulan yang difasilitasi pemasarannya melalui pameran di luar kota sukabumi	Produk	15		10	-	DISKOPDAGRIN
		Persentase pengawasan pembangunan pasar pelita	Persen	-		100	-	DISKOPDAGRIN
2.00.06.1.02.11.19	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN						100.000.000	DISKOPDAGRIN
		Jumlah kawasan penataan PKL dan pemberdayaan pedagang	Kawasan	3		-	-	DISKOPDAGRIN
		Jumlah pengembangan dan	Unit	-		-	-	DISKOPDAGRIN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pembangunan pusat-pusat perdagangan						
2.00.07	PERINDUSTRIAN							
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							DISKOPDAGRIN
2.00.07.1.02.11.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	Pertumbuhan industri	Persen	2		0,2	200.000.000	DISKOPDAGRIN
2.00.07.1.02.11.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Pertumbuhan industri	Persen	2		0,2	288.000.000	DISKOPDAGRIN
2.00.07.1.02.11.17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan legalitas usaha	Persen	-		100	239.000.000	DISKOPDAGRIN
2.00.08	TRANSMIGRASI							
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA							DISNAKER

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.00.08.1.02.01.15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	terlaksananya mou kerjasama antar wilayah transmigrasi dan terkirimnya calon transmigrasi ke wilayah transmigrasi					215.535.000	DISNAKER
2.00.08.1.02.01.17	Program Transmigrasi Nasional	Fasilitasi transmigrasi regional	Angka				-	DISNAKER
3.	PENUNJANG URUSAN							
3.00.01	INSPEKTORAT							
3.00.01.01.	INSPEKTORAT DAERAH							INSPEKTORAT
3.00.3.00.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90		90	874.785.678	INSPEKTORAT
3.00.3.00.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	90		90	370.450.000	INSPEKTORAT
3.00.3.00.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan OPD yang sesuai aturan dan tepat waktu	Persen	90		90	11.612.500	INSPEKTORAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.01.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran opd dengan daerah	Persen	90		90	14.485.000	INSPEKTORAT
3.00.01.3.00.01.15	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH						735.495.500	INSPEKTORAT
		Nilai pengawasan kinerja pada saki	Persen	65,2		70,5		INSPEKTORAT
		Persentase SAKIP PD bernilai baik	Persen	70		80		INSPEKTORAT
		Tingkat maturitas SPIP	Level	1		2		INSPEKTORAT
		Persentase unit WBK/WBBM	Persen	0,06		5		INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut temuan BPK	Persen	81		81		INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Persen	70		85		INSPEKTORAT
3.00.01.3.00.01.xx	PROGRAM PENATAAN REFORMASI BIROKRASI		Level					INSPEKTORAT
		Level APIP	Level	1	1	2		INSPEKTORAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase pemenuhan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang sesuai peraturan dan kebijakan nasional		75	75	100	100.000.000,00	INSPEKTORAT
3.00.01.3.00.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan		15		18	807.000.000	INSPEKTORAT
4.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH							BAG. EKBANG & KD
3.00.01.4.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH						161.000.000	BAG. EKBANG & KD
3.00.02	PERENCANAAN							
3.00.02.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							BAPPEDA
3.00.3.00.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Tingkat kepuasan aparatur terhadap				70	757.961.000	BAPPEDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PERKANTORAN	pelayanan administrasi perkantoran						
3.00.3.00.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen			75	448.273.000	BAPPEDA
3.00.3.00.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	persentase peningkatan kapasitas dan legalitas sdm	Persen				204.500.000	BAPPEDA
3.00.3.00.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	Persen			75	47.125.000	BAPPEDA
3.00.3.00.02.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen			70	114.370.000	BAPPEDA
3.00.02.3.00.02.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI						680.781.500,00	BAPPEDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.02.3.00.02.18.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Persentase pencapaian pemenuhan program dan kegiatan infrastruktur dan tata ruang	Persen				998.555.950,00	BAPPEDA
3.00.02.3.00.02.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						2.392.499.500	BAPPEDA
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen		80	100		BAPPEDA
		Persentase konsistensi penjabaran program rpjmd kedalam RKPD	Persen	100	100	100		BAPPEDA
		Persentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100		BAPPEDA
		Persentase perangkat daerah yang memenuhi	Persen	96	95	91		BAPPEDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		target program pembangunan daerah						
3.00.02.3.00.02.22.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Perbandingan antara PD yang telah mencapai target indikator program pembangunan pencapaian sasaran dalam rpjmd dengan jumlah seluruh PD	Persen			75	332.444.500	BAPPEDA
3.00.02.3.00.02.23.	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA						553.901.500	BAPPEDA
3.00.02.3.00.02.26.	PROGRAM PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PENGUATAN KONDISI PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengajian dengan melibatkan akademisi				57	200.000.000	BAPPEDA
3.00.02.3.00.02.27.	PROGRAM PENELITIAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH						591.256.000	BAPPEDA
		Persentase inovasi daerah yang terfasilitasi	Persen			57		BAPPEDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase penelitian dan pengkajian dengan melibatkan akademisi	Jumlah					BAPPEDA
3.00.03	KEUANGAN							
3.00.03.02.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH							
3.00.03.01.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							BPKD
3.00.3.00.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90	90	90	992.065.667,00	BPKD
3.00.3.00.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90	90	90	14.034.855.000	BPKD
3.00.3.00.03.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin	Persen	90	90	90	75.200.000	BPKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		manajemen						
3.00.3.00.03.04.	PROGRAM FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS	Persentase fasilitasi pindah atau purna tugas pns	Persen	90	90	90	185.282.075	BPKD
3.00.3.00.03.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	90	90	90	59.414.000	BPKD
3.00.3.00.03.07.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai PERMENDAGRI No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	90	90	90	169.331.000	BPKD
3.00.3.00.03.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	90	90	90	50.409.000	BPKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.03.3.00.03.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Dinas unit kerja dapat mengerjakan tugas PERDA APBD serta dapat mengendalikan program kegiatan pengendalian anggaran 2. Tersusunnya buku PERDA tentang jawaban laporan organisasi laporan realisasi anggaran semester prognosis, buku pertanggung jawaban semester, 3. Persentase ketepatan waktu laporan pertanggung jawaban apbd laporan keuangan SKPD lebih efisien dan tepat waktu 4, Meningkatnya PAD non PBBP2 dan bphtb				1. laporan 32 SKPD. 2. Raperda, Perda 3. Bulan Oktober 4. 15 %	4.896.720.425	BPKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		
				2017	2018	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah 6. Penyampaian RAPERDA APBD murni tepat waktu 7. Presentase peningkatan sumber pendapatan pajak daerah 8. Pemanfaatan informasi teknologi dalam pengelolaan pendapatan 9. Presentasee tingkat kepatuhan wajib pajak 10. Presentase tingkat pemahaman wajib pajak 11. Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan aset sesuai peraturan	5. Bln 6. Bln 7. Persen 8. 9. Sistem 10. Persen 11. SKPD	5. 31 Maret 6. September 7. 0,15 8. 0 9. 0,85 10. 0,15 11. 33	5. 31 Maret 6. Sept 7. 0,15 8. 0 9. 0,86 10. 0,15 11. 33	5. 31 Maret 6. September 7. 0,05 8. 0 9. 0,02 10. 0,03 11. 32		BPKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.03.3.00.03.16.	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA	1. Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kota 2. Koordinasi penyusunan hasil evaluasi gubernur tentang raperda APBD dan PERKADA penjabaran APBD 3. Verifikasi dan koordinasi bantuan keuangan provinsi	1. SKPD 2. Persen 3. Dokumen	1. 33 2. 100 3. Dokumen		1. 33 SKPD 2. 100% 3. Dokumen	383.643.500	BPKD
4.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH							BAG. EKBANG & KD
3.00.03.4.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						457.000.000	BAG. EKBANG & KD
3.00.04	KEPEGAWAIAN							
3.00.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							BKPSDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.3.00.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase meningkatnya administrasi perkantoran	Persen	88,26	88,26	88,26	406.250.000	BKPSDM
3.00.3.00.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase meningkatnya kinerja sarana dan prasarana	Persen	89,98	89,98	89,98	668.000.000	BKPSDM
3.00.3.00.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sdm aparatur	Persen	90,00	90,00	90,00	152.283.400	BKPSDM
3.00.3.00.04.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	Persen	85,57	85,57	85,57	45.000.000	BKPSDM
3.00.3.00.04.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase meningkatnya pengembangan sistem perencanaan program kegiatan	Persen	81,44	81,44	81,44	22.527.000	BKPSDM
3.00.04.3.00.04.15.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	Persen	91,87	91,87	91,87	969.036.000	BKPSDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.00.05	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
3.00.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							BKPSDM
3.00.05.3.00.04.	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan	Persen	95,19	95,19	95,19	567.897.700	BKPSDM
3.00.05.3.00.04.16.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sdm aparatur	Persen	95	95	95	2.312.000.000	BKPSDM
4.	PENDUKUNG							
4.00.01	SEKRETARIAT DAERAH							BAG. KEU & KEPEG
4.00.4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen				2.860.307.500	BAG. KEU & KEPEG
4.00.4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen				2.690.201.700	BAG. HUMAS & PROTOKOL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.00.4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen				1.251.291.800	BAG. PERLENGKAPAN
4.00.4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen				5.121.885.455	BAG. PERLENGKAPAN
4.00.4.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen				999.354.400	BAG. PERLENGKAPAN
4.00.4.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas sdm	Persen				160.230.000	BAG. KEU & KEPEG
4.00.4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen				10.700.000	BAG. KEU & KEPEG
4.00.4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen				15.000.000	BAG. ORGANISASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.00.4.00.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan program berkualitas	Persen				138.953.375	BAG. PERLENGKAPAN
4.00.01.4.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH						1.199.277.100	BAG. TAPEM
4.00.01.4.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH						100.000.000	BAG. KEU & KEPEG
4.00.01.4.00.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH						1.530.448.000	BAG. HUMAS & PROTOKOL
4.00.01.4.00.01.16.	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase penerapan pengadaan barang atau jasa di daerah melalui sarana aplikasi yang terintegrasi	Persen			90	192.842.000	BAG. BARANG/JASA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.00.01.4.00.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH						461.776.300	BAG. EKBANG & KD
4.00.01.4.00.01.19.	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase produk hukum yang harmonis	Persen	100	100	100	1.365.767.500	BAG. HUKUM
4.00.01.4.00.01.21.	PROGRAM KETATALAKSANAAN DAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH						1.104.125.000	BAG. ORGANISASI
		Persentase perangkat daerah dengan peringkat komposit 4 (P-4)	Persen			60	-	BAG. ORGANISASI
		Persentase perangkat daerah dan BUMD yang memiliki proses bisnis	Persen			25	-	BAG. ORGANISASI
		Nilai manajemen perubahan	Angka	3,06		0,08	-	BAG. ORGANISASI
		Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan	Persen	N/A		20,00	-	BAG. ORGANISASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pada setiap jenis pelayanan dan atau indeks pelayanan publik						
		Persentase unit pelayanan publik yang memiliki nilai ikm baik	Persen	68,57		71,00	-	BAG. ORGANISASI
4.00.01.4.00.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH						1.209.759.800	BAG. TAPEM
		Nilai pelaporan kinerja pada SAKIP	Nilai	11,15	-	11,50	-	BAG. TAPEM
		Nilai hasil EKPPD	Nilai	3,39	-	3,40	-	BAG. TAPEM
4.00.01.4.00.01.23.	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM						109.070.000	BAG. HUKUM
4.00.01.4.00.01.24.	PROGRAM LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT)						21.000.000	BAG. EKBANG & KD
4.00.01.4.00.01.25.	PROGRAM PELAYANAN DAN PENANGANAN MASALAH BARANG DAN JASA						135.622.000	BAG. BARANG/JASA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.00.01.4.00.01.26.	PROGRAM PELAYANAN DAN KOORDINASI PENGADAAN BARANG/JASA						688.544.600	BAG. BARANG/JASA
4.00.01.02.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH							
1.02.08.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							DP2KBP3APM
4.00.01.1.02.08.22.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pelayanan kepada masyarakat ditingkat kelurahan dan kecamatan se-kota sukabumi	Persen	39		50	32.794.000	DP2KBP3APM
4.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH							
4.00.02	SEKRETARIAT DPRD							
4.00.02.02.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.00.02.01.	SEKRETARIAT DPRD							SETWAN
4.00.4.00.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100		90	2.349.475.400	SETWAN
4.00.4.00.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	100		90	714.898.000	SETWAN
4.00.4.00.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	100		90	455.810.000	SETWAN
4.00.4.00.02.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas sdm	Persen	100		90	981.480.600	SETWAN
4.00.4.00.02.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	100		90	8.867.000	SETWAN
4.00.4.00.02.06	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT	Meningkatnya kinerja DPRD	Persen	100		100	19.231.428.500	SETWAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
5.00.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
4.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH							BAG. KESRA
5.00.01.4.00.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase peningkatan kegiatan keagamaan swadaya masyarakat	Persen				5.773.537.250	BAG. KESRA
5.00.01.4.00.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN	Persentase peningkatan jamaah mesjid jami kelurahan	Persen				1.246.843.370	BAG. KESRA
5.00.01.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							KESBANGPOL
5.00.5.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100		100	232.075.000	KESBANGPOL
5.00.5.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100		100	84.557.000	KESBANGPOL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.00.5.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100		100	11.550.000	KESBANGPOL
5.00.5.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100		100	1.000.000	KESBANGPOL
5.00.5.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	100		100	3.140.000	KESBANGPOL
5.00.01.5.00.01.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase unjuk rasa yang disebabkan konflik antar dan inter umat beragama	Persen	≤ 10	≤ 10	≤ 10	143.455.000	KESBANGPOL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.00.01.5.00.01.16.	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase keterlibatan komponen masyarakat dan aparat dalam pemahaman dan pemantapan wawasan kebangsaan	Persen	-		100	301.877.100	KESBANGPOL
5.00.01.5.00.01.17.	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pendidikan politik	Persen	100	100	100	87.757.000	KESBANGPOL
5.00.01.5.00.01.19.	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN	Persentase penanganan aliran keagamaan atau kepercayaan masyarakat yang menyimpang	Persen	100		100	52.827.000	KESBANGPOL
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							SATPOL PP
5.00.01.1.01.05.18.	PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU	Persentase keamanan pemilu	Persen	N/A		100	183.160.000	SATPOL PP
6.	KEWILAYAHAN							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.00.01	KECAMATAN							
6.00.01.01.	KECAMATAN CIKOLE							KEC. CIKOLE
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	98		98	1.296.461.000	KEC. CIKOLE
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	93		95	250.039.500	KEC. CIKOLE
6.00.6.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	98		98	22.616.000	KEC. CIKOLE
6.00.6.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas sdm	Persen	97		98	19.657.000	KEC. CIKOLE
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	100		100	22.115.000	KEC. CIKOLE
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen	Persen	100		100	4.060.000	KEC. CIKOLE

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		perencanaan dengan dokumen penganggaran						
6.00.01.6.00.01.15.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen	100		80	132.945.000	KEC. CIKOLE
6.00.01.6.00.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan dan kelurahan	Persen	98		80	2.515.690.650	KEC. CIKOLE
6.00.01.02.	KECAMATAN GUNUNG PUYUH							KEC. GUNUNG PUYUH
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	94,50		90	1.068.054.700	KEC. GUNUNG PUYUH
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	85,00		90	354.619.900	KEC. GUNUNG PUYUH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	98,30		90	16.540.000	KEC. GUNUNG PUYUH
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	100		90	3.140.000	KEC. GUNUNG PUYUH
6.00.01.6.00.01.15.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen	85		90	130.961.000	KEC. GUNUNG PUYUH
6.00.01.6.00.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	87,30		90	1.677.974.000	KEC. GUNUNG PUYUH
6.00.01.03.	KECAMATAN CITAMIANG							KEC. CITAMIANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	1.032.713.600	KEC. CITAMIANG
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	80	85	84	428.866.000	KEC. CITAMIANG
6.00.6.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	80	85	100	36.000.000	KEC. CITAMIANG
6.00.6.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	80	85	84	27.348.000	KEC. CITAMIANG
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	9.070.000	KEC. CITAMIANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	100	100	100	2.220.000	KEC. CITAMIANG
6.00.01.6.00.01.15.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen	80	80	84	217.645.000	KEC. CITAMIANG
6.00.01.6.00.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	65	65	84	2.071.973.000	KEC. CITAMIANG
6.00.01.04.	KECAMATAN WARUDOYONG							KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01..01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi	Persen	85			1.007.302.720	KEC. WARUDOYONG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		perkantoran						
6.00.6.00.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	85			390.289.435	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	85			16.250.000	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen	85			88.388.000	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	85			6.995.000	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET *	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan program berkualitas	Persen	85			260.000	KEC. WARUDOYONG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	Tahun 2019		
						target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.00.6.00.01.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	85			1.455.000	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.15	PROGRAM PEMBINAAN & PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen				321.397.500	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen				2.025.587.500	KEC. WARUDOYONG
6.00.01.05.	KECAMATAN BAROS							KEC. BAROS
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	80		100	833.085.500	KEC. BAROS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	80		100	284.742.500	KEC. BAROS
6.00.6.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	90		100	54.450.000	KEC. BAROS
6.00.6.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen	90		100	8.986.000	KEC. BAROS
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	80		100	13.480.000	KEC. BAROS
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	80		100	4.710.000	KEC. BAROS
6.00.01.6.00.01.15.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan	Persen	100		100	126.888.200	KEC. BAROS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		tingkat kewilayahan						
6.00.01.6.00.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100		100	1.716.070.265	KEC. BAROS
6.00.01.06.	KECAMATAN LEMBURSITU							KEC. LEMBURSITU
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen			100	979.779.000	KEC. LEMBURSITU
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen			100	472.508.000	KEC. LEMBURSITU
6.00.6.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen			100	26.745.000	KEC. LEMBURSITU
6.00.6.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen			100	36.347.250	KEC. LEMBURSITU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen			100	18.223.000	KEC. LEMBURSITU
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen			100	4.325.000	KEC. LEMBURSITU
6.00.01.6.00.01.15.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen			100	144.400.000	KEC. LEMBURSITU
6.00.01.6.00.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen			100	320.182.500	KEC. LEMBURSITU
6.00.01.07.	KECAMATAN CIBEUREUM							KEC. CIBEUREUM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90,80		90	877.885.825	KEC. CIBEUREUM
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	88,05		90	370.511.000	KEC. CIBEUREUM
6.00.6.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	96,67		90	34.500.000	KEC. CIBEUREUM
6.00.6.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen	97,80		90	31.242.000	KEC. CIBEUREUM
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	96,73		90	9.200.000	KEC. CIBEUREUM
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	97,97		90	6.238.000	KEC. CIBEUREUM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2019		target	Rp	
				2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.00.01.6.00.01.15.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen	98,84		90	115.661.000	KEC. CIBEUREUM
6.00.01.6.00.01.16.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	99,24		90	1.804.623.000	KEC. CIBEUREUM

Tabel 7.3
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Daerah Tahun 2020-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	URUSAN WAJIB													
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
1.01.01	PENDIDIKAN													
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN													DISDIK
1.01.1.01.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	10.277.475.400	100	13.173.503.288	100	14.490.853.617	100	15.808.203.946	100	53.750.036.250	DISDIK
1.01.1.01.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	2.371.000.000	100	6.254.600.000	100	6.880.060.000	100	7.505.520.000	100	23.011.180.000	DISDIK
1.01.1.01.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	144.525.000	100	158.977.500	100	174.875.250	100	190.773.000	100	669.150.750	DISDIK
1.01.1.01.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	38.855.000	100	130.399.500	100	143.439.450	100	156.479.400	100	469.173.350	DISDIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG JASA DAN ASSET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai PERMENDAGRI No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	100	29.400.000	100	46.750.000	100	51.425.000	100	56.100.000	100	183.675.000	DISDIK
1.01.1.01.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	100	50.000.000	100	105.600.000	100	116.160.000	100	126.720.000	100	398.480.000	DISDIK
1.01.1.01.01.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Angka partisipasi kasar PAUD	persen	70,2	2.065.475.000	71,70	3.083.586.000	73,20	3.391.944.600	75,70	3.700.303.200	75,70	12.241.308.800	DISDIK
1.01.1.01.01.16.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN				31.954.114.000		48.863.869.725		53.750.256.698		58.636.643.670		193.204.884.093	DISDIK
		Angka partisipasi murni (APM) SD	Persen	99,60	-	99,70	-	99,80	-	99,90	-	99,90	-	DISDIK
		Angka partisipasi murni (APM) SMP	Persen	97,50	-	98,00	-	98,50	-	99,90	-	99,90	-	DISDIK
1.01.1.01.01.18.	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Persentase penurunan anak usia sekolah yang tidak sekolah	persen	0	1.591.870.000	0	2.714.717.610	0	2.986.189.371	-	3.257.661.132	-	10.550.438.113	DISDIK
1.01.1.01.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK	Persentase pendidik dan tenaga	persen	75	1.502.715.800	85	2.310.000.000	95	2.541.000.000	100	2.772.000.000	100	9.125.715.800	DISDIK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kependidikan yang profesional												
1.01.1.01.01.21.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Persentase SMP Negeri yang melaksanakan PPDB <i>Online</i>	Persen	100	1.649.668.000	100	4.385.549.740	100	4.824.104.714	100	5.262.659.688	100	16.121.982.142	DISDIK
1.01.1.01.01.23	PROGRAM PENYELENGGARAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PUSAT	Persentase jumlah sekolah yang menerima BOS pusat	Persen	100	36.649.450.000	100	40.314.395.000	100	44.345.834.500	100	48.377.274.000	100	169.686.953.500	DISDIK
1.01.1.01.01.xx	PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER	Persentase penurunan kasus kenakalan siswa	Persen	30	600.000.000	50	617.100.000	70	678.810.000	85	740.520.000	90	2.636.430.000	DISDIK
1.01.02.	KESEHATAN												-	
1.01.02.01.	DINAS KESEHATAN												-	DINKES
1.01.1.01.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	7.959.776.000	100	8.755.753.000	100	9.631.328.000	100	10.594.461.000	100	36.941.318.000	DINKES
1.01.1.01.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	1.670.035.000	100	1.837.038.000	100	2.020.742.000	100	2.222.817.000	100	7.750.632.000	DINKES
1.01.1.01.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan	Persen	100	100.994.000	100	111.093.000	100	122.203.000	100	134.423.000	100	468.713.000	DINKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		disiplin manajemen												
1.01.1.01.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	10.000.000	100	11.000.000	100	12.100.000	100	13.310.000		46.410.000	DINKES
1.01.1.01.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	263.244.000	100	289.568.000	100	318.525.000	100	350.377.000	100	1.221.714.000	DINKES
1.01.1.01.02.07.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai PERMENDAGRI No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	100	76.187.000	100	83.805.000	100	92.186.000	100	101.405.000	100	353.583.000	DINKES
1.01.1.01.02.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketepatan perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKP	Dokumen	100	104.745.000	100	115.219.000	100	126.741.000	100	223.135.000	100	569.840.000	DINKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.1.01.02.15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan	Persen	100	3.590.401.000	100	3.949.441.000	100	4.344.385.000	100	4.778.824.000	100	16.663.051.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase keluarga tidak sehat meningkat kemandiriannya (keluarga mandiri level IV)	Persen	30	10.353.413.000	35	10.991.849.000	40	11.680.267.000	45	12.423.870.000	45	45.449.399.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Persentase sediaan farmasi dan pangan yang memenuhi syarat kesehatan	Persen	100	101.920.000	100	112.112.000	100	123.323.000	100	135.655.000	100	473.010.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai standar	Persen	100	413.055.000	100	454.360.000	100	499.796.000	100	549.776.000	100	1.916.987.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Persentase BALITA <i>stunting</i>	Persen	22,5	289.082.000	22	317.990.000	21,5	349.789.000	21	286.800.000	21	1.243.661.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase rumah sehat	Persen	100	1.177.790.000	100	1.308.169.000	100	1.438.985.000	100	1.603.674.000	100	5.528.618.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR (P2M)	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular	Persen	100	2.397.798.000	100	1.843.288.000	100	2.027.617.000	100	2.218.583.000	100	8.487.286.000	DINKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.02.1.01.02.23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna	Persen	2	2.462.818.000	2	2.759.099.000	3	4.011.962.000	4	3.181.510.000	4	12.415.389.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUS KESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	Persen	100	23.100.000.000	100	29.300.000.000	100	33.000.000.000	100	68.000.000.000	100	153.400.000.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (UHC)	Persen	100	41.240.121.000	100	43.860.250.000	100	46.673.448.000	100	46.480.557.000	100	178.254.376.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Angka kematian bayi	per 100.000 KH	9	86.989.000	8,5	95.687.000	8,5	105.256.000	8	115.782.000	8	403.714.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Persentase LANSIA yang dilakukan skrining kesehatan	Persen	100	163.813.000	100	180.194.000	100	198.213.000	100	218.035.000	100	760.255.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Angka kematian ibu	per 100.000 KH	125	818.861.000	122	854.847.000	122	894.431.000	120	937.974.000	120	3.506.113.000	DINKES
1.01.02.1.01.02.33	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai	Persen	100	2.310.000.000	100	2.425.500.000	100	2.546.775.000	100	2.674.113.750	100	9.956.388.750	DINKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		kebutuhan													
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan	persen	100		100		100		100		100		-	DINKES
1.01.02.1.01.02.35	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PPK-BLUD	Persentase masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan UPT BLUD	persen	60	6.444.299.840	65	6.766.514.832	70	7.104.840.574	80	7.460.082.602	80	27.775.737.848	DINKES	
1.01.02.1.01.02.36	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	Cakupan peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	persen	100	196.074.000	100	215.681.000	100	237.249.000	100	260.974.000	100	909.978.000	DINKES	
1.01.02.02.	RSUD R.SYAMSUDIN SH													RSUD R. Syamsudin	
1.01.02.1.01.02.26	PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT				114.100.066.645		83.392.166.645		84.851.066.645		86.224.466.645		368.567.766.580	RSUD R. Syamsudin	
		Pengadaan alat kesehatan rumah sakit (DAK)	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	RSUD R. Syamsudin	
		Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran (pajak rokok)	Persen		-		-		-		-		-	RSUD R. Syamsudin	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Peningkatan sarana dan prasarana RSUD R Syamsudin SH DAK (pembangunan gedung 8 lantai)	Persen	25	-	25	-	25	-	25	-	100	-	RSUD R. Syamsudin
		Pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan regional Pembangunan gedung pusat penunjang (APBD I)	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	RSUD R. Syamsudin
		Pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan regional pengadaan alat kedokteran (APBD I)		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	RSUD R. Syamsudin
1.01.02.1.01.02.33	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Penyediaan atau pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Persen		-		-		-		-	100	-	RSUD R. Syamsudin
1.01.02.1.01.02.34	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BLUD				300.000.000.000		300.000.000.000		300.000.000.000		300.000.000.000		1.200.000.000.000	RSUD R. Syamsudin

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		Peningkatan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasaran rumah sakit dan pengembangan SDM	Persen	100		100		100		100		100		-	RSUD R. Syamsudin
		Peningkatan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit Bidang Umum dan Keuangan	Persen	100		100		100		100		100		-	RSUD R. Syamsudin
		Peningkatan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasaran rumah sakit Bidang Pelayanan dan Keperawatan	Persen	100		100		100		100		100		-	RSUD R. Syamsudin
		Peningkatan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasaran rumah sakit Bidang Pendidikan dan Bagian Mutu	Persen	100		100		100		100		100		-	RSUD R. Syamsudin
		Peningkatan administrasi pengelolaan dan pengembangan SDM	Persen	100		100		100		100		100		-	RSUD R. Syamsudin
1.01.03.	PEKERJAAN UMUM													-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN													-	DPUPRPKP2
1.01.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				1.098.832.260		1.193.360.486		1.297.241.535		1.411.410.688		5.000.844.969		DPUPRPKP2
		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100		100		100		100		100		-	DPUPRPKP2
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan pusat pemerintahan	Dokumen	-		-		-		-		1		-	DPUPRPKP2
1.01.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				522.397.900		554.637.690		590.101.459		629.111.605		2.296.248.654		DPUPRPKP2
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100		100		100		100		100		-	DPUPRPKP2
		Persentase bangunan sesuai dengan tata	Gedung	1		1		1		1		3		-	DPUPRPKP2

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		ruang kota												
1.01.03.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	100	80.000.000	100	88.000.000	100	96.800.000	100	106.480.000	100	371.280.000	DPUPRPKP2
1.01.03.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	100	15.116.200	100	16.627.820	100	18.290.602	100	20.119.662	100	70.154.284	DPUPRPKP2
1.01.03.01.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase kondisi jalan lingkungan baik	Persen	87.79	203.258.550	91.40	223.584.405	95.00	245.942.846	98.60	270.537.130	98.60	943.322.931	DPUPRPKP2
1.01.03.01.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	Persentase pencapaian target pembangunan drainase	M	199.547	3.000.000.000	201.047	3.000.000.000	202.547	3.000.000.000	204.047	3.000.000.000	1.005.235	12.000.000.000	DPUPRPKP2
1.01.03.01.17.	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Persentase turap/talud/bronjong kondisi baik	Unit	7	2.075.000.000	9	2.575.000.000	9	2.550.000.000	5	1.050.000.000	35	8.250.000.000	DPUPRPKP2
1.01.03.01.18.	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase kondisi jalan lingkungan baik	Dokumen	3	203.258.880	3	223.584.768	3	245.943.245	3	270.537.569	15	943.324.462	DPUPRPKP2
1.01.03.01.21.	TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN				2.206.297.500		2.426.927.250		2.669.619.975		2.936.581.973		10.239.426.698	DPUPRPKP2
		Persentase kondisi jalan lingkungan baik	Dokumen	10		10		10		10		50	-	DPUPRPKP2

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Persentase turap/talud/bro njong yang terbangun dalam kondisi baik	m3	500		500		500		500		2.500	-	DPUPRPKP2
		Persentase pencapaian target pembangunan drainase	Dokumen	10		10		10		10		50	-	DPUPRPKP2
1.01.03.01.24.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	M'	1.500	4.715.000.000	1.500	5.220.000.000	1.500	3.740.000.000	1.500	2.940.000.000	7.500	16.615.000.000	DPUPRPKP2
1.01.03.01.27.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH				6.700.000.000		6.700.000.000		6.700.000.000		6.700.000.000		26.800.000.000	DPUPRPKP2
		Persentase penduduk berakses air minum	Persen	69		69		70		71		71	-	DPUPRPKP2
		Persentase rumah tinggal bersanitasi (MCK)	Persen	89		90		91		92		92	-	DPUPRPKP2
1.01.03.01.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KELURAHAN/KEC AMATAN				10.050.000.000		10.100.000.000		10.150.000.000		10.200.000.000		40.500.000.000	DPUPRPKP2
		Persentase jalan lingkungan yang	Persen	87.79		91.40		95.00		98.60		99	-	DPUPRPKP2

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		baik												
		Pencapaian targetan penanganan kawasan DAS Cipelang	Persen	3		3		3		3		15	-	DPUPRPKP2
		Persentase KK dengan akses air bersih	Persen	69		69		70		71		71	-	DPUPRPKP2
1.01.03.01.31.	PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya keunggulan dan kemandirian pelaku sektor jasa konstruksi di Kota Sukabumi	Orang	40	150.000.000	40	165.000.000	40	181.500.000	40	199.650.000	160	696.150.000	DPUPRPKP2
1.01.03.01.32.	PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya keunggulan dan kemandirian pelaku sektor jasa konstruksi di Kota Sukabumi	Orang	40	150.000.000	40	165.000.000	40	181.500.000	40	199.650.000	160	696.150.000	DPUPRPKP2
1.01.03.01.33.	PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya keunggulan dan kemandirian pelaku sektor jasa konstruksi di Kota Sukabumi	Persen	100	473.150.000	100	515.465.000	100	567.011.500	100	623.012.650	100	2.178.639.150	DPUPRPKP2
1.01.03.01.xx.	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG SERTA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				2.150.000.000		240.000.000.000		240.000.000.000		60.000.000.000		542.150.000.000	DPUPRPKP2

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kawasan pusat pemerintahan	Dokumen	5		-		-		-		5	-	DPUPRPKP2
		Persentase pencapaian pembangunan kawasan pusat pemerintahan	persen	-		40		40		10		90	-	DPUPRPKP2
1.01.03.01.35.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG				1.219.000.000		600.900.000		535.990.000		424.589.000		2.780.479.000	DPUPRPKP2
		Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan perencanaan tata ruang	Persen	60		70		80		80		80	-	DPUPRPKP2
		Persentase tingkat ketersediaan pranata penataan ruang (RTRW, RDTR & RTBL KSK)	Persen	1 Draft RDTR		Ranperda		Perda		-		1 Perda RDTR	-	DPUPRPKP2
1.01.03.01.36.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG				60.500.000		66.550.000		73.205.000		80.525.500		280.780.500	DPUPRPKP2
		Jumlah lapang milik pemerintah yang di tata	Lapang									1	-	DPUPRPKP2
		Persentase kesesuaian dengan dokumen tata ruang	Persen	95		95		95		95		95	-	DPUPRPKP2

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.03.01.37.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Persentase kesesuaian pengendalian pemanfaatan ruang dengan dokumen perencanaan tata ruang	Persen	70	115.500.000	65	127.050.000	60	339.755.000	55	243.730.500	55	826.035.500	DPUPRPKP2
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN												-	DISHUB
1.01.03.1.02.09.15	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN												-	DISHUB
		Persentase kondisi jalan yang mantap	Persen	5,31	194.983.800	5,84	214.482.180	6,43	235.930.398	7,07	259.523.438	7,07	904.919.816	DISHUB
		Ruas jalan kota yang mantap	Km	95,12	5.000.000.000	95,46	5.500.000.000	95,83	6.050.000.000	96,25	6.655.000.000	96,70	23.205.000.000	DISHUB
		Panjang trotoar yang ramah pejalan kaki dan berkebutuhan khusus	Km	3,21	15.004.000.000	3,53	16.504.400.000	3,88	18.154.840.000	4,27	19.970.324.000	4,70	69.633.564.000	DISHUB
		Revitalisasi pedestrian kawasan Jl. Ahmad Yani, Jl. Ir. H. Juanda, Lapangan Merdeka, Jl. Ciwangi, dan Jl. Kapt. Harun Kabir		3	9.500.000.000	2	5.000.000.000	2	5.000.000.000	3	8.000.000.000	12	27.500.000.000	DISHUB
1.01.03.1.02.09.18	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase kondisi jalan yang mantap			26.726.789.301		29.489.468.231		34.428.415.054		35.561.256.560	0,00	126.205.929.146	DISHUB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.03.1.02.09.20	PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah data inspeksi kondisi jalan			55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		255.255.000	DISHUB
1.01.03.1.02.09.21	PROGRAM CEPAT TANGGAP JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah ruas jalan yang harus ditangani dalam situasi segera			4.079.273.101		4.487.200.411		4.935.920.452		5.429.512.497		18.931.906.461	DISHUB
1.01.03.1.02.09.23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan			104.500.000		114.950.000		126.445.000		139.089.500		484.984.500	DISHUB
1.01.03.1.02.09.38	PROGRAM PENEINGKATAN PEDESTIAN YANG LAYAK DAN LAHAN PARKIR	Persentase jalan trotoar yang ramah pejalan kaki dan berkebutuhan khusus	Persen	8,05	21.104.000.000	8,36	21.604.400.000	8,69	23.254.840.000	9,06	28.070.324.000	9,47	94.033.564.000	DISHUB
1.01.04	PERUMAHAN RAKYAT												-	
1.01.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN													DPUPRPKP2
1.01.04.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase jumlah rumah layak huni	Persen	96,70	5.022.698.000	96,99	5.132.464.580	97,28	5.195.711.038	97,57	5.265.282.142	97,57	20.616.155.760	DPUPRPKP2
1.01.04.01.16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN		Dokumen	1	287.201.750	1	315.921.925	1	347.514.118	1	382.265.529	5	1.332.903.322	DPUPRPKP2

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.04.01.17	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	Persentase kawasan kumuh	Persen	0,13	4.000.000.000	0,08	4.000.000.000	0,04	4.000.000.000	-	4.000.000.000	-	16.000.000.000	DPUPRPKP2
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL													DINSOS
1.01.04.1.01.06.20	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Persentase area taman makam pahlawan yang dipelihara	Persen	84	60.000.000	86	63.000.000	88	66.150.000	90	69.457.500	90	258.607.500	DINSOS
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP													DLH
1.01.04.1.02.05.20	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Luas areal pemakaman	Ha	34,80	850.000.000	34,90	1.100.000.000	35,00	1.300.000.000	35,10	1.200.000.000	35,10	4.450.000.000	DLH
1.01.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1.01.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA													SATPOL PP
1.01.1.01.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	2.920.700.000	100	3.117.600.000	100	3.471.200.000	100	3.569.400.000	100	13.078.900.000	SATPOL PP
1.01.1.01.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	487.000.000	100	509.500.000	100	529.500.000	100	555.500.000	100	2.081.500.000	SATPOL PP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.05.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100	250.000.000	100	275.000.000	100	300.000.000	100	325.000.000	100	1.150.000.000	SATPOL PP
1.01.1.01.05.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	60	65.000.000	70	85.000.000	80	125.000.000	90	150.000.000	90	425.000.000	SATPOL PP
1.01.1.01.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	12.250.000	100	13.450.000	100	14.650.000	100	16.250.000	100	56.600.000	SATPOL PP
1.01.1.01.05.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketesesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	100	6.500.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	26.000.000	100	49.000.000	SATPOL PP
1.01.05.1.01.05.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tertangani	Persen	100	410.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	1.910.000.000	SATPOL PP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.05.1.01.05.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Persentase tingkat gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	Persen	100	819.200.000	100	901.120.000	100	993.707.000	100	755.829.500	100	3.469.856.500	SATPOL PP
1.01.05.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH													BPBD
1.01.1.01.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	91	910.800.000	92	1.001.880.000	93	1.102.068.000	94	1.212.274.800	95	4.227.022.800	BPBD
1.01.1.01.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	91	5.385.000.000	92	423.500.000	93	465.850.000	94	512.450.000	95	6.786.800.000	BPBD
1.01.1.01.05.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	91	220.000.000	92	242.000.000	93	266.200.000	94	292.820.000	95	1.021.020.000	BPBD
1.01.1.01.05.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen	91	132.000.000	92	145.200.000	93	159.720.000	94	175.692.000	95	612.612.000	BPBD
1.01.1.01.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase jumlah dokumen, laporan kinerja, dan laporan keuangan OPD yang tepat waktu	Persen	91	57.200.000	92	62.920.000	93	69.212.000	94	76.150.000	95	265.482.000	BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.05.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	91	82.500.000	92	90.750.000	93	99.825.000	94	109.850.000	95	382.925.000	BPBD
1.01.05.1.01.05.19	PROGRAM Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				654.500.000		719.950.000		791.945.000		841.076.700		3.007.471.700	BPBD
		Persentase kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana	Persen	1,8	-	2,9	-	2,38	-	2,67	-	2,67	-	BPBD
		Jumlah zona tangguh bencana	Zotabe	17	-	21	-	25	-	29	-	29	-	BPBD
		persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi dari korban bencana	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	BPBD
1.01.05.1.01.05.21	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL				166.418.130		171.410.674		176.552.994		181.849.584		696.231.382	BPBD
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam	Persen	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Persentase perbaikan rumah korban akibat bencana alam	Persen	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	BPBD
1.01.05.1.01.05.22	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN				372.378.990		383.550.360		395.056.870		406.908.577		1.557.894.797	BPBD
		Persentase kesiapan dan pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan kebakaran	Persen	1,8	-	2,9	-	2,38	-	2,67	-	2,67	-	BPBD
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan di evakuasi dari korban kebakaran	Persen	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	BPBD
1.01.06	SOSIAL												-	
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL												-	DINSOS
1.01.1.01.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	704.766.900	100	807.220.500	100	887.942.550	100	928.303.575	100	3.328.233.525	DINSOS
1.01.1.01.06.02	PROGRAM PELAYANAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	306.941.000	100	337.750.000	100	381.525.000	100	405.851.250	100	1.432.067.250	DINSOS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.1.01.06.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100	34.000.000	100	37.750.000	100	43.412.500	100	49.924.375	100	165.086.875	DINSOS
1.01.1.01.06.05	PROGRAM PELAYANAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	38.000.000	100	40.300.000	100	45.025.000	100	48.647.500	100	171.972.500	DINSOS
1.01.1.01.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	14.845.500	100	15.911.300	100	16.706.865	100	18.377.552	100	65.841.217	DINSOS
1.01.1.01.06.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG /JASA DAN ASET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai PERMENDAGRI No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	100	3.345.000	100	5.152.500	100	5.410.125	100	5.951.138	100	19.858.763	DINSOS
1.01.1.01.06.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersediaan perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW,	Persen	84	27.000.000	86	29.700.000	88	31.185.000	90	71.185.000	90	159.070.000	DINSOS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		RPJMD, dan RKP												
1.01.06.1.01.06.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA				610.000.000		731.000.000		755.000.000		778.000.000		2.874.000.000	DINSOS
		Persentase masyarakat miskin BDT yang tertangani	Persen	77		78		79		80		80	-	DINSOS
1.01.06.1.01.06.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL				1.000.000.000		1.105.000.000		1.153.250.000		1.205.000.000		4.463.250.000	DINSOS
		Persentase tuna sosial (terutama gelandangan dan pengemis) terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	58		60		62		65		65	-	DINSOS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	Persen	100		100		100		100		100		-	DINSOS
		Persentase Lanjut Usia terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial dasar (SPM)	Persen	58		60		62		65		65		-	DINSOS
		Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	58		60		62		65		65		-	DINSOS
		Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	62		65		67		70		70		-	DINSOS
		Persentase PMKS lainnya yang tertangani	Persen	47		48		49		50		50		-	DINSOS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.06.1.01.06.17	PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR	Perentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM Sosial)	Persen	40	75.000.000	41	95.000.000	42	115.000.000	43	130.000.000	43	415.000.000	DINSOS
1.01.06.1.01.06.18	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	Persen	62	95.000.000	65	104.500.000	67	120.000.000	70	127.500.000	70	447.000.000	DINSOS
1.01.06.1.01.06.19	PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO	Persentase PSKS yang aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial	Persen	20	90.000.000	25	192.000.000	30	196.000.000	35	200.000.000	35	678.000.000	DINSOS
1.01.06.1.01.06.xx	PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI KESETIAKAWANAN SOSIAL				1.350.000.000		1.427.500.000		1.555.000.000		1.622.500.000		5.955.000.000	DINSOS
		Persentase PSKS yang aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial	Persen	20		25		30		35		35	-	DINSOS
		Persentase masyarakat yang datang dan dilayani di	Persen	100		1		1		1		1	-	DINSOS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		rumah singgah												
		Persentase keluhan masyarakat miskin yang ditindaklanjuti dan selesai melalui UPT SLRT	persen	100		1		1		1		1		DINSOS
		Persentase keluarga miskin BDT yang tertangani	persen	100		1		1		1		1		DINSOS
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR												-	
1.02.01	TENAGA KERJA												-	
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA												-	DISNAKER
1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	588.438.730	100	647.282.603,00	100	712.010.863,00	100	783.211.950,00	100	2.730.944.146	DISNAKER
1.02.1.02.01.02	PROGRAM SARANA PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	100	530.299.000	100	583.328.900,00	100	641.661.790,00	100	705.827.969,00	100	2.461.117.659	DISNAKER
1.02.1.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	100	65.450.000	100	71.995.000	100	79.194.500	100	87.113.950	100	303.753.450	DISNAKER

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen	100	109.367.500	100	120.304.250	100	132.334.675	100	145.568.143	100	507.574.568	DISNAKER
1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	8.655.570	100	9.521.127	100	10.473.240	100	11.520.564	100	40.170.501	DISNAKER
1.02.1.02.01.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	100	19.812.320	100	21.793.552	100	23.972.907	100	26.370.198	100	91.948.977	DISNAKER
1.02.01.1.02.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH BERBASIS EKONOMI KREATIF	Persentase terselenggaranya pendidikan vokasi	Orang	75	250.000.000	80	300.000.000	85	350.000.000	90	430.000.000	90	1.330.000.000	DISNAKER
1.02.01.1.02.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persen	3,75	558.800.000	5	614.680.000	6	676.148.000	8	743.762.800	8	2.593.390.800	DISNAKER
1.02.01.1.02.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Persentase Peningkatan penyerapan pencari kerja dalam bursa kerja atau <i>job fair</i>	Orang	550	275.000.000	600	302.500.000	650	332.750.000	700	366.025.000	700	1.276.275.000	DISNAKER

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.1.02.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Persen	100	494.681.550	100	544.149.705	100	598.564.676	100	658.421.143	100	2.295.817.074	DISNAKER
1.02.01.1.02.01.18	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCT PRIORITAS DAERAH)	Persentase peningkatan keterampilan pencari kerja	Persen		605.000.000		665.500.000		732.050.000		805.255.000		2.807.805.000	DISNAKER
1.02.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
1.02.08.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													DP2KBP3APM
1.02.08.01.15.	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Persentase kapasitas perempuan dan anak dalam pembangunan	persen	33	50.000.000	36	50.000.000	39	50.000.000	45	50.000.000	45	200.000.000	DP2KBP3APM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.02.1.02.08.16	PROGRAM Penguatan KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	Persentase penguatan dan pengembangan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah dan penyedia layanan	persen	80	1.596.493.000	85	594.000.000	90	602.000.000	95	609.000.000	95	3.401.493.000	DP2KBP3APM
1.02.02.1.02.08.18	PROGRAM Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah kelompok usaha ekonomi pemempuan	kelompok	19	50.000.000	20	50.000.000	21	50.000.000	22	50.000.000	23	200.000.000	DP2KBP3APM
1.02.02.1.02.08.xx.	PROGRAM Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan	persen	33	160.000.000	36	172.000.000	39	180.000.000	45	190.000.000	45	702.000.000	DP2KBP3APM
1.02.03	PANGAN													
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN													DKP3
1.02.1.02.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	1.468.600.000	100	1.629.300.000	100	1.789.500.000	100	1.904.700.000	100	6.792.100.000	DKP3
1.02.1.02.03.01.02	PROGRAM Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparaturnya	Persen	100	650.000.000	100	660.000.000	100	865.000.000	100	770.000.000	100	2.945.000.000	DKP3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.03.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	90	0	90	120.000.000	90	0	90	130.000.000	90	250.000.000	DKP3
1.02.1.02.03.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	90	270.000.000	90	220.000.000	90	270.000.000	90	270.000.000	90	1.030.000.000	DKP3
1.02.1.02.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	90	37.535.000	90	40.970.000	90	44.730.000	90	48.800.000	90	172.035.000	DKP3
1.02.1.02.03.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai PERMENDAGRI No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	90	20.000.000	90	50.000.000	90	20.000.000	90	25.000.000	90	115.000.000	DKP3
1.02.1.02.03.01.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keteresuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan	Persen	90	20.700.000	90	22.800.000	90	25.100.000	90	27.650.000	90	96.250.000	DKP3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		RKPD												
1.02.03.1.02.03.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/ PERKEBUNAN				820.432.000		813.989.000		913.505.000		947.093.500		3.495.019.500	DKP3
		a. Skor PPH	Poin	79	-	80	-	80	-	80	-	80	-	DKP3
		b. Angka kecukupan energi	kkal/kap/hari	2422	-	2220	-	2219	-	2217	-	-	-	DKP3
		c. Angka kecukupan protein	gr/kap/hari	107,1	-	107,1	-	107,1	-	107,1	-	107,1	-	DKP3
		d. Persentase keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH)	Persen	87	-	88	-	89	-	90	-	90	-	DKP3
		e. Angka ketersediaan Cadangan Pangan Pokok Pemerintah	Kg	25000	-	30000	-	40000	-	50000	-	50000	-	DKP3
		f. Persentase ketersediaan data ketahanan pangan atau pertanian	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DKP3
		g. Persentase penggunaan KTI dalam pembelian pupuk bersubsidi	Persen	50	-	70	-	80	-	90	-	90	-	DKP3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		h. Persentase luas lahan pertanian yang mengikuti AUTP	Persen	25		30		35		40		40	-	DKP3
		i. Persentase peningkatan luas lahan pertanian organik yang tersertifikasi	Persen	10		10		10		10		10	-	DKP3
		j. Persentase petani hortikultura yang memiliki sertifikat prima	Persen	15		20		25		30		30	-	DKP3
1.02.04	PERTANAHAN												-	
1.02.14.4.00.01.15	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN				48.840.000		53.724.000		59.096.400		65.006.000		226.666.400	BAG. TAPEM
1.02.05	LINGKUNGAN HIDUP												-	
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP												-	DLH
1.02.1.02.05.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	12.077.074.200	100	12.895.532.800	100	19.917.301.342	100	24.764.575.386	100	69.654.483.728	DLH
1.02.1.02.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	71.127.610.200	100	7.388.252.080	100	8.726.278.154	100	60.507.576.601	100	147.749.717.035	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.05.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100	251.240.000	100	301.218.000	100	361.785.600	100	434.142.720	100	1.348.386.320	DLH
1.02.1.02.05.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR *	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	199.015.080	100	238.818.096	100	286.581.715	100	343.898.058	100	1.068.312.949	DLH
1.02.1.02.05.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	29.000.000	100	31.900.000	100	35.090.000	100	38.599.000	100	134.589.000	DLH
1.02.1.02.05.07.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai PERMENDAGRI No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	100	19.340.000	100	23.208.000	100	27.849.600	100	33.419.520	100	103.817.120	DLH
1.02.1.02.05.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketepatan perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan	Persen	100	25.000.000	100	27.500.000	100	30.250.000	100	83.275.000	100	166.025.000	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		RKPD												
1.02.05.1.02.05.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				6.079.700.000		6.764.770.000		7.514.447.000		8.336.491.700		28.695.408.700	DLH
		Persentase pengurangan sampah	Persen	22	-	24	-	26	-	27	-	27	-	DLH
		Persentase penanganan sampah	Persen	75	-	74	-	73	-	72	-	72	-	DLH
		Persentase pelayanan kebersihan	Persen	60	-	65	-	70	-	75	-	75	-	DLH
		Persentase pemrosesan akhir sampah	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DLH
1.02.05.1.02.05.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.439.200.000		1.574.020.000		1.799.722.000		2.034.394.200		6.847.336.200	DLH
		Persentase dokumen kebijakan digunakan dalam pengambilan keputusan	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DLH
		Persentase usaha dan/atau kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	Persen	8	-	10	-	12	-	15	-	15	-	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Cakupan pelaksanaan program pelaporan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DLH
		Persentase peningkatan kualitas air sungai	Persen	7	-	10	-	14	-	17	-	17	-	DLH
		Persentase dokumen kajian dampak lingkungan digunakan dalam pengambilan keputusan	Persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DLH
		Persentase capaian penggunaan produk yang ramah lingkungan		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DLH
		Persentase peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persen	12	-	13	-	14	-	15	-	15	-	DLH
		Cakupan wilayah pelayanan pengambilan lumpur tinja	Persen	40	-	45	-	50	-	55	-	55	-	DLH
1.02.05.1.02.05.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA				1.140.000.000	15	1.219.000.000	15	1.305.900.000	15	1.401.490.000	15	5.066.390.000	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	ALAM														
		Persentase perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Persen	100		100		100		100		100		-	DLH
		Persentase jumlah kampung iklim di wilayah Kota Sukabumi	Persen	5		6		6		7		7		-	DLH
1.02.05.1.02.05.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP				304.633.500		335.096.850		368.606.535		405.467.189		1.413.804.074	DLH	
		Persentase Penyediaan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	100		100		100		100		100		-	DLH
		Persentase jumlah peran serta sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persen	20		22		24		60		60		-	DLH
1.02.05.1.02.05.20	PROGRAM PENINGKATAN				265.000.000		312.000.000		360.000.000		413.500.000		1.350.500.000	DLH	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	PENGENDALIAN POLUSI													
		Persentase capaian kualitas udara ambien memenuhi baku mutu	Persen	60		60		80		80		80		DLH
		Persentase ketaatan masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran	Persen	17		20		25		30		30		DLH
1.02.05.1.02.05.24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Luasan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)	Ha	21,35	4.450.000.000	21,38	3.850.000.000	21,41	3.700.000.000	21,44	3.700.000.000	21,44	15.700.000.000	DLH
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN													DISHUB
1.02.05.1.02.09.24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Jumlah lampu PJU yang terpasang di seluruh Kota Sukabumi	Titik	227	5.500.000.000	247	1.723.342.005	267	1.895.676.206	287	2.085.243.826	1.157	11.204.262.037	DISHUB
1.02.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN													
1.02.11.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
1.02.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	1.554.568.500	100	1.710.025.350	100	1.881.027.975	100	2.072.430.965	100	7.218.052.790	DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	241.605.810	100	265.766.000	100	292.342.600	100	321.576.850	100	1.121.291.260	DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100	77.000.000	100	84.700.000	100	93.170.000	100	102.487.000	100	357.357.000	DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	171.000.000	100	188.100.000	100	206.910.000	100	227.550.000	100	793.560.000	DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian	Persen	100	46.268.200	100	50.895.000	100	55.984.500	100	61.582.490	100	214.730.190	DISDUKCAPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Pelaporan keuangan tepat waktu												
1.02.1.02.06.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai Permendagri No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	100	5.500.000	100	6.050.000	100	6.655.000	100	7.320.500	100	25.525.500	DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	100	23.430.000	100	25.773.000	100	28.350.000	100	41.185.000	100	118.738.000	DISDUKCAPIL
1.02.1.02.06.01.15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				2.249.965.400		2.474.961.540		2.722.457.694		2.994.702.867		10.442.087.501	DISDUKCAPIL
		Cakupan kepemilikan KTP-el	Persen	100		100		100		100		100	-	DISDUKCAPIL
		Cakupan kepemilikan kartu keluarga	Persen	100		100		100		100		100	-	DISDUKCAPIL
		Cakupan kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 tahun	Persen	100		100		100		100		100	-	DISDUKCAPIL
		Cakupan kepemilikan akta	Persen	100		100		100		100		100	-	DISDUKCAPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		kematian												
		Cakupan pemanfaatan data kependudukan	Persen	100		100		100		100		100	-	DISDUKCAPIL
1.02.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												-	
1.02.08.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												-	DP2KBP3APM
1.02.07.1.02.08.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN/KEC AMATAN	- Persentase tingkat pemberdayaan masyarakat; - Persentase swadaya masyarakat	persen	- 60%; -49,4%	3.295.909.000	- 70%; - 49,6%	3.301.542.000	- 80%; - 49,8%	3.440.798.500	- 90%; -50%	3.584.685.950	- 90%; -50%	13.622.935.450	DP2KBP3APM
1.02.07.1.02.08.17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	Persentase kelurahan cepat berkembang	persen	57	306.525.000	60	337.177.500	63	370.895.250	66	407.984.775	66	1.422.582.525	DP2KBP3APM
1.02.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.08.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													DP2KBP3APM
1.02.1.02.08.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	721.576.500	100	793.734.150	100	873.107.565	100	960.418.322	100	3.348.836.537	DP2KBP3APM
1.02.1.02.08.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	80	254.330.000	80	224.763.000	80	247.239.300	80	271.963.230	80	998.295.530	DP2KBP3APM
1.02.1.02.08.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen		100	32.500.000	-	-	-	-	-	-	-	32.500.000	DP2KBP3APM
1.02.1.02.08.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	16.580.000	100	23.600.000	100	27.600.000	100	31.600.000	100	99.380.000	DP2KBP3APM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.08.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran	Persen	100	28.510.000	100	16.000.000	100	17.000.000	100	18.000.000	100	79.510.000	DP2KBP3APM
1.02.08.1.02.08.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	-CPR; CU/PUS; PA/PUS -UKPW -MKPJ <i>-Unmet need</i>	Persen	67,86% ; 21,32; 23,55%; 11,20%;	98.078.700	67,90%; 21,32; 23,55%; 11,15%;	103.784.550	67,95%; 21,32; 23,55%; 11,10%;	121.355.050	68,05%; 21,32; 23,55%; 10,05%;	142.651.600	68,05%; 21,32; 23,55%; 10,05%;	465.869.900	DP2KBP3APM
1.02.08.1.02.08.16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)	Rata-rata Usia Nikah Pertama	Tahun	21.32	95.716.700	21.32	63.917.350	21.32	70.309.100	21.32	28.494.300	21.32	258.437.450	DP2KBP3APM
1.02.08.1.02.08.17	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	-CPR; CU/PUS; PA/PUS -UKPW -MKPJ <i>-Unmet need</i>	Persen	67,86% ; 21,32; 23,55%; 11,20%;	147.381.000	67,90%; 21,32; 23,55%; 11,15%;	44.731.850	67,95%; 21,32; 23,55%; 11,10%;	53.678.200	68,05% 21,32; 23,55%; 10,05%	64.413.850	68,05% 21,32; 23,55%; 10,05%	310.204.900	DP2KBP3APM
1.02.08.1.02.08.18	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	-CPR; CU/PUS; PA/PUS -UKPW -MKPJ <i>-Unmet need</i>	Persen	67,86% ; 21,32; 23,55%; 11,20%;	179.015.500	67,90% ; 21,32; 23,55%; 11,15%;	214.917.000	67,95%; 21,32; 23,55%; 11,10%;	246.408.000	68,05%; 21,32; 23,55%; 10,05%;	278.549.000	68,05%; 21,32; 23,55%; 10,05%;	918.889.500	DP2KBP3APM
1.02.08.1.02.08.XX	PROGRAM KETAHANAN KELUARGA (FAMILY STRENGTHENING)	Persentase keluarga sejahtera II	persen	76,5	1.075.000.000	77	1.180.000.000	77,5	1.295.000.000	78	1.400.000.000	78	4.950.000.000	DP2KBP3APM
1.02.08.1.02.08.22	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan	persen	75	370.000.000	80	300.000.000	82	320.000.000	85	385.000.000	85	1.375.000.000	DP2KBP3APM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK													
1.02.08.1.02.08.23	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Persentase keluarga sejahtera II	persen	77	110.000.000	77	150.000.000	77,5	180.000.000	78	220.000.000	78	660.000.000	DP2KBP3APM
1.02.08.1.02.08.24	PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU	Jumlah kelompok bina keluarga (BKB-BKR-BKL)	klp	301	458.600.000	322	646.000.000	343	838.400.000	364	893.400.000	364	2.836.400.000	DP2KBP3APM
1.02.09	PERHUBUNGAN													
1.02.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN													DISHUB
1.02.1.02.09.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	5.914.101.534	100	6.505.511.687	100	7.156.062.856	100	7.871.669.142	100	27.447.345.219	DISHUB
1.02.1.02.09.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	100	2.671.642.360	100,00	2.938.806.596	100,00	3.232.687.255	100,00	3.555.955.981	100,00	12.399.092.193	DISHUB
1.02.1.02.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	100	465.897.575	100	512.487.333	100	563.736.066	100	620.109.672	100	2.162.230.646	DISHUB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.09.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	5	178.663.485	5	196.529.834	5	216.182.817	5	237.801.099	25	829.177.234	DISHUB
1.02.1.02.09.08.	PROGRAM PERNECANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	1	10.781.650	1	11.859.815	1	13.045.797	1	14.350.376	5	50.037.638	DISHUB
1.02.1.02.09.15.	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Program Aplikasi PPTV visim	dokumen		717.058.490		788.764.339		831.818.317		879.177.693		3.216.818.839	DISHUB
		Dokumen rencana jaringan lalu lintas dan angkutan jalan											-	DISHUB
1.02.1.02.09.16.	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui peralatan dan perlengkapan pengujian			504.086.000		554.494.600		609.944.060		670.938.466		2.339.463.126	DISHUB
1.02.1.02.09.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN				4.161.070.000		13.607.360.000		11.738.625.000		1.888.235.000		31.395.290.000	DISHUB
		Tingkat keselamatan dalam berlalu lintas meningkat	Persen										-	DISHUB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Persentase angkutan umum yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor	Persen	83,10		83,86		84,57		86,56		83,64	-	DISHUB
		Dokumen perencanaan dan evaluasi trayek angkutan umum dan SAUM	Dokumen	1,00									0	DISHUB
		SAUM	Dokumen	1,00		1,00						1,00	-	DISHUB
		DED gedung atau lahan parkir baru	dokumen	1									-	DISHUB
		Jumlah gedung atau lahan parkir baru	titik	1		1		1				2	-	DISHUB
1.02.1.02.09.19.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS				6.533.626.000		7.041.397.500		1.649.946.150		1.485.349.665		16.710.319.315	DISHUB
		Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan :											-	DISHUB
		1. Rambu	buah	8	77.715.000	10	85.486.500	12	94.035.150	14	103.438.665	50	360.675.315	DISHUB
		2. ITS	Titik	5	5.000.000.000	5	5.500.000.000		100.000.000		100.000.000	10	10.700.000.000	DISHUB
		3. Warning Light	unit	10	294.000.000	10	294.000.000	10	294.000.000	4	120.000.000	36	1.002.000.000	DISHUB
		4. Cermin tikungan	buah	40	181.000.000	40	181.000.000	40	181.000.000	40	181.000.000	174	724.000.000	DISHUB
		5. Marka	m'	5.700	580.911.000	6.270	580.911.000	6.897	580.911.000	7.587	580.911.000	32.154	2.323.644.000	DISHUB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		6. Pagar pengaman	paket	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	DISHUB
		Jumlah pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	orang	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	1.000	800.000.000	DISHUB
1.02.1.02.09.20.	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR				5.762.785.820		6.339.064.402		6.972.970.842		7.670.267.926		26.745.088.991	DISHUB
		Terpenuhinya kebutuhan PKB											-	DISHUB
		Tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor	persen			100						100	-	DISHUB
1.02.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												-	
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												-	DISKOMINFO
1.02.1.02.10.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90	1.311.208.300	90	1.378.000.000	90	1.446.900.000	90	1.519.245.000	90	5.655.353.300	DISKOMINFO
1.02.1.02.10.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90	388.415.000	90	407.835.750	90	428.227.538	90	449.638.914	90	1.674.117.202	DISKOMINFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.10.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	90	24.000.000	90	25.200.000	90	26.460.000	90	27.783.000	90	103.443.000	DISKOMINFO
1.02.1.02.10.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	90	100.000.000	90	110.000.000	90	121.000.000	90	133.100.000	90	464.100.000	DISKOMINFO
1.02.1.02.10.06.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	90	16.320.000	90	17.136.000	90	17.992.800	90	18.892.440	90	70.341.240	DISKOMINFO
1.02.1.02.10.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersediaan perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKP	Persen	90	22.355.500	90	23.473.275	90	24.646.939	90	55.879.286	90	126.354.999	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa		90	328.617.700	90	391.724.600	90	411.310.830	90	431.876.372	90	1.563.529.502	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.16	PROGRAM PENGAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG	Meningkatnya efektifitas pemanfaatan teknologi		N/A	N/A	80	50.000.000	80	52.500.000	80	55.125.000	80	157.625.000	DISKOMINFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	komunikasi dan informatika												
1.02.10.1.02.10.17	PROGRAM FASILITAS PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	Peningkatan wawasan SDM dalam penyebarluasan informasi		90	165.372.500	90	208.641.125	90	219.073.181	90	230.026.840	90	823.113.647	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Persentase Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah		90	518.943.000	90	351.667.050	90	369.250.403	90	387.712.923	90	1.627.573.375	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.19	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI (DBHCHT)	Persentase Penyebaran informasi ketentuan bidang cukai tembakau yang tersampaikan		80	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	80	400.000.000	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.20	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tersedianya informasi pemerintahan daerah yang aktual		N/A	N/A	80	630.000.000	80	630.000.000	80	630.000.000	80	1.890.000.000	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.21	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Optimalnya pengelolaan aplikasi pelayanan publik		N/A	N/A	80	290.000.000	80	210.000.000	80	210.000.000	80	710.000.000	DISKOMINFO
1.02.10.1.02.10.22	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah		N/A	N/A	90	230.000.000	90	310.000.000	90	230.000.000	90	770.000.000	DISKOMINFO
4.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH													BAG. HUMAS & PROTOKOL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.10.1.02.10.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA				315.000.000		317.700.000		320.700.000		325.500.000		1.278.900.000	BAG. HUMAS & PROTOKOL
1.02.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH												-	
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN												-	DISKOPDAGRIN
1.02.1.02.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	916.435.000	100	998.129.000	100	1.089.413.250	100	1.191.854.575	100	4.195.831.825	DISKOPDAGRIN
1.02.1.02.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	326.124.500	100	340.500.000	100	355.500.000	100	372.550.000	100	1.394.674.500	DISKOPDAGRIN
1.02.1.02.11.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100	22.440.000	100	25.000.000	100	27.000.000	100	29.000.000	100	103.440.000	DISKOPDAGRIN
1.02.1.02.11.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	165.000.000	100	181.500.000	100	199.650.000	100	219.615.000	100	765.765.000	DISKOPDAGRIN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.11.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPMD	Persen	100	51.943.300	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	231.943.300	DISKOPDAGRIN
1.02.05.1.02.11.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan perusakkan lingkungan hidup	Persen	100	292.000.000	100	13.370.500	100	14.000.000	100	16.000.000	100	335.370.500	DISKOPDAGRIN
1.02.11.1.02.11.15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	Persentase usaha mikro dan kecil	Persen	84,50	200.000.000	84,00	210.000.000	83,50	220.000.000	83,00	230.000.000		860.000.000	DISKOPDAGRIN
1.02.11.1.02.11.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH				4.140.448.300		2.106.493.130		2.113.142.443		1.406.456.687		9.766.540.560	DISKOPDAGRIN
		UMKM naik kelas	Usaha Mikro	30	-	30	-	30	-	30	-	150	-	DISKOPDAGRIN
		Persentase wirausaha muda baru yang terbentuk melalui program Sukabumi KECE	Persen	50	-	50	-	50	-	50	-	50	-	DISKOPDAGRIN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.11.1.02.11.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH				7.317.000.000		3.300.000.000		3.325.000.000		2.299.000.000		16.241.000.000	DISKOPDAGRIN
		Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang menerima penguatan permodalan	UMK	200	-	200	-	200	-	200	-	1000	-	DISKOPDAGRIN
		Jumlah promosi produk usaha mikro kecil menengah melalui pameran	Produk	10	-	10	-	10	-	10	-	50	-	DISKOPDAGRIN
		Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh penguatan permodalan	Persen	80	-	90	-	95	-	100	-	100	-	DISKOPDAGRIN
1.02.11.1.02.11.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI				381.327.000		402.500.000		421.550.000		443.205.000		1.648.582.000	DISKOPDAGRIN
		Persentase peningkatan koperasi aktif	Persen	65	-	67	-	69	-	71	-	71	-	DISKOPDAGRIN
		Persentase peningkatan koperasi yang melaksanakan RAT	Persen	37	-	38	-	39	-	40	-	40	-	DISKOPDAGRIN
4.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH													BAG. EKBang & KD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.11.4.00.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH				80.000.000	100.000.000		125.000.000		150.000.000		455.000.000	BAG. EKBANG & KD	
1.02.12	PENANAMAN MODAL													
1.02.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU													
1.02.1.02.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	80	844.688.400	80	919.263.540	80	994.444.894	80	1.072.584.383	80	3.830.981.217	DPMPTSP
1.02.1.02.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	80	251.602.000	80	311.562.200	80	300.918.420	80	327.490.262	80	1.191.572.882	DPMPTSP
1.02.1.02.12.02	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	persen	80	20.000.000	80	22.000.000	80	24.000.000	80	26.000.000	80	92.000.000	DPMPTSP
1.02.1.02.12.02	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian	persen	80	4.400.000	80	5.500.000	80	6.750.000	80	8.000.000	80	24.650.000	DPMPTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Pelaporan keuangan tepat waktu												
1.02.1.02.12.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersediaan perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	persen	80	7.133.500	80	7.846.850	80	8.631.535	80	9.494.689	80	33.106.574	DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI				526.072.100		578.400.350		631.425.350		684.752.850		2.420.650.650	DPMPTSP
		Persentase pertumbuhan investor yang berinvestasi	persen	8	-	7	-	7	-	6	-	6	-	DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.16	PROGRAM PENINGLATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Persentase terkendalinya prosedur pelayanan perizinan secara berkala	Persen	72	290.000.000	75	320.000.000	78	355.000.000	80	390.000.000	80,00	1.355.000.000	DPMPTSP
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta rupiah	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	200.000	-	DPMPTSP
		Realisasi investasi PMA dan PMDN	Juta rupiah	210.000	-	220.000	-	230.000	-	240.000	-	240.000	-	DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.17	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA				25.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		115.000.000	DPMPTSP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	DAN PRASARANA DAERAH													
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk pemanfaatan dan pengembangan potensi unggulan daerah	Persen	72	-	75	-	78	-	80	-	80	-	DPMPTSP
		Persentase potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah yang terinformasikan untuk investasi	persen	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DPMPTSP
1.02.12.1.02.12.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN PERIZINAN	Jumlah ijin yang diterbitkan	Persen	72	124.000.000	75	148.000.000	78	172.000.000	80	196.000.000,00	80	640.000.000	DPMPTSP
1.02.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												-	
1.02.13.01.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA												-	DISPORAPAR
1.02.1.02.13.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	1.046.485.511	100	1.077.880.076	100	1.110.216.478	100	1.143.522.972	100	4.378.105.037	DISPORAPAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.13.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	100	350.000.000	100	450.000.000	100	550.000.000	100	650.000.000	100	2.000.000.000	DISPORAPAR
1.02.1.02.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	100	183.000.000	100	233.000.000	100	283.000.000	100	333.000.000	100	1.032.000.000	DISPORAPAR
1.02.1.02.13.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Dokumen	100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	550.000.000	DISPORAPAR
1.02.13.1.02.13.16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jumlah peran serta pemuda	Angka	12	350.000.000	14	402.500.000	16	455.125.000	18	507.881.250	69	1.715.506.250	DISPORAPAR
1.02.13.1.02.13.17	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	Jumlah wirausaha muda pemula	Orang	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	200	600.000.000	DISPORAPAR
1.02.13.1.02.13.18	PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA	Persentase peningkatan pengetahuan tentang bahaya narkoba	Persen	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1	300.000.000	DISPORAPAR
1.02.13.1.02.13.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA	Jumlah raihan medali pada event olahraga tingkat provinsi dan nasional	Skor	20	755.000.000	15	970.000.000	49	4.785.000.000	31	1.000.000.000	124	7.510.000.000	DISPORAPAR
1.02.13.1.02.13.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN				1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		5.600.000.000	DISPORAPAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	PRASARANA OLAHRAGA													
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga Kota Sukabumi	Unit	7	-	7	-	7	-	7	-	33	-	DISPORAPAR
		Persentase kelurahan <i>sport center</i>	Persen	21	-	21	-	21	-	21	-	100	-	DISPORAPAR
1.02.13.1.02.13.xx	PROGRAM PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAJAR DAERAH (PPLPD) DI SEKOLAH	Jumlah kelas olahraga yang terbentuk	Angka	2	1.236.000.000	3	1.854.000.000	4	2.472.000.000	5	3.090.000.000	15	8.652.000.000	DISPORAPAR
1.02.13.1.02.13.xx	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	Jumlah wirausaha muda pemula	Angka	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	200	600.000.000	DISPORAPAR
1.02.14	STATISTIK													
1.02.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													DISKOMINFO
1.02.14.1.02.10.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH	Tingkat ketersediaan data pembangunan dan informasi statistik sektoral	Persen	100	85.600.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	355.600.000	DISKOMINFO
1.02.14.1.02.10.16	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK			75	-	80	435.000.000	85	440.000.000	90	510.000.000	100	1.385.000.000	DISKOMINFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	SEKTORAL													
4.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH												-	BAG. EKBANG & KD
1.02.14.4.00.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI /STATISTIK DAERAH				150.000.000		175.000.000		200.000.000		230.000.000		755.000.000	BAG. EKBANG & KD
1.02.16	KEBUDAYAAN												-	
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN												-	DISDIK
1.02.16.1.01.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah budaya lokal yang dilestarikan	Jenis	6	134.400.000	7	291.500.000	8	320.650.000	11	48.697.924.000	11	49.444.474.000	DISDIK
1.02.16.1.01.01.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jumlah seni budaya yang dilestarikan	Kegiatan	5	1.102.000.000	7	3.972.320.000	9	4.369.552.000	11	5.110.072.000	11	14.553.944.000	DISDIK
1.02.16.1.01.01.17	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah pengelolaan keragaman budaya	Kegiatan	5	882.000.000	6	970.200.000	7	1.067.220.000	8	1.067.220.000	10	3.986.640.000	DISDIK
1.02.13.01.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA												-	DISPORAPAR
1.02.16.1.02.13.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Jumlah destinasi pariwisata berbasis kuliner dan sejarah	Lokasi	4	250.000.000	5	250.000.000	6	250.000.000	8	400.000.000	8	1.150.000.000	DISPORAPAR
1.02.17	PERPUSTAKAAN												-	
1.02.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN												-	DISPUSIP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	DAN KEARSIPAN DAERAH													
1.02.1.02.17.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	95	600.000.000	96	700.000.000	98	800.000.000	100	900.000.000	100	3.000.000.000	DISPUSIP
1.02.1.02.17.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	92	1.000.000.000	95	250.000.000	95	400.000.000	100	500.000.000	100	2.150.000.000	DISPUSIP
1.02.1.02.17.05	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	90	20.000.000	95	30.000.000	95	40.000.000	100	50.000.000	100	140.000.000	DISPUSIP
1.02.1.02.17.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	95	3.500.000	95	6.000.000	90	7.500.000	95	10.000.000	95	27.000.000	DISPUSIP
1.02.1.02.17.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	80	20.000.000	85	30.000.000	90	40.000.000	100	50.000.000	100	140.000.000	DISPUSIP
1.02.1.02.17.15	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan minat baca	Persen	6	550.000.000	9	780.000.000	12	980.000.000	15	1.185.000.000	15	3.495.000.000	DISPUSIP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.1.02.17.xx	PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA LITERASI BERBASIS KOMUNITAS DAN WILAYAH	Persentase peningkatan minat baca	Persen	6	1.400.000.000	3	1.680.000.000	12	1.935.000.000	15	2.200.000.000	15	7.215.000.000	DISPUSIP
1.02.18	KEARSIPAN												-	
1.02.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH												-	DISPUSIP
1.02.18.1.02.17.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Meningkatnya tertib arsip		33	330.000.000	33	440.000.000	33	490.000.000	33	570.000.000	33	1.830.000.000	DISPUSIP
1.02.18.1.02.17.17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan		500	140.000.000	500	160.000.000	500	250.000.000	500	350.000.000	500	900.000.000	DISPUSIP
1.02.18.1.02.17.18	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Terwujudnya pemelamatan dan pelestarian dokumen arsip bernilai bersejarah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	150.000.000	100	150.000.000	DISPUSIP
2.	URUSAN PILIHAN												-	
2.00.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN												-	
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN												-	DKP3
2.00.01.1.02.03.20	PROGRAM PENGEMBANGAN	Provitas perikanan	ton/ha	24,77	367.500.000	24,83	394.500.000	24,89	412.750.000	24,95	432.500.000	24,95	1.607.250.000	DKP3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	BUDIDAYA PERIKANAN	budidaya												
2.00.01.1.02.03.01.23	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN				100.000.000		108.000.000		115.000.000		122.500.000		445.500.000	DKP3
		a. Persentase keamanan pangan produk perikanan	%	22	-	25	-	27	-	30	-	30	-	DKP3
		b. Angka konsumsi ikan	kg/kapita/tahun	41,48	-	41,89	-	42,31	-	42,73	-	42,73	-	DKP3
2.00.02	PARIWISATA													
1.02.13.01	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA													DISPORAPAR
2.00.02.1.02.13.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah event yang diselenggarakan		6	750.000.000	7	850.000.000	7	950.000.000	8	1.050.000.000	8	3.600.000.000	DISPORAPAR
2.00.02.1.02.13.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah pengunjung ke destinasi wisata		5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	25	1.200.000.000	DISPORAPAR
2.00.02.1.02.13.18	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang aktif		4	250.000.000	5	250.000.000	6	250.000.000	8	400.000.000	8	1.150.000.000	DISPORAPAR
	Program Kampung kreatif tematik (BARU)	Jumlah obyek wisata alternatif bagi masyarakat		7	350.000.000	7	375.000.000	7	400.000.000	7	425.000.000	28	1.550.000.000	DISPORAPAR
2.00.03	PERTANIAN													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN												-	DKP3
2.00.03.1.02.03.15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI				142.900.000		157.250.000		173.000.000		190.350.000		663.500.000	DKP3
		a. Persentase lembaga usaha tani yang berbadan hukum	Persen	7	-	10	-	12	-	14	-	14	-	DKP3
		b. Persentase lembaga usaha tani dengan katagori kelas utama	Persen	7	-	9	-	11	-	13	-	13	-	DKP3
2.00.03.1.02.03.16	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERK EBUNAN	Tingkat konsumsi buah dan sayuran	Gr/kap /hari	197,49	66.000.000	199,86	69.500.000	202,26	73.000.000	204,69	76.500.000	204,69	285.000.000	DKP3
2.00.03.1.02.03.17	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERK EBUNAN				100.550.000		105.900.000		111.500.000		117.700.000		435.650.000	DKP3
		a. Persentase lembaga usaha tani yang menerapkan mekanisasi pertanian dengan baik	Persen	55	-	60	-	65	-	70	-	70	-	DKP3
		b. Tingkat pendayagunaan dan	Persen	75	-	75	-	75	-	75	-	75	-	DKP3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		pemanfaatan fasilitas pengolahan hasil pertanian												
2.00.03.1.02.03.18	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Provitasi padi	ton/ha GKG	6,28	257.500.000	6,41	283.250.000	6,54	311.200.000	6,67	342.320.000	6,67	1.194.270.000	DKP3
2.00.03.1.02.03.19	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh dalam melakukan metode penyuluhan	Persen	80	137.348.750	80	151.083.625	80	166.191.988	80	182.811.186	80	637.435.549	DKP3
2.00.03.1.02.03.20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Persen	100	4.550.000.000	100	150.000.000	100	160.000.000	100	170.000.000	100	5.030.000.000	DKP3
2.00.03.1.02.03.21	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi daging	ton	5.673,03	175.000.000	5.786,49	175.000.000	5.902,22	175.000.000	6.020,27	175.000.000	6.020,27	700.000.000	DKP3
2.00.03.1.02.03.22	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tingkat konsumsi pangan hewani	(gr/kap /hr)	70	985.000.000	72	950.000.000	75	775.000.000	77	720.000.000	77	3.430.000.000	DKP3
2.00.03.1.02.03.24	Program Penataan dan Pengembangan Kawasan Agribisnis				720.000.000		742.000.000		516.200.000		542.820.000		2.521.020.000	DKP3
		a. Persentase peningkatan peserta Sekolah Agro di KAC	Persen	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	DKP3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		b. Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha agribisnis dalam Sukabumi Agrokreatif Expo (SAE)	Persen	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	DKP3
2.00.03.1.02.03.25	Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan				2.750.000.000		3.110.000.000		3.475.000.000		3.830.000.000		13.165.000.000	DKP3
		a. Luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	80	0	134	0	160	0	184	0	184	0	DKP3
		b. Persentase peningkatan LP2B milik Pemerintah Kota Sukabumi	Persen	3,5	-	3,3	-	3,2	-	3,1	-	-	-	DKP3
2.00.03.1.02.03.26	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner				150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		660.000.000	DKP3
		a. Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	35	-	40	-	45	-	50	-	50	-	DKP3
		b. Persentase penerapan SOP pemotongan hewan kurban di masyarakat	Persen	30	-	35	-	40	-	50	-	50	-	DKP3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.00.04	KEHUTANAN													-
2.00.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL													-
2.00.06	PERDAGANGAN													-
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN													-
2.00.06.1.02.11.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN				1.200.000.000		331.000.000		220.000.000		363.100.000		2.114.100.000	DISKOPDAGRIN
		Jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera dan di tera ulang	UTTP	200	-	300	-	400	-	500	-	1500	-	DISKOPDAGRIN
		Jumlah peserta sosialisasi metrologi legal	Orang	-	-	120	-	-	-	120	-	360	-	DISKOPDAGRIN
2.00.06.1.02.11.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor bersih perdagangan	US\$	2.125.486,13	50.000.000	2.210.505,58	60.000.000	2.298.925,80	70.000.000	2.390.882,83	80.000.000	11.069.537,01	260.000.000	DISKOPDAGRIN
2.00.06.1.02.11.18	PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI				10.415.000.000		41.025.000.000		31.043.000.000		1.084.300.000		83.567.300.000	DISKOPDAGRIN
		Jumlah draft rancangan peraturan	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	DISKOPDAGRIN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Walikota												
		Jumlah pembangunan dan pembangunan pusat-pusat perdagangan	Unit	1	-	2	-	1	-	-	-	4	-	DISKOPDAGRIN
		Persentase pemanfaatan profil, prognosa, informasi harga, dan pengawasan barang penting atau strategis	Persen	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	DISKOPDAGRIN
		Jumlah produk unggulan yang difasilitasi pemasarannya melalui pameran di luar Kota Sukabumi	Produk	10	-	10	-	10	-	10	-	50	-	DISKOPDAGRIN
		Persentase pengawasan pembangunan Pasar Pelita	Persen	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	DISKOPDAGRIN
2.00.06.1.02.11.19	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN				200.000.000		200.000.000		200.000.000		-		600.000.000	DISKOPDAGRIN
		Jumlah kawasan penataan PKL dan pemberdayaan pedagang	Kawasan	1	-	1	-	1	-	-	-	6	-	DISKOPDAGRIN
		Jumlah pengembangan dan pembangunan	Unit	1	-	2	-	1	-	-	-	4	-	DISKOPDAGRIN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Pusat-pusat perdagangan												
2.00.07	PERINDUSTRIAN													-
1.02.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN													DISKOPDAGRIN
2.00.07.1.02.11.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	Pertumbuhan industri	Persen	0,3	100.000.000	0,4	110.000.000	0,5	120.000.000	0,6	130.000.000	0,6	460.000.000	DISKOPDAGRIN
2.00.07.1.02.11.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Pertumbuhan industri	Persen	0,3	1.025.000.000	0,4	880.000.000	0,5	885.000.000	0,6	890.000.000	0,6	3.680.000.000	DISKOPDAGRIN
2.00.07.1.02.11.17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan legalitas usaha	Persen	100	235.000.000	100	255.000.000	100	275.000.000	100	295.000.000	100	1.060.000.000	DISKOPDAGRIN
2.00.07.1.02.11.19	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	Pertumbuhan industri	Persen	0,3	100.000.000	0,40	50.000.000	0,50	50.000.000	0,60	50.000.000	0,60	250.000.000	DISKOPDAGRIN
2.00.08	TRANSMIGRASI													-
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA													DISNAKER

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.00.08.1.02.01.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Terlaksananya MOU kerjasama antar wilayah transmigrasi dan terkirimnya calon transmigrasi ke wilayah transmigrasi			237.088.500		260.797.350		286.877.085		315.564.794		1.100.327.729	DISNAKER
2.00.08.1.02.01.17	Program Transmigrasi Nasional	Fasilitasi transmigrasi regional	Angka		55.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		235.000.000	DISNAKER
3.	PENUNJANG URUSAN													
3.00.01	INSPEKTORAT													
3.00.01.01.	INSPEKTORAT DAERAH													INSPEKTORAT
3.00.3.00.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90	851.435.178	90	850.000.000	95	850.000.000	95	800.000.000	95	3.351.435.178	INSPEKTORAT
3.00.3.00.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	90	244.450.000	90	250.000.000	95	250.000.000	95	200.000.000	95	944.450.000	INSPEKTORAT
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	90	26.250.000	90	26.250.000	95	26.250.000	95	26.250.000	95	105.000.000	INSPEKTORAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.00.3.00.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan OPD yang sesuai aturan dan tepat waktu	Persen	90	11.612.500	90	12.000.000	95	12.000.000	95	12.000.000	95	47.612.500	INSPEKTORAT
3.00.3.00.01.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran OPD dengan Daerah	Persen	90	14.485.000	90	15.000.000	95	15.000.000	95	15.000.000	95	59.485.000	INSPEKTORAT
3.00.01.3.00.01.15	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH				1.040.058.000		1.040.058.000		1.040.058.000		1.040.058.000		4.160.232.000	INSPEKTORAT
		Nilai pengawasan kinerja pada SAKIP	Persen	75		80,5		85		90		90	-	INSPEKTORAT
		Persentase SAKIP PD bernilai baik	Persen	85		90		95		100		100	-	INSPEKTORAT
		Tingkat maturitas SPIP	Level	3		3		3		4		4	-	INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut temuan BPK	Persen	82		84		85		90		90	-	INSPEKTORAT
		Persentase tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Persen	90		90		90		90		90	-	INSPEKTORAT

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.00.01.3.00.01.xx	PROGRAM PENATAAN REFORMASI BIROKRASI		Level		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		200.000.000	INSPEKTORAT
		persentase tingkat pengawasan dalam penataan RB	Level	12		12		12		12		12	-	INSPEKTORAT
		Persentase unit WBK/WBBM	Persen	5		10		15		20		20	-	INSPEKTORAT
		Level APIP	Level	3		3		3		3		3	-	INSPEKTORAT
	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase pemenuhan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang sesuai peraturan dan kebijakan nasional		100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	75.000.000,00	100	50.000.000,00	100	325.000.000	INSPEKTORAT
3.00.01.3.00.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan		20	207.000.000	25	210.000.000	25	210.000.000	25	210.000.000	25	837.000.000	INSPEKTORAT
4.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH												-	BAG. EKBANG & KD
3.00.01.4.00.01.15	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH				200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		1.100.000.000	BAG. EKBANG & KD
3.00.02	PERENCANAAN													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.00.02.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													-	BAPPEDA
3.00.3.00.02.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran		75	743.033.500	80	810.582.000	85	878.130.500	90	945.679.000	1	3.377.425.000		BAPPEDA
3.00.3.00.02.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	80	219.300.000	85	228.600.000	90	237.900.000	95	247.200.000	1	933.000.000		BAPPEDA
3.00.3.00.02.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen		210.635.000		216.954.050		223.462.672		230.166.552		881.218.273		BAPPEDA
3.00.3.00.02.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	Persen	80	51.837.500	85	52.605.000	90	57.317.500	95	62.030.000	1	223.790.000		BAPPEDA
3.00.3.00.02.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	80	20.322.500	85	22.170.000	90	24.017.500	95	25.865.000	1	92.375.000		BAPPEDA
3.00.02.3.00.02.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI													-	BAPPEDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.00.02.3.00.02.18	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Persentase pencapaian pemenuhan program dan kegiatan infrastruktur dan tata ruang	Persen	91	920.000.000	92	940.000.000	93	960.000.000	94	980.000.000	94	3.800.000.000	BAPPEDA
3.00.02.3.00.02.xx.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				2.746.489.750		1.999.941.225		2.169.045.848		3.348.150.432		10.263.627.255	BAPPEDA
		Persentase perangkat daerah yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	100		100		100		100		100	-	BAPPEDA
		Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPd	Persen	100		100		100		100		100	-	BAPPEDA
		Persentase penjabaran konsistensi program RKPd kedalam APBD	Persen	100		100		100		100		100	-	BAPPEDA
		Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target program pembangunan daerah	Persen	92		93		94		95		95	-	BAPPEDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.00.02.3.00.02.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Perbandingan antara PD yang telah mencapai target indikator program pembangunan pencapaian sasaran dalam RPJMD dengan jumlah seluruh PD		80	650.000.000	85	510.000.000	90	325.000.000	95	600.000.000	95	2.085.000.000	BAPPEDA
3.00.02.3.00.02.XX	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI,PERENCANAAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN	Jumlah perusahaan swasta/BUMN/ BUMD dan lembaga lainnya yang bergabung mendukung CSR Kota Sukabumi	perusahaan	30	250.000.000	35	300.000.000	40	300.000.000	45	300.000.000	45	1.150.000.000	BAPPEDA
3.00.02.3.00.02.23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA				570.518.545		587.634.101		605.263.124		623.421.018		2.386.836.789	BAPPEDA
3.00.02.3.00.02.xx.	PROGRAM PENELITIAN DAN INOVASI DAERAH				1.255.000.000		1.325.000.000		1.565.000.000		1.645.000.000		5.790.000.000	BAPPEDA
		Persentase fasilitasi atas pengembangan inovasi	Persen										-	BAPPEDA
		Persentase keterlibatan aktor pembangunan dalam penelitian dan pengkajian	Persen	67		78		89		100		100	-	BAPPEDA
3.00.03	KEUANGAN												-	
3.00.03.02.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN												-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	DAERAH													
3.00.03.01.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH													BPKD
3.00.3.00.03.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90	1.258.188.457,00	90	1.384.007.302,70	90	1.522.408.032,97	90	1.674.648.836,27	90	5.839.252.629	BPKD
3.00.3.00.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90	16.773.882.000,00	90	18.451.270.200,00	90	20.296.397.220,00	90	22.326.036.942,00	90	77.847.586.362	BPKD
3.00.3.00.03.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	90	95.000.000,00	90	104.500.000,00	90	114.950.000,00	90	126.445.000,00	90	440.895.000	BPKD
3.00.3.00.03.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	90	309.414.000,00	90	340.355.400,00	90	374.390.940,00	90	411.830.034,00	90	1.435.990.374	BPKD
3.00.3.00.03.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen		50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		232.050.000	BPKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.00.3.00.03.07.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET	Persentase barang jasa atau aset yang dikelola sesuai PERMENDAGRI No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah	Persen	90	169.331.000,00	90	186.264.100,00	90	204.890.510,00	90	225.379.561,00	90	785.865.171	BPKD
3.00.3.00.03.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	90	210.409.000,00	90	231.449.900,00	90	254.594.890,00	90	280.054.379,00	90	976.508.169	BPKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.00.03.3.00.03.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Dinas unit kerja dapat mengerjakan tugas perda APBD serta dapat mengendalikan program kegiatan pengendalian anggaran 2. tersusunnya buku perda tentang jawaban laporan organisasi laporan realisasi anggaran semester prognosis, buku pertanggung jawaban semester, 3. persentase ketepatan waktu laporan pertanggung jawaban APBD laporan keuangan SKPD lebih efisien dan tepat waktu 4, meningkatnya PAD non PBBP2 dan BPHTB		1. laporan 32 SKPD. 2. Raperda, Perda 3. Bulan Oktober 4. 15 %	5.291.000.000	1. laporan 32 SKPD. 2. Raperda, Perda 3. Bulan Oktober 4. 15 %	5.820.100.000	1. laporan 32 SKPD. 2. Raperda, Perda 3. Bulan Oktober 4. 15 %	6.402.110.000	1. laporan 32 SKPD. 2. Raperda, Perda 3. Bulan Oktober 4. 15 %	7.042.321.000	1. laporan 32 SKPD. 2. Raperda, Perda 3. Bulan Oktober 4. 15 %	24.555.531.000	BPKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
v		5. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah 6. Penyampaian RAPERDA APBD murni tepat waktu 7. Presentase peningkatan sumber pendapatan pajak daerah 8. Pemanfaatan informasi teknologi dalam pengelolaan pendapatan 9. Presentasee tingkat kepatuhan wajib pajak 10. Presentase tingkat pemahaman wajib pajak 11. Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan aset sesuai peraturan	5. Bln 6. Bln 7. Persen 8. 9. Sistem 10. Persen 11. SKPD	5. 31 Maret 6. September 7. 0,05 8. 0 9. 0,02 10. 0,03 11. 32		5. 31 Maret 6. September 7. 0,05 8. 0 9. 0,02 10. 0,03 11. 32		5. 31 Maret 6. September 7. 0,05 8. 0 9. 0,02 10. 0,03 11. 32		5. 31 Maret 6. September 7. 0,05 8. 0 9. 0,02 10. 0,03 11. 32		5. 31 Maret 6. September 7. 0,05 8. 0 9. 0,02 10. 0,03 11. 32		BPKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.00.03.3.00.03.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA	1. Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah Kota /Kab. 2. Koordinasi penyusunan hasil evaluasi gubernur tentang RAPERDA APBD dan PERKADA penjabaran APBD 3. Verifikasi dan koordinasi bantuan keuangan provinsi	1. SKPD 2. Persen 3. Dokumen	1. 33 2. 100 3. Dokumen	397.188.500	1. 33 2. 100 3. Dokumen	436.907.350	1. 33 2. 100 3. Dokumen	480.598.085	1. 33 2. 100 3. Dokumen	528.657.893,5	1. 33 2. 100 3. Dokumen	1.843.351.828,5	BPKD
4.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH													BAG. EKBANG & KD
3.00.03.4.00.01.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				360.000.000		415.000.000		460.000.000		540.000.000		1.775.000.000	BAG. EKBANG & KD
3.00.04	KEPEGAWAIAN													BKPSDM
3.00.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													BKPSDM
3.00.3.00.04.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Persentase meningkatnya administrasi	Persen	88,26	579.344.000	88,26	695.213.000	88,26	834.256.000	88,26	1.001.107.000	88,26	3.109.920.000	BKPSDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	PERKANTORAN	perkantoran												
3.00.3.00.04.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase meningkatnya kinerja sarana dan prasarana	Persen	89,98	917.000.000	89,98	776.800.000	89,98	1.062.160.000	89,98	1.194.592.000	89,98	3.950.552.000	BKPSDM
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase meningkatnya disiplin aparaturnya	Persen	90,00	95.900.000	90,00	44.000.000	90,00	122.470.000	90,00	50.600.000	90,00	312.970.000	BKPSDM
3.00.3.00.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparaturnya	Persen	90,00	784.416.000	90,00	941.303.000	90,00	1.129.563.000	90,00	1.355.476.000	90,00	4.210.758.000	BKPSDM
3.00.3.00.04.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	Persen	85,57	66.000.000	85,57	75.120.000	85,57	85.942.000	85,57	98.801.000	85,57	325.863.000	BKPSDM
3.00.3.00.04.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase meningkatnya pengembangan sistem perencanaan program kegiatan	Persen	81,44	36.000.000	81,44	43.200.000	81,44	51.840.000	81,44	62.208.000	81,44	193.248.000	BKPSDM
3.00.04.3.00.04.15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparaturnya	Persen	91,87	1.737.907.000	91,87	2.195.688.000	91,87	2.871.625.000	91,87	3.014.890.000	91,87	9.820.110.000	BKPSDM
3.00.05	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.00.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													BKPSDM
3.00.05.3.00.04.	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan	Persen	95,19	4.925.050.000	95,19	5.910.060.000	95,19	7.092.072.000	95,19	8.510.486.000	95,19	26.437.668.000	BKPSDM
3.00.05.3.00.04.16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	Persen	95	1.969.000.000	95	5.137.200.000	95	2.835.360.000	95	6.731.712.000	95	16.673.272.000	BKPSDM
4.	PENDUKUNG													
4.00.01	SEKRETARIAT DAERAH													BAG. KEU & KEPEG
4.00.4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen		3.146.338.250		3.460.972.075		3.807.069.283		3.303.459.811		13.717.839.419	BAG. KEU & KEPEG
4.00.4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen		2.705.200.000		2.718.000.000		2.758.000.000		2.834.500.000		11.015.700.000	BAG. HUMAS & PROTOKOL
4.00.4.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap	Persen		1.266.500.000		1.278.300.000		1.297.500.000		1.355.000.000		5.197.300.000	BAG. PERLENGKAPAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		pelayanan administrasi perkantoran												
4.00.4.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen		5.216.871.525		5.591.237.000		5.821.800.000		6.165.000.000		22.794.908.525	BAG. PERLENGKAPAN
4.00.4.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen		1.012.500.500		1.030.000.000		1.060.500.000		1.093.400.000		4.196.400.500	BAG. PERLENGKAPAN
4.00.4.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen		80.253.000		193.878.300		213.266.130		234.592.743		721.990.173	BAG. KEU & KEPEG
4.00.4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen		11.770.000		12.947.000		14.241.700		15.665.670		54.624.370	BAG. KEU & KEPEG
4.00.4.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen		20.000.000		22.000.000		25.000.000		27.000.000		94.000.000	BAG. ORGANISASI
4.00.4.00.01.07.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan program berkualitas	Persen		150.300.000		165.500.000		188.000.000		217.000.000		720.800.000	BAG. PERLENGKAPAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.00.01.4.00.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH				1.264.765.300		1.334.767.100		1.407.469.100		1.485.195.900		5.492.197.400	BAG. TAPEM
4.00.01.4.00.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		464.100.000	BAG. KEU & KEPEG
4.00.01.4.00.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH				1.558.700.000		1.584.050.000		1.605.600.000		1.624.200.000		6.372.550.000	BAG. HUMAS & PROTOKOL
4.00.01.4.00.01.xx	PROGRAM ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JADA	Persentase penerapan pengadaan Barang atau Jasa di Kota Sukabumi melalui sarana aplikasi yang terintegrasi	Persen	90	275.000.000	100	300.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	100	1.250.000.000	BAG. BARANG/JASA
4.00.01.4.00.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH				640.000.000		740.000.000		850.000.000		975.000.000		3.205.000.000	BAG. EKBANG & KD
4.00.01.4.00.01.19	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-	Persentase produk hukum yang harmonis	Persen		1.498.000.000		1.645.000.000		1.807.000.000		1.986.000.000	100	6.936.000.000	BAG. HUKUM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	UNDANGAN													
4.00.01.4.00.01.21	PROGRAM KETATALAKSANAAN DAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH				649.006.000		694.406.600		741.847.260		791.531.986		2.876.791.846	BAG. ORGANISASI
		Persentase Perangkat Daerah dengan peringkat komposit 4 (P-4)	Persen	70	-	80	-	85	-	90	-	90	-	BAG. ORGANISASI
		Persentase Perangkat Daerah dan BUMD yang memiliki proses bisnis	Persen	50	-	80	-	90	-	100	-	100	-	BAG. ORGANISASI
4.00.01.4.00.01.22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH				1.290.640.150		1.377.603.797		1.471.158.297		1.571.800.577		5.711.202.821	BAG. TAPEM
		Nilai pelaporan kinerja pada SAKIP	Nilai	12,00	-	12,25	-	12,50	-	13,00	-	13,00	-	BAG. TAPEM
		Nilai hasil EKPPD	Nilai	3,42	-	3,44	-	3,46	-	3,48	-	3,48	-	BAG. TAPEM
4.00.01.4.00.01.xx.	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	Nilai manajemen perubahan	Angka	3	80.000.000	3	85.000.000	3	90.000.000	3	100.000.000	3	355.000.000	BAG. ORGANISASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.00.01.4.00.01.xx.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan pada setiap jenis pelayanan dan atau indeks pelayanan publik	Persen	40	85.000.000	60	90.000.000	70	95.000.000	80	100.000.000	100	370.000.000	BAG. ORGANISASI
4.00.01.4.00.01.xx.	PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki nilai IKM baik	Persen	72	120.000.000	73	70.000.000	74	80.000.000	75	90.000.000	75	360.000.000	BAG. ORGANISASI
4.00.01.4.00.01.23	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM				120.000.000		132.000.000		145.000.000		160.000.000		557.000.000	BAG. HUKUM
4.00.01.4.00.01.24	PROGRAM LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT)				50.000.000		70.000.000		85.000.000		95.000.000		300.000.000	BAG. EKBANG & KD
4.00.01.4.00.01.25	PROGRAM PELAYANAN DAN PENANGANAN MASALAH BARANG DAN JASA				149.184.200		164.102.620		180.512.882		198.564.170		692.363.872	BAG. BARANG/JASA
4.00.01.4.00.01.26	PROGRAM PELAYANAN DAN KOORDINASI PENGADAAN BARANG/JASA				757.399.060		833.138.966		916.452.862		1.008.098.147		3.515.089.035	BAG. BARANG/JASA
4.00.01.02.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH												-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.08.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT													DP2KBP3APM
4.00.01.1.02.08.22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	Pelayanan kepada masyarakat ditingkat kelurahan dan kecamatan se-kota Sukabumi	Persen	60	104.000.100	70	114.400.000	80	125.840.000	90	138.424.000	90	482.664.100	DP2KBP3APM
4.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH													
4.00.02	SEKRETARIAT DPRD													
4.00.02.02.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH													
4.00.02.01.	SEKRETARIAT DPRD													SETWAN
4.00.4.00.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	95	2.378.079.440	95	2.615.887.384	95	2.877.476.122	95	3.165.223.734	100	11.036.666.680	SETWAN
4.00.4.00.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	95	824.447.800	95	906.892.580	95	997.581.838	95	1.097.340.021	100	3.826.262.239	SETWAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.00.4.00.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	95	501.391.000	95	551.530.100	95	606.683.110	95	667.351.421	100	2.326.955.631	SETWAN
4.00.4.00.02.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen	95	809.497.260	95	890.446.986	95	979.491.684	95	1.077.440.853	100	3.756.876.783	SETWAN
4.00.4.00.02.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBNAGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	95	9.753.700	95	10.729.070	95	11.801.977	95	12.982.174	100	45.266.921	SETWAN
4.00.4.00.02.06	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT	Meningkatnya kinerja DPRD	Persen	100	17.755.542.750	100	19.531.097.025	100	21.484.206.727	100	23.632.627.400	100	82.403.473.902	SETWAN
5.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
5.00.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
4.00.01.01.	SEKRETARIAT DAERAH													BAG. KESRA
5.00.01.4.00.01.xx.	PROGRAM PEMBINAAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN KEAGAMAAN	Persentase peningkatan kegiatan keagamaan swadaya masyarakat	Persen		6.914.139.000		8.754.539.722		9.559.616.604		10.924.685.554		36.152.980.879	BAG. KESRA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.00.01.4.00.01.xx.	PROGRAM LAYANAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan jamaah mesjid jami kelurahan	Persen		1.030.470.000		1.102.602.900		1.179.786.100		1.262.372.000		4.575.231.000	BAG. KESRA
5.00.01.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													KESBANGPOL
5.00.5.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	262.500.000	100	293.000.000	100	315.000.000	100	370.000.000	100	1.240.500.000	KESBANGPOL
5.00.5.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100.000.000	100	120.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	100	510.000.000	KESBANGPOL
5.00.5.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100	30.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	180.000.000	KESBANGPOL
5.00.5.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	50.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	100	260.000.000	KESBANGPOL
5.00.5.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan	Persen	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	150.000.000	KESBANGPOL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Keuangan tepat waktu												
5.00.5.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketepatan perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RKPD	Persen	100	20.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	40.000.000	100	115.000.000	KESBANGPOL
5.00.01.5.00.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase unjuk rasa yang disebabkan konflik antar dan inter umat beragama	Persen	≤ 10	220.000.000	≤ 10	235.000.000	≤ 10	245.000.000	≤ 10	255.000.000	≤ 10	955.000.000	KESBANGPOL
5.00.01.5.00.01.16	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase keterlibatan komponen masyarakat dan aparat dalam pemahaman dan pemantapan wawasan kebangsaan	Persen	100	665.000.000	100	700.000.000	100	740.000.000	100	770.000.000	100	2.875.000.000	KESBANGPOL
5.00.01.5.00.01.17	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pendidikan politik	Persen	100	300.000.000	100	370.000.000	100	415.000.000	100	450.000.000	100	1.535.000.000	KESBANGPOL
5.00.01.5.00.01.18	PROGRAM DUKUNGAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU	Persentase TPS yang melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	500.000.000	100	500.000.000	KESBANGPOL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		suara dengan tertib dan aman												
5.00.01.5.00.01.19	PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN	Persentase Penanganan aliran keagamaan atau kepercayaan masyarakat yang menyimpang	Persen	100	125.000.000	100	135.000.000	100	145.000.000	100	150.000.000	100	555.000.000	KESBANGPOL
5.00.01.5.00.01.21	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN, ANTISIPASI DAN KONDISIVITAS DI DAERAH	Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang terantisipasi	Persen	100	475.000.000	100	480.000.000	100	515.000.000	100	550.000.000	100	2.020.000.000	KESBANGPOL
6.	KEWILAYAHAN													
6.00.01	KECAMATAN													
6.00.01.01.	KECAMATAN CIKOLE													KEC. CIKOLE
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	98	1.426.107.100	98	1.568.717.810	98	1.725.589.591	100	1.898.148.550	100	6.618.563.051	KEC. CIKOLE
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	95	275.043.450	95	302.547.795	95	332.802.575	99	366.082.832	99	1.276.476.651	KEC. CIKOLE
6.00.6.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	98	24.877.600	98	27.365.360	98	30.101.896	100	33.112.086	100	115.456.942	KEC. CIKOLE

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.00.6.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen	98	21.622.700	98	23.784.970	98	26.163.467	100	28.779.814	100	100.350.951	KEC. CIKOLE
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	88	24.326.500	90	26.759.150	95	29.435.065	100	32.378.572	100	112.899.287	KEC. CIKOLE
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	89	4.466.000	90	4.912.600	93	5.403.860	100	5.944.246	100	20.726.706	KEC. CIKOLE
6.00.01.6.00.01.15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen	85	146.239.500	90	160.863.450	95	176.949.795	98	194.644.775	98	678.697.520	KEC. CIKOLE
6.00.01.6.00.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	85	2.767.259.715	90	3.043.985.687	95	3.348.384.255	98	3.683.222.681	98	12.842.852.337	KEC. CIKOLE
6.00.01.02.	KECAMATAN GUNUNG PUYUH													KEC. GUNUNG PUYUH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90	1.095.809.770	90	1.205.390.747	90	1.325.929.822	90	1.458.522.804	95	5.085.653.143	KEC. GUNUNG PUYUH
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	90	390.081.890	90	429.090.079	90	471.999.087	90	519.198.996	90	1.810.370.051	KEC. GUNUNG PUYUH
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	90	18.194.000	90	20.013.400	90	22.014.740	90	24.216.214	98	84.438.354	KEC. GUNUNG PUYUH
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	90	3.454.000	90	3.799.400	90	4.179.340	90	4.597.274	100	16.030.014	KEC. GUNUNG PUYUH
6.00.01.6.00.01.15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen	90	144.057.100	90	158.462.810	90	174.309.091	90	191.740.000	100	668.569.001	KEC. GUNUNG PUYUH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.00.01.6.00.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	90	292.831.000	90	322.114.100	90	354.325.510	90	389.758.061	90	1.359.028.671	KEC. GUNUNG PUYUH
6.00.01.03.	KECAMATAN CITAMIANG												-	KEC. CITAMIANG
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	1.135.984.960	100	1.249.583.456	100	1.374.541.802	100	1.511.995.982	100	5.272.106.199	KEC. CITAMIANG
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	86	471.752.600	88	518.927.860	90	570.820.646	95	627.902.711	95	2.189.403.817	KEC. CITAMIANG
6.00.6.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen	Persen	100	39.600.000	100	43.560.000	100	47.916.000	100	52.707.600	100	183.783.600	KEC. CITAMIANG
6.00.6.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	86	30.082.800	88	33.091.080	90	36.400.188	95	40.040.207	95	139.614.275	KEC. CITAMIANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan keuangan tepat waktu	Persen	100	9.977.000	100	10.974.700	100	12.072.170	100	13.279.387	100	46.303.257	KEC. CITAMIANG
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase ketersediaan perencanaan anggaran oleh perangkat daerah dengan dokumen RTRW, RPJMD, dan RPKD	Persen	100	2.442.000	100	2.686.200	100	2.954.820	100	53.250.302	100	61.333.322	KEC. CITAMIANG
6.00.01.6.00.01.15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen	86	239.409.500	88	263.350.450	90	289.685.495	95	318.654.045	95	1.111.099.490	KEC. CITAMIANG
6.00.01.6.00.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	86	2.102.699.800	88	2.136.499.280	90	2.173.678.708	95	2.214.576.079	95	8.627.453.867	KEC. CITAMIANG
6.00.01.04.	KECAMATAN WARUDOYONG													KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap	Persen		1.057.667.856		1.110.551.249		1.166.078.811		1.224.382.752		4.558.680.668	KEC. WARUDOYONG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		pelayanan administrasi perkantoran												
6.00.6.00.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen		409.803.907		430.294.102		451.808.807		474.399.248		1.766.306.064	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen		19.500.000		23.400.000		25.740.000		28.314.000		96.954.000	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen		92.807.400		97.447.770		102.320.159		107.436.166		400.011.495	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen		7.344.750		7.711.988		8.097.587		8.502.466		31.656.791	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET *	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan program berkualitas	Persen		273.000		286.650		300.983		316.032		1.176.664	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.08	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen		1.527.750		1.604.138		1.684.344		1.768.562		6.584.793	KEC. WARUDOYONG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.00.6.00.01.15	PROGRAM PEMBINAAN & PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen		353.537.250		388.890.975		427.780.073		470.558.080		1.640.766.377	KEC. WARUDOYONG
6.00.6.00.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen		2.228.146.250		2.450.960.875		2.696.056.963		2.965.662.659		10.340.826.746	KEC. WARUDOYONG
6.00.01.05.	KECAMATAN BAROS													KEC. BAROS
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	916.394.050	100	1.008.033.455	100	1.108.836.801	100	1.219.720.481	100	4.252.984.786	KEC. BAROS
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	100	313.216.750	100	344.538.425	100	378.992.268	100	416.891.494	100	1.453.638.937	KEC. BAROS
6.00.6.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	100	59.895.000	100	65.884.500	100	72.472.950	100	79.720.245	100	277.972.695	KEC. BAROS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.00.6.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen	100	9.884.600	100	10.873.060	100	11.960.366	100	13.156.403	100	45.874.429	KEC. BAROS
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	14.828.000	100	16.310.800	100	17.941.880	100	19.736.068	100	68.816.748	KEC. BAROS
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	100	5.181.000	100	5.699.100	100	6.269.010	100	6.895.911	100	24.045.021	KEC. BAROS
6.00.01.6.00.01.15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen	100	139.577.020	100	153.534.722	100	168.888.194	100	185.777.014	100	647.776.950	KEC. BAROS
6.00.01.6.00.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100	1.887.677.292	100	2.076.445.021	100	2.284.089.523	100	2.512.498.475	100	8.760.710.310	KEC. BAROS
6.00.01.06.	KECAMATAN LEMBUR SITU													KEC. LEMBURSITU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	1.077.756.900	100	1.185.532.590	100	1.304.085.849	100	1.434.494.434		5.001.869.773	KEC. LEMBURSITU
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	100	519.758.800	100	571.734.680	100	628.908.148	100	691.798.963		2.412.200.591	KEC. LEMBURSITU
6.00.6.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	100	29.419.500	100	32.361.450	100	35.597.595	100	39.157.355		136.535.900	KEC. LEMBURSITU
6.00.6.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen	100	39.981.975	100	43.980.173	100	48.378.190	100	53.216.009		185.556.346	KEC. LEMBURSITU
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	100	20.045.300	100	22.049.830	100	24.254.813	100	26.680.294		93.030.237	KEC. LEMBURSITU
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	100	4.757.500	100	5.233.250	100	5.756.575	100	6.332.233		22.079.558	KEC. LEMBURSITU
6.00.01.6.00.01.15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Persen	100	158.840.000	100	174.724.000	100	192.196.400	100	211.416.040		737.176.440	KEC. LEMBURSITU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	TINGKAT KEWILAYAHAN	Administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan												
6.00.01.6.00.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	100	352.200.750	100	387.420.825	100	426.162.908	100	468.779.198		1.634.563.681	KEC. LEMBURSITU
6.00.01.07.	KECAMATAN CIBEUREUM												-	KEC. CIBEUREUM
6.00.6.00.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Persen	90	906.609.908	90	997.270.898	90	1.096.997.988	90	1.206.697.787	90	4.207.576.581	KEC. CIBEUREUM
6.00.6.00.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	Persen	90	407.562.100	90	448.318.310	90	493.150.141	90	542.465.155	90	1.891.495.706	KEC. CIBEUREUM
6.00.6.00.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase aparatur yang berdisiplin	Persen	90	37.950.000	90	41.745.000	90	45.919.500	90	50.511.450	90	176.125.950	KEC. CIBEUREUM
6.00.6.00.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	Persen	90	42.770.200	90	47.047.220	90	51.751.942	90	56.927.136	90	198.496.498	KEC. CIBEUREUM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.00.6.00.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan laporan keuangan yang tepat waktu	Persen	90	10.120.000	90	11.132.000	90	12.245.200	90	13.469.720	90	46.966.920	KEC. CIBEUREUM
6.00.6.00.01.08.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	90	6.861.800	90	7.547.980	90	8.302.778	90	9.133.056	90	31.845.614	KEC. CIBEUREUM
6.00.01.6.00.01.15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TINGKAT KEWILAYAHAN	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan tingkat kewilayahan	Persen	90	124.477.100	90	136.924.810	90	150.617.291	90	165.679.020	90	577.698.221	KEC. CIBEUREUM
6.00.01.6.00.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN/KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	Persen	90	432.144.900	90	475.359.390	90	522.895.329	90	575.184.862	90	2.005.584.481	KEC. CIBEUREUM

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan program prioritas dan pendanaan program pembangunan, maka perlu ditetapkan indikator kinerja pembangunan dan indikator penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sebagai ukuran keberhasilan pembangunan Daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi aspek kesejahteraan umum, aspek pelayanan yang meliputi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan, juga daya saing daerah.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama atau IKU Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci atau IKK pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja *outcomes* atau *impact* yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran. Selain itu, ditetapkan juga target pencapaiannya sebagai patokan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan pemerintahan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Selain menetapkan IKU dan IKK, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan Daerah dalam jangka menengah dan jangka panjang digunakan indikator makro pembangunan. Indikator makro pembangunan disajikan pada Tabel 8.1 sedangkan IKU dan IKK masing-masing disajikan pada Tabel 8.2 dan Tabel 8.3.

Tabel

Tabel 8.1
Indikator Makro Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1.	Indeks Pembangunan Manusia	73,03	73,60	74,17	74,74	75,32	75,90	76,49	76,49
	a. Rata-Rata Lama Sekolah	9,52	9,79	10,06	10,35	10,64	10,94	11,25	11,25
	b. Angka Harapan Lama Sekolah	13,39	13,47	13,55	13,63	13,71	13,79	13,88	13,88
	c. Angka Harapan Hidup	71,95	72,00	72,05	72,10	72,15	72,21	72,26	72,26
	d. Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan ((Pendapatan perkapita (ribu rupiah))	10.188	10.339	10.492	10.648	10.806	10.966	11.129	11.129
2.	Persentase Penduduk Miskin	8,48	8,31	8,14	7,98	7,82	7,67	7,51	7,51
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,00	7,84	7,68	7,53	7,38	7,23	7,09	7,09
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,43	5,54	5,65	5,76	5,88	6,00	6,12	6,12
5.	Indeks Gini	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37

Sumber : RPJMD Provinsi Jabar 2018- 2023

Tabel

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Utama Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA		TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR (2023)
			AWAL RPJMD		2019	2020	2021	2022	2023	
			2017	2018						
VISI : TERWUJUDNYA KOTA SUKABUMI YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA										
MISI 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA										
1.1	Indeks kerukunan umat beragama	Angka	94,68	94,68	94,98	95,28	95,58	95,88	96,18	96,18
1.1.1	Indeks rasa aman	Persen	N/A	N/A	63,70	64,00	64,30	64,60	64,90	64,90
1.2	Angka harapan hidup	Angka	71,95	72,00	72,05	72,10	72,15	72,20	72,25	72,25
1.2.1	Indeks keluarga sehat	Angka	0,18	0,18	0,21	0,26	0,29	0,32	0,37	0,37
1.3	Indeks pendidikan	Angka	69,80	69,80	69,81	69,82	69,82	69,83	69,83	69,83
1.3.1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,52	9,79	10,06	10,35	10,64	10,94	11,25	11,25
1.3.2	Indeks pembangunan pemuda	Persen	N/A	N/A	53,63	54,13	54,63	55,13	55,63	55,63
1.4	Indeks ketahanan keluarga	Angka	67,76	67,76	67,81	67,86	67,91	67,96	68,01	68,01
1.4.1	Indeks pembangunan gender	Angka	91,01	91,01	91,07	91,13	91,19	91,25	91,31	91,31
1.4.2	Indeks ketahanan keluarga	Angka	67,76	67,76	67,81	67,86	67,91	67,96	68,01	68,01
MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN										
2.1	Indeks kota layak huni	Angka	N/A	N/A	45	46	47	48	49	49
2.1.1	Persentase penilaian aspek fisik indeks layak huni	Persen	N/A	N/A	41	42	43	44	45	45

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR (2023)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.1.2	Persentase penilaian aspek kualitas lingkungan hidup	Persen	N/A	N/A	41	42	43	44	45	45
2.1.3	Persentase penilaian aspek transportasi	Persen	N/A	N/A	51	52	53	54	55	55
2.1.4	Persentase penilaian aspek fasilitas	Persen	N/A	N/A	41	42	43	44	45	45
2.1.5	Persentase penilaian aspek utilitas	Persen	N/A	N/A	51	52	53	54	55	55
2.1.6	Persentase pengurangan risiko bencana	Persen	1,00	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	2,50
2.1.7	Indeks kualitas lingkungan hidup	Point	42,67	42,67	42,83	43,30	43,23	43,44	43,64	43,64
2.1.8	Persentase kawasan kumuh	Persen	0,21	0,21	0,17	0,13	0,08	0,04	0	-
MISI 3 MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN, EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR										
3.1	Tingkat kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	persen	54,57	56,22	57,85	59,46	61,05	62,62	64,18	64,18
3.1.1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Milyar Rupiah	N/A	N/A	100	105	110	115	120	550
3.1.2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	39,44	39,44	39,49	39,51	39,54	39,56	39,59	39,59
3.1.3	Persentase ketersediaan LP2B	persen	1,90	1,90	3,80	5,65	7,50	9,35	11,20	11,20
3.1.4	Skor pola pangan harapan	persen	77,90	79,70	78,70	79,10	79,50	79,99	80,30	80,30
3.1.5	Persentase keamanan pangan	persen	85,45	78,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR (2023)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF										
4.1	Indeks reformasi birokrasi	Skala	68,03	68,79	69,00	69,50	70,00	70,50	71,00	71,00
4.1.1	Nilai SAKIP	Skor	74,49	74,49	80,00	81,35	83,07	84,78	86,50	86,50
4.1.2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.1.3	Indeks pelayanan publik	Angka	N/A	N/A	2,60	2,75	3,00	3,10	3,25	3,25
4.1.4	Indeks kepuasan masyarakat	Angka	79,28	79,28	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00	82,00
4.1.5	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2*	2*	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,50
4.2	Indeks inovasi Daerah	Persen	25	57	60	65	70	75	80	80
4.2.1	Persentase ketercapaian Indeks Daya Saing Daerah	Persen	25	57	60	65	70	75	80	80

Sumber : Hasil Analisa 2018

Tabel

Tabel 8.3
Indikator Kinerja Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
ASPEK DAYA KESEJAHTERAAN RAKYAT										
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skala	73,03	73,60	74,17	74,74	75,32	75,90	76,49	76,49
2	Pengeluaran Per Kapita yang d disesuaikan((Pendapatan perkapita(ribu rupiah))	Rupiah	10,188	10,339	10,492	10,648	10,806	10,966	11,129	11,129
3	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,43	5,54	5,65	5,76	5,88	6,00	6,12	6,12
4	Persentase penduduk miskin	Persen	8,48	8,31	8,14	7,98	7,82	7,67	7,51	7,51
5	Indeks gini	Angka	0,40	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37
6	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	70,11	72,08	74,02	75,94	75,46	77,34	79,2	79,2
7	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,52	9,79	10,06	10,35	10,64	10,94	11,25	11,25
8	Angka usia harapan hidup	Tahun	71,95	72,00	72,05	72,10	72,15	72,21	72,26	72,26
9	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,1	N/A	<1	<1	<1	<1	<1	<1
10	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	5,41	N/A	<10	<10	<10	<10	<10	<10
11	Cakupan kelurahan siaga aktif	Persen	100	N/A	100	100	100	100	100	100
12	Angka partisipasi angkatan kerja	Angka	231.848	233.628	235.408	237.188	238.968	240.748	242.528	242.528
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	69	70	68	68	67	67	66	66
14	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	47,14	46,00	47,04	46,98	46,93	46,88	46,83	46,83
15	Tingkat kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	54,57	56,22	57,85	59,46	61,05	62,62	64,18	64,18

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
16	Tingkat kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	47,14	46,00	47,04	46,98	46,93	46,88	46,83	46,83
17	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	76,97	N/A	77,22	77,34	77,46	77,59	77,71	77,71
18	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	23,92	N/A	24,14	24,35	24,56	24,77	24,99	24,99
19	Peningkatan PAD	Persen	21,59	0,92	15	15	15	15	15	15
20	Opini BPK	Opini	WTP	N/A	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	77,9	N/A	78,7	79,1	79,5	79,99	80,3	80,3
22	Angka ketersediaan cadangan pangan pokok pemerintah	Kg	N/A	N/A	15.099	25.000	30.000	40.000	50.000	50.000
23	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	39,41	N/A	39,41	39,41	39,5	39,75	40	40
24	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	5,14	N/A	5,34	5,44	5,54	5,64	5,74	5,74
Aspek pelayanan umum										
	Pelayanan Urusan Wajib									
	Layanan Urusan Wajib Dasar									
1	Pendidikan									
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	67,72	63,4	68,7	70,2	71,7	73,2	74,7	74,7
1.2.	Angka Partisipasi Murni									
1.2.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	96,7	99,4	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	99,9
1.2.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	96,5	96,4	97	97,5	98	98,5	99,9	99,9
1.3.	Angka partisipasi sekolah									
1.3.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persen	104	107	100	100	100	100	100	100
1.3.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persen	117	118	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.4.	Angka Putus Sekolah:									
1.4.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,003	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,07	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Angka Kelulusan:									
1.5.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6.	Angka Melanjutkan (AM):									
1.6.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	112,4	110,2	100	100	100	100	100	100
1.6.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	141,4	141,4	100	100	100	100	100	100
1.7.	Fasilitas Pendidikan:									
1.7.1.	Persentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	96	96	97	98	99	100	100	100
1.7.2.	Persentase sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	97	94	95	96	97	99	100	100
1.8.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
1.9.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	92	93	93,5	95	96,5	98	100	100
2	Kesehatan									
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	6,82	5,94	9	9	8,5	8,5	8	8
2.2.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	7,82	6,5	12	11,5	11	10,5	10	10
2.3.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	4,49	4,5	9	9	8,5	8,5	8	8
2.4.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Angka	116,5	116,7	125	125	122	122	120	120

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Angka	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17
2.6.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Angka	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
2.7.	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Angka	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,85	0,85	0,85
2.8.	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Persen	96,69	98,42	83	83,5	84	84,5	85	85
2.9.	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persen	97,44	97,9	100	100	100	100	100	100
2.10.	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	94,48	100,6	100	100	100	100	100	100
2.11.	Persentase pelayanan kesehatan anak BALITA sesuai standar	Persen	78,91	84,63	100	100	100	100	100	100
2.12.	persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	97,55	96,67	100	100	100	100	100	100
2.13.	Persentase pelayanan skrining kesehatan pada usia produktif (15-59 Thn)	Persen	83,21	10,09	100	100	100	100	100	100
2.14.	Persentase lansia yang dilakukan skrining kesehatan	Persen	30,17	38,74	100	100	100	100	100	100
2.15.	persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persen	100	112,37	100	100	100	100	100	100
2.16.	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persen	99,72	99,86	100	100	100	100	100	100
2.17.	Persentase pelayanan kesehatan penderita DM	Persen	65,37	94,49	100	100	100	100	100	100
2.18.	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.19.	Persentase orang yang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart	Persen	150	83,35	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.20.	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	79,6	87	88	90	92	93	95	95
2.21.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun atau BALITA.	Persen		23,1	23	22,5	22	21	20	20
2.22.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.23.	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Jumlah	0	0	0	1	1	2	2	6
2.24.	Prevalensi balita <i>stunting</i>	Persen		23.1	23	22.5	22	21	20	20
2.25.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	86	85,9	86	87	88	89	90	90
2.26.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.27.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.28.	Akreditasi Rumah Sakit sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)	Persen	87,7	87,7	75	80	85	90	95	95
2.29.	Persentase <i>contact rate</i> pasien dengan usia > 72 tahun	Persen		31,09	32	34	36	38	40	40
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
3.1.	Pekerjaan Umum:									
3.1.1.	Persentase jalan lingkungan yang baik	Persen	81,99	81,99	84,192	87,794	91,396	94,998	98,6	98,6
3.1.2.	Jumlah kejadian genangan	Kali	43		42	41	40	40	40	40
3.1.3.	Panjang trotoar yang ramah pejalan kaki dan berkebutuhan khusus	Km	2,653		2,92	3,21	3,53	3,88	4,27	4,27
3.1.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	87,57	87,57		88,77	89,97	91,17	92,37	92,37

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3.1.5.	Persentase pencapaian target pembangunan drainase	M	196547	196547	198047	199547	201047	202547	204047	1005235
3.1.6.	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	M'	-	-	1500	1500	1500	1500	1500	7500
3.1.7.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	68,17	68,17	68,77	68,77	69,37	69,97	70,57	70,57
3.1.8.	Persentase KK yang menggunakan air bersih	Persen	68,17	68,17	68,77	68,77	69,37	69,97	70,57	70,57
3.1.9.	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	0,21	0,21	0,17	0,13	0,08	0,04	0,00	0,00
3.1.10	Persentase luasan kumuh	Persen	0,21	0,21	0,17	0,13	0,08	0,04	0,00	0,00
3.2.	Penataan Ruang:									
3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	1,16	1,16	1,17	1,17	1,17	1,18	1,18	1,18
3.2.2.	Persentase tingkat ketersediaan pranata penataan ruang (RTRW, RDTR & RTBL KSK)	Persen	50	50	0	60	70	80	0	80
3.2.3.	Persentase kesesuaian ruang dengan dokumen tata ruang	Persen	95	95	95	95	95	95	95	95
3.2.4.	Luasan kawasan lindung	Ha	12,18	12,18	12,68	13,18	13,68	14,18	14,18	14,18
3.2.5.	Jumlah ruang publik budaya	Unit	0	0	0	1	1	1	1	4
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
4.1.	Persentase rumah layak huni	Persen	96,12	96,12	96,41	96,70	96,99	97,28	97,57	97,57
4.2.	Persentase jalan lingkungan yang baik	Persen	81,99	81,99	84,192	87,794	91,396	94,998	98,6	98,6
4.3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (MCK)	Persen	87,57	87,57		88,77	89,97	91,17	92,37	92,37
4.4.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	0,21	0,21	0,17	0,13	0,08	0,04	0,00	0,00
4.5.	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	68,17	68,17	68,77	68,77	69,37	69,97	70,57	70,57

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
5.1	Trantibumlinmas									
5.1.1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5.1.2.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	Orang	1380	2075	420	840	1260	1680	2075	2075
5.1.3.	Persentase penegakan PERDA	Persen	75	80	80	85	90	95	100	100
5.1.4.	Cakupan pengendalian keamanan lingkungan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5.1.5	Persentase unjuk rasa terkendali	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Kebencanaan									
5.2.1.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi bencana sesuai ancaman bencana	Persen	1,22	1,51	1,51	1,80	2,90	2,38	2,67	2,67
2.2.2.	Persentase jumlah aparaturnya dan masyarakat yang mendapatkan pelatihan	Persen	90	90	91	92	93	94	95	95
5.2.3.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban bencana	Persen	90	90	91	92	93	94	95	95
5.3.	Kebakaran									
5.3.1.	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari korban kebakaran	Persen	90	90	91	92	93	94	95	95
6	Sosial									
6.1.	Persentase masyarakat miskin basis data terpadu yang tertangani	Persen	70	72	76	77	78	79	80	80
6.2.	Persentase PSKS yang aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial	Persen	10	10	15	20	25	30	35	35

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
6.3.	Persentase tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	40%	45%	55	58	60	62	65	65
6.4.	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	45	52	55	58	60	62	65	65
6.5.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM)	Persen	100%	100%	100	100	100	100	100	100
6.6.	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	33	45	60	62	65	67	70	70
6.7.	Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	40	45	55	58	60	62	65	65
6.8	Persentase masyarakat yang datang dan dilayani oleh rumah singgah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
6.9	Persentase PMKS lainnya yang tertangani	Persen	40	45	46	47	48	49	50	50
Layanan urusan wajib non dasar										
1	Tenaga Kerja									
1.1.	Besaran mediasi perselisihan pengusaha-pekerja per tahun	Angka	20	20	25	30	35	40	45	45
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Angka	20	18	20	25	30	35	40	40
1.3	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	65	70	75	80	83	87	92	92
1.4	Besaran pembinaan perusahaan	Angka	100	100	150	170	180	190	200	200
1.5	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Angka	5.107	5.246	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000	8.000

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.6	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan masyarakat	Persen	4	2	3	4	4	5	6	6
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.1	Rasio kekerasan terhadap anak	Angka			0,005	0,004	0,003	0,002	0,001	0,001
2.2	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Angka			0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
2.3	Persentase anggaran Responsif Gender pada belanja langsung atau tidak langsung APBD	Persen			45,46	51,52	57,58	63,64	66,67	66,67
2.4	Status capaian kota layak anak	Status	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
2.5	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.				250	200	175	150	125	125
2.6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen		17,18	20	20	20	20	20	20
2.7.	Rasio KDRT	Persen	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
2.8	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	34,52	35,5	35,55	35,61	35,69	35,78	35,8	35,8
2.9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban	Persen	75	100	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.									
2.12	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	80	100	100	100	100	100	100	100
2.13	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	80	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	50	100	100	100	100	100	100	100
2.15	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen	100							
3	Pangan									
3.1	Ketersediaan energi dan protein perkapita				AKE 2423 kkal/kap/ hari, AKP 107,1 gr/kap/hari	AKE 2422 kkal/kap/hari , AKP 107,1 gr/kap/hari	AKE 2420 kkal/kap/har i AKP 107,1 gr/kap/hari	AKE 2419 kkal/kap/ hari AKP 107,1 gr/kap/hari	AKE 2417 kkal/kap/ hari AKP 107,1 gr/kap/hari	AKE 2417 kkal/kap/ hari AKP 107,1 gr/kap/hari
3.2	Persentase Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Pangan Asal Hewan (PAH)		Ada		86	87	88	89	90	90
4	Lingkungan Hidup	Persen	100							
4.1	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	/Mil	584,19		584,19	585,69	586,19	586,69	587,19	587,19
4.2	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	0		1	1	0	0	0	2
4.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Persen	0		0	20	30	40	50	50
4.4	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Dokumen	1		0	0	1	0	1	2

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
4.5	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Poin	0	37,95	38,28	38,73	39,19	39,66	40,11	40,11
4.6	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Poin	0	74,44	74,64	74,84	75,04	75,24	75,44	75,44
4.7	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	Poin	0	22,38	22,39	22,4	22,41	22,42	22,43	22,43
4.8	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	20	20	20	20	20	20	20	20
4.9	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Persen	100		100	100	100	100	100	100
4.10	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Persen	100		100	100	100	100	100	100
4.11	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jenis	3		3	3	3	3	3	3
4.12	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti.	Persen	100		100	100	100	100	100	100
4.13	Timbulan sampah yang ditangani	Ton/ Tahun	45.895,40		63.080,77	63.774,66	64.603,73	65.572,78	66.678,52	66.678,52
4.14	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	5,91		20	22	24	26	27	27
4.15	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	84,04		80	75	74	73	72	72
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
5.1	Cakupan kepemilikan KTP elektronik	Persen	98	99,08	100	100	100	100	100	100
5.2	Cakupan kepemilikan KK	Persen	97	94,41	100	100	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5.3	Cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk penduduk usia 0-18 tahun	Persen	96	96,63	100	100	100	100	100	100
5.4	Cakupan kepemilikan akte kematian	Persen	81	74,46	100	100	100	100	100	100
5.5	Cakupan pemanfaatan data kependudukan	Persen	-	9,7	100	100	100	100	100	100
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
6.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kel	2006	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2016
6.2	Persentase LPM aktif	Persen	68	68	70	72	73	74	75	75
6.3	Persentase PKK aktif	Persen	67	67	75	80	85	90	90	90
6.4	Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
6.5	Persentase Posyandu mandiri	Persen	57,17	57,17	61	62	63	64	65	65
6.6	Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	47	47,8	55	60	65	70	75	75
6.7	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
6.8	Jumlah inovasi wilayah (satu kelurahan satu unggulan)	Kel	0	0	0	1	3	5	7	7
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,4	1,4	1,4	1,39	1,38	1,37	1,36	1,36
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,26	2,26	2,21	2,2	2,19	2,18	2,17	2,17
7.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	0	0	10	15	15	15	15	15
7.4	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan (sekolah siaga kependudukan)	Angka	0	0	4	4	6	8	10	10

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
7.5	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah	2,26	2,26	2,21	2,2	2,19	2,18	2,17	2,17
7.6	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi atau CPR semua cara pada Pasangan Usia Subur atau PUS usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	0	67,7	67,8	67,86	67,9	67,95	68,05	68,05
7.7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Persen	0	41,7	40	39,5	39	38	37,5	37,5
7.8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0	22,22	21	20,7	19	18,25	18	18
7.9	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi atau <i>unmet need</i>	Persen	0	0	11,75	11,5	11,25	11,05	10,95	10,95
7.10	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	0	0	23,55	23,55	23,55	23,55	23,55	23,55
7.11	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	67,7	67,7	67,8	67,86	67,9	67,95	68,05	68,05
7.12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	0	87,75	88	88,25	88,5	88,75	89	89
7.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	0	80,52	80,75	81	81,25	81,5	81,75	81,75
7.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen		61,8	62	62,2	62,4	62,6	62,8	62,8
7.15	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Angka		1	1	1	1	1	1	1
7.16	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja atau mahasiswa									
7.17	Cakupan PKB atau PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk/Rasio petugas lapangan KB/penyuluhan KB	Persen	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57	57,57

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	(PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan									
7.18	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen		85	85	86	87	88	89	89
7.19	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
7.20	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
7.21	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	80	80	80	80	80	80	80	80
7.22	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan	Persen		60	60	75	80	82	85	85
7.23	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Angka		21,32	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32
8	Perhubungan									
8.1	Rasio ijin trayek	Unit	1531	2092	2092	2092	2092	2092	2092	2092
8.2	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	2194	1864	1964	2014	2074	2149	2239	2239
8.3	Persentase layanan angkutan darat	Persen	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48	43,48
8.4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	95.14	78.18	79.06	79.47	79.95	80.51	81.15	81.16
8.5	Pemasangan rambu-rambu	Persen	67,87		80	80	80	80	80	80
8.6	Persentase pencapaian kawasan <i>off street parking</i>	Persen	0	0	0	50	100	100	100	100
8.7	Persentase pencapaian SAUM	Persen	0	0	0	0	100	100	100	100
8.8	Jumlah orang atau barang yang terangkut angkutan umum	Pnp/ jam	175638	175638	193201,8	193201,8	193201,8	193201,8	193201,8	193201,8
9	Komunikasi dan Informatika									

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
9.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kelompok	-	-	-	4	5	6	7	7
9.2	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Poin	-	-	-	3	3,3	3,5	3,7	3,7
9.3	Indeks keterbukaan informasi publik	Persen	-	-	-	80	85	90	93	93
9.4	Persentase penyelesaian sengketa informasi	Persen	-	-	-	80	85	87	90	90
10	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah									
10.1	Persentase koperasi aktif	Persen	61,15	61,23	63	65	67	69	71	71
10.2	Persentase UKM non BPR atau LKM aktif	Persen	54	56	58	60	62	64	66	66
10.3	Persentase BPR atau LKM aktif	Persen	1	1	1	1	1	1	1	1
10.4	Persentase usaha mikro dan kecil	Persen	85,53	85,66	85	84,5	84	83,5	83	83
11	Penanaman Modal									
11.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)				60	65	70	75	80	80
11.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rp	30,63		200	205	210	215	220	220
11.3	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	Milyar Rp			5	5	5	5	5	25
12	Kepemudaan dan Olah Raga									
12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen		21	25	28	31	34	35	35
12.2	Jumlah pemuda berprestasi atau pelopor	Angka		3	5	8	10	12	15	15
12.3	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Persen		75	80	85	90	95	100	100
12.4	Jumlah pembinaan atlet muda	Persen		0	0	25	50	75	100	100
12.5	Jumlah atlet berprestasi	Orang		105	105	105	105	113	113	113
12.6	Jumlah prestasi olahraga	Cabang		27	27	27	27	35	35	35

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
12.7	Gelanggang atau balai remaja (selain milik swasta)	Unit		1	1	1	1	1	1	5
12.8	Lapangan olahraga	Unit		1	1	1	1	1	1	5
13	Statistik									
13.1	Persentase data/informasi/ statistik yang terintegrasi	Persen			60	70	80	90	95	95
13.2	Tingkat ketersediaan data pembangunan dan informasi statistik sektoral	Persen			60	70	80	90	95	95
14	Persandian									
14.1	Indeks keamanan informasi daerah	Persen	-	-	40	50	60	70	80	80
15	Kebudayaan									
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	10	8	5	8	10	12	13	
15.2	Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	67	50	55	58	60	62	64	
15.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah		1	0	4	5	6	7	
15.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Jumlah	8	8	8	9	10	11	12	
15.5	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah	31	4	4	4	4	4	5	
16	Perpustakaan									
16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	105.276	181.030	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000	205.000
16.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	76.702	78.647	83.497	86.497	89.997	93.997	98.497	98.497
16.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Persen	0,092	0,093	0,095	0,096	0,098	0,100	0,110	0,110
16.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	8.733	15.086	15.416	15.833	16.250	16.667	17.083	17.083
16.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Eks	38.351	39.323	41.748	43.248	44.998	46.998	49.248	49.248

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
16.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	0	0	4	5	7	9	10	10
17	Kearsipan									
17.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	PD	33		33	33	33	33	33	33
17.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	50		50	50	50	50	50	50
Layanan urusan pilihan										
1	Pariwisata									
1.1	Lama kunjungan wisata	Hari	2		2	2	2	2	2	2
2	Pertanian									
2.1	Provitasi padi	Ton/ha GKG	40.88 ton/Ha	7,03	6,16	6,28	6,41	6,54	6,67	6,67
2.2	Persentase lembaga usaha tani yang berbadan hukum	Persen	-	-	5	5	10	12	14	14
3	Perdagangan									
3.1	Ekspor bersih perdagangan	US \$	1.298.243,7 3	1.965.131,4 1	2.043.736,6 7	2.125.486,13	2.210.505,58	2.298.925,8 0	2.390.882,8 3	11.069.537,0 1
3.2	Cakupan bina kelompok pedagang atau usaha informal	Persen	-	-	19	19	19	19	19	19
4	Perindustrian									
4.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	2,94	2,94	2,94	5,88	9,38	12,50	15,63	15,63
4.2	Pertumbuhan industri	Persen	2	2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6
5	Transmigrasi									
5.1	Besaran pengerahan penempatan calon transmigrasi ke wilayah daerah transmigrasi	Angka kepala keluarga	0	2	2	3	3	3	4	4
5.2	Memonitoring wilayah transmigrasi	Angka	0	0	1	1	1	1	1	1
6	Kelautan dan Perikanan									

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
6.1	Provitas budidaya perikanan	Ton/ha	85,21	24,59	24,71	24,77	24,83	24,89	24,95	24,95
6.2	Angka konsumsi ikan	Kg/tahun /kapita	164,32	41,07	41,07	41,48	41,89	42,31	42,73	42,73
Penunjang urusan										
1	Perencanaan Pembangunan									
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2.	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA atau PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3.	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5.	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPd	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6.	Persentase penjabaran konsistensi program RKPd kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	90	90	90	90	90	90	90	90
1.8	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi target program pembangunan daerah	Persen	95,54	94,83	91	92	93	94	95	95
2	Keuangan									
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Persentase SILPA	Persen	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	6,93	11	<10	<10	<10	<10	<10	<10

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	21,78	15,73	21,61	>20	>20	>20	>20	>20
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	38,18	39,59	37,24	>10	>10	>10	>10	>10
2.7.	Penetapan APBD	Bulan	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									
3.1.	Rata-rata lama pejabat ASN mendapatkan pendidikan dan pelatihan struktural setelah menduduki jabatan struktural	Tahun	2-5	2-5	2-5	1-2	1	0	0	
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	90	121	0	80	80	80	80	80
3.3.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	5,8	5,9	6,94	15,25	13,74	10,3	10,3	10,3
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	29	21	29	29	29	29	29	29
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	117	115	117	117	117	117	117	117
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2.077	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853	1.853
4	Penelitian dan pengembangan									
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	85	85	80	90	90	100	100	100
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Persen	70	90	90	95	95	100	100	100
	Penerapan SIDA:									
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	20	20	30	40	50	60	70	70
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	10	10	20	30	40	50	60	60

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5	Pengawasan									
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	105	80,98	81	81,9	84	85	90	90
5.2.	Jumlah temuan BPK	Temuan	16	16	15	10	5	5	0	0
5.3.	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Rasio	0	0	0,5	0,6	0,70	0,80	0,90	0,90
5.4.	Tingkat maturitas SPIP	Level	1	1	2	3	3	4	4	4
5.5.	Jumlah unit WBK atau WBBM	Unit	1	2	5	5	10	15	20	20
5.6.	Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN atau LHKSN	Persen	0	53,42	60	70	75	80	85	85
6	Sekretariat Dewan									
6.1.	Integrasi dan sinkronisasi program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen perencanaan (Pemda/PD) (Rencana Kerja Tahunan Alat Kelengkapan Dewan)	Ada	100	100	100	100	100	100	100	100
6.2.	Tingkat kesesuaian perencanaan dan penganggaran Setwan	Ada	100	100	100	100	100	100	100	100
6.3.	Tingkat kesesuaian target dan realisasi anggaran	Ada	100	100	100	100	100	100	100	100
6.4.	Tingkat kepuasan DPRD terhadap kinerja pelayanan Setwan	Persen	60	65	70	75	80	90	100	100
7	Kesatuan Bangsa dan Politik									
7.1	Persentase unjuk rasa yang disebabkan konflik antar dan inter umat beragama	%	0	0	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%
7.2	Persentase penanganan aliran keagamaan atau kepercayaan masyarakat yang menyimpang	%	-	-	100	100	100	100	100	100

NO

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
7.3	Persentase keterlibatan komponen masyarakat dan aparat dalam pemahaman dan pematapan wawasan kebangsaan	%	-	-	100	100	100	100	100	100
7.4	Persentase gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang terantisipasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7.5	Persentase kecamatan yang mendapatkan fasilitasi pendidikan politik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7.6	Persentase TPS yang melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara dengan tertib dan aman	%	-	100	-	-	-	-	100	100

BAB IX

PENUTUP

RPJMD memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah, arah kebijakan keuangan Daerah, program Perangkat Daerah, dan program lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya, pelaksanaan RPJMD perlu memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan serta pedoman transisi yang mengatur perencanaan tahunan pada akhir periode RPJMD.

9.1. KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, serta merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD dan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat, serta masyarakat termasuk dunia usaha;
2. Wali Kota, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Daerah;
3. Wali Kota berkewajiban menyebarluaskan RPJMD kepada masyarakat;
4. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD;
5. penyusunan RKPD tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berpedoman pada RPJMD, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA, Prioritas

dan

dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kota Sukabumi Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023; dan

6. kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

9.2. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Daerah, diperlukan adanya pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Sebagaimana diketahui, Tahun 2023 adalah tahun terakhir periode RPJMD. Penyusunan RKPD Tahun 2024 pada saat belum ada RPJMD baru, berpedoman pada arah kebijakan RPJPD, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, RKP Tahun 2024, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024. Pemerintah Daerah akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani atau terselesaikan sampai dengan tahun 2023, untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2024, baik nasional maupun provinsi.

Sukabumi, 21 Maret 2019

WALI KOTA SUKABUMI

ttd.

ACHMAD FAHMI